

PEMODELAN PENDIDIKAN TINGGI INKLUSIF

(ANALISIS *SOCIOLOGICAL INSTITUTIONALISM THEORY* DALAM
REGULASI DAN DISEMINASI NILAI INKLUSIVITAS DI UNIVERSITAS
BRAWIJAYA)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUHAMMAD NUR FAUZAN
NIM 145030100111105**



Dosen Pembimbing:

Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D

Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**



“Sebagaimana kamu berlelah-lelah karna menolong orang lain, serupa seperti kamu berlelah-lelah karna lillah.”

Muhammad Nur Fauzan



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis Sociological Institutionalism Theory dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya)*

Disusun oleh : Muhammad Nur Fauzan

NIM : 145030100111105

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 23 September 2019

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.PAff., Ph.D
NIP. 197406272003121001

Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 198407132015041004



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Oktober 2019
 Jam : 08.00 – 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Muhammad Nur Fauzan
 Judul : *Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis Sociological Institutionalism Theory dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya)*

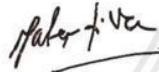
Dan Dinyatakan LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua Penguji

Anggota Penguji I



Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.PAff., Ph.D
NIP. 197406272003121001



Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 198407132015041004

Anggota Penguji II



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 20180451102812001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis *Sociological Institutionalism Theory* dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya).”** Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 17 September 2019



Muhammad Nur Fauzan

145030100111105



RINGKASAN

Muhammad Nur Fauzan, 2019. **Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis Sociological Institutionalism Theory dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya)**. Ketua Komisi Pembimbing: Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D. dan Wakil Ketua Komisi Pembimbing: Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui, menganalisa, dan mengidentifikasi peran regulasi dalam membentuk pengalaman dan pemaknaan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif berdasarkan perspektif *Sociological Institutionalism Theory*. 2) Mengetahui, menganalisa, dan mengidentifikasi diseminasi standar baru bagi pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, lalu menggunakan asumsi filosofis, serta menggunakan kerangka penafsiran konstruktivisme sosial. Pengumpulan data diperoleh melalui metode triangulasi data. Teknik pengambilan sumber data yaitu dengan *purposive sampling*. Peneliti melakukan wawancara kepada partisipan seperti jajaran rektorat, dekan, dan mahasiswa difabel. Hasil wawancara dengan partisipan diolah menjadi transkrip, lalu diolah lebih lanjut dengan Nvivo 12 Plus. Analisis data yang digunakan adalah horionalisasi dan pengelompokan makna. Berdasarkan analisis data ditemukan tema, subtema, dan kategori berdasarkan transkrip. Selanjutnya peneliti mencari klasifikasi *sentiments* pada aktor yang menangani kebijakan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya berdasarkan tema, subtema, dan kategori yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa fenomena pendidikan tinggi inklusif ada pada *positive sentiments* berdasarkan analisis *Sociological Institutionalism Theory*. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya pimpinan Universitas Brawijaya membuat kebijakan Peraturan Rektor mengenai inklusivitas terhadap difabel pada beberapa aspek dan direncanakan bersama dengan mahasiswa. Universitas Brawijaya juga dapat membuat model penilaian indikator inklusivitas pendidikan tinggi yang menilai beberapa aspek dengan model bernama *Brawijaya Inclusive Matrix*.

Kata Kunci: *Sociological Institutionalism Theory*, Kebijakan, Pendidikan Tinggi Inklusif, Difabel

SUMMARY

Muhammad Nur Fauzan, 2019. **Modeling Inclusive Higher Education (Analysis of Sociological Institutionalism Theory in the Regulation and Dissemination of Inclusiveness Values in Brawijaya University)**. Supervisor: Fadillah Putra, S.Sos., M.Sc., MPAff., Ph.D. and Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP.

This study aims to: 1) Know, analyze, and identify the role of regulation in shaping the experience and meaning of the UB's Academic Community towards the phenomenon of inclusive higher education based on the perspective of the Sociological Institutionalism Theory. 2) Knowing, analyzing, and identifying the dissemination of new standards for inclusive higher education in Brawijaya University.

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach, then uses philosophical assumptions, and uses the framework of the interpretation of social constructivism. Data collection is obtained through data triangulation method. The technique of taking data sources is purposive sampling. Researchers conducted interviews with participants such as rectorates, deans, and difable students. The results of interviews with participants are processed into transcripts, then further processed with Nvivo 12 Plus. Analysis of the data used is the horizontalitation and clusters of meanings. Based on data analysis, themes, sub-themes and categories are based on transcripts. Next, the researcher looked for the classification of sentiments among actors who deal with the policy of inclusive higher education in UB based on the themes, sub-themes and categories obtained.

The results of this study indicate a tendency that the phenomenon of inclusive higher education exists in positive sentiments based on the analysis of Sociological Institutionalism Theory. Based on the results of this study, it is better for the leadership of Universitas Brawijaya to make a policy of the Rector's Regulation regarding the inclusiveness of the difable in several aspects and plan it together with students. Universitas Brawijaya can also make an assessment model of higher education inclusiveness indicators that assess several aspects with a model named Brawijaya Inclusive Matrix.

Keywords: Sociological Institutionalism Theory, Policy, Inclusive Higher Education, Difable

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk diucapkan setiap harinya selain kata tersebut karena dengan segala nikmat kasih-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis Sociological Institutionalism Theory dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dari peneliti terhadap keilmuan Administrasi Publik dan upaya menggaungkan nilai inklusivitas di Universitas Brawijaya dan Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui skripsi ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya periode 2014-2018 yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan dukungan terbaik selama peneliti beramanah sebagai Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2018.
2. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya periode 2018-2022 yang telah memberikan motivasi selama peneliti beramanah sebagai Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2018.
3. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selalu memotivasi peneliti untuk meneruskan jenjang studi.
4. Drs. Heru Susilo MA selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Administrasi Uuniversitas Brawijaya periode 2013-2017 yang telah peneliti anggap sebagai ayah sendiri di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan.
5. Dr. Mohammad Rozikin, MSi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Administrasi Uuniversitas Brawijaya periode 2017-2021 yang selalu



memberikan nasihat terbaik untuk peneliti menjalankan perkuliahan dan organisasi kemahasiswaan.

6. Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.d selaku Ketua Dosen Pembimbing atas luar biasanya bagi peneliti cakrawala keilmuan Administrasi Publik yang lebih mendalam. Peneliti mengakui pemikiran yang semakin matang mengenai keilmuan Administrasi Publik hingga saat ini berkat ilmu-ilmu dan motivasi yang diberikan olehnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan.
9. Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP selaku Wakil Ketua Dosen Pembimbing yang menjadi *role model* peneliti selama di dunia perkuliahan. Terima kasih atas ilmu-ilmu baik agama, Administrasi Publik, dan kegiatan kemahasiswaan yang diberikan kepada peneliti.
10. Budi Nurachman dan Wulan Ferniawaty selaku orang tua peneliti atas segala doa, kepedulian dan lain-lainnya yang tidak pantas peneliti tuliskan di sini. Sulit untuk dihitung banyaknya kasih cinta dari keduanya kepada peneliti. Lalu, Nur Fitriani selaku kakak kandung peneliti atas cinta yang diberikan kepada adik semata wayangnya. Bahagia dan sulit kita jalani bersama sebagai bagian yang tak terpisahkan. Lalu kepada Ade Machyati selaku nenek peneliti atas kasih cinta yang diberikan. Terima kasih atas doa-doa dan nasihat agama terbaik yang selalu diberikan. Akan selalu teringat bayangan ketika dirinya berpisah dengan peneliti mengucapkan kata yang sulit peneliti lupakan disertai tangis dan peluknya yang erat. Terima kasih sekali lagi. Surga untukmu semua. Kelak.
11. Laras Tri Wahyu Darmaji selaku kakak peneliti selama di Universitas Brawijaya yang telah peneliti anggap sebagai kakak kandung sendiri. Terima kasih atas kebaikan yang tidak terhitung. Peneliti bukanlah apa-apa selama ini bila tanpa kebaikannya.

12. Keluarga KAMMI Universitas Brawijaya atas ilmu yang merubah personal peneliti menjadi jauh lebih baik. Terima kasih telah menjadi candradimuka terbaik bagi peneliti. Peneliti bukanlah apa-apa bila tanpa luar biasanya KAMMI Universitas Brawijaya. Kejayaan menanti.
13. Keluarga BEM FIA UB 2017 atas kesempatan untuk kita belajar bersama menjadi lebih baik, memberikan kontribusi bagi FIA, dan suka duka yang kita lalui bersama. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan peneliti di saat sulit. Kesuksesan menanti.
14. Keluarga EM UB 2018 atas rasa memiliki yang begitu kuat terhadap EM UB 2018. Terima kasih untuk semangat terus mengabdikan bagi Universitas Brawijaya dan Indonesia. Terima kasih selalu menginspirasi peneliti. Kesuksesan menanti.
15. Keluarga Forum Indonesia Muda atas upaya mengabdikan bagi Indonesia yang terus menginspirasi peneliti. Terima kasih telah menerima peneliti menjadi bagian di dalam candradimuka ini.
16. Keluarga Rumah Al Junda atas segala pembentukan karakter peneliti yang menjadi jauh lebih baik. Subuh berjamaah, makan bersama, dan canda tawa selama ini akan menjadi kenangan bagi peneliti.
17. Kawan-kawan HMI, GMNI, IMM, dan PMII Universitas Brawijaya yang menjadi inspirator peneliti. Terima kasih selalu memacu peneliti untuk selalu belajar dan terima kasih untuk kader-kadernya yang sempat kita berbagi ide.
18. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang dan Kediri atas segala dukungan, keramahan, dan kenangan yang menjadi sulit dilupakan oleh peneliti. Bagi yang pernah bertegur sapa, peneliti sampaikan semoga kebaikan untukmu. Bagi yang pernah memberi senyum, peneliti sampaikan semoga kebaikan untukmu. Bagi yang selalu memberi canda, peneliti sampaikan semoga kebaikan untukmu. Terima kasih telah menjadi bagian kenangan yang tidak terlupakan. Salam dari peneliti:
“Membentang dari Barat hingga ke Timur, Kediri hingga Malang.. Kita berada di bawah naungan yang sama, mentari yang sama, rembulan yang sama, dan di atas pijakan bumi yang sama.. Bumi Brawijaya.. Jika

Pancasila memiliki Bhineka Tunggal Ika, maka kita Brawijaya memiliki..
Kita Satu Brawijaya!”

Semoga Allah Azza Wa Jala selalu membalas kebaikan-kebaikan dengan rahmat dan hikmahnya. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti memohon kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Malang, 20 September 2019

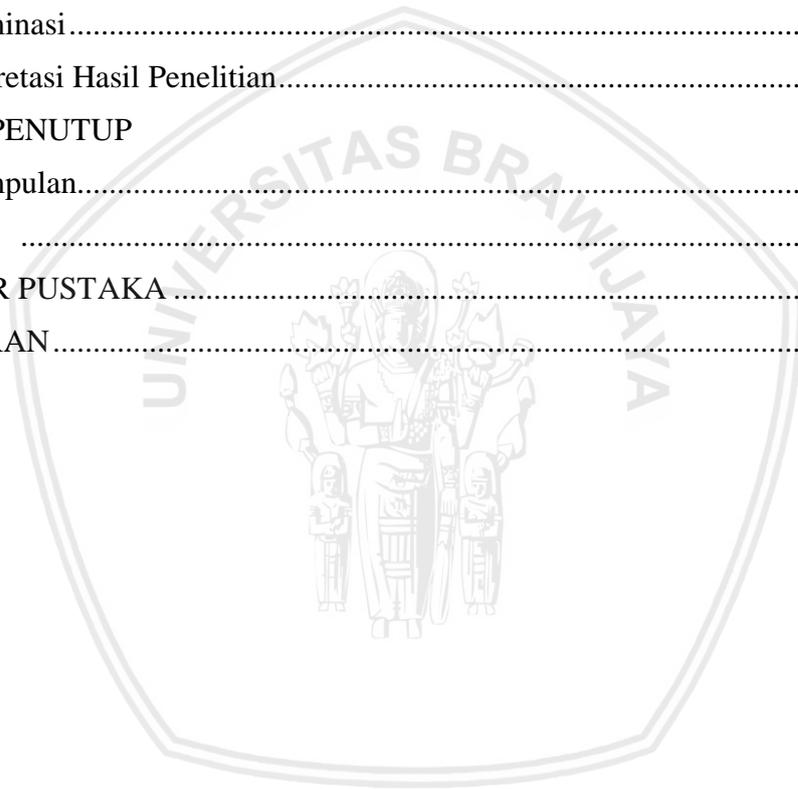


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kontribusi Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Teori Institusionalisme	27
C. <i>Sociological Institutionalism Theory</i>	28
D. Perspektif Islam terhadap Difabilitas	30
E. Terminologi Penyandang Difabel, Cacat, dan Disabilitas.....	31
F. Perspektif Kapitalis terhadap Difabilitas	36
G. Pendidikan dalam Berbagai Perspektif	37
H Definisi dan Konsep Pendidikan Inklusif.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	46

D. Sumber Data.....	47
E. Instrumen Penelitian	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	51
G. Prosedur Pengumpulan Data	53
H. Metode Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	57
B. Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	63
C. Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	112
D. Diseminasi.....	119
E. Interpretasi Hasil Penelitian.....	149
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran	203
DAFTAR PUSTAKA	211
LAMPIRAN.....	214



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Penelitian Terdahulu.....	26
2	Ragam Perspektif terhadap Pendidikan.....	38
3	Daftar Partisipan Rektorat	57
4	Daftar Partisipan Dekan/Direktur Vokasi.....	58
5	Daftar Partisipan Mahasiswa Difabel	58
6	Penjelasan Regulasi yang Mengatur Inklusifitas terhadap Difabel	60



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Ilustrasi Sudut Pandang terhadap Disabilitas berdasarkan Pendekatan Empat Model	3
2	Perkembangan Pendidikan Inklusif	13
3	Implikasi SI dalam Analisis Kebijakan Publik	29
4	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	53
5	Skema Model Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	62
6	Skema Model Subtema dan Kategori pada Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	63
7	Diagram Group Query, “Kendala Persiapan Karir”	65
8	Diagram Group Query, “Peluang Karir”	68
9	Diagram Group Query, “Upaya Pelatihan Karir”	70
10	Diagram Group Query, “Kendala Akses Pendidikan”	71
11	Diagram Group Query, “Kendala Regulasi”	74
12	Diagram Group Query, “Upaya Penerimaan Difabel”	75
13	Diagram Group Query, “Upaya Pelayanan”	77
14	Diagram Group Query, “Kendala Peningkatan Kapasitas”	79
15	Diagram Group Query, “Kendala Pelayanan Umum”	80
16	Diagram Group Query, “Kendala Pelayanan Peribadatan”	82
17	Diagram Group Query, “Pertimbangan Rasio Difabel”	85
18	Diagram Group Query, “Pengalaman Mengajar Difabel”	86
19	Diagram Group Query, “Kendala Proses Belajar Mengajar”	88
20	Diagram Group Query, “Upaya Koordinasi”	90
21	Diagram Group Query, “Kebutuhan Komunikasi”	93
22	Diagram Group Query, “Kendala Komunikasi”	94
23	Diagram Group Query, “Kendala Koordinasi”	95
24	Diagram Group Query, “Kendala Fasilitas Umum”	99
25	Diagram Group Query, “Kendala Fasilitas Peribadatan”	103
26	Diagram Group Query, “Kendala Pemahaman”	106
27	Diagram Group Query, “Pertimbangan Sumber Daya”	107
28	Diagram Group Query, “Upaya Penyediaan Infrastruktur”	108



29	Diagram Group Query, “Kebutuhan Fasilitas Umum”	110
30	Diagram Group Query, “Monitoring Implementasi”	111
31	Skema Model Subtema pada Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	112
32	Diagram Group Query, “Tuntutan”	113
33	Diagram Group Query, “Konstruksi Nalar Kepantasan”	115
34	Skema Model Subtema pada Diseminasi	119
35	Diagram Group Query, “Diseminasi Akses Pendidikan”	120
36	Diagram Group Query, “Diseminasi Fasilitas Umum”	122
37	Diagram Group Query, “Diseminasi <i>Building Awareness</i> ”	124
38	Diagram Group Query, “Diseminasi Pelayanan Peribadatan”	126
39	Diagram Group Query, “Diseminasi Fasilitas Peribadatan”	128
40	Diagram Group Query, “Diseminasi Koordinasi”	131
41	Diagram Group Query, “Diseminasi Regulasi”	133
42	Diagram Group Query, “Diseminasi Pelayanan Umum”	137
43	Diagram Group Query, “Diseminasi Peningkatan Kapasitas”	138
44	Diagram Group Query, “Diseminasi Proses Belajar Mengajar”	139
45	Diagram Group Query, “Diseminasi Pemahaman”	141
46	Diagram Group Query, “Diseminasi Umum”	142
47	Diagram Group Query, “Diseminasi Persiapan Karir”	145
48	Diagram Group Query, “Diseminasi Dunia Karir”	148
49	Skema Model Partisipan dalam Asumsi Very Positive	176
50	Skema Model Partisipan dalam Asumsi Moderately Positive.....	183
51	Skema Model Partisipan dalam Asumsi Moderately Negative	188
52	Skema Model Partisipan dalam Asumsi Very Negative	192
53	Grafik Persentase Subtema pada Tema Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	195
54	Grafik Persentase Subtema pada Tema Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif	196
55	Grafik Persentase Subtema pada Tema Diseminasi	197
56	Grafik Persentase Ulasan Keseluruhan Tema	198
57	Grafik Jumlah Aktor (Dekan & Direktur Vokasi) dengan Sentiments	199
58	Grafik Jumlah Aktor (Rektorat) dengan Sentiments	200

59	Bagan Hirarkis (Hierarchy Chart) Tema dengan Klasifikasi Sentiments	201
60	Skema Model Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif di Universitas Brawijaya.....	205
61	Indikator Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia	209



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Foto Kegiatan	214
2	Surat Permohonan Wawancara.....	230
3	Surat Persetujuan Kelayakan Riset Pertanyaan	238
4	Tanda Tangan Persetujuan Wawancara.....	239



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang memiliki keterbatasan fisik merupakan sebuah fenomena perbedaan identitas di dalam masyarakat. Tidak jarang beberapa masyarakat di lain sisi masih menyematkan manusia yang memiliki keterbatasan fisik dengan istilah penyandang cacat dan dianggap sebagai individu yang terbelakang secara potensi. Anggapan tersebut yang akhirnya secara tidak langsung justru menciptakan perbedaan kelas antara mereka yang memiliki keterbatasan fisik dengan yang tidak. Stigma negatif dari masyarakat kepada penyandang cacat banyak dipengaruhi karena institusi ide yang selama ini terbangun. Tidak jarang masyarakat sudah terbiasa dengan stigma bahwa penyandang cacat adalah kelompok yang sekedar patut dikasihani, sehingga perilaku masyarakat sering memberikan santunan kepada penyandang cacat atas dasar kasihan dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Butuh dipahami bahwa belum tentu potensi keahlian yang dimiliki oleh penyandang cacat seolah berada dibawah kapasitas penyandang non-cacat.

Penyematan istilah bagi individu dengan keterbatasan fisik memiliki terminologi lain yang dianggap lebih eufemis bila dibandingkan dengan penyandang cacat, yaitu penyandang disabilitas atau penyandang difabel. Kata cacat memiliki arti rusak dan ini sangat tidak pantas disematkan kepada manusia.

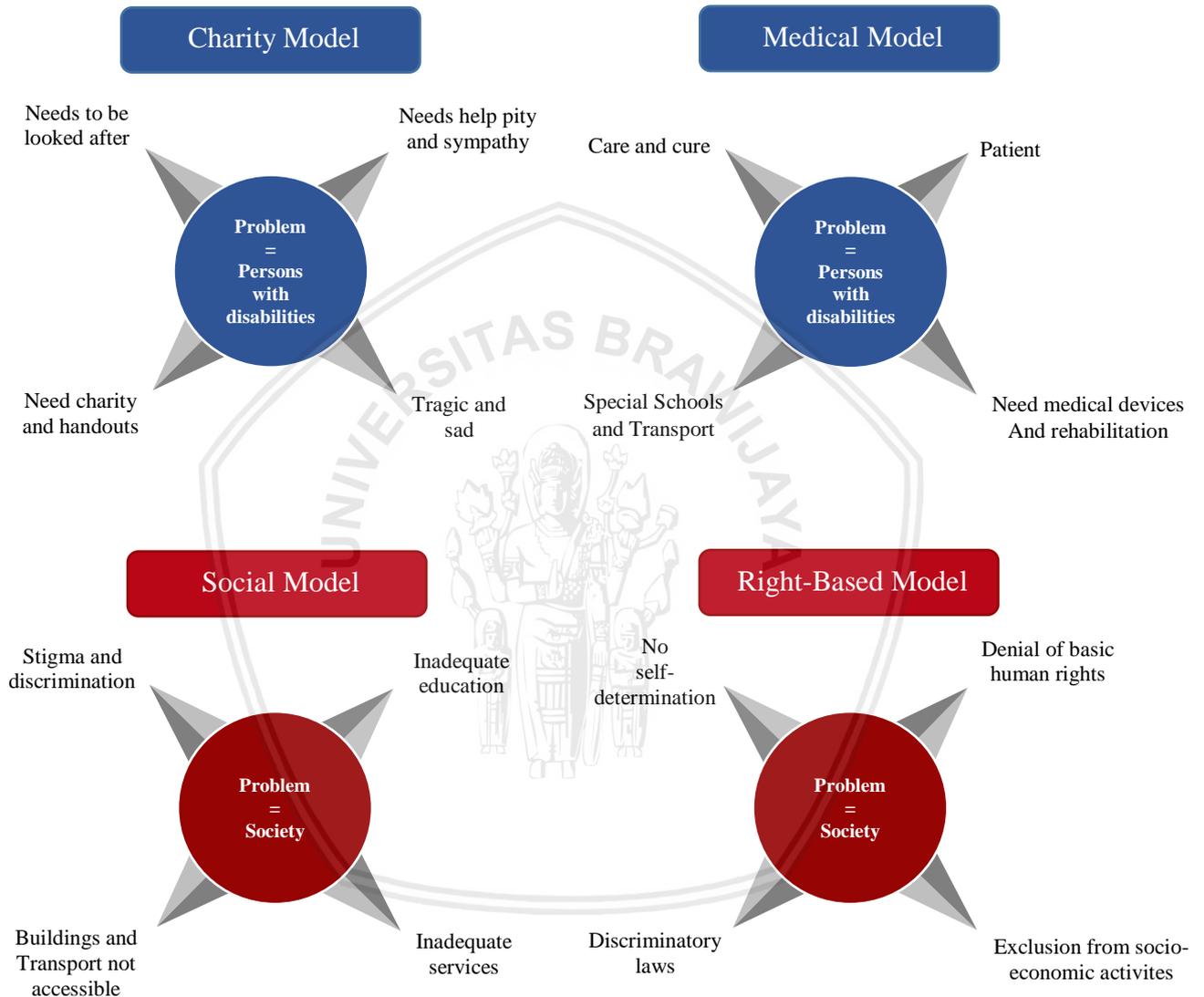
Komnas HAM pada tahun 2009 menyelenggarakan diskusi dengan para pakar untuk mengubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas.



Pun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dalam Pasal 1 yang berarti orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sementara itu istilah penyandang difabel (*difable*) digunakan pula sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang terkesan diskriminatif dan negatif. *Difable* sendiri merupakan sebuah akronim dari *different ability*, yang berarti manusia yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Mansour Fakih di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an menurut Suharto (dalam Pratiwi dkk., 2018). Penjelasan tersebut dapat lebih diterima, karena sebagaimana manusia harus menyadari realitas bahwa setiap manusia diciptakan terdapat perbedaan, maka ini yang menjadi semangat penulis untuk mengampanyekan terminologi ‘difabel’ atau ‘difabilitas’ agar lebih diterima publik dan dengan harapan dapat menyadarkan masyarakat bahwa difabel merupakan entitas fenomena perbedaan identitas, bukan kelas.

Fenomena difabilitas atau disabilitas terhadap penyandangnyanya mendapatkan sudut pandang berdasarkan beragam pendekatan. Terdapat beberapa pendekatan yang akhirnya membuat perbedaan kelas antara penyandang difabel dengan yang non-difabel, lalu juga terdapat beberapa pendekatan yang memandang penyandang difabel bukanlah sebagai sumber masalahnya hingga ia dianggap *disabled* (tidak mampu), tetapi karena ketidaksiapan lingkungan yang membentuknya menjadi *disabled*. Berikut berbagai sudut pandang dalam melihat difabilitas atau disabilitas, yaitu pendekatan *medical model*, *charity model*, *social*

model, dan *right-based model*. Model-model pendekatan tersebut diilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber: Roman et al., 2014

Gambar 1. Ilustrasi Sudut Pandang terhadap Disabilitas berdasarkan Pendekatan

Empat Model

Pendekatan *charity model* dan *medical model* lebih menekankan pada individu difabel yang dianggap menjadi masalah. Oleh karena itu cara pandang masyarakat melihat difabel hanya sebagai subjek yang patut disantuni dan membutuhkan bantuan medis sesungguhnya mengarah pada model tersebut. Berbeda dengan pendekatan *social model* dan *right-based model* yang memandang bahwa kegagalan masyarakat dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang difabel yang menjadi permasalahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh organisasi advokasi bagi disabilitas yaitu *Disability Action in Islington (DAII)* dalam Rizky (dalam Pratiwi dkk., 2018) terhadap *social model* dan *right-based model* sebagai berikut:

“A civil rights based approach to disability developed by disabled people in the 1970s and 1980s. The Social model of disability rejects the medical idea that the problem lies with the individual disabled person who is damaged, sick, and in need of a cure. Instead it puts forward the view that is the way society is run and organized that is the problem not the individual disabled person.”

Sebagian masyarakat belum banyak mengetahui apa itu penyandang disabilitas atau difabel, mereka lebih mahfum dengan penggunaan istilah penyandang cacat. Terminologi tentang penyandang cacat seharusnya sudah tidak lagi digunakan, karena hal itu dapat memberikan kesan seperti barang yang rusak. Nalar masyarakat yang telah terbiasa mengistilahkan individu yang memiliki keterbatasan fisik dengan sebutan penyandang cacat akan menyulitkan para difabel memperoleh akses hak yang adil, seperti hak memperoleh pendidikan. Adanya segregasi sistem pendidikan formal seperti pendidikan khusus dengan pendidikan umum contohnya, dalam jangka panjang akan membuat siswa difabel

terkucilkan di masyarakat. Untuk meneruskan jenjang ke pendidikan tinggi pun akan terbatas aksesnya, karena belum banyaknya perguruan tinggi yang siap menerima difabel. Sesuai dengan kritik Oliver (1996) terhadap sistem pendidikan khusus yang justru membuat difabel terkecualikan, berikut kutipannya: *“I argue that the special education system has functioned to exclude persons with disabilities are not only from the education process but also from mainstream social life”*. Adanya perbedaan sistem dari pemerintah kepada penyandang difabel dengan non-difabel dalam hal pelayanan pendidikan akhirnya menciptakan konstruksi sosial yang gagap terhadap inklusivitas bagi penyandang difabel. Dengan demikian akan membentuk perilaku masyarakat memperlakukan penyandang difabel pada kecenderungan tertentu.

Menurut Peters (dalam Putra dan Sanusi, 2018) bagi neo-institusionalis, perilaku individu atau masyarakat merupakan akibat keberadaan institusi. Institusi yang dimaksud tidak selalu bermakna sempit seperti organisasi, namun dapat berupa ide, nilai, aturan, konstitusi, dan seterusnya. Hal tersebut sesuai dengan teori institusionalisme bahwa institusi merupakan sesuatu yang tidak selalunya termanifestasikan secara fisik, tetapi dapat dirasakan dan meresap ke dalam nalar. Teori institusionalisme memiliki salah satu turunan teorinya yaitu teori institusionalisme sosiologi (selanjutnya disebut *Sociological Institutionalism/SI*). Lecours (dalam Putra dan Sanusi, 2018) mengungkapkan bahwa SI berfokus pada penelitian tentang norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan membentuk perilaku masyarakat. Perspektif SI memberikan atensi pada proses konstruksi sosial dan nilai yang terinstitusionalisasi seperti undang-undang dan regulasi lainnya, karena hal tersebut berperan membentuk

perilaku masyarakat di ruang institusi itu berlaku. Nilai inklusif bagi difabel yang telah diatur dalam undang-undang yaitu terdapat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 10 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta mereka juga berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 42 ayat 3 disampaikan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas, yang selanjutnya disampaikan pada ayat 4 fungsi Unit Layanan Disabilitas ringkasnya adalah membentuk budaya inklusivitas terhadap penyandang difabel di pendidikan tinggi, baik itu proses belajar-mengajar, aksesibilitas, dan seterusnya. Universitas Brawijaya (UB) memiliki Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) jauh sebelum UU Nomor 8 Tahun 2016 diterbitkan, karena PSLD sebagai unit layanan disabilitas didirikan pada 19 Maret 2012 dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor UB Nomor: 135/SK/2012.

PSLD UB memiliki visi dan misi sebagai bentuk komitmen yang diemban. Visi PSLD UB yaitu membangun lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan mewujudkan Masyarakat Indonesia yang inklusif. Syahdan serangkaian misi yang dibawa yaitu:

1. Menyediakan layanan baik fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas;

2. Mengembangkan isu-isu disabilitas dalam dunia akademik;
3. Meningkatkan sensitivitas Sivitas Akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas;
4. Melakukan pengabdian pada masyarakat agar kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih baik, serta mendapat kesamaan hak dan keadilan. (Pratiwi, dkk., 2018)

Komitmen yang diemban oleh PSLD tentu harus dilakukan bersama-sama oleh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya demi penguatan kultur pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya.

Kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan akomodasi pendidikan yang layak bagi mahasiswa difabel, akan lebih mudah diperoleh di perguruan tinggi jika mereka terjauh dari stigma *mainstream* yang negatif dan tekad yang kuat dari sivitas akademika untuk supportif terhadap kebutuhan hak difabel. Halloway (dalam Shakespeare, 2015) cukup memberikan peringatan ketika keterbatasan fisik seseorang dipandang oleh personel universitas sebagai keadaan yang problematis di sisi orang tersebut —sesuai penjelasan mengenai *medical approach*—, berarti universitas tidak siap dengan eksistensi difabel. Hadirnya kultur inklusif akan mempermudah penerimaan eksistensi difabel di lingkup sosial perguruan tinggi sebagaimana mereka seharusnya dianggap hanya sekedar perbedaan identitas, bukan kelas, jika dianalogikan dalam sebuah struktur sosial. Perlu untuk memengaruhi perilaku personel universitas untuk mendukung

pemberdayaan mahasiswa difabel (Murray et al. dalam Shakespeare, 2015), yang harus mencakup tidak hanya staf administrasi tetapi juga memengaruhi bagaimana staf akademik dalam mengajar (Matthews dalam Shakespeare, 2015). Kultur inklusif merupakan kewajiban yang harus difasilitasi oleh pemimpin perguruan tinggi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 7. Membangun kultur inklusif haruslah dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik, di dalam peraturan menteri tersebut setidaknya sudah cukup mencakup amanat untuk menyediakan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendidik terhadap inklusivitas, serta layanan proses pembelajaran. Semakin baik Universitas Brawijaya membangun kultur inklusif bagi difabel, semakin menjadikan Universitas Brawijaya sebagai *role model* nasional untuk ditiru kultur inklusifnya tidak hanya di antar perguruan tinggi namun juga di lingkup masyarakat. Semua demi teralikhannya stigma negatif terhadap difabel yang seolah mereka biasa dianggap sebagai kelompok terbelakang, berubah menjadi identitas kelompok yang juga memiliki potensi berkontribusi di masyarakat.

Pentingnya akses menuju pendidikan yang layak bagi difabel tentu harus didapat di perguruan tinggi. Namun sayang, mayoritas perguruan tinggi tidak melaksanakan pendidikan inklusif dengan menerima difabel. Dari permasalahan tersebut bila dilihat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 46 Tahun 2017 ada beberapa pasal yang harus dikaji lebih dalam seperti:

1. Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa: “*Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.*”;
2. Pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa: “... *perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.*”;
3. Pasal 10 ayat 1 “*Perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.*”.

penggunaan kata ‘dapat’ sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut sangat bermakna seperti hal yang hanya dijadikan rekomendasi semata. Walaupun perguruan tinggi melaksanakannya, dalam peraturan menteri tersebut juga tidak disebutkan mengenai *reward* yang akan didapat. Kemenristekdikti seharusnya menetapkan *merit system* —*reward and punishment*— agar perguruan tinggi termotivasi untuk menjadi institusi pendidikan tinggi inklusif. Harapan implikasi yang bisa didapat oleh difabel yaitu akan merasa teradvokasi dengan baik jika seluruh perguruan tinggi berlomba-lomba menjadi institusi pendidikan inklusif. Jika yang terjadi beberapa program studi memang sangat tidak memungkinkan untuk dipilih oleh difabel karena proses pembelajarannya sangat sulit untuk diikuti, seperti program studi yang membutuhkan visualisasi sebagai indera yang menangkap proses pembelajaran, maka sangat dimaklumkan bagi difabel khususnya tuna netra untuk tidak bisa memilih program studi tersebut. Setidaknya berarti harus terdapat peraturan dari perguruan tinggi yang terkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan bahwa program studi yang dapat dipilih oleh difabel yaitu sesuai

dengan kapabilitas yang memungkinkan difabel mengikuti proses pembelajarannya. Jadi langkah ini sangat adil jika serius direncanakan dengan baik oleh perguruan tinggi dan pemerintah.

Kultur inklusif juga harus bisa dirasakan dalam bentuk fisik agar memudahkan difabel untuk mengaksesnya. Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan serta fasilitas fisik lainnya di Universitas Brawijaya misalnya, harus terus diberikan perhatian agar ramah terhadap difabel. Atensi tersebut sudah dijamin di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Melalui peraturan tersebut pada pasal 5 ayat 1 diamanatkan bahwa prinsip Desain Universal bangunan yang memenuhi persyaratan kemudahan haruslah meliputi:

- a. kesetaraan penggunaan ruang;
- b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
- c. kemudahan akses tanpa hambatan;
- d. kemudahan akses informasi;
- e. kemandirian penggunaan ruang;
- f. efisiensi upaya pengguna;
- g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Syahdan pada pasal 5 ayat 2 semakin diperjelas nilai inklusivitasnya bahwa prinsip Desain Universal harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang difabel salah satunya.

Tanggung jawab moral untuk mencerdaskan masyarakat terhadap inklusivitas bukan hanya harus diemban oleh perguruan tinggi, namun juga pemerintah.

Kewajiban pemerintah kepada difabel khususnya adalah meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan mereka dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak difabel melalui regulasi hukum maupun kebijakan pada setiap aspek kehidupan dengan memperkuat kedudukan difabel sebagai kelompok masyarakat yang butuh memperoleh perlindungan lebih (*more protection*) dan perlakuan khusus (*special treatment*) tanpa perlu memisahkan mereka dengan kelompok masyarakat non-difabel. Upaya tersebut bertujuan agar mereka tidak mendapat perlakuan segregatif yang terkesan diskriminatif sehingga tidak berpotensi menimbulkan *social gap*. Memenuhi hak seluruh manusia untuk memperoleh pendidikan adalah wujud menciptakan keadilan bagi sesama. Upaya-upaya pemerintah melalui pembentukan landasan hukum terhadap pendidikan telah dilakukan. Meski demikian, pengawasan terhadap pelaksanaannya harus selalu diutamakan.

Regulasi yang mengatur tentang pentingnya memperoleh pendidikan di Indonesia secara khusus diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Landasan utama pendidikan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas). Pasal 1 Ayat (1) pada UU ini menyatakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Berdasarkan yang dinyatakan di dalam UU Sisdiknas tersebut diharapkan bahwa tujuan diselenggarakan pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

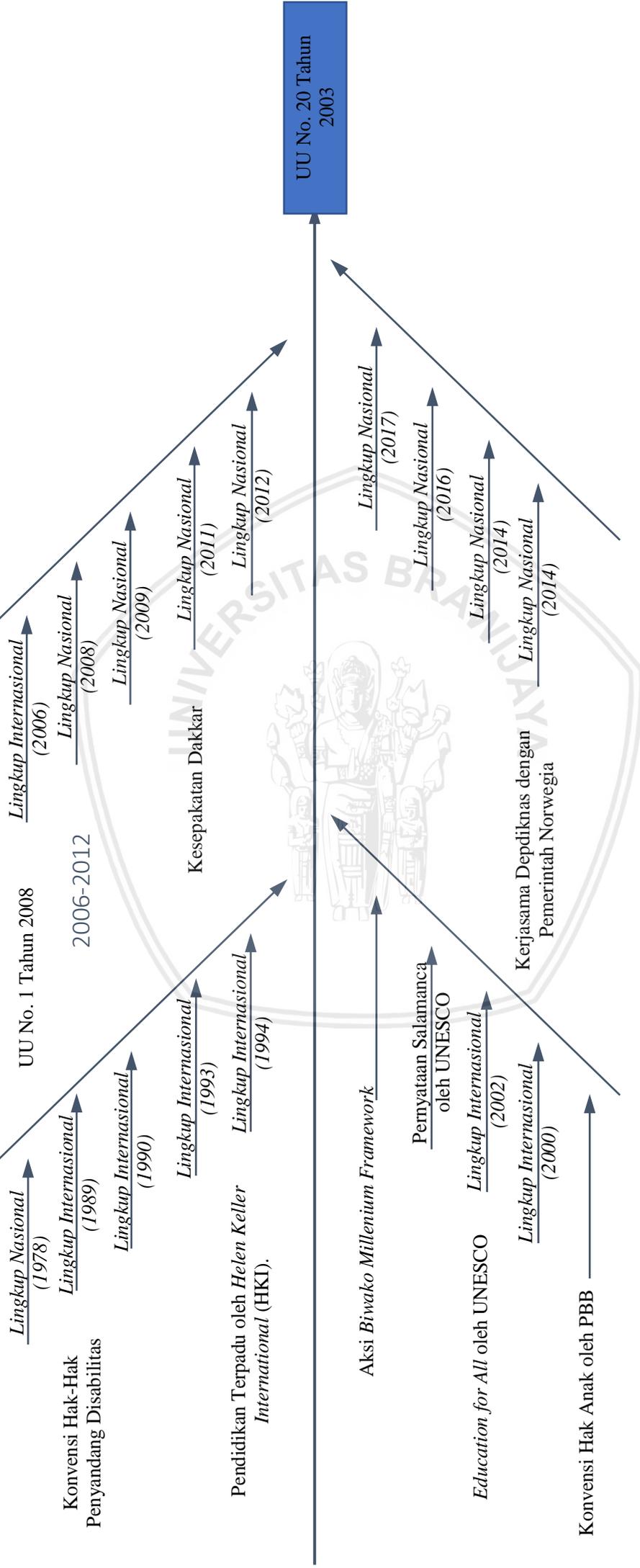
Hak memperoleh pendidikan bagi penyandang difabel juga telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implikasi yang terbentuk dengan adanya landasan hukum berdasarkan SI adalah sebuah nilai di dalamnya akan menjadi nalar kepantasan dan *cognitive script* di masyarakat dan tentunya akan menjadi suatu nilai yang harus ditaati. Cepat atau lambatnya sebuah nilai masuk menjadi nalar kepantasan masyarakat tergantung pada momentum, seperti seberapa mendesak nilai itu harus segera dijadikan panduan dalam berkehidupan sosial. Penanaman nilai inklusif akan mudah dikonstruksikan ke masyarakat seiring pendidikan formal yang mulai diarahkan menuju sistem pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif dalam usaha terwujudnya di Indonesia saling berkaitan dengan perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Penerapan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan hasil deklarasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif yang mengikat. Berikut dapat dilihat pada Gambar 2 mengenai perkembangan pendidikan inklusif dari waktu ke waktu.

Peraturan Kesamaan Kesempatan oleh PBB

Akhir 1990-an-2004

1978-1994



Dalam dunia pendidikan, adanya segregasi sekolah-sekolah seperti sekolah luar biasa yang berbeda dengan sekolah umum masih menjadi perdebatan. Butuh untuk melihat secara historis hadirnya pendidikan luar biasa. Pada 1978 Pemerintah Indonesia mulai bekerjasama dengan *Helen Keller International* (HKI) untuk mengembangkan sekolah terpadu, demikian akhirnya ditetapkanlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu yang mengatur bahwa anak penyandang cacat pada saat itu yang memiliki kemampuan belajar diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan sebayanya yang tidak cacat di sekolah terpadu. Firdaus (2010) mengungkapkan ketika proyek pendidikan terpadu itu berakhir, implementasi pendidikan terpadu semakin kurang dipraktikan. Syahdan jenis pendidikan luar biasa diupayakan pemerintah untuk payung hukumnya. Berawal dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan tertuang dalam pasal 11 nomor 4 yang membahas mengenai pendidikan luar biasa yang didefinisikan sebagai pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik dengan kelainan fisik dan/atau mental. Dikeluarkan pula ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Syahdan menjelang akhir tahun 1990-an, inisiasi pendidikan inklusif muncul melalui program kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan Pemerintah Norwegia di bawah manajemen *Braillo Norway* dan Direktorat PLB (Rahardja, 2010). Jatuh bangunnya eksistensi pendidikan inklusif mencerminkan perencanaan dan kesiapan pemerintah serta masyarakat harus segera diperbaiki, demi memperkuat semangat inklusivitas pendidikan di Indonesia.

Pemerintah sudah seharusnya membuat sebuah *roadmap* kebijakan mengenai pendidikan bagi difabel menuju ke arah yang lebih inklusif. Jika memang sekolah luar biasa dibentuk di setiap jenjangnya agar mempermudah proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik difabel, di era kontemporer kebijakan seperti itu justru memberi kesan eksklusif untuk difabel. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pendidikan inklusif yang akan menciptakan di masa depan sebuah peradaban masyarakat yang inklusif terhadap perbedaan identitas, terkait hadirnya difabel misalnya.

Penerapan pendidikan terhadap difabel di Indonesia dengan di luar negeri masih begitu berbeda penerapannya. Di Inggris, pendidikan layanan khusus yang biasa disebut *Special Educational Needs* (SEN) tidak dilaksanakan dalam lingkungan akademis yang berbeda, namun dilaksanakan dalam lingkungan akademis yang terpadu bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Seperti tertuang dalam *Code of Practices* yang menyatakan bahwa “*the special educational needs of children will normally be met in mainstream schools or settings*” (Pratiwi dkk., 2018:21).

Pemerintah harus siap menjamin satuan pendidikan beserta sumber daya di dalamnya baik pengajar, tenaga pendidik, dan lain sebagainya untuk cakap dalam hal inklusif kepada difabel. Eskalasi menuju sistem pendidikan yang inklusif butuh ditata dengan *roadmap* yang matang. Dengan demikian diharapkan untuk praktiknya di lingkup masyarakat sudah tidak ada lagi kecanggungan menghadapi kultur inklusif. Besar harapan akhirnya untuk setiap elemen masyarakat tidak lagi mendiskreditkan difabel, dan teruntuk mereka yang difabel tetap mendapatkan bantuan pemerintah yang layak sesuai kebutuhannya.

Pemerintah dan perguruan tinggi di Indonesia harus segera berbenah melampaui langkah Pakistan. Pemerintah Pakistan pada tahun 2011 telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang digagas oleh PBB. Syahdan, mereka membangun komitmen terhadap hak-hak difabel dengan menetapkan kuota penerimaan mahasiswa difabel di seluruh universitas negeri sejumlah 2% (Roman et al., 2014). Sebagai contoh perguruan tinggi di Pakistan seperti University of Sindh pada tahun 2018 menerima 10.000 mahasiswa baru tingkat sarjana, dengan demikian kuota yang disediakan bagi mahasiswa difabel berarti sejumlah 200 kursi. Berbeda dengan Universitas Brawijaya yang pada tahun 2018 hanya menyediakan kuota penerimaan bagi mahasiswa difabel sejumlah 20 kursi. Melihat komitmen Pakistan kepada difabel dalam bidang pendidikan tinggi seharusnya menjadikan evaluasi besar bagi Indonesia. Jika dilihat perbandingan antara anggaran pendidikan nasional Indonesia di tahun 2017 yang sejumlah 31.162 juta US\$ (Rp. 441 triliun) dengan anggaran pendidikan nasional Pakistan di tahun yang sama sejumlah 8.418 juta US\$ (Rp. 119 triliun), maka segala sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia harus lebih efektif dan efisien. Serta perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, yang merupakan pelopor perguruan tinggi inklusif di Indonesia sejak tahun 2012 pun harus lebih berkomitmen memberikan kesempatan yang lebih luas kepada difabel. Universitas Brawijaya harus terus meningkatkan kualitasnya sebagai perguruan tinggi inklusif di hadapan Masyarakat Indonesia. mengingat Universitas Brawijaya pernah menerima penghargaan *Inclusive Education Award* pada 18 November 2013 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Perguruan tinggi harus selalu menjadi

katalisator yang dapat memperjuangkan hak-hak difabel untuk memperoleh pendidikan yang layak. Perguruan tinggi tidak boleh justru menjadi “penindas” bagi difabel.

Pada setiap era memiliki *zeitgeist* masing-masing sebagai romantika perjuangannya yang sangat mendesak untuk mendobrak penindasan. Masyarakat Indonesia pada era kolonial dianggap sebagai kelompok *inlander* (pribumi) atau masyarakat golongan kelas ketiga, dibawah Masyarakat Belanda yang berada di kelas pertama, syahdan Masyarakat Cina, India, dan Arab pada kelas kedua. Penyematan kata *inlander* pada saat itu selalu dikonotasikan sebagai pribumi yang pemalas, tidak cerdas, dan sebagainya. Di lain era terdapat filsuf Italia beraliran Marxis pada awal abad ke-20, Antonio Gramsci yang menyuarakan istilah *subaltern* sebagai sebuah kelompok yang dikecualikan, dieksklusi, dan dikucilkan dalam tatanan sosial (Setiawan, 2018). Penindasan hak seseorang bahkan hingga membangun stigma buruk yang melekat pada dirinya harus dihapuskan. Perjuangan *inlander* untuk merdeka dari kolonialisme dan perjuangan *subaltern* untuk bisa dianggap setara dirinya dihadapan masyarakat umum tanpa harus melihat status apakah dia imigran, kulit hitam, atau apapun yang lainnya, adalah bentuk perjuangan kelas untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang lebih adil. Sama halnya dengan difabel yang memperjuangkan haknya untuk terjauh dari stigma buruk seolah mereka sepenuhnya tidak sanggup dan tidak mandiri dalam beraktivitas. Kemiskinan terjadi tidak jarang karena adanya diskriminasi, bahkan dalam hal akses *socio-economy activities*. Seperti kebijakan pembangunan transportasi umum bernama *Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority* (MARTA) di Atlanta, Amerika Serikat, pada tahun 1978 diinisiasi untuk

mempercepat mobilitas masyarakat *sub-urban* menuju ke pusat kota. Namun kebijakan tersebut banyak ditolak oleh warga kulit putih, dengan anggapan bahwa warga kulit hitam yang tinggal di daerah *sub-urban* adalah orang-orang yang tidak layak disubsidi karena profil kehidupannya (Kruse, 2019). Masyarakat dunia haruslah terdidik oleh sebuah institusi nilai yang adil, agar segregasi kelompok yang cenderung diskriminatif dapat semakin diminimalisir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Oliver (1990) bahwa difabel juga tidak kurang dari penyandang non-difabel, mereka butuh mengekspresikan sifat dasar kemanusiaan mereka dengan membentuk lingkungan sosial dan material, sehingga dengan demikian mereka dapat mempengaruhi jalannya sejarah.

Melalui latar belakang ini, maka penulis bertekad melakukan penelitian lebih mendalam untuk dijadikan skripsi sebagai kontribusi penulis demi perbaikan Universitas Brawijaya yang lebih inklusif. Penulis tertarik untuk menuangkan gagasan melalui tugas skripsi ini yang berjudul **Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis *Sociological Institutionalism Theory* dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang ada adalah:

1. Bagaimana peran regulasi dalam membentuk pengalaman dan pemaknaan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif berdasarkan perspektif *Sociological Institutionalism Theory*?

2. Bagaimana diseminasi standar baru bagi pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi pengaruh regulasi terhadap partisipan sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Brawijaya dalam perspektif *Sociological Institutionalism Theory*
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi diseminasi berdasarkan perspektif partisipan sebagai standar baru bagi pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dan instansi pendidikan sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
 - 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan terhadap inklusivitas bagi penyandang difabel.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan inklusivitas pendidikan bagi penyandang difabel.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pemodelan inklusivitas penyandang difabel di Universitas Brawijaya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian yang mendasari penelitian ini yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan yang ditulis pada skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori, konsep dan penjelasan pengertian pengertian yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dengan komponen-komponen yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis yang digunakan dalam pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang perkembangan pendidikan inklusif dan aksesibilitas difabel yang menjadi bahan pustaka untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rizky (2015)

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi tentang Advokasi Kebijakan kampus Inklusif di Universitas Brawijaya). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses di perguruan tinggi bagi difabel. Keterbatasan akses ini juga dikarenakan stigma yang sudah melekat pada difabel yang ditempatkan dalam eksklusi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *action research*.

Penelitian ini mengambil tiga fokus penelitian yaitu: Pertama, proses advokasi kebijakan kampus inklusif bagi difabel di Universitas Brawijaya. Kedua, proses perumusan kebijakan kampus inklusif bagi difabel di Universitas Brawijaya. Ketiga, dampak advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah advokasi yang telah diselesaikan oleh bagian advokasi, dan peneliti mendapatkan hasil yang

diinginkan, Universitas Brawijaya menerima gagasan perguruan tinggi inklusif yang diberikan oleh bagian advokasi. Universitas Brawijaya mendirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas yang merupakan fokus institusi dalam bidang pelayanan untuk menanggapi permasalahan difabilitas, dan yang terakhir adalah Universitas Brawijaya membuka program seleksi untuk mahasiswa difabel dan menyediakan sekitar 20 kuota untuk mahasiswa dengan difabel.

2. Syafitri, Fadli dan Hadiyantina (2015)

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Jaminan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut yang berarti pemerintah memiliki tanggung jawab dan sudah berkomitmen penuh untuk mengupayakan hak-hak difabel, khususnya dalam ranah pendidikan. Ranah pendidikan disini yang dimaksud khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Pendidikan untuk difabel masih sangat jarang dan sedikit ditemui. Melihat hal tersebut sebagai langkah nyata implementasi jaminan perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Universitas Brawijaya mendirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas sebagai langkah untuk memudahkan akses kepada mahasiswa difabel dalam menempuh pendidikan inklusif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang langsung turun ke Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian, dengan meneliti langsung ke Pusat Studi dan

Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah Universitas Brawijaya sudah mulai mengimplementasikan kampus yang inklusif melalui SK Rektor Universitas Brawijaya 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Hal tersebut merupakan implementasi aturan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang aturan pelaksanaannya diatur melalui Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014, dimana peraturan tersebut bersifat mengikat karena memang sebagai aturan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012.

3. Pratiwi, Lintangari, Rizky, dan Rahajeng (2018)

Penelitian ini membahas tentang Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi. Terminologi mengenai disabilitas dan difabel menjadi pembahasan pertama sebagai penjelasan asal mula hadirnya penamaan tersebut. Syahdan, sejarah pemenuhan hak pendidikan bagi difabel yang akhirnya menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya peran pendidikan inklusif bagi kehidupan maupun penghidupan masyarakat umum. Proses transformasi Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi inklusif merupakan bagian fokus yang diteliti lebih mendalam.

Universitas Brawijaya menjadi pilihan studi kasus penelitian karena beberapa kriteria yang dimiliki Universitas Brawijaya yaitu: Pertama, sejak tahun 2012-

2018, Universitas Brawijaya adalah satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kebijakan afirmasi seleksi masuk perguruan tinggi bagi difabel. Kedua, Universitas Brawijaya memiliki Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) yang tidak hanya berfokus pada pemberian layanan, tetapi juga kajian-kajian ilmiah tentang isu-isu difabel. Ketiga, sejak tahun 2012-2018 Universitas Brawijaya telah menyediakan akses bagi 124 mahasiswa dengan difabilitas sensorik, motorik, serta intelektual dan perkembangan. Keempat, pada tahun 2013 UB mendapatkan *Inclusive Education Award* dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI).

Deskripsi praktik pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya menjadi hasil penelitian ini. Diadakannya Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) di Universitas Brawijaya sebagai upaya praktik menunjang pendidikan inklusif. PSLD membuka *volunteer* bagi Mahasiswa UB untuk menjadi pendamping bagi difabel demi menyediakan dukungan akademik, sosial, perilaku, dan emosional bagi difabel. Langkah tersebut sebagai upaya lain yaitu menyuarakan kampanye pengakuan hak-hak difabel khususnya dalam konteks pendidikan. Syahdan, penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Brawijaya bagi difabel yang masih terus berkembang menjadi perhatian penelitian ini pula. Evaluasi dan rekomendasi menjadi langkah penting yang diambil oleh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya demi terpenuhinya kebutuhan aksesibilitas difabel.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Penelitian
Rizky (2015)	Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)	Menjadikan perguruan tinggi inklusif dengan memberikan akses bagi penyandang disabilitas	Proses advokasi kebijakan dalam mewujudkan perguruan tinggi inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya
Syafitri, dkk. (2015)	Implementasi Jaminan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Universitas Brawijaya sudah mulai mengimplementasikan kampus yang inklusif melalui SK Rektor Universitas Brawijaya 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya	Implementasi jaminan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 di Universitas Brawijaya
Pratiwi, dkk. (2018)	Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Deskripsi praktik pendidikan inklusif di Upaya transformasi Universitas Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Brawijaya menuju perguruan tinggi inklusif

Sumber: Penelitian Terdahulu (diolah peneliti).

B. Teori Institusionalisme

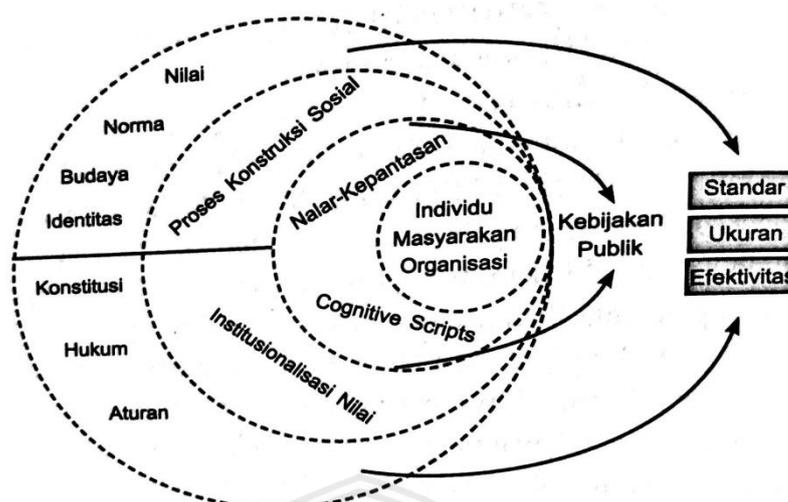
Secara terminologi, kata institusional berasal dari kata institusi. Pengertian institusi dalam penulisan ini bukan dalam makna yang sempit seperti organisasi semata, melainkan melekat pada beberapa karakteristik yang akhirnya dapat disebut sebagai makna institusi. Menurut Manggolo (dalam Darono 2012) karakteristik sebuah institusi adalah: (1) berupa organisasi pemikiran; (2) mempunyai tingkat kekekalan tertentu; (3) mempunyai tujuan yang ingin dicapai; (4) mempunyai perangkat untuk mencapai tujuannya; (5) dalam bentuk simbol-simbol; (6) memiliki dokumentasi baik tertulis maupun tak-tertulis. Definisi institusi yang cukup mewakili karakteristik tersebut sebagaimana menurut Subakti (dalam Darono 2012), institusi adalah pola-pola perilaku yang stabil, bermakna, dan berulang-ulang.

Syahdan, menurut Scott (2004:2) teori institusional hadir memberi perhatian mendalam pada tatanan sosial. Teori ini mempertimbangkan proses dimana struktur, skema, aturan, norma, dan rutinitas, ditetapkan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial. Dalam studi organisasi, teori institusional memiliki hubungan dengan bidang-bidang seperti: strategi, kewirausahaan, manajemen perawatan kesehatan, sumber daya manusia, manajemen internasional, sejarah manajemen, kognisi organisasi, struktur dan perubahan organisasi, organisasi dan lingkungan alam, dan organisasi publik dan nirlaba (Scott, 2004:27-28). Jika dikaitkan antara teori institusional dengan organisasi formal, maka organisasi formal baik itu secara tujuan hingga fungsi strukturalnya terbentuk sangat bergantung pada norma lingkungan sosial.

Universitas Brawijaya sebagai institusi pendidikan berupaya mengakomodir hak-hak difabel untuk memperoleh pendidikan. Proses Universitas Brawijaya bertransformasi menjadi lebih inklusif bagi mahasiswa difabel merupakan langkah membentuk norma lingkungan sosial yang dapat pula dicontoh di lingkup masyarakat. Namun sebelum itu pola-pola berfikir inklusif kepada difabel haruslah sudah mapan di lingkup akademisi agar dapat menjadi edukasi yang berulang-ulang tersampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

C. *Sociological Institutionalism Theory*

Sociological Institutionalism (SI) Theory menurut Putra dan Sanusi (2019) adalah sebuah pendekatan yang percaya bahwa institusi merupakan faktor penyebab utama tindakan para aktor kebijakan publik. Institusi hadir dalam relung kehidupan setiap individu melalui wacana, simbol, norma, nilai, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang diformulasikan dalam bentuk hukum formal maupun tidak. Kumpulan nilai dan norma tersebut kemudian menjadi identitas kultural yang mengikat individu-individu menjadi masyarakat. Masyarakat kemudian membentuk negara. Oleh sebab itu, aktor kebijakan publik pada dasarnya terikat erat dengan institusi dan identitas yang berlaku. Tidak hanya tindakan dari para aktor, tujuan serta ukuran keberhasilan kebijakan publik juga tak lepas dari norma dan nilai tersebut. Norma kultural membentuk alat ukur kebijakan publik melalui jalur nilai yang terlembagakan serta sosialisasi wacana menurut Scott (dalam Putra dan Sanusi, 2019). Identitas kultural adalah hal utama dan pertama yang harus dilakukan oleh analisis kebijakan publik.



Gambar 3. Implikasi SI dalam Analisis Kebijakan Publik

Sumber: Putra dan Sanusi, 2019

Peran dan posisi SI dalam analisis kebijakan publik sangat jelas dan strategis. Gambar 3 menjelaskan bagaimana kebijakan publik dapat dilihat dalam konteks SI. Kebijakan publik pada dasarnya dapat dianalisis pada level individu, masyarakat, serta organisasi. Keberadaan kebijakan publik tersebut merupakan perwujudan dari *the logic of appropriateness* (nalar-kepantasan) dan semesta kognitif (*cognitive scripts*) yang berlaku di masyarakat tempat kebijakan publik itu diputuskan. Asal-usul dari terbentuknya nalar-kepantasan tertentu setidaknya melalui dua proses, yaitu konstruksi sosial dan institusionalisasi nilai-nilai yang berasal dari institusi, baik informal (budaya, identitas kolektif, nilai, dan norma) maupun formal (hukum, konstitusi, dan aturan) yang berlaku. Kristalisasi berbagai level institusi tersebut akan menghasilkan harapan masyarakat atas perilaku aktor maupun performa kebijakan publik yang diamati. Harapan masyarakat tersebutlah yang mewujudkan menjadi standar, ukuran keberhasilan, dan efektivitas kebijakan publik. Termasuk di dalamnya adalah penerimaan masyarakat terhadap introduksi kebijakan tertentu. Dengan demikian analisis kebijakan publik diharapkan

melakukan telaah mendalam atas aspek-aspek kultural-institusional yang ada di masyarakat tempat kebijakan publik tersebut dirumuskan. Upaya itu merupakan prasyarat dasar analisis kebijakan publik agar dapat menjejak kuat di atas realitas sesungguhnya.

Universitas Brawijaya membutuhkan institusi “inklusivitas terhadap difabel” baik dalam bentuk formal maupun informal. Dalam bentuk formal, Universitas Brawijaya wajib mengupayakan adanya regulasi yang mengatur inklusivitas terhadap difabel secara spesifik, hal tersebut dikarenakan agar nilai inklusivitas terhadap difabel dapat terinstitusionalisasi. Dengan demikian institusi tersebut akan memperkuat pemaknaan sivitas akademika karena terdapat regulasi yang mengikat dengan segala konsekuensi logisnya. Selanjutnya dalam bentuk informal, Universitas Brawijaya wajib memperkuat identitas dan budaya inklusivitasnya terhadap difabel sebagai sebuah institusi. Hal ini dikarenakan agar membentuk pengalaman bagi sivitas akademika terhadap institusi dan mampu memaknai institusi tersebut dengan pengambilan keputusan atau sikap dari dirinya.

D. Perspektif Islam terhadap Difabilitas

Agama memang memengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari, sehingga setiap diskusi tentang difabilitas di Indonesia tidak lengkap tanpa membahas agama dominan di negara ini, yaitu Islam. Islam menguraikan bahwa pada prinsipnya, difabel memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang non-difabel. Menurut Mohammed Ghaly, profesor yang menggeluti keilmuan Islam dan etika biomedis di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar (dalam Roman et al., 2014) beliau menyampaikan:

”Islam outlines that, in principle, persons with disabilities are on an equal footing with able-bodied individuals: “The Quran speaks about the dignity of the children of Adam, and the children of Adam includes Muslims and non-Muslims, rich and poor, healthy and sick, people with disabilities, with no disabilities, etc. It includes every human being. So dignity is conferred upon human beings unconditionally.”

Dia menambahkan bahwa menurut sejarah Islam, ada rumah sakit inovatif yang diciptakan pada abad pertama yang didedikasikan khusus untuk para difabel. Setelah meninggalkan rumah sakit mereka diberi uang untuk membantu mereka bertransisi dan menjalani hidup mereka lagi, demikian beliau menambahkan. Faktanya, biografi sejarah menunjukkan orang-orang terkemuka dengan difabilitas berkontribusi pada masyarakat sebagai penyair, hakim, mau pun penulis. Mohamed Ghaly menyampaikan: *“They had access to education and were not excluded from society. The Islamic texts are not discriminatory to persons with disabilities.”*. Beliau menambahkan, keutamaan dan gagasan ini perlu ditransformasikan ke dalam hukum suatu negara. Tetapi banyak dari negara-negara berkembang kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk memberlakukan undang-undang yang efektif untuk melindungi hak-hak individu.

E. Terminologi Penyandang Difabel, Cacat, dan Disabilitas

Penyematan kepada seseorang yang memiliki kondisi fisik tidak pada umumnya –buta, tuli, buntung, dan sebagainya baik disematkan dengan terminologi difabel, penyandang disabilitas, atau cacat dapat mencerminkan bagaimana pemaknaan orang lain terhadap para penyandang tersebut. Cara pandang merendahkan kemampuan seseorang karena keterbatasan fisiknya

merupakan yang terburuk dalam memandang keterbatasan fisik seseorang, dan menganggap setiap orang dengan segala perbedaan kondisi fisiknya dapat berkontribusi terhadap sesuatu dari segala usaha potensi yang dimilikinya merupakan cara pandang yang lebih baik. Penggunaan setiap masing-masing terminologi terhadap seseorang dengan keterbatasan fisik akan mempengaruhi nalar-kepentasan dan semesta kognitif (*cognitive scripts*) individu maupun kelompok yang memberikan penyematan istilah tersebut. Kriteria pelamar kerja harus sehat jasmani dalam sebuah perusahaan misalnya, akan membentur nalar pimpinan perusahaan –dengan asumsi ia terbiasa menyebut seseorang dengan keterbatasan fisik sebagai penyandang cacat, yang sudah pasti tidak mampu bekerja dengan baik— ketika terdapat seseorang yang melamar kerja di perusahaannya dengan kondisi keterbatasan fisik, karena ia merasa hanya orang dengan jasmani yang sehatlah yang mampu melakukan pekerjaan. Dengan demikian secara langsung pimpinan tersebut menolak permohonan lamaran kerja tersebut. Sesungguhnya setiap orang dengan kondisi fisik yang dimiliki masing-masing, tentu memiliki potensi keahliannya yang berhak untuk diuji sesuai dengan apa yang ia tawarkan. Sangat penting untuk masyarakat bisa memahami ragam terminologi yang disematkan kepada seseorang dengan fisik berbeda, dengan harapan akan membangun nalar-kepentasan dan *cognitive scripts* individu maupun masyarakat yang adil dalam memberikan perlakuan kepada difabel pada akhirnya.

Terminologi difabel merupakan sebuah akronim dari *differently abled*. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Mansour Fakih di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an menurut Suharto dkk. (dalam Pratiwi dkk., 2018:7) dan secara

internasional istilah ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1981 dalam Konferensi Ketunetraan Asia yang diselenggarakan bersama oleh *International Federation of The Blind* (IFB), dan *World Council for The Welfare of The Blind* (WCWB) di Singapura (Pratiwi dkk., 2018). Istilah difabel memberi sebuah penekanan pada perbedaan kemampuan melakukan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dengan fisik tidak pada umumnya dengan yang lain

Menurut Ikaputra (dalam Mujimin, 2007:62) menyimpulkan bahwa dalam penggunaan istilah difabel lebih mengajak kita untuk memahami adanya keberagaman dan menghargai tingkat kemampuan antara satu orang dengan yang lain. Difabel dengan label yang diberikan oleh masyarakat, banyak menghadapi permasalahan yang kompleks, baik yang menyangkut perolehan hak maupun dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh difabel cukup beragam sesuai dengan kekurangan apa yang dimiliki. Mereka yang mengalami kelainan penglihatan akan mengalami kesulitan dalam orientasi dan mobilitas, untuk mengenal lingkungan dan berkomunikasi, mereka memerlukan sarana khusus seperti tongkat, buku-buku *braille*, kaca mata bantu, dan sebagainya.

Mereka yang mengalami gangguan organ bicara, memerlukan latihan khusus seperti artikulasi, bina persepsi bunyi, dan sebagainya. Begitu juga mereka yang mengalami cacat tubuh, akan terganggu saat berjalan atau berpindah tempat, termasuk dalam hal *activity of daily living* dan mereka memerlukan pula alat bantu berjalan, alat penguat tubuh, dan sebagainya.

Masalah yang dihadapi difabel adalah belum tersedianya fasilitas publik yang memungkinkan mereka hidup dengan mandiri, misalnya belum semua sekolah

baik itu sekolah dasar dan sederajat, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat, maupun perguruan tinggi yang terbuka untuk menerima difabel. Sarana umum di Indonesia juga masih belum ramah untuk difabel, seperti stasiun kereta api, terminal, pasar, halte bahkan trotoar masih banyak yang tidak memungkinkan untuk dapat diakses oleh difabel seorang diri. Hal tersebut membuat difabel di Indonesia semakin dipandang sebelah mata karena tidak mempunyai akses yang mudah untuk menuntut ilmu di sekolah yang sama dengan masyarakat lain, dan tidak mempunyai akses mobilitas yang mudah untuk menggunakan sarana umum.

Secara terminologi difabel dapat berawal dari kata cacat yang muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut untuk identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap tidak sama dengan manusia yang lain. Istilah penyandang cacat telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang berbeda kepada orang yang memiliki kekurangan tersebut. Hakikatnya kecacatan bukan suatu keadaan yang menentukan kualitas seorang manusia dan kecacatan bukanlah ukuran suatu keterbatasan dari eksistensi manusia.

Kecacatan sebenarnya merupakan kondisi dimana seorang manusia mempunyai perbedaan cara saat menghadapi realitas kehidupan dibandingkan dengan manusia lainnya. Istilah penyandang cacat ketika digunakan sebagai identitas seorang manusia maka istilah tersebut justru menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia dan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi penyandang cacat itu sendiri. Karena cacat lebih berkonotasi pada kata rusak, seolah mereka yang memiliki kekurangan dianggap seperti barang yang rusak.

Seiring berjalannya waktu para pakar setuju untuk mengadakan “Semiloka Terminologi Penyandang Cacat dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat”, untuk merubah istilah penyandang cacat agar tidak menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat. Semiloka ini diselenggarakan pada tanggal 8-9 Januari 2009 dan menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah penyandang cacat dalam masyarakat (Tarsidi dan Somad, 2009). Beberapa saat setelah semiloka tersebut terselenggara, pada tanggal 19-20 Maret 2009, Komnas HAM menggelar diskusi pakar sebagai tindak lanjut dari mandat hasil semiloka sebelumnya. Diskusi pakar tersebut bertujuan untuk memilih terminologi pengganti istilah penyandang cacat, dan dihasilkan istilah pengganti penyandang cacat yaitu penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sendiri mempunyai makna sebagai orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu yang lama dimana dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan hak dan kewajibannya. Diskusi pakar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Istilah penyandang disabilitas tidak bermakna diskriminatif dan menggambarkan adanya kesetaraan
- b. Kata disabilitas memiliki makna tidak termampukan sehingga adanya hak perlakuan khusus yang merupakan suatu keharusan
- c. Istilah penyandang disabilitas dapat mendorong perubahan lingkungan
- d. Istilah penyandang disabilitas mencerminkan perubahan paradigma pendekatan dari *individual medical* menuju *right based model*

Wacana mengenai penggunaan istilah difabel dan disabilitas selalu menjadi perdebatan. Diantara keduanya memiliki argumentasi yang sama kuat. Namun dalam hal ini penulis lebih memilih istilah difabel dengan dasar membawa semangat perbedaan kapasitas seseorang yang harus diterima dan diakomodir oleh negara, korporat, akademisi, aktivis, dan masyarakat.

F. Perspektif Kapitalis terhadap Difabilitas

Pihak yang konsep kebenarannya dibangun dari aliran positivisme beranggapan bahwa sesuatu yang dianggap normal adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang —secara fisik— akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, atau berkembang dengan menyebutnya abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna, dan lain sebagainya. Dari pemikiran lain, kaum kapitalis liberal selalu berusaha melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (*human resource*), investasi (*human investment*) atau sebagai modal (*human capital*) (Naomi dalam Nursyamsi dkk., 2015:18).

Dalam alam pemikiran itu, orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik tidak dapat dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasikan keuntungan, bahkan orang-orang semacam ini dianggap sebagai beban atau masalah yang sama sekali tidak memberikan keuntungan dan cenderung merugikan. Selain itu mereka juga dianggap tidak mempunyai nilai-nilai produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang-orang yang dapat digolongkan sebagai *human resource*, *human investment* atau *human*

capital. Tidak heran jika masih banyak perusahaan-perusahaan yang menetapkan persyaratan pelamar kerja harus memiliki kesehatan jasmani, padahal kondisi terlahir sebagai difabel tidak selalunya memiliki kekurangan untuk bekerja di bidang barang atau jasa.

Pola berfikir kapitalis yang terbangun tersebut berimplikasi terhadap pemberian fasilitas kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik, segalanya menjadi harus diperhitungkan terlebih dahulu untung dan ruginya. Terlebih anggapan bahwa kehidupan ini adalah kompetisi. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap memiliki eksistensi adalah yang mampu memenangkan persaingan. Jadilah difabel sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka.

G. Pendidikan dalam Berbagai Perspektif

Filosofi pendidikan di masing-masing negara sangat berbeda. Faktor geografis, sosio-kultural, hingga historis seperti pendapat tokoh dapat menjadi sumbangsih terbentuknya sistem pendidikan yang ideal di masing-masing negara tersebut. Penting untuk diketahui beragam perspektif berbeda dalam memandang pendidikan sebagai dasar pemahaman. Bagaimana pakar aliran Marxis, Islam, Difabilitas, serta bagaimana konstitusi Negara Indonesia memandang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Ragam Perspektif terhadap Pendidikan

Pakar Marxis	Pakar Islam	Pakar Difabilitas	Konstitusi
<p>Paulo Freire (dalam Hendrastomo, 2012): Pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang hanya mengganggu <i>prestige</i> sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.</p>	<p>Ibnu Sina (dalam Putra, 2015): Pendidikan diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya.</p>	<p>Michael Oliver (1996): Salah satu fungsi pemberian kesejahteraan secara umum, dan pendidikan khususnya, adalah untuk memastikan integrasi individu ke dalam masyarakat.</p>	<p>UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</p>

Sumber: Ragam Perspektif terhadap Pendidikan (diolah peneliti)

H. Definisi dan Konsep Pendidikan Inklusif

1. Definisi Pendidikan Inklusif

Memiliki pemahaman yang jelas tentang pendidikan inklusif itu penting karena perbedaan prinsip dan nilai yang mendasarinya mampu mempengaruhi hasil pada saat implementasi pendidikan inklusif. Menurut Stubbs (2008:11) mengenai pemahaman dan interpretasi pendidikan inklusif sebagai berikut:

*“There are many different understandings and interpretations which can affect whether or not outcomes are successful and sustainable. The key issue is that **inclusive education is based on a rights and social model**; the system should adapt to the child, not the child to the system. The ‘twin-track’ approach is also important, focusing both on changing the system and supporting learners who are vulnerable to exclusion. A rights-based framework can be useful for pulling together key components of quality education for all, but also has its challenges and tensions.”*

Definisi pendidikan inklusif akan berkembang terus menerus seiring dengan semakin beragamnya pemahaman masyarakat tentang praktik pendidikan inklusif. Definisi tersebut juga berkembang sejalan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam berbagai budaya dan konteks yang semakin luas.

Seminar Agra yang dilaksanakan pada tahun 1998 juga menghasilkan keputusan yang disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara, keputusan tersebut juga diimplementasikan dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan tidak ada perubahan. Keputusan tersebut antara lain:

- a. Lebih luas daripada pendidikan normal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non formal, dan informal;

- b. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar;
- c. Memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak;
- d. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak, yaitu usia, *gender*, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dan lain lai.;
- e. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya;
- f. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Pendidikan inklusif telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka mengurangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan inklusif didasari oleh dokumen-dokumen internasional yaitu:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948;
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak yang dilaksanakan oleh PBB tahun 1989;
- c. Deklarasi Dunia Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang dilaksanakan oleh UNESCO tahun 1990;
- d. Peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para difabel yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1993;
- e. Pernyataan Salamanca (*Salamanca Statement*) tentang pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh UNESCO tahun 1994;

- f. Kesepakatan Dakar tentang pendidikan untuk semua yang dilaksanakan oleh Forum Pendidikan Dunia (*World Education Forum*) tahun 2000;
- g. Aksi *Biwako Millenium Framework* (BMF) oleh kelompok kerja Asia Pasifik sebagai kerangka kerja regional untuk panduan negara-negara Asia Timur dan Pasifik dengan mengajukan 7 prioritas yang salah satunya adalah deteksi dini, intervensi dini, serta pendidikan bagi difabel, dilaksanakan tahun 2002;
- h. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) yang dilaksanakan oleh PBB dan dihadiri hampir seluruh negara di dunia pada tahun 2006.

Menurut Stubbs (2008:14) Program dan layanan pendidikan untuk orang-orang yang bersangkutan (difabel –red) harus dikembangkan dan diimplementasikan dalam kerjasama dengan mereka dan akan memasukkan sejarah mereka, pengetahuan dan teknologi mereka, sistem nilai mereka dan aspirasi sosial, ekonomi, dan budaya mereka selanjutnya. Hal ini menjadi lebih adil ketika perencanaan pelaksanaan pendidikan inklusif harus melibatkan difabel, karena merekalah yang paling mengerti kebutuhannya. Pelaksanaan forum-forum internasional menjadi sumbangsih pemikiran bagi dunia untuk pendidikan inklusif, namun ternyata terdapat kritik keras dari beberapa kalangan, seperti Kesepakatan Dakar pada tahun 2000 yang dianggap kurang melibatkan masyarakat menurut Rosa Maria Tores (dalam Stubbs, 2008:129), beliau berpendapat sebagai berikut :

“Pendidikan untuk Semua 1990-2000 pada dasarnya adalah gerakan *top-down* yang direncanakan, dilakukan dan dievaluasi oleh elit politik dan teknokratis internasional dan nasional, dengan sedikit informasi atau dorongan untuk berpartisipasi yang diberikan kepada warga negara... 15 tahun ke depan tidak boleh mengulang cerita ini. Tidak mungkin memisahkan pemikiran (*top*) dari tindakan (*bottom*), baik dalam hubungan antara lembaga internasional dan pemerintah nasional atau antara pemerintah nasional/lokal dan masyarakat nasional/lokal... Melakukan sesuatu dengan baik, berarti berpikir dan bertindak di semua tingkatan. Membahas diagnosis dan strategi yang diadopsi di tingkat makro, dan membuat saran untuk 'apa' dan 'bagaimana' untuk setiap konteks tertentu adalah tugas untuk Forum Nasional “Pendidikan untuk Semua” dan untuk masyarakat sipil secara keseluruhan.”

Dengan argumen tersebut setidaknya menjadi sebuah penyadaran pula untuk masyarakat. Kebijakan pendidikan inklusif yang dibuat berdasarkan keterlibatan masyarakat akan menjadi jauh lebih komprehensif sehingga masyarakat menjadi mengerti terkait pentingnya pendidikan inklusif, sehingga kebijakan pun akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi.

2. Pentingnya Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif akan menjadi wadah pemenuhan hak difabel. Dengan demikian pihak penyelenggara pendidikan inklusif pun harus memperhatikan pelayanan baik fisik maupun non-fisik untuk menunjang kebutuhan difabel. Hak mendapatkan pendidikan hingga pekerjaan pun bagi difabel telah dijamin di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Difabel yang terdidik dengan kualitas pendidikan yang baik hingga diperhatikan pula potensi mereka, akan membuat difabel memiliki spesifikasi keahlian tersendiri. Spesifikasi keahlian difabel yang

disesuaikan dengan kebutuhan dunia seperti yang disampaikan oleh *World Economic Forum* dalam *Top 10 Skills in 2022* misalnya, akan memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan pada sektor formal ataupun informal. Difabel yang memiliki pekerjaan atau bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan keahlian dari ilmu yang dimiliki akan membantu mengurangi beban negara terhadap pengangguran. Sangatlah penting pendidikan inklusif untuk diterapkan sedari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Syarat untuk menjadi institusi pendidikan yang inklusif bagi difabel, khususnya perguruan tinggi harus meliputi:

1. Sivitas akademika memandang Difabilitas dengan Pendekatan *Social Model* dan *Right-Based Model* (Stubbs, 2008:11)
2. Sensitivitas pribadi dosen dan tenaga kependidikan (berorientasi pelayanan) (Shevlin, et al. dalam Shakespeare, 2015);
3. Akomodasi dan Teknologi Bantu dalam proses perkuliahan (Pratiwi, dkk., 2018);
4. Pendampingan Kegiatan Akademik;
5. Pelayanan Ibadah Keagamaan;
6. Aksesibilitas sarana dan prasarana;
7. Layanan Konseling;
8. Fasilitas Persiapan Karir di Dunia Kerja;

Syarat-syarat tersebut tentunya harus mempertimbangkan kebutuhan difabel yang akan mendapatkan pelayanan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Moeleong (dalam Nugrahani, 2014:8) menyatakan bahwa metode penelitian **kualitatif** adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Metode penelitian kualitatif digunakan karena peneliti ingin lebih mengamati dan memberi rekomendasi pemodelan pendidikan tinggi inklusif yang lebih sesuai untuk Universitas Brawijaya.

Pendekatan **fenomenologi**, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dan makna mendasar dari suatu fenomena yang dialami seseorang. “Esensi” makna dari suatu fenomena adalah yang diburu oleh studi fenomenologi (Creswell, 2015). Dalam melakukan pendekatan fenomenologi, maka peneliti akan mencari tahu bagaimana narasumber (partisipan) menjalani pengalamannya hingga memberi pemaknaan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif.

Asumsi filosofis dalam sebuah penelitian sangat penting digunakan sebagai ide dan keyakinan abstrak yang memengaruhi dan mewarnai penelitian, karena asumsi filosofis merupakan ide pertama dalam pengembangan studi. Peneliti

menggunakan asumsi **aksiologis**, yang berarti peneliti mengakui adanya muatan nilai dari



penelitiannya dan secara aktif menyampaikan nilai-nilai dan bias-bias dari peneliti sendiri (Cresswell, 2015). Menurut Huff (dalam Cresswell, 2015) asumsi filosofis memengaruhi bagaimana peneliti merumuskan permasalahan dan berbagai pertanyaan, serta bagaimana peneliti mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Inklusivitas dan penyematan istilah difabel merupakan nilai yang secara aktif disampaikan oleh peneliti.

Denzin dan Lincoln (dalam Creswell, 2015) menganggap asumsi filosofis sebagai premis penting yang perlu dimasukkan ke dalam kerangka penafsiran yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan **konstruktivisme sosial** sebagai kerangka penafsirannya. Melalui konstruktivisme sosial menurut Creswell (2015) maka partisipan sebagai individu akan mengembangkan makna-makna subjektif dari pengalamannya dan peneliti dengan latar belakang serta pengalaman yang dimilikinya akan menafsirkan makna yang disampaikan oleh narasumber. Dengan pengalaman dan latar belakang terdahulu peneliti sebagai Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2018 yang banyak berkuat dengan inklusivitas penyandang difabel, maka makna-makna yang disampaikan oleh partisipan akan ditafsir oleh peneliti sesuai pengalaman kultural, personal, dan historisnya.

Alasan penggunaan jenis penelitian fenomenologi-kualitatif adalah karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai fenomena kultur inklusif yang terbangun di Universitas Brawijaya, serta bagaimana sudut pandang partisipan memaknai pendidikan tinggi inklusif. Mengingat Universitas Brawijaya pernah menerima penghargaan *Inclusive Education Award* dari Kemendikbud pada tahun

2013, maka menarik melihat perkembangan terkini sejauh mana kematangan Universitas Brawijaya menuju perguruan tinggi inklusif. Dengan ini diharapkan dapat ditemukannya rekomendasi pemodelan pendidikan tinggi inklusif untuk Universitas Brawijaya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus penelitian dalam suatu penelitian dibutuhkan agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar, dengan kata lain fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

3. Peran regulasi dalam membentuk pengalaman dan pemaknaan sivitas akademika Universitas Brawijaya terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif berdasarkan perspektif *Sociological Institutionalism Theory*
2. Diseminasi standar baru bagi pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yang sesuai dengan fenomena permasalahan sangat dibutuhkan, karena pada lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa, secara kritis dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Nugrahani, 2014:112). Penelitian ini dilakukan di Universitas Brawijaya yang beralamat di Jalan Veteran, Kota Malang. Alasan penulis memilih lokus tersebut yaitu:

1. Universitas Brawijaya merupakan perguruan tinggi yang sejak tahun 2012 telah berkomitmen mempraktikkan inklusivitas di perguruan tinggi (Pratiwi dkk., 2018);
2. Universitas Brawijaya telah memiliki unit layanan disabilitas bernama Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD), hal ini akan memperkuat sumbangsih pemikiran penulis untuk Universitas Brawijaya selaras dengan upaya PSLD untuk menciptakan kultur inklusif.
3. Universitas Brawijaya diharapkan dapat lebih baik lagi untuk menjadi percontohan pemodelan perguruan tinggi inklusif terhadap difabel dalam skala nasional bagi seluruh perguruan tinggi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan asal mula penulis mendapatkan data dan informasi yang berguna untuk penelitiannya. Penulis memutuskan untuk menentukan responden penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan secara tidak mengacak/menunjuk responden (*purposeful sampling*). Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena penulis ingin lebih memahami secara langsung bagaimana implementasi inklusivitas penerimaan mahasiswa penyandang difabel.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Nugrahani (2014:113) data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya partisipan. Data primer dalam penelitian ini didapat dari partisipan, yaitu orang yang akan dijadikan objek untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam, yaitu orang yang berhubungan langsung dengan pemangku kebijakan inklusivitas terhadap mahasiswa difabel dan mahasiswa difabel selaku yang mengikuti kebijakan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk memilih responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya

Rektor Universitas Brawijaya dipilih karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 disampaikan pada Pasal 1 bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas. Syahdan pimpinan perguruan tinggi merupakan pihak yang mengatur terbentuknya kultur inklusif di kampus sesuai amanat Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 7. Wakil Rektor yang dipilih untuk menjadi partisipan yaitu Wakil Rektor 1 bidang akademik dan Wakil Rektor 4 bidang perencanaan dan kerjasama.

b. Dekan Universitas Brawijaya

Dekan dipilih karena merupakan pimpinan yang berperan mengatur pengelolaan di lingkup fakultas baik dari segi pelaksanaan pendidikan, kegiatan kemahasiswaan, hingga administrasi umum.

c. Mahasiswa Difabel Universitas Brawijaya

Mahasiswa Difabel dipilih karena merupakan individu ataupun kelompok yang menjalani bagaimana kultur inklusif berlangsung di Universitas Brawijaya.

d. Ketua Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) UB

Ketua PSLD UB sebagai bagian dari rektorat dipilih karena Universitas Brawijaya telah membentuk PSLD pada tahun 2012 untuk membentuk kultur inklusif di lingkup kampus.

e. Ketua Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) Universitas Brawijaya

Ketua UPKK sebagai bagian dari rektorat dipilih karena penting untuk Universitas Brawijaya menyediakan persiapan karir bagi mahasiswa difabel di dunia kerja. Terlebih indikator penilaian performa perguruan tinggi pada tahun 2019 dari Kemenristekdikti turut melihat salah satu penilaiannya yaitu alumni perguruan tinggi yang sudah mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan. Menarik untuk mengetahui kesiapan Universitas Brawijaya menerima difabel sebagai peserta didik apakah diimbangi dengan kesiapan memberikan fasilitas persiapan karir bagi mahasiswa difabel tersebut.

f. Ketua Bagian Umum, Hukum, dan Tata Layanan (Kabag Umum dan HTL) Universitas Brawijaya

Kabag Umum dan HTL sebagai bagian dari rektorat dipilih karena perihal sarana dan prasana Universitas Brawijaya dikelola oleh Bagian Umum dan HTL. Sarana dan prasarana sangat penting untuk disediakan secara inklusif untuk mempermudah akses difabel. Dengan demikian penting untuk diketahui segala

informasi mengenai sarana dan prasarana Universitas Brawijaya berdasarkan perspektif Kabag Umum dan HTL.

g. Manajer Operasional Masjid Raden Patah

Manajer Operasional Masjid Raden Patah sebagai bagian dari rektorat dipilih karena perihal peribadatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk memfasilitas bagi mereka yang difabel. Pelayanan dan fasilitas fisik peribadatan di Masjid Raden Patah menarik untuk diketahui bagaimana kendala-kendalanya sejauh ini. Masjid Raden Patah juga merupakan simbol tempat ibadah bagi muslim yang menjadi representasi masjid universitas.

2. Data Sekunder

Menurut Nugrahani (2014:113) data sekunder adalah data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia partisipan dalam fungsinya sebagai sumber data primer. Data sekunder ini dapat dikumpulkan dengan cepat.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Buku, jurnal, dan lain-lain;
- b. Undang-undang dan peraturan menteri;
- c. Media online, seperti portal berita online, dan lain-lain;
- d. Berbagai sumber lain yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian. Instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu seperti pedoman wawancara, buku catatan, bolpoin, *handphone* sebagai alat rekam suara dan gambar. Masing-masing instrumen penelitian yang digunakan sesuai kesepakatan dengan narasumber.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi data. Triangulasi data yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang berbeda, lalu data tersebut diolah menjadi satu data yang akan dianalisis untuk mendapatkan hasil. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*In-depth interview*)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan durasi 60 menit. Metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) atau disebut juga sebagai wawancara tak terstruktur bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua partisipan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri tiap partisipan. Metode wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada partisipan. Tujuan dari hal ini hanya untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara, menggali informasi,

keterangan, data, dan selanjutnya tergantung improvisasi dari peneliti sewaktu berada di lokasi penelitian. Berdasarkan penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi tentang inklusivitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya dari berbagai perspektif partisipan.

2. Pengamatan (observasi)

Observasi menurut peneliti dalam riset ini sangat dibutuhkan untuk melihat aksesibilitas infrastruktur Universitas Brawijaya terhadap penyandang difabel. Berdasarkan hal tersebut maka ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nugrahani (2014:132) bahwa semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Hasil observasi akan memperkuat interaksi wawancara peneliti dengan partisipan.

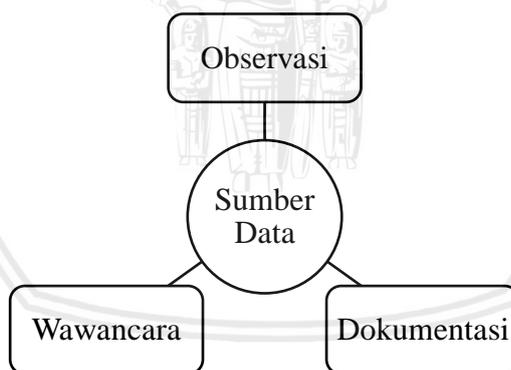
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017:240). Metode pengumpulan data seperti ini maksudnya adalah dengan membaca setiap dokumen yang terdapat di perusahaan, baik itu buku, majalah, surat kabar, ataupun buletin, serta melihat grafik-grafik yang terdapat di Universitas Brawijaya.

4. Teknik Triangulasi

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan sekaligus memeriksa kredibilitas suatu data adalah triangulasi (Sugiyono, 2017). Teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu data, informasi atau teori diluar data yang didapat dalam penelitian. Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2017:241) menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”*.

Berikut adalah gambar triangulasi teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan peneliti.



Gambar 4. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Sugiyono, 2017:242 (diolah oleh peneliti)

G. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan setelah peneliti mendapatkan surat izin lulus uji etik (*ethical clearance*) untuk pertanyaan penelitian (*research question*) dari Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) dan izin penelitian dari Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Surat tersebut diserahkan kepada partisipan terkait. Sebelum melakukan wawancara terhadap partisipan pertama, peneliti melakukan *pilot study* yang bertujuan sebagai latihan dalam melakukan teknik wawancara. *Pilot study* dilakukan pada 1 partisipan dengan mengajukan penjelasan dan persetujuan (*informed consent*) sebelum memulai wawancara. Setelah itu, hasil wawancara dari *pilot study* dibuat dalam bentuk transkrip. Selanjutnya peneliti mengonsultasikan hasil dari *pilot study* dengan pembimbing. Setelah mendapat persetujuan pembimbing, kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada partisipan berikutnya.

Tahapan selanjutnya ketika peneliti telah bersama calon partisipan yang berikutnya, peneliti memberikan *informed consent* kepada calon partisipan untuk mendapatkan persetujuan menjadi partisipan dalam penelitian ini. Jika partisipan bersedia, maka dilanjutkan dengan membuat kontrak waktu dan tempat untuk wawancara. Semua wawancara dilakukan dengan kondisi tenang dan nyaman.

Tahap selanjutnya, setelah kesepakatan didapat, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama partisipan. Peneliti meminta izin untuk merekam percakapan selama wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan metode *in-depth interview* dengan durasi 60 menit. Pertanyaan yang diajukan selama wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah ada. Kemudian melanjutkan mengajukan berbagai pertanyaan dengan menggunakan teknik *probing*.

Teknik diam (*silent*) juga digunakan peneliti sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mengingat kembali dan menceritakan

pengalamannya. Pada tahap wawancara berlangsung peneliti juga berupaya untuk tidak mengarahkan jawaban partisipan dan membiarkan partisipan mengungkapkan pengalamannya secara bebas terhadap pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara. Langkah tersebut sebagai upaya agar sejalan dengan langkah awal studi fenomenologis menurut Moustakas (1994, dalam Cresswell, 2015) yaitu *epoche* (pengurangan) dimana peneliti mengesampingkan —sebisamungkin sebagai manusia— seluruh pengalamannya terhadap fenomena inklusivitas difabel untuk memahami secara maksimal pengalaman dari partisipan dalam studi tersebut, sehingga data yang diperoleh merupakan informasi alamiah yang sesuai dengan pengalaman partisipan. Ketika pengalaman partisipan sudah disampaikan, peneliti selanjutnya menanyakan mengenai bagaimana akhirnya partisipan memaknai inklusivitas terhadap penyandang difabel. Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sejauh mana Universitas Brawijaya menjalankan amanat undang-undang dan peraturan menteri yang mengatur mengenai inklusivitas difabel. Terakhir peneliti menanyakan mengenai bagaimana rencana atau harapan ke depan mengenai implementasi inklusivitas kepada difabel baik secara fisik dan non-fisik di Universitas Brawijaya menurut partisipan.

Pada saat berakhirnya sesi wawancara, peneliti menyampaikan terima kasih lalu foto bersama sebagai bentuk dokumentasi wawancara. Peneliti juga mengadakan perjanjian kembali jika di kemudian waktu masih terdapat data yang masih diperlukan dan untuk melakukan validasi hasil transkrip yang nantinya dibuat peneliti. Tahap selanjutnya peneliti membuat hasil wawancara kedalam bentuk transkrip, setelah transkrip selesai dibuat oleh peneliti, peneliti melakukan

member check kepada partisipan. Tujuan *member check* untuk meyakinkan kesesuaian dengan fakta yang telah diungkapkan partisipan, setelah semua transkrip dibaca oleh masing-masing partisipan dan dirasa sesuai dengan yang diungkapkan, peneliti meminta partisipan untuk menandatangani transkrip tersebut, sesuai dengan kolom *member check* yang telah disediakan peneliti. Tahap akhir peneliti menyampaikan bahwa proses penelitian telah selesai kepada partisipan.

H. Metode Analisis Data

Tahapan ketika proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan pendekatan dari Moustakas (1994, dalam Cresswell, 2015). Tahapan metode analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Horizontalisasi (*horizontalization*)

Peneliti mentranskrip setiap pernyataan penting dari partisipan yang terekam dalam *audio recorder*. Pernyataan yang telah ditranskrip didaftar sesuai dengan topik pertanyaan. Transkrip wawancara kemudian divalidasi oleh partisipan yang bersangkutan.

2. Pengelompokan makna (*clusters of meaning*)

Peneliti menguraikan makna yang terkandung dalam pernyataan penting yang sudah ditranskrip, cara yang dapat dilakukan dengan menghilangkan pernyataan yang tumpang-tindih dan berulang. Peneliti menetapkan atau mengatur makna yang telah dirumuskan ke dalam kelompok sejenis.

Dalam melaksanakan analisis data ini yang didapat dari hasil wawancara, peneliti menggunakan bantuan *software* NVivo Versi 12 Plus (*Trial*).



BAB IV

PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum Penelitian

Kebijakan mengenai pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya tentu ditetapkan oleh pimpinan universitas seperti rektor beserta jajarannya dan jajaran pimpinan fakultas. Peneliti mewawancarai pimpinan-pimpinan tersebut beserta mahasiswa difabel Universitas Brawijaya sebagai partisipan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fenomena pendidikan tinggi inklusif. Berikut daftar partisipan yang diwawancarai:

1. Rektorat

Rektorat	Jenis Kelamin	Berinteraksi dengan Difabel	Memiliki Famili yang Difabel	Pengalaman Studi di Luar Negeri
Ketua PSLD	Perempuan	Pernah	Ya	Australia
Ketua UPKK	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Manajer Operasional MRP	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Prof. Bisri	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Prof. Nuhfil	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Wakil Rektor 1	Perempuan	Tidak Pernah	Tidak	Perancis
Wakil Rektor 4	Laki-laki	Pernah	Ya	Tidak Pernah

Tabel 3. Daftar Partisipan Rektorat

2. Dekan/Direktur Vokasi

Dekan/Direktur	Jenis Kelamin	Berinteraksi dengan Difabel	Memiliki Famili yang Difabel	Pengalaman Studi di Luar Negeri
Dekan FAPET	Laki-laki	Pernah	Tidak	Australia
Dekan FEB	Laki-laki	Pernah	Tidak	Australia
Dekan FH	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Dekan FIA	Laki-laki	Pernah	Ya	Tidak Pernah
Dekan FIB	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Perancis
Dekan FILKOM	Laki-laki	Pernah	Ya	Australia
Dekan FISIP	Laki-laki	Pernah	Ya	Tidak Pernah
Dekan FK	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Dekan FKG	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Dekan FKH	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Australia
Dekan FMIPA	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Australia
Dekan FP	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Dekan FPIK	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Dekan FT	Laki-laki	Tidak Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Dekan FTP	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah
Direktur Vokasi	Laki-laki	Pernah	Tidak	Tidak Pernah

Tabel 4. Daftar Partisipan Dekan/Direktur Vokasi

3. Mahasiswa Difabel

Mahasiswa Difabel	Jenis Kelamin	Fakultas	Jenis Difabel	Angkatan
Anjas	Laki-laki	FILKOM	Tuna Daksa	2016
Firman	Laki-laki	FIB	Tuna Netra	2015
Hasan	Laki-laki	FIA	Tuna Wicara dan Tuli	2015
Sasa	Perempuan	FMIPA	Tuna Daksa	2018

Tabel 5. Daftar Partisipan Mahasiswa Difabel

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada para partisipan yaitu 1) pengalaman partisipan berada dalam sebuah lingkungan yang terdapat difabel, 2) pemaknaan inklusivitas menurut partisipan, 3) penerapan amanat regulasi mengenai inklusivitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya, serta 4)

harapan partisipan untuk Universitas Brawijaya agar menjadi lebih inklusif kepada difabel.

Pertanyaan mengenai pengalaman partisipan berada dalam sebuah lingkungan yang terdapat difabel bertujuan untuk menganalisis apakah partisipan memiliki pengalaman tersebut atau tidak. Beberapa partisipan menyampaikan pengalamannya, seperti pernah studi di luar negeri yang menurutnya dapat dicontoh penerapan inklusivitasnya terhadap difabel; mengajar di kelas yang terdapat mahasiswa difabel; memiliki famili yang difabel; kendala berkomunikasi antar sesama mahasiswa difabel; dan lain-lain.

Pertanyaan mengenai pemaknaan partisipan terhadap inklusivitas bertujuan untuk menganalisis seperti apakah partisipan secara institusional memegang nilai inklusif dalam tataran normatif. Beberapa partisipan menyampaikan pemaknaannya, seperti perintah agama menghargai sesama; pemenuhan hak sesama; kewajiban melayani tanpa mempertimbangkan biaya; menerima perbedaan; tidak bisa sepenuhnya inklusif dalam akses pendidikan; dan lain-lain.

Dua pertanyaan tersebut diajukan kepada partisipan berdasarkan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menganalisis seperti apa hadir atau tidaknya fenomena inklusivitas dalam pengalaman partisipan untuk mempengaruhi cara partisipan memaknai fenomena inklusivitas tersebut secara normatif. Analisis awal peneliti tersebut hanya untuk mengetahui pandangan secara umum dari partisipan terhadap fenomena inklusivitas. Analisis tersebut sebagai wujud penerapan *in-depth interview* di tahap awal agar partisipan dapat

lebih leluasa menceritakan tahap selanjutnya dan peneliti juga menjadi lebih mudah mengidentifikasi kesesuaian jawaban selanjutnya dari partisipan dengan pernyataan normatif sebelumnya.

Pertanyaan yang diajukan peneliti khusus mengenai regulasi bermaksud untuk menemukan pandangan dari partisipan-partisipan yang secara langsung menyinggung fenomena pendidikan tinggi inklusif. Pertanyaan ini sebagai analisis lanjut yang lebih mendalam dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Alasan peneliti memilih beberapa regulasi untuk diajukan sebagai pertanyaan karena berdasarkan kajian peneliti regulasi tersebut mengamanatkan penerapan inklusivitas kepada difabel. Penjelasan mengenai regulasi tersebut sebagai berikut:

Regulasi	Penjelasan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 (poin a dan d)	Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; dan (d) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 11 (poin a)	Penyandang Disabilitas berhak: a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 80 &	Pasal 80: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

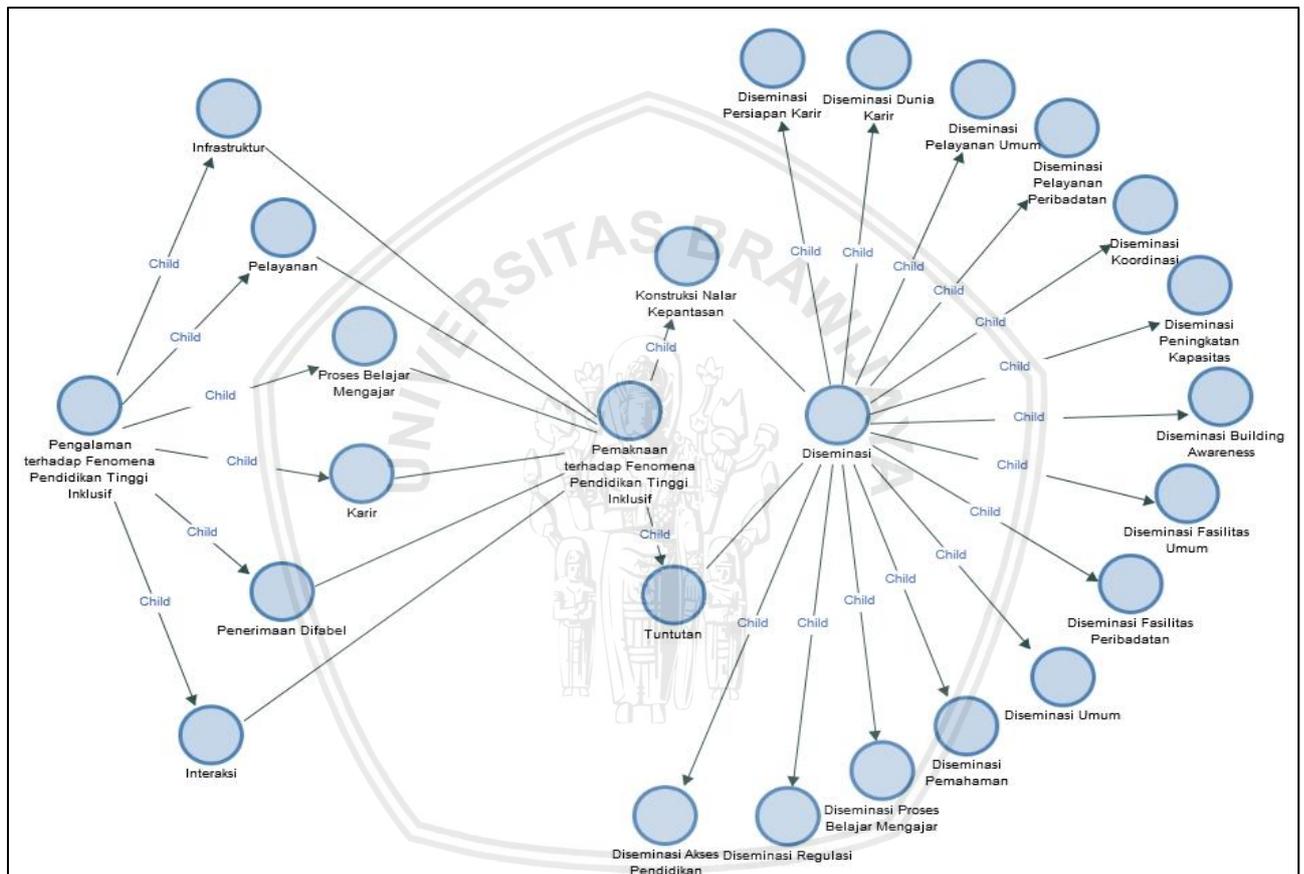
82	<p>Pasal 82: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.</p> <p>Pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi: (a) terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan (b) peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.</p>
Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 7	
Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 Pasal 5	<p>Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesetaraan penggunaan ruang; b. keselamatan dan keamanan bagi semua; c. kemudahan akses tanpa hambatan; d. kemudahan akses informasi; e. kemandirian penggunaan ruang; f. efisiensi upaya pengguna; dan g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Tabel 6. Penjelasan Regulasi yang Mengatur Inklusivitas terhadap Difabel

Sumber: Data Primer Hasil Olah Peneliti

Pada regulasi-regulasi yang dipaparkan pada tabel 6, amanat untuk menerapkan inklusivitas baik secara fisik maupun non-fisik telah jelas disampaikan. Dengan adanya regulasi tersebut, membentuk kultur inklusif di perguruan tinggi sudah seharusnya diterapkan dalam sebuah kebijakan yang diatur oleh pimpinan perguruan tinggi. Menjadi sebuah catatan ketika beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada partisipan mengenai regulasi, menjadi sesuatu hal yang baru diketahui. Menurut beberapa partisipan perlu

adanya sosialisasi mengenai regulasi tersebut agar diketahui banyak sivitas akademika Universitas Brawijaya. Pertanyaan regulasi tersebut diajukan ke seluruh partisipan tanpa pengecualian regulasi, hal ini bertujuan agar dapat terlihat pernyataan-pernyataan yang memiliki keterkaitan antar partisipan.



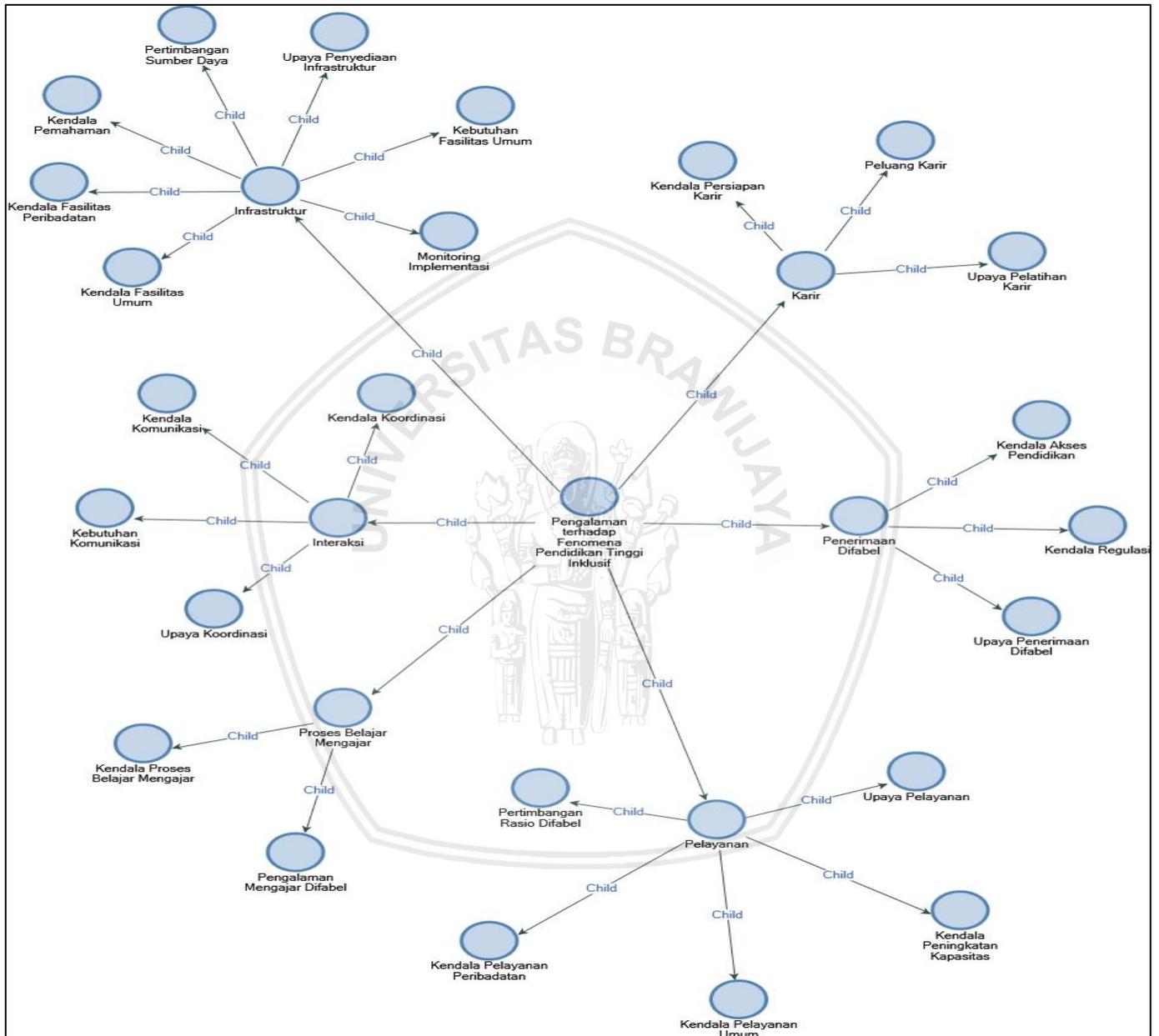
Gambar 5. Skema Model Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Tema yang diperoleh dari hasil analisis jawaban-jawaban yang disampaikan oleh partisipan ditemukan 3 tema yaitu 1) pengalaman terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif, 2) pemaknaan terhadap pendidikan tinggi inklusif, dan 3) diseminasi dapat dilihat pada Gambar 5. Tema-tema ini akan dibahas lebih terperinci dengan subtema serta kategori.

B. Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif

1. Subtema dan Kategori yang Ditemukan dalam Tema



Gambar 6. Skema Model Subtema dan Kategori pada Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif (Tema)

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Subtema dan kategori berdasarkan tema pengalaman terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif dapat dilihat pada Gambar 6, skema model subtema

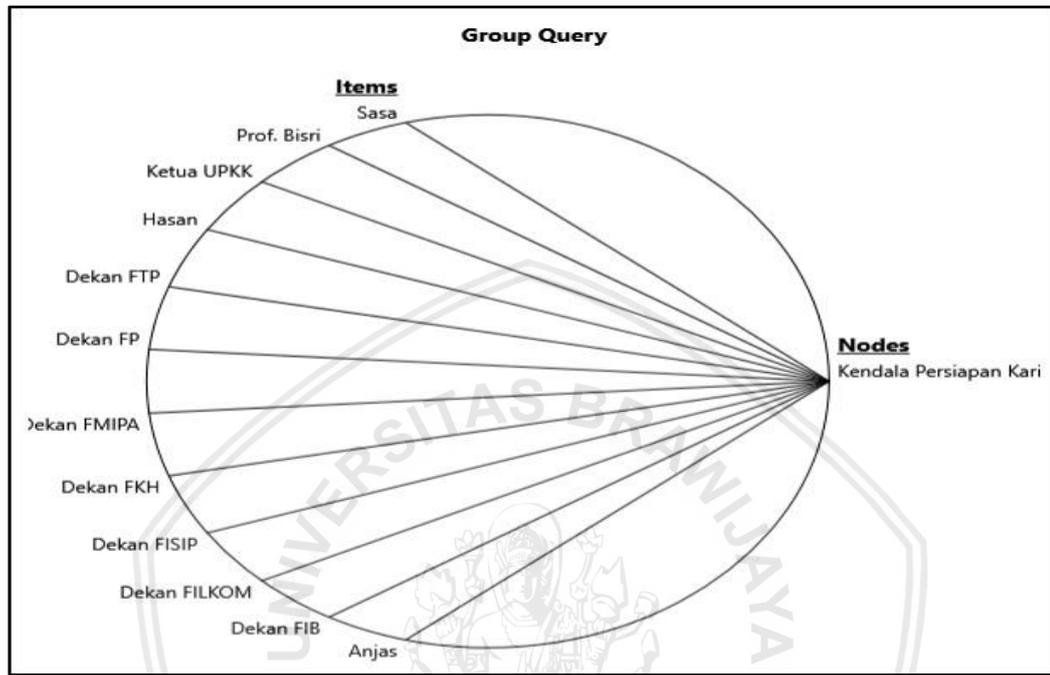
dan kategori diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu *project map*. Subtema yang didapat sebanyak 6 dengan kategori sebanyak 24. Adapun subtema dan kategori tersebut antara lain: 1) subtema karir dengan kategori kendala persiapan karir, peluang karir, dan upaya pelatihan karir; 2) subtema penerimaan difabel dengan kategori kendala akses pendidikan, kendala regulasi, dan upaya penerimaan difabel; 3) subtema pelayanan dengan kategori upaya pelayanan, kendala peningkatan kapasitas, kendala pelayanan umum, kendala pelayanan peribadatan, dan pertimbangan rasio difabel; 4) subtema proses belajar mengajar dengan kategori pengalaman mengajar difabel dan kendala proses belajar mengajar; 5) subtema interaksi dengan kategori upaya koordinasi, kebutuhan komunikasi, kendala komunikasi, dan kendala koordinasi; 6) subtema infrastruktur dengan kategori kendala fasilitas umum, kendala fasilitas peribadatan, kendala pemahaman, pertimbangan sumber daya, upaya penyediaan infrastruktur, kebutuhan fasilitas umum, dan monitoring implementasi.

2. Pemaparan Hasil Penelitian berdasarkan Kategori dengan Subtema

Berikut ini visualisasi partisipan yang terkait dengan kategori berupa diagram, pernyataan-pernyataan partisipan, dan grafik persentase pernyataan partisipan yang sudah ter-*coding* terkait dengan kategori berdasarkan keseluruhan transkrip antara lain:

a. Karir

1) Kendala persiapan karir



Gambar 7. Diagram *Group Query*, “Kendala Persiapan Karir”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala persiapan karir dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 7. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala persiapan karir antara lain:

[<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif>](#) - § 18 references coded [3.96% Coverage]

- Anjas

Reference 1 - 0.38% Coverage

“Kita pernah mempertanyakan apakah UPKK memiliki pengarahan untuk kita-kita yang difabel ini setelah lulus nanti, dan ketika saya selidik ternyata memang belum ada. Ini menjadi evaluasi bersama untuk lebih memperhatikan difabel karena setelah lulus nanti difabel ini akan menjadi tenaga profesional.”

- Dekan FIB
Reference 2 - 0.19% Coverage

“Untuk mengenai setelah lulus, terus terang ini sesuatu yang baru untuk detilnya seperti apa saya belum tahu persis (bagaimana UB membantu difabel).”

- Dekan FILKOM
Reference 3 - 0.25% Coverage

“Seingat saya tidak ada diskusi (di pimpinan UB –red) mengenai bagaimana mahasiswa ini (difabel –red) setelah lulus, justru banyak diskusinya (mengenai) apakah fakultas bisa menerima mahasiswa difabel.”

Reference 4 - 0.22% Coverage

“Belum ada (pembahasan) sampai membekali mereka (mahasiswa difabel –red), misalkan ya (pemberian) pengetahuan khusus supaya mereka bisa bersaing secara fair (di dunia kerja).”

- Dekan FISIP
Reference 5 - 0.38% Coverage

“FISIP sejauh ini belum pernah ada semacam koordinasi dari UPKK (Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan) untuk membantu alumni mahasiswa difabel dan dari IKA (Ikatan Alumni) juga belum ada, mungkin mereka berkoordinasinya dengan PSLD (Pusat Studi Layanan Disabilitas) sejauh ini saya belum banyak tahu.”

- Dekan FKH
Reference 6 - 0.31% Coverage

“Memang kalau saya rasa kan untuk yang kesiapan di dunia kerja itu sudah di luar kampus ya, kalau di kita kan ranahnya bagaimana kita menyiapkan semua mahasiswa termasuk yang difabel itu untuk bisa bersaing di luarnya nanti (di dunia kerja –red).”

Reference 7 - 0.18% Coverage

“Selama ini UPKK kan masih kurang untuk mempersiapkan pengembangan karir mahasiswa (difabel), selama ini hanya mengundang industri-industri saja.”

- Dekan FMIPA

Reference 8 - 0.41% Coverage

“Kita belum punya pengalaman (membantu alumni mahasiswa difabel MIPA), tetapi seandainya ada saya kira itu akan kita ikut perjuangkan kalau memiliki kapasitas. Seperti (mahasiswa difabel) statistika (kita bantu) di BPS (Badan Pusat Statistik), itu kan gak begitu membutuhkan praktik di lapangan karena cukup mengolah data.”

Reference 9 - 0.16% Coverage

“Kok sejauh ini sepertinya belum ya ada kerjasama dari UPKK untuk membantu mahasiswa difabel pasca kampusnya (di dunia karir).”

- Dekan FP

Reference 10 - 0.11% Coverage

“Selama ini belum ada dari pihak universitas yang mengomunikasikan perihal ini ke saya.”

- Dekan FTP

Reference 11 - 0.16% Coverage

“Sepanjang saya tahu saya belum pernah mendengar ada pemfasilitasan dari UPKK (terkait dunia kerja) untuk mahasiswa difabel.”

- Hasan

Reference 12 - 0.13% Coverage

“Masih belum terbantu, pelatihan (karir) untuk difabel masih sedikit jadinya kayak belum siap untuk kerja.”

Reference 13 - 0.08% Coverage

“Aku tahu ada UPKK tapi belum membantu banget (untuk difabel).”

- Ketua UPKK

Reference 14 - 0.22% Coverage

“Kami belum pernah melakukan pendataan kepada mahasiswa difabel baik secara keseluruhan maupun di fakultas. Jadi kami tidak punya data itu (jumlah mahasiswa difabel UB –red).”

Reference 15 - 0.11% Coverage

“(Dari UPKK) belum ada roadmap (pengembangan karir) sama sekali untuk yang difabel.”

- Prof. Bisri
Reference 16 - 0.40% Coverage

“Yang saya ketahui selama saya (menjabat rektor) pun masih belum kelihatannya perhatian khusus terhadap difabel. Kemarin-kemarin perhatiannya hanya di sektor akomodasi dan pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga sekarang ini mestinya udah mulai mengarah ke sana (memfasilitasi persiapan dan akses dunia kerja).”

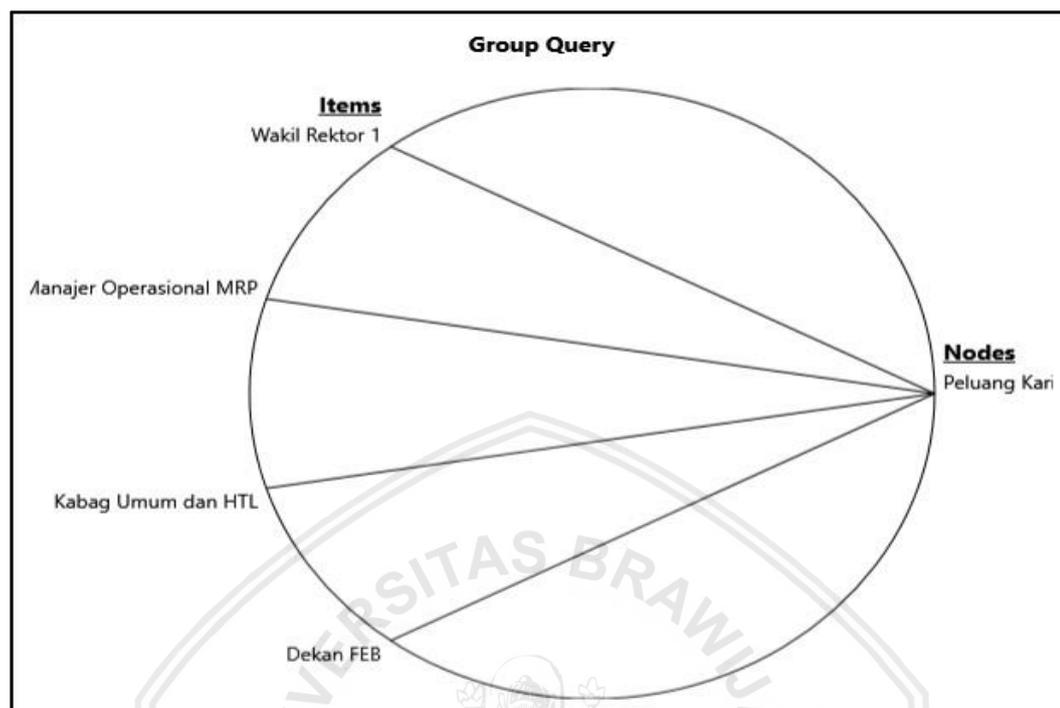
- Sasa
Reference 17 - 0.17% Coverage

“Sejauh ini aku gak tahu apakah ada pelatihan untuk dunia kerja dari PSD, antara memang gak ada atau memang akunya aja yang gak tahu.”

Reference 18 - 0.11% Coverage

“Aku baru denger ada yang namanya UPKK (Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan).”

2) Peluang Karir



Gambar 8. Diagram *Group Query*, “Peluang Karir”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori peluang karir dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 8. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait peluang karir antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 4 references coded [0.61% Coverage]

- Dekan FEB
Reference 1 - 0.11% Coverage

“Ada alumni UB kawan saya jadi wiraswasta sekarang dia, semua ada kesempatan saya rasa.”

- Kabag Umum dan HTL
Reference 2 - 0.16% Coverage

“Ada lulusan FIA dia sekarang bekerja di Perpustakaan UB, itu dia pendek. Fikirannya normal hanya fisiknya saja (yang difabel).”

- Manajer Operasional MRP

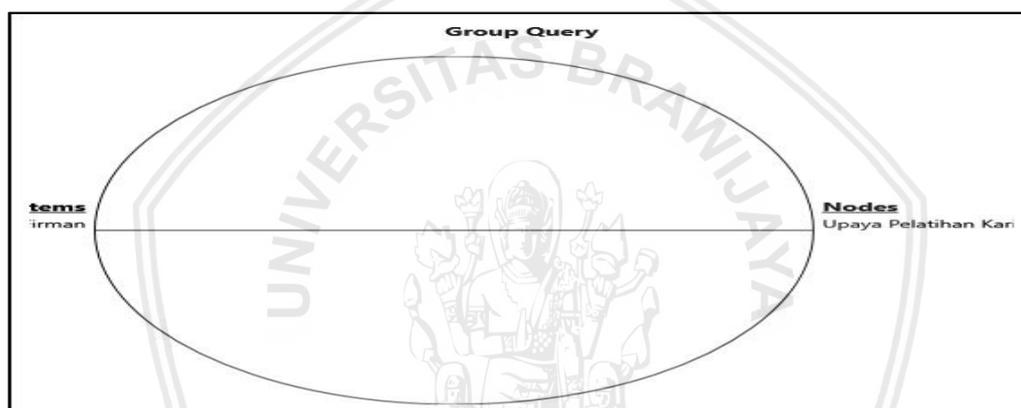
Reference 3 - 0.26% Coverage

“Kalau di Masjid Raden Patah kami mencoba mengupayakan hal tersebut, seperti mas Wahyu mengajar tahsin ke imam muda yang lain. Kami gak segan-segan kalau ke depan mas Wahyu kami terima sebagai pegawai di sini.”

- Wakil Rektor 1
Reference 4 - 0.08% Coverage

“Kita punya pegawai perpustakaan dan pegawai FK yang difabel.”

3) Upaya Pelatihan Karir



Gambar 9. Diagram *Group Query*, “Upaya Pelatihan Karir”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori upaya pelatihan karir dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 9. Berikut ungkapan dari partisipan terkait upaya pelatihan karir antara lain:

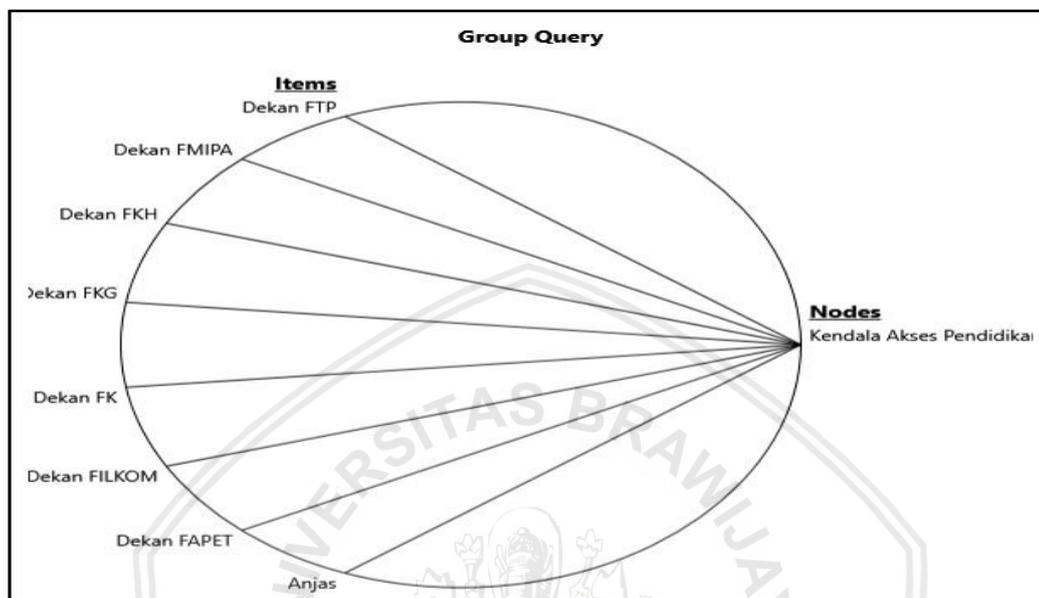
<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 1 reference coded [0.10% Coverage]

- Firman
Reference 1 - 0.10% Coverage

“Saat itu ada pelatihan dari PSLD untuk persiapan karir, ini sangat membantu.”

b. Penerimaan Difabel

1) Kendala Akses Pendidikan



Gambar 10. Diagram *Group Query*, “Kendala Akses Pendidikan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala akses pendidikan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 10. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala akses pendidikan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 13 references coded [3.42% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.31% Coverage

“Ini yang harusnya menjadi perhatian banyak orang ya terutama birokrasi di bidang pendidikan atau yang lain-lain yaitu social awareness kepada difabel itu sangat kurang, dan ini berdampak (terjadinya) diskriminasi kepada difabel, itu saya alami.”

Reference 2 - 0.32% Coverage

“Meskipun masih ada beberapa fakultas seperti FILKOM misalnya yang terlalu kolot untuk menolak teman-teman yang tuli. Padahal ada lulusan

tuli yang dia selesai tiga setengah tahun kuliahnya. Ini kan berarti tidak semua tuli (bisa dianggap) tidak bisa coding.”

Reference 3 - 0.40% Coverage

“Kalau kita berkaca pada skala nasional juga baru sedikit perguruan tinggi yang menerima difabel, bahkan kendala juga ada di sekolah dasar hingga menengah. Pernah ada kenalan saya yang akhirnya tidak lulus SMA karena saking ribetnya peraturan untuk difabel. Pimpinan sekolah selalu mengarahkannya lebih baik ke SLB.”

- Dekan FKH

Reference 4 - 0.17% Coverage

“Kalau di FKH ketika saya tanyakan bisa tidak menerima difabel, berdasarkan hasil rapat seluruh program studi tidak bisa menerima difabel.”

Reference 5 - 0.13% Coverage

“Meskipun undang-undang mengatakan begitu tapi kan tidak bisa semua program studi menerima (difabel).”

- Dekan FK

Reference 6 - 0.34% Coverage

“Mereka (difabel) punya hak yang sama termasuk di dalam pendidikan, hanya saja ada beberapa prodi seperti di FK ini yang tidak menerima difabel, karena ini terkait dengan profesi yang nantinya akan terkait dengan keselamatan untuk yang menjalankan profesi dan pasien.”

Reference 7 - 0.15% Coverage

“Untuk FK sudah sangat rigid mengikuti peraturan dari nasional, seperti untuk mahasiswanya harus sehat jasmani dan rohani.”

- Dekan FTP

Reference 8 - 0.26% Coverage

“Keterbatasan-keterbatasan itu tidak menghalangi dia (mahasiswa difabel) untuk belajar, jadi bukan kita menghalangi tapi memang kondisi itu yang menyebabkan. Nah kalau pada level itu tentu kita tidak bisa.”

- Dekan FAPET

Reference 9 - 0.35% Coverage

“Ada beberapa fakultas yang bisa diikuti, tetapi ada juga fakultas yang tidak bisa diikuti (oleh difabel). Mengapa begitu? Karena lulusan S1 akan memiliki sesuatu peran tertentu, sehingga kompetensi tertentu harus dimiliki selama perkuliahan untuk (nantinya) melayani sesuatu.”

Reference 10 - 0.15% Coverage

“Seperti di FAPET ini kan sulit kalau mahasiswa difabel dia harus menghalau sapi atau kuda selama praktik lapangan.”

- Dekan FILKOM

Reference 11 - 0.18% Coverage

“FILKOM saya rasa termasuk yang ramah difabel ya, hanya saja memang ada beberapa jurusan yang kurang memungkinkan untuk jenis difabel tertentu.”

- Dekan FKG

Reference 12 - 0.29% Coverage

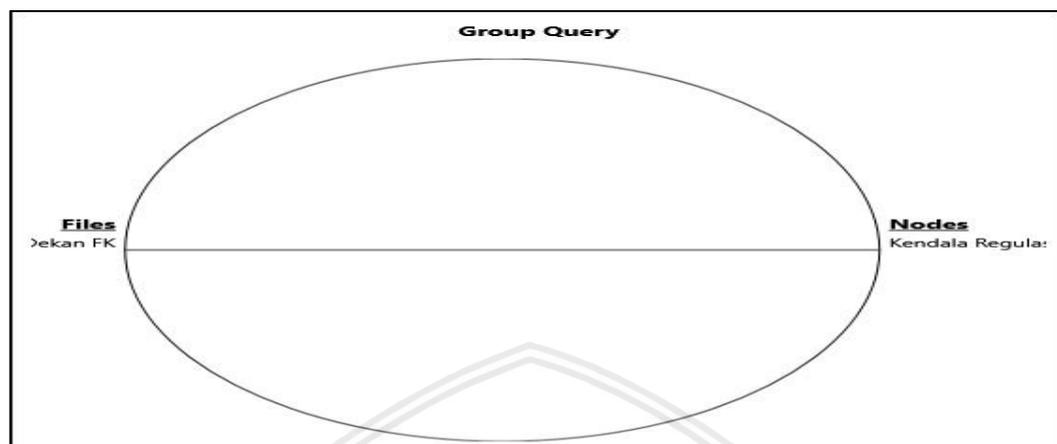
“Sayangnya beberapa fakultas tidak bisa diperuntukkan kepada difabel, seperti misalnya FKG. Karena kita melayani masyarakat, memberikan pengobatan kepada masyarakat, dan aktivitas yang dilakukan itu memerlukan orang-orang yang normal.”

- Dekan FMIPA

Reference 13 - 0.37% Coverage

“Beberapa difabel akan sulit memang untuk masuk jurusan yang berhubungan dengan (pembelajaran di) laboratorium dan lapangan. Mungkin seperti (jurusan) kimia, geofisika, fisika, biologi gak bisa, mungkin yang bisa adalah di statiska dan matematika yang memang tidak membutuhkan mobilitas tinggi.”

2) Kendala Regulasi



Gambar 11. Diagram *Group Query*, “Kendala Regulasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala regulasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 11. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala regulasi antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 2 references coded [0.31% Coverage]

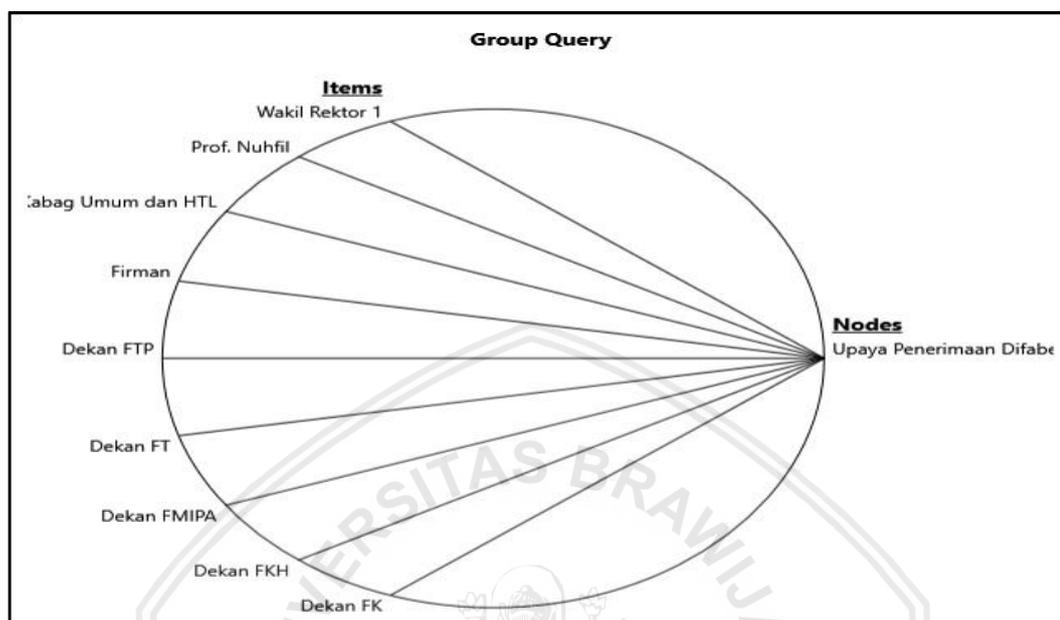
- Dekan FK
Reference 1 - 0.16% Coverage

“Sulit menerima difabel di kedokteran karena sudah diatur di dalam Konsil Kedokteran Indonesia harus sehat jasmani dan rohani.”

Reference 2 - 0.15% Coverage

“Untuk FK sudah sangat rigid mengikuti peraturan dari nasional, seperti untuk mahasiswanya harus sehat jasmani dan rohani.”

3) Upaya Penerimaan Difabel



Gambar 12. Diagram *Group Query*, “Upaya Penerimaan Difabel”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori upaya penerimaan difabel dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 12. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait upaya penerimaan difabel antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 9 references coded [2.08% Coverage]

- Kabag Umum dan HTL
Reference 1 - 0.13% Coverage

“Semenjak era Prof. Yogi (Rektor UB 2010-2014) itu sudah menerima difabel lalu dilanjut hingga sekarang.”

- Prof. Nuhfil
Reference 2 - 0.55% Coverage

“UB menjadi percontohan nasional dan kita seleksi (penerimaan) untuk mahasiswa baru punya slot khusus untuk difabel tapi memang kategori jalur mandiri. Sistem pendidikannya sudah punya kita, yang menangani

sudah punya juga, kemudian yang mendampingi juga ada. Ibu Gubernur terpilih (Khofifah) pernah datang untuk melihat penanganan UB terhadap difabel, kelihatannya UB dianggap yang paling care (terhadap difabel) dibanding universitas lain.”

- Wakil Rektor 1
Reference 3 - 0.11% Coverage

“Kalau kita lihat di peraturan rektor itu ada khusus penerimaan bagi mahasiswa difabel.”

- Dekan FK
Reference 4 - 0.21% Coverage

“UB sudah membuat PSLD, sudah ada niat ke situ untuk mengawali. Dulu saat saya jadi WD (Wakil Dekan) 1 pernah ada pembahasan perihal penerimaan mahasiswa difabel saja.”

- Dekan FKH
Reference 5 - 0.12% Coverage

“Ada pembahasan di rapat pimpinan tapi tidak sering, hanya sebatas penerimaan mahasiswa difabel.”

- Dekan FMIPA
Reference 6 - 0.13% Coverage

“Sering ada pembahasan tentang inklusivitas sebagian besar hanya ketika penerimaan mahasiswa difabel.”

- Dekan FT
Reference 7 - 0.22% Coverage

“Saya jujur saja tidak banyak ruang untuk membahas ini (inklusivitas terhadap difabel) di level pimpinan. Ini dibahas ketika syarat masuk (penerimaan mahasiswa difabel) saja.”

- Dekan FTP
Reference 8 - 0.38% Coverage

“Yang saya dapat informasi dari WD 1 saya, di bawah Wakil Rektor 1 dengan seluruh WD 1 sudah ada pembahasan untuk memfasilitasi teman-teman yang difabel pada level mana dia bisa ikut di program studi,

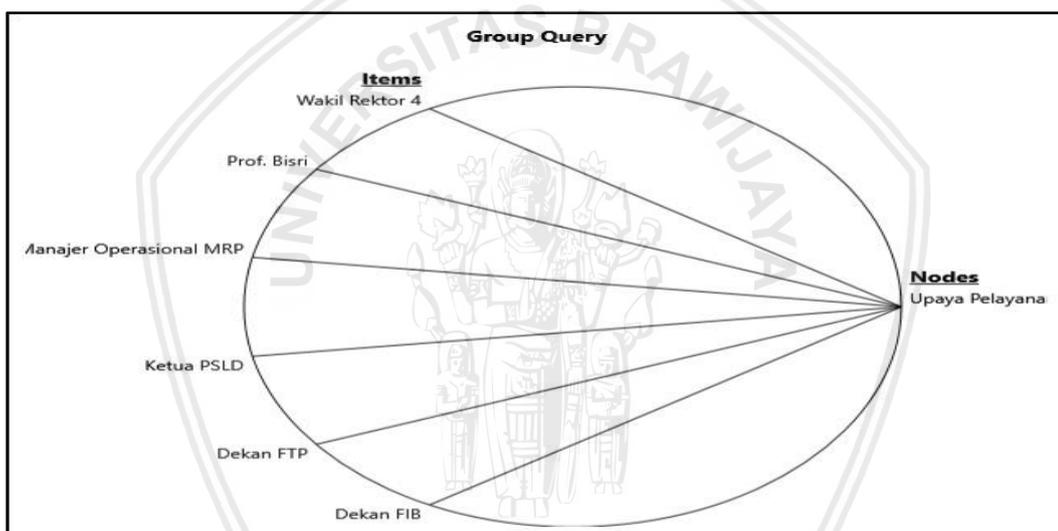
“mungkin kalau di (fakultas rumpun) sosial saya kira sudah semua karena tidak ada kendala di laboratorium.”

- Firman
Reference 9 - 0.22% Coverage

“Untuk penerimaan mahasiswa baru difabel yang dipisahkan dengan yang non-difabel ini sangat baik menurut saya, karena secara psikologis dan kemampuan difabel sangat berbeda.”

c. Pelayanan

1) Upaya Pelayanan



Gambar 13. Diagram *Group Query*, “Upaya Pelayanan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori upaya pelayanan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 13. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait upaya pelayanan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 7 references coded [1.83% Coverage]

- Dekan FIB
Reference 1 - 0.28% Coverage

“Sepertinya di Masjid Raden Patah itu (interpreter) tidak ada ya, apalagi di mushola-mushola, saya kira ini menarik ya. Insya Allah saya akan sampaikan ke teman-teman (Takmir) Masjid Raden Patah untuk menjadi perhatian.”

- Dekan FTP

Reference 2 - 0.13% Coverage

“UB sudah termasuk sangat responsive dibanding universitas lain, seperti kita sudah memiliki PSLD.”

- Rektor Prof. Bisri

Reference 3 - 0.50% Coverage

“UB sebelum undang-undang ini keluar sudah menjalankan, saat itu dimulai dari eranya Prof. Yogi (Rektor UB dua periode 2006-2014), terus saya lanjutkan lebih intensif karena saya melihat selain ada undang-undang itu wajib kita laksanakan, tetapi ada juga sisi kemanusiaan. Saat itu saya lebih banyak melaksanakan (dengan) sisi kemanusiaannya dibanding melaksanakan undang-undang walaupun itu wajib.”

- Ketua PSLD

Reference 4 - 0.27% Coverage

“Kita mengadakan program disability awareness, kita mengundang tendik (tenaga pendidik) dan dosen untuk belajar tentang sign language, lalu tentang bagaimana pendidikan yang inklusif itu sudah (diadakan) tiap tahun.”

Reference 5 - 0.23% Coverage

“Biasanya fakultas mengirimkan perwakilan ke acara disability awareness untuk nantinya didiseminasikan di fakultasnya masing-masing. Kami sedang memperhatikan juga efektifitasnya.”

- Manajer Operasional MRP

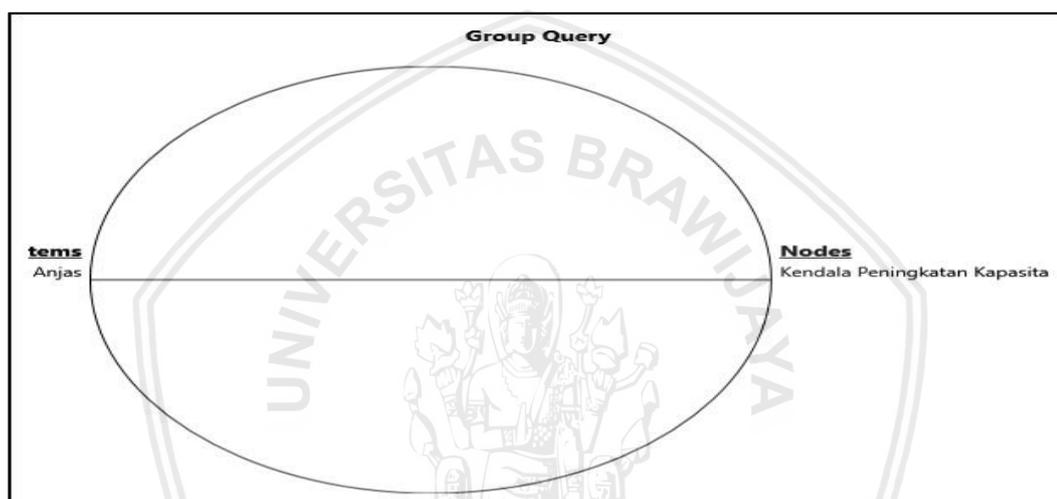
Reference 6 - 0.31% Coverage

“Selama kepemimpinan rektor periode Prof. Yogi, Prof. Bisri, dan Prof. Nuhfil perhatian itu sudah ada tercermin di Masjid Raden Patah. Meskipun masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus terus dilakukan ya untuk melayani jamaah Masjid Raden Patah.”

- Wakil Rektor 4
Reference 7 - 0.12% Coverage

“Adanya volunteer memang masih terbatas, tapi climate-nya (kultur inklusif-red) sudah mendukung.”

2) Kendala Peningkatan Kapasitas



Gambar 14. Diagram *Group Query*, “Kendala Peningkatan Kapasitas”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala peningkatan kapasitas dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 14. Berikut ungkapan dari partisipan terkait kendala peningkatan kapasitas antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 3 references coded [0.73% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.16% Coverage

“Kita selalu berkuat pada pembangunan infrastruktur, tapi tidak membangun (pemahaman inklusivitas) sumber daya manusia yang ada.”

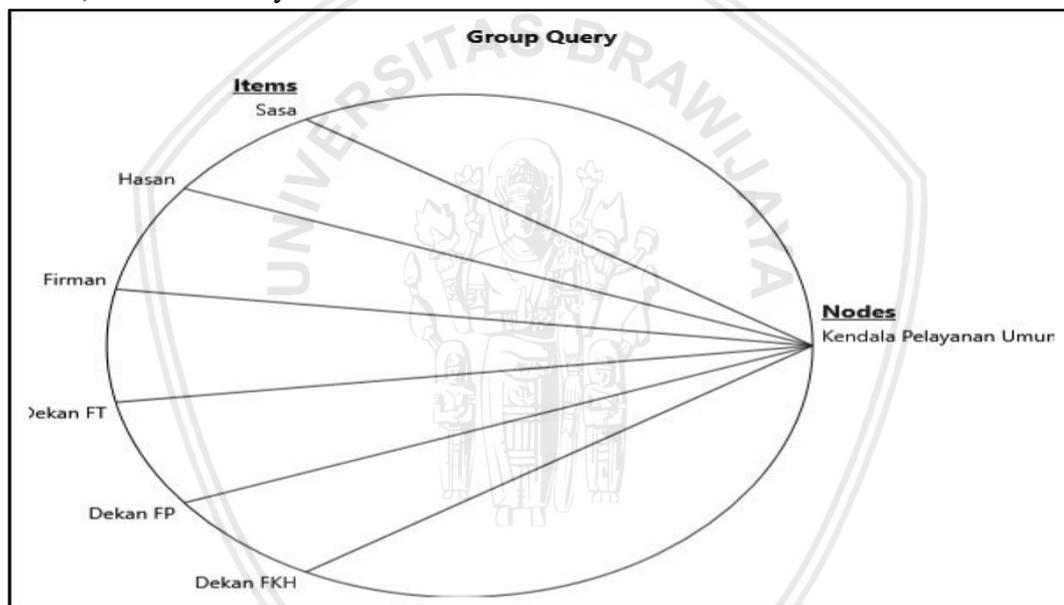
Reference 2 - 0.31% Coverage

“UB itu sudah ada pelatihan mengajari dosen bahasa isyarat, permasalahannya adalah pengoptimalan dari PSDL untuk bekerjasama dengan fakultas-fakultas dan tenaga ahli yang ada untuk meningkatkan animo semangat inklusivitas di dosen-dosen masih kurang.”

Reference 3 - 0.25% Coverage

“Saya di FILKOM belum melihat keseriusan ya dari pimpinan fakultas untuk membangun kultur inklusif itu, misalnya langkah konkrit seperti pelatihan disability awareness untuk pegawai dan dosen-dosen.”

3) Kendala Pelayanan Umum



Gambar 15. Diagram *Group Query*, “Kendala Pelayanan Umum”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala pelayanan umum dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 15. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala pelayanan umum antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 13 references coded [2.72% Coverage]

- Dekan FP
Reference 1 - 0.22% Coverage

“Saya berfikir begini, karena populasi mereka (mahasiswa difabel –red) tidak banyak, kalau selama mereka tidak mengakses meminta bantuan kita juga sulit untuk memahami itu.”

- Dekan FT

Reference 2 - 0.25% Coverage

“Terkadang kendala yang didapat untuk mewadahi mereka ini dari segi anggaran. Karena jumlah mereka yang tidak banyak, kemudian (di lain sisi) membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang mereka.”

- Hasan

Reference 3 - 0.24% Coverage

“Tapi dulu aku kuliah di FIA banyak masalah, (tentang) akademik bingung formnya buat isinya di mana betul atau salah (ngisinya), ga ada alur (pelayanannya yang bisa mudah dibaca oleh difabel).”

Reference 4 - 0.13% Coverage

“Pernah waktu di rumah sakit dipanggil nomor antrian, gak ada pengumuman (visual), jadinya bingung.”

Reference 5 - 0.24% Coverage

“Trotoar dan ramp masih kurang, lalu juga untuk tuli contohnya kayak petunjuk simbol (masih kurang), pernah dulu diomelin sama tukang parkir harus nunjukin STNK waktu parkir aku gak ngerti.”

Reference 6 - 0.23% Coverage

“Kalau di Poliklinik UB (antriannya) cuma dipanggil aja, kan gak denger. Terus dokternya gak ngerti bahasa isyarat, terus ngasih obatnya salah, padahal aku udah niruin batuk-batuk.”

Reference 7 - 0.11% Coverage

“Dulu waktu ke prodi (program studi) yang ngelayaninnya kayak gak ngerti sama difabel.”

- Dekan FKH
Reference 8 - 0.22% Coverage

“Dengan adanya peraturan khusus kan mau tidak mau semua unit harus melaksanakan, selama ini hanya banyak secara personal (pelayanannya) tapi kan ini menjadi tidak seragam.”

- Sasa
Reference 9 - 0.22% Coverage

“Sama ketua prodi (program studi) dulu waktu penerimaan wawancara kan sama beliau, ditanya kesiapan nanti kuliah. Soal kebutuhan yang butuh diakomodir di kampus gak ditanyain.”

Reference 10 - 0.20% Coverage

“Orang-orang administrasi (tenaga pendidik –red) aku gak pernah ketemu, karena di lantai 2 (ruang kerjanya), jadi aku selalu nitip temen kalau butuh apa-apa.”

Reference 11 - 0.31% Coverage

“Kadang kalau difikir-fikir kita masuk lewat jalur mandiri dan bayar uang pangkal juga, masa gak mampu untuk ngebangun hal-hal kayak gitu (aksesibilitas infrastruktur –red). Kan ini kampus negeri bukan swasta, harusnya bisa dong (lebih diakomodir).”

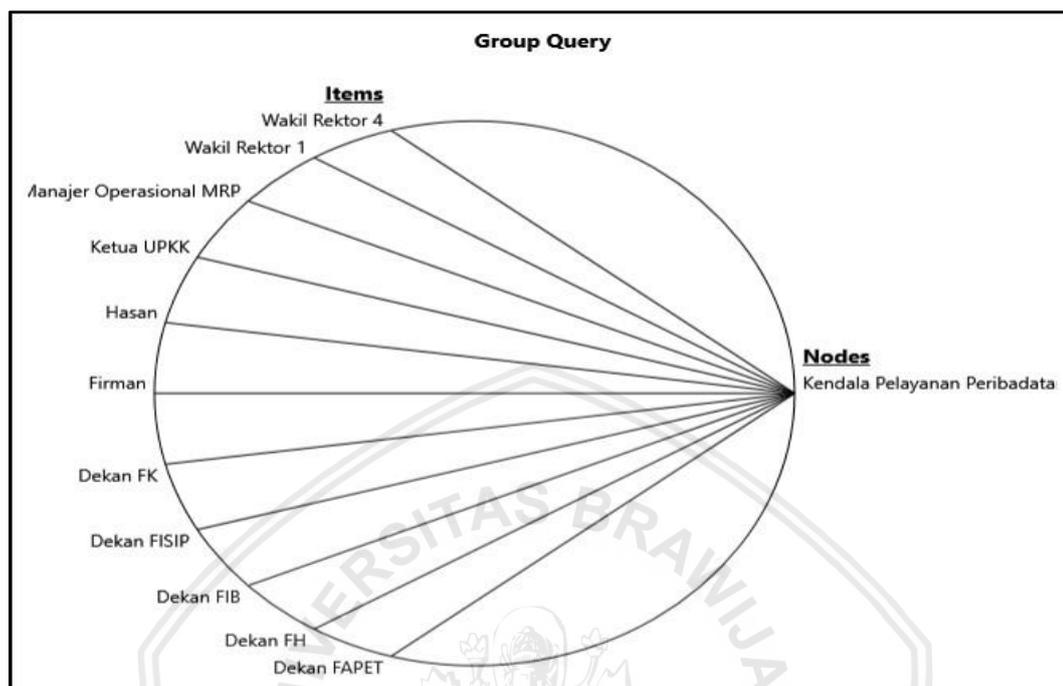
- Firman
Reference 12 - 0.26% Coverage

“Untuk kami yang difabel tuna netra ini butuh ada printer braille, lalu untuk pelayanan di perpustakaan harapannya ada pendamping tetap untuk kami dalam mencari buku-buku dan harapannya ada penyediaan scanner.”

Reference 13 - 0.10% Coverage

“Kadang ruang kelas nomornya suka berubah-ubah ini jadi menyulitkan buat saya.”

4) Kendala Pelayanan Peribadatan



Gambar 16. Diagram *Group Query*, “Kendala Pelayanan Peribadatan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala pelayanan peribadatan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 16. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala pelayanan peribadatan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 13 references coded [2.21% Coverage]

- Dekan FAPET
Reference 1 - 0.10% Coverage

“Sejauh ini bisa dikatakan kurang untuk penyedia bahasa isyarat di masjid-masjid.”

- Dekan FH
Reference 2 - 0.14% Coverage

“Saya rasa institusi pemerintah untuk perihal peribadatan belum sampai ke sana (mencoba memfasilitasi –red).”

- Dekan FIB

Reference 3 - 0.28% Coverage

“Sepertinya di Masjid Raden Patah itu (interpreter) tidak ada ya, apalagi di mushola-mushola, saya kira ini menarik ya. Insya Allah saya akan sampaikan ke teman-teman (Takmir) Masjid Raden Patah untuk menjadi perhatian.”

- Dekan FISIP

Reference 4 - 0.20% Coverage

“Kalau harus di-cover oleh takmir (penyediaan interpreter) saat ini kami belum mampu, tapi kalau ada inisiatif dari PSLD untuk memfasilitasi ya kami senang saja”

- Dekan FK

Reference 5 - 0.21% Coverage

“Kalau sekedar ramp saja sudah ada ya, untuk interpreter (dalam kegiatan peribadatan) ini belum ada ya di Brawijaya. Idealnya kita adakan, walau berapa pun yang difabel.”

- Firman

Reference 6 - 0.08% Coverage

“Alquran braille masih terbatas dan interpreter juga belum ada.”

- Hasan

Reference 7 - 0.17% Coverage

“Aksesnya masih kurang (untuk difabel beribadah di Masjid Raden Patah) harusnya ditambahin contohnya layar (subtitle-nya) sama penerjemah.”

Reference 8 - 0.11% Coverage

“Terus masjid harus ada proyektor soalnya kalo ceramahnya dari ngomong doang gak paham.”

- Ketua UPKK
Reference 9 - 0.22% Coverage

“Saya saat Jumatan biasanya di Masjid Raden Patah, jarang saya lihat ada yang difabel. Sehingga untuk adanya penyedia bahasa isyarat saya malah seringnya melihat ketika di TV.”

- Manajer Operasional MRP
Reference 10 - 0.15% Coverage

“Kami kesulitan mengadakan penerjemah bahasa isyarat, harapan kami dari PSLD bisa membantu (menyediakan interpreter).”

Reference 11 - 0.32% Coverage

“Kadang mereka tidak ada yang mendampingi (ketika di Masjid Raden Patah), padahal mereka juga memiliki hak yang sama (untuk) mengikuti kajian-kajian di Masjid Raden Patah ini, yang mungkin itu merupakan bagian dari pendidikan agama juga menurut saya.”

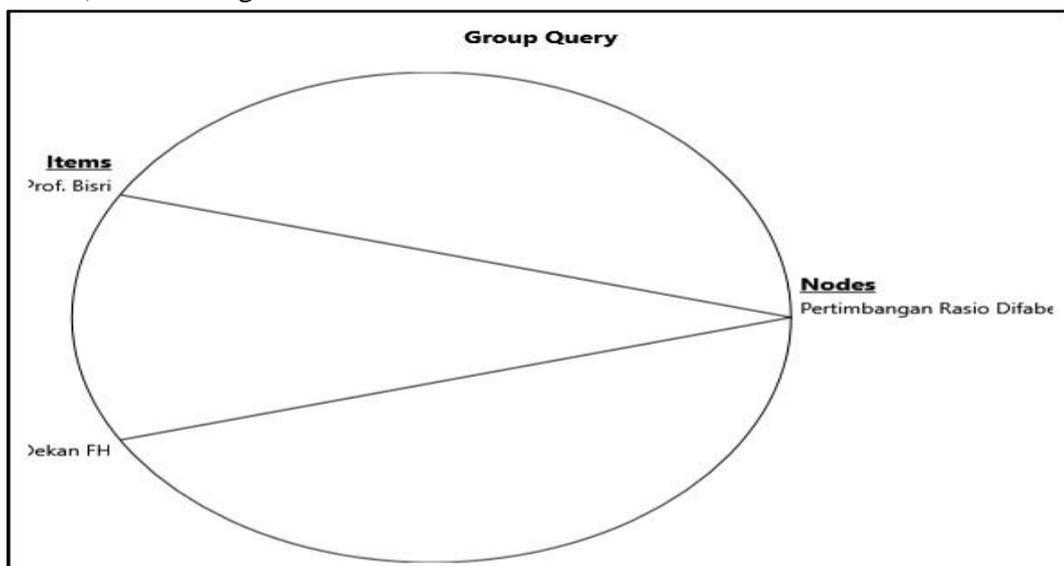
- Wakil Rektor 1
Reference 12 - 0.11% Coverage

“Saya kurang tahu apakah sejauh ini sudah ada diskusi untuk penyediaan itu atau belum.”

- Wakil Rektor 4
Reference 13 - 0.11% Coverage

“Biasanya baru beberapa kajian ceramah sih saya melihatnya ada penerjemah bahasa isyarat.”

5) Pertimbangan Rasio Difabel



Gambar 17. Diagram *Group Query*, “Pertimbangan Rasio Difabel”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori pertimbangan rasio difabel dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 17. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait pertimbangan rasio difabel antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 5 references coded [1.29% Coverage]

- Prof. Bisri

Reference 1 - 0.20% Coverage

“Harus dilihat dulu mungkin ketika khutbah Jumat apakah ada yang difabel (tuna rungu/tuli) atau tidak. Kalau gak ada kan sayang mubazir, meskipun itu perlu juga.”

Reference 2 - 0.12% Coverage

“Tidak sering dibahas karena jumlahnya (mahasiswa difabel) tidak signifikan dibanding yang normal.”

- Dekan FH

Reference 3 - 0.13% Coverage

“Belum pernah ada bahasan mengenai hal tersebut, karena kalau di FH sendiri jumlahnya yang masih sedikit.”

Reference 4 - 0.38% Coverage

“Kalau yang dapat membuat disegerakan (penyediaan fasilitas difabel – red) ya butuh ada regulasi. Problem-nya regulasi adalah monitoring (implementasinya), monitoring akan mudah jika ada kesadaran, kesadaran juga dibangun dari adanya kebutuhan, berarti harus semakin banyak difabel yang diterima disini.”

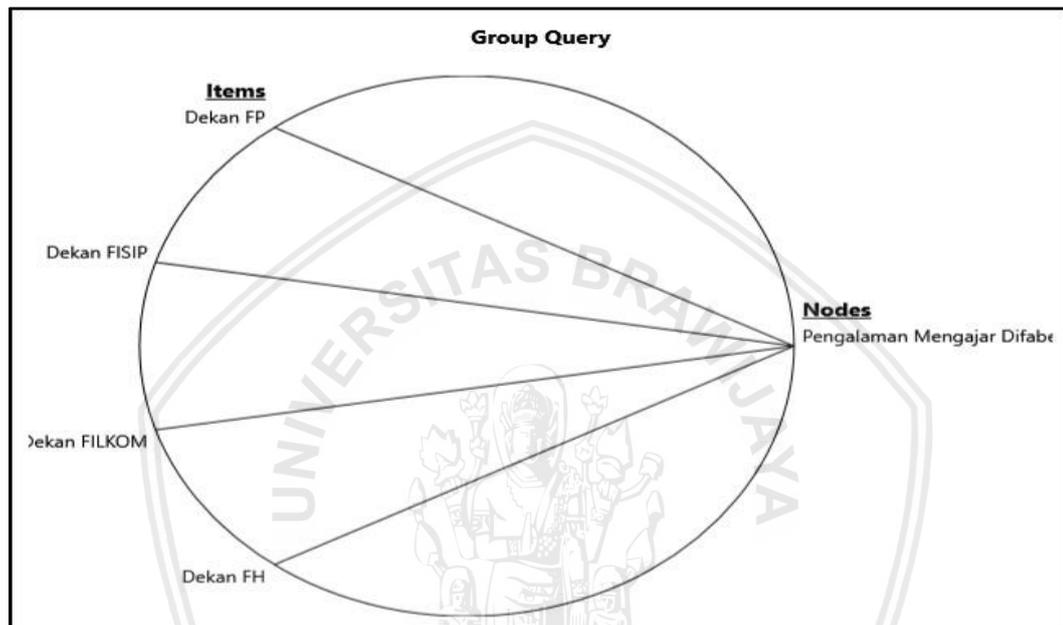
Reference 5 - 0.45% Coverage

“Ingin kami memfasilitasi seluruh difabel, tapi karena selama ini jumlahnya kan belum banyak itu akan menjadi tidak efektif kalau diselenggarakan masing-masing fakultas. Resource yang kita sediakan jadi tidak bermanfaat, misalnya diwajibkan dosen untuk mengikuti

pelatihan bahasa isyarat namun ternyata tidak ada mahasiswa tuna rungu di fakultas tersebut.”

d. Proses Belajar Mengajar

1) Pengalaman Mengajar Difabel



Gambar 18. Diagram *Group Query*, “Pengalaman Mengajar Difabel”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori pengalaman mengajar difabel dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 18. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait pengalaman mengajar difabel antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 4 references coded [0.55% Coverage]

- Dekan FH
Reference 1 - 0.11% Coverage

“Saya pernah ngajar di satu kelas ada yang difabel entah low vision atau totally blind.”

- Dekan FILKOM
Reference 2 - 0.18% Coverage

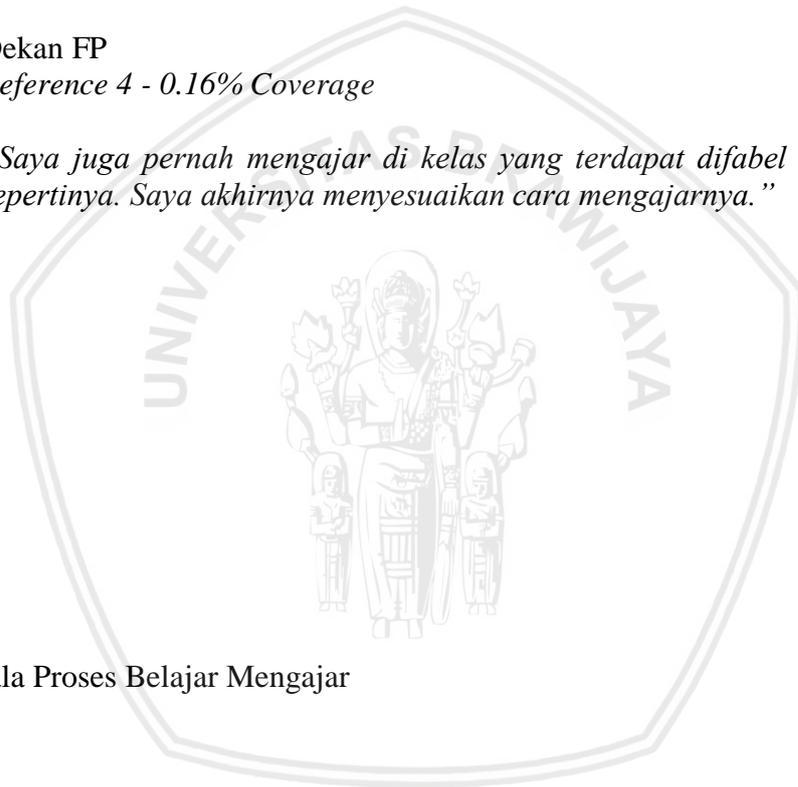
“Saya pernah ngajar selama di sini (FILKOM –red) dua kali mahasiswa difabel, jenisnya tuna wicara, jadi saat mengajar saya harus menyesuaikan.”

- Dekan FISIP
Reference 3 - 0.10% Coverage

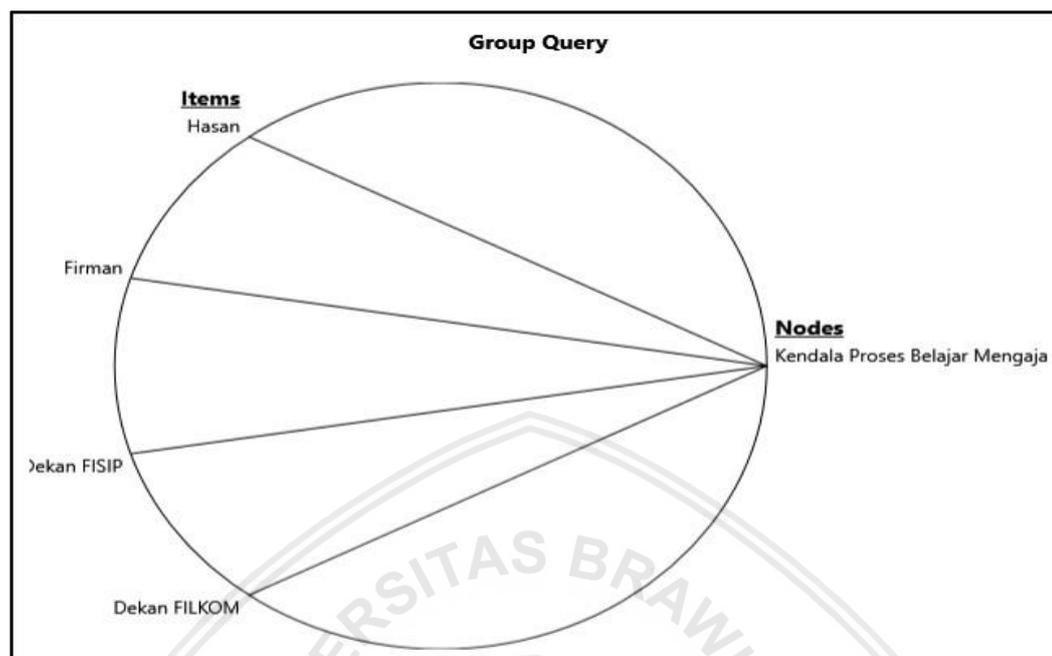
“Saya memiliki kelas yang terdapat penyandang difabel baik di FEB maupun di FISIP.”

- Dekan FP
Reference 4 - 0.16% Coverage

“Saya juga pernah mengajar di kelas yang terdapat difabel tuna rungu sepertinya. Saya akhirnya menyesuaikan cara mengajarnya.”



2) Kendala Proses Belajar Mengajar



Gambar 19. Diagram *Group Query*, “Kendala Proses Belajar Mengajar”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala proses belajar mengajar dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 19. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala proses belajar mengajar antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 5 references coded [1.33% Coverage]

- Hasan
Reference 1 - 0.25% Coverage

“Dulu gak paham dosen ngajar apa, terus (pernah) sebetulnya dosen manggil-manggil aku lewat list absensi, aku gak paham kalau dipanggilin jadi butuh ditulis (di papan) supaya paham kalau lewat tulisan.”

Reference 2 - 0.49% Coverage

“Waktu awal aku ngajuin dosen pembimbing skripsi, namanya Bu Sunarti, beliau bilang kalau gak bisa bahasa isyarat dan minta aku untuk cari dosen pembimbing yang lain tapi aku gak mau, aku maunya sama ibu, aku bilang ibu belajar aja komunikasinya gak usah takut gak usah ragu-ragu,

akhirnya ibunya terima. Berapa kali ketemu sekitar 3 kali ketemu akhirnya udah biasa ibunya bahasa isyarat.”

- Firman
Reference 3 - 0.06% Coverage

“Buku-buku digital beberapa masih terbatas.”

- Dekan FILKOM
Reference 4 - 0.26% Coverage

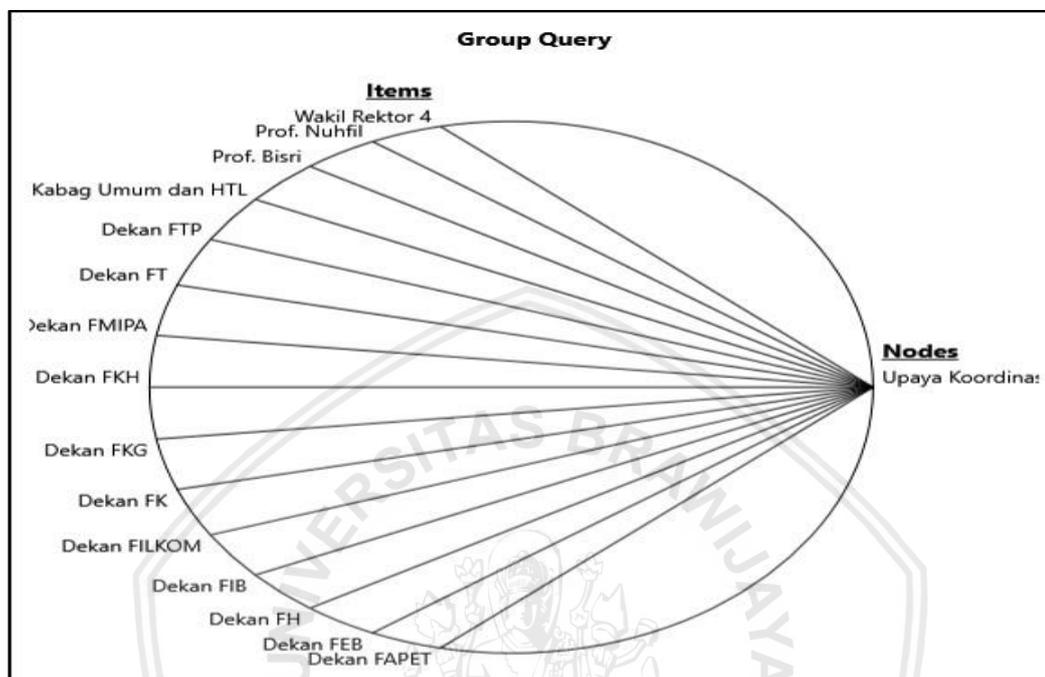
“Pusat Studi Layanan Disabilitas buka lowongan bagi mahasiswa untuk jadi volunteer , mereka ikut di kelas saya katanya pernah dilatih di sana (PSLD –red), cuma untuk dosen kayaknya belum (pernah dilatih).”

- Dekan FISIP
Reference 5 - 0.28% Coverage

“Terkait membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru (difabel) pernah, tapi terkait desain kurikulum atau implikasi proses pembelajaran memang selama saya menjabat selama 3 tahun (menjadi Dekan FISIP UB) itu belum pernah.”

e. Interaksi

1) Upaya Koordinasi



Gambar 20. Diagram *Group Query*, “Upaya Koordinasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori upaya koordinasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 20. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait upaya koordinasi antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 16 references coded [3.78% Coverage]

- Dekan FH
Reference 1 - 0.14% Coverage

“Sudah ada upaya tapi kadang saya melihat belum menjadi isu central, ini kan gambaran besar Indonesia juga begitu.”

Reference 2 - 0.10% Coverage

“Selama saya rapim (rapat pimpinan) 2 kali, belum ada bahasan mengenai itu.”

- Dekan FAPET
Reference 3 - 0.09% Coverage

“Pembahasannya biasanya cukup 1-2 kali dalam setahun di rapat pimpinan.”
- Dekan FEB
Reference 4 - 0.12% Coverage

“Sepertinya ada di bahasan rapat pimpinan tapi kok mungkin saat saya tidak diundang mungkin ya.”
- Dekan FIB
Reference 5 - 0.37% Coverage

“Secara spesifik kalau di FIB kami selalu diskusikan (membahas inklusivitas difabel), dosen-dosen sering mengeluh juga karena ingin membantu tetapi mereka tidak punya kemampuan (untuk melayani difabel). Selalu kami upayakan untuk menghubungkan dosen, mahasiswa difabel, dan interpreter di FIB ini.”
- Dekan FILKOM
Reference 6 - 0.36% Coverage

“Kayaknya (ini) jadi masalah, biasanya kalau di rapat pimpinan lebih (membahas) ke kebijakan umum melalui rektor dan dekan. Contoh paling kami hanya membahas difabel ini bisa diterima atau tidak..oke bisa, kemudian jenisnya apa saja, nah sudah. Untuk hal yang lebih teknis dibahas di WD 1.”
- Dekan FK
Reference 7 - 0.21% Coverage

“UB sudah membuat PSLD, sudah ada niat ke situ untuk mengawali. Dulu saat saya jadi WD (Wakil Dekan) 1 pernah ada pembahasan perihal penerimaan mahasiswa difabel saja.”
- Dekan FKH
Reference 8 - 0.12% Coverage

“Ada pembahasan di rapat pimpinan tapi tidak sering, hanya sebatas penerimaan mahasiswa difabel.”

- Dekan FMIPA

Reference 9 - 0.13% Coverage

“Sering ada pembahasan tentang inklusivitas sebagian besar hanya ketika penerimaan mahasiswa difabel.”

- Dekan FT

Reference 10 - 0.22% Coverage

“Saya jujur saja tidak banyak ruang untuk membahas ini (inklusivitas terhadap difabel) di level pimpinan. Ini dibahas ketika syarat masuk (penerimaan mahasiswa difabel) saja.”

- Dekan FTP

Reference 11 - 0.39% Coverage

“Yang saya dapat informasi dari WD 1 saya, di bawah Wakil Rektor 1 dengan seluruh WD 1 sudah ada pembahasan untuk memfasilitasi teman-teman yang difabel pada level mana dia bisa ikut di program studi, mungkin kalau di (fakultas rumpun) sosial saya kira sudah semua karena tidak ada kendala di laboratorium.”

- Kabag Umum dan HTL

Reference 12 - 0.23% Coverage

“Kita selalu koordinasi semisalnya kalau perbaikan trotoar (agar lebih accessible), ada Pak Rektor, ada PSLD, selalu bekerjanya seperti itu kita harus mengajak unit yang juga mengurus.”

- Prof. Bisri

Reference 13 - 0.30% Coverage

“Pernah ada pembahasan di rapat pimpinan tapi tidak sering. Pernah saat itu untuk menyiapkan infrastruktur, saya sampaikan di semua fakultas harus sudah mulai disiapkan ramp. Penyediaan mobil juga (untuk mobilisasi difabel di UB) sudah.”

- Prof. Nuhfil

Reference 14 - 0.31% Coverage

“Pada saat Rapim (Rapat Pimpinan) tidak pernah secara spesifik membahas tentang isu difabel. Tapi saya selalu pesankan ke dekan-dekan untuk memperhatikan (difabilitas) termasuk sarana-prasarananya karena itu wajib dalam standar internasional.”

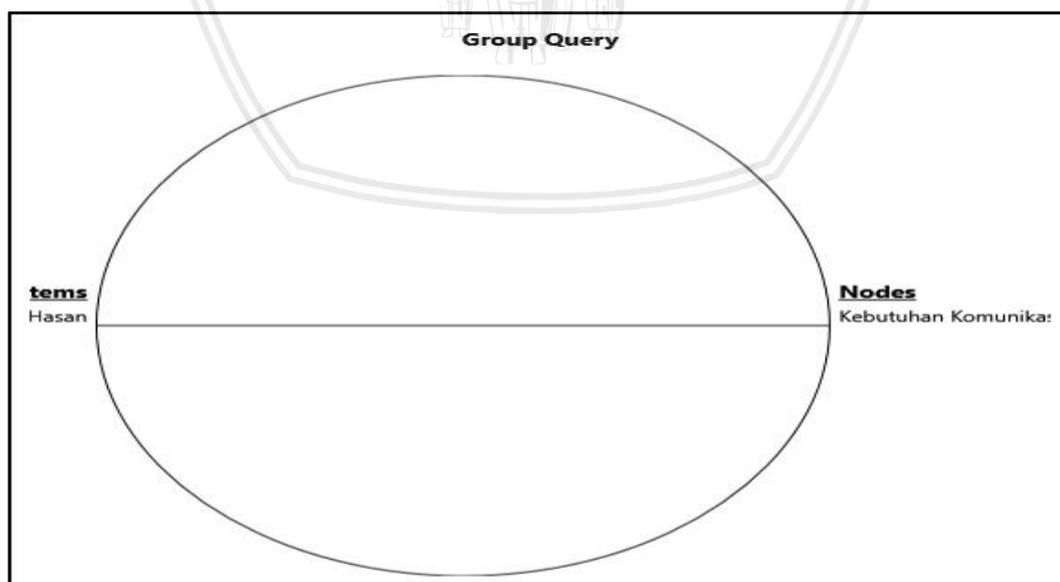
- Wakil Rektor 4
Reference 15 - 0.46% Coverage

“Sering ada pembahasan di rapat pimpinan terkait inklusivitas. Saya saat jadi WR (Wakil Rektor) yang (periode) pertama itu, kebetulan beberapa perguruan tinggi mengajak kerjasama untuk mengelola (mahasiswa) difabel. Jadi kita dipandang oleh universitas lain lebih baik dari mereka, tetapi saya sendiri terus terang saja belum puas dengan kondisi (inklusivitas) kita.”

- Dekan FKG
Reference 16 - 0.23% Coverage

“Pembangunan gedung-gedung FKG itu kita mengusulkan ke rektorat. Untuk instruksi dari rektorat bahwa gedung misalnya harus accessible itu belum ada, sifatnya sejauh ini bottom-up.”

2) Kebutuhan Komunikasi



Gambar 21. Diagram *Group Query*, “Kebutuhan Komunikasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

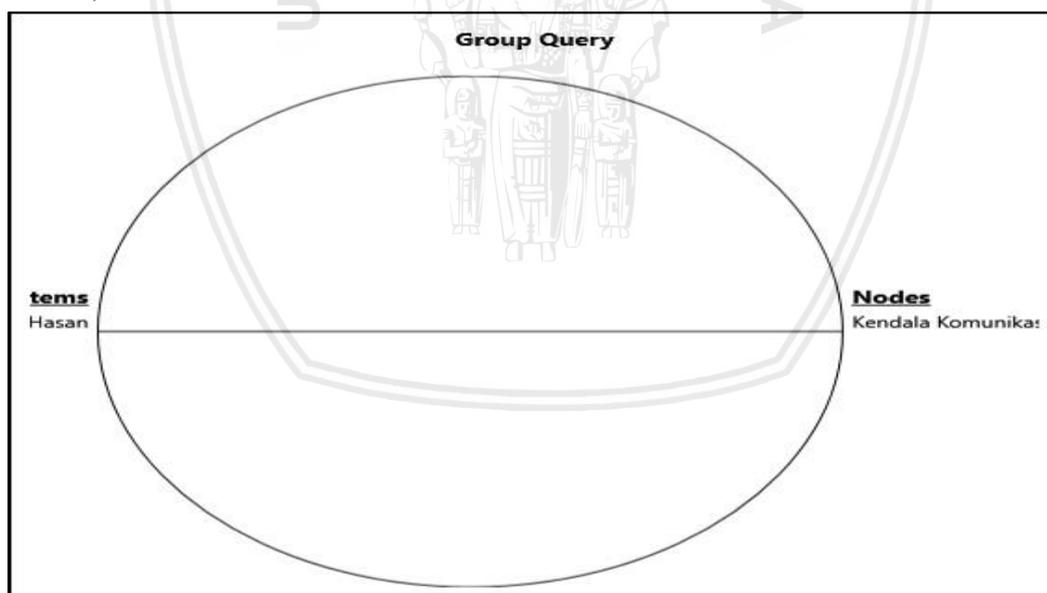
Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kebutuhan komunikasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 21. Berikut ungkapan dari partisipan terkait kebutuhan komunikasi antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 1 reference coded [0.26% Coverage]

- Hasan
Reference 1 - 0.26% Coverage

“Dulu pengalaman ketemu difabel yang macem-macem gak cuma tuli aja, jadi berusaha untuk komunikasi. Karena penting banget komunikasi, kayak buat belajar kuliah, sama tentang organisasi jadinya latihan banyak.”

3) Kendala Komunikasi



Gambar 22. Diagram *Group Query*, “Kendala Komunikasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

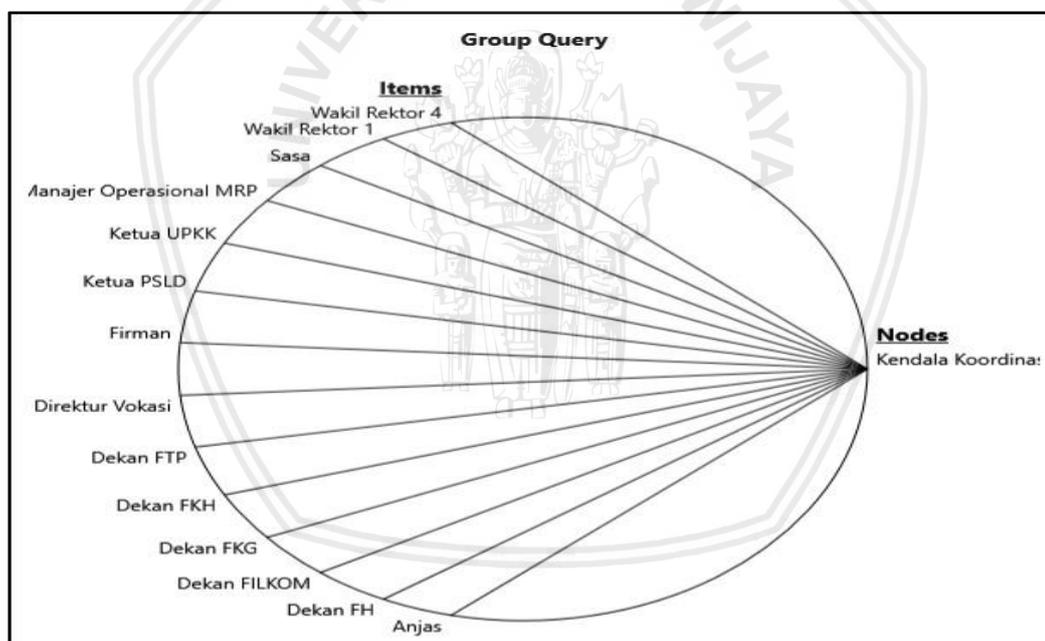
Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala komunikasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 22. Berikut ungkapan dari partisipan terkait kendala komunikasi antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 1 reference coded [0.53% Coverage]

- Hasan
Reference 1 - 0.53% Coverage

“Dulu pertama kali kenal sama tuli, tapi beda komunikasinya sebab budaya tulinya kan beda-beda jadinya interaksinya beda, kan ada Jawa, Madura, Kalimantan. Kedua ketemu (pengguna) kursi roda namanya Rara, selalu fokus ke mulut dia bagus. Dia ngobrolnya pakai (pengucapan) suara dan isyarat, gampang ngerti jadinya. Kalau sama yang tuna netra susah banget komunikasinya jadi butuh pendamping komunikasi antara aku sama dia.”

4) Kendala Koordinasi



Gambar 23. Diagram *Group Query*, “Kendala Koordinasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala koordinasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 23. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala koordinasi antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 18 references coded [4.55% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.14% Coverage
“Upaya dari pimpinan fakultas untuk mengadakan forum diskusi dengan teman-teman difabel pun juga belum ada.”
Reference 2 - 0.35% Coverage
“Kalau dari rektorat itu mungkin masih sebatas pembangunan infrastruktur, saya belum menemukan adanya audiensi seperti misalnya saat penerimaan mahasiswa difabel yang terjadi penolakan di berbagai fakultas, belum ada klarifikasi bahkan sampai ditutupnya program penerimaan itu.”
- Dekan FKH
Reference 3 - 0.11% Coverage
“Saya kurang tahu apakah sejauh ini sudah ada diskusi untuk penyediaan itu atau belum.”
Reference 4 - 0.12% Coverage
“Belum ada koordinasi selama ini dari UPKK sejak saya menjadi dekan baik di FTP maupun FKH.”
Reference 5 - 0.12% Coverage
“Saya tidak tahu apa (rancangan kerja) yang sudah disusun oleh PSLD terhadap undang-undang ini.”
- Dekan FH
Reference 6 - 0.13% Coverage
“Belum pernah ada bahasan mengenai hal tersebut, karena kalau di FH sendiri jumlahnya yang masih sedikit.”
- Ketua PSLD
Reference 7 - 0.36% Coverage
“Pernah kita mengadakan FGD (Forum Group Discussion) dengan para pemberi kerja misalkan apa saja persyaratan yang diperlukan. Kita juga mengadakan coaching melamar pekerjaan. Kalau dengan UPKK kami

belum punya mekanisme formal (sinergitas memfasilitasi karir mahasiswa difabel –red).”

- **Direktur Vokasi**

Reference 8 - 0.11% Coverage

“Saya kurang mendengar kalau di rapat pimpinan membahas ini, frekuensinya masih kurang.”

Reference 9 - 0.29% Coverage

“Pembahasan di rapat pimpinan ada tapi tidak sering. Menurut saya begini, tidak mesti ketika ada masalah baru dibahas. Ya..kita jemput bola sajalah, kita support apa-apa saja kegiatan difabel. Tidak mesti bottom-up ya juga top-down.”

- **Dekan FILKOM**

Reference 10 - 0.26% Coverage

“Pusat Studi Layanan Disabilitas buka lowongan bagi mahasiswa untuk jadi volunteer , mereka ikut di kelas saya katanya pernah dilatih di sana (PSLD –red), cuma untuk dosen kayaknya belum (pernah dilatih).”

- **Dekan FKG**

Reference 11 - 0.28% Coverage

“Selama saya menjadi dekan baik rektor yang sekarang (Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, A.R., MS.) maupun rektor sebelumnya (Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS.) belum pernah setiap kali rapat pimpinan berbicara mengenai difabel.”

- **Ketua UPKK**

Reference 12 - 0.39% Coverage

“Tidak setiap rapat pimpinan UPKK dilibatkan, tidak selalu, kecuali memang itu bersentuhan dengan tupoksi dari UPKK. Sejauh ini kami tidak pernah dilibatkan untuk membahas difabilitas itu, tetapi untuk rapim-rapim yang membahas anggaran lalu barangkali (membahas) OTK (Organisasi dan Tata Kerja) sudah sering.”

- **Dekan FTP**

Reference 13 - 0.19% Coverage

“Saya belum dapat informasi yang cukup apakah ke depan UB akan merencanakan infrastruktur dan fasilitas yang mendekati sempurna untuk teman-teman difabel.”

- Firman

Reference 14 - 0.10% Coverage

“Dulu saya pernah minta difasilitasi printer braille, sayang tidak terealisasi.”

- Manajer Operasional MRP

Reference 15 - 0.84% Coverage

“Inilah kelemahan kita, untuk pembangunan masjid semua diserahkan kepada bagian perencanaan di kantor pusat (rektorat –red) tapi tidak pernah kemudian mengajak diskusi (lebih lanjut dengan) pihak (Takmir) Masjid Raden Patah. Ini yang akhirnya membuat sering terjadi miss komunikasi, yang dampaknya kepada jamaah. Sejak awal takmir selalu mengakomodir kebutuhan jamaah baik yang difabel maupun yang sudah sepuh. Kami selalu memperhatikan fasilitas wudhu, bahkan pilihan keramik yang aman kami perhatikan. Kami diskusikan kepada rektorat mereka sudah menerima, tetapi ketika praktik di lapangan sama sekali tidak berjalan bahkan melenceng jauh dari yang kita usulkan.”

Reference 16 - 0.48% Coverage

“Sebenarnya harus ada komunikasi yang baik, ketika kami sudah melayangkan usulan (fasilitas yang ramah difabel) kemudian sudah disetujui mbok ya langsung direalisasikan. Jangan kemudian hanya gara-gara proyek masjid mendadak, tendernya mendadak, kemudian garapnya mendadak akhirnya “aduh gak sempat”, itulah jawaban yang sering kami dapatkan sehingga usulan-usulan kami mentah.”

- Sasa

Reference 17 - 0.11% Coverage

“Aku baru denger ada yang namanya UPKK (Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan).”

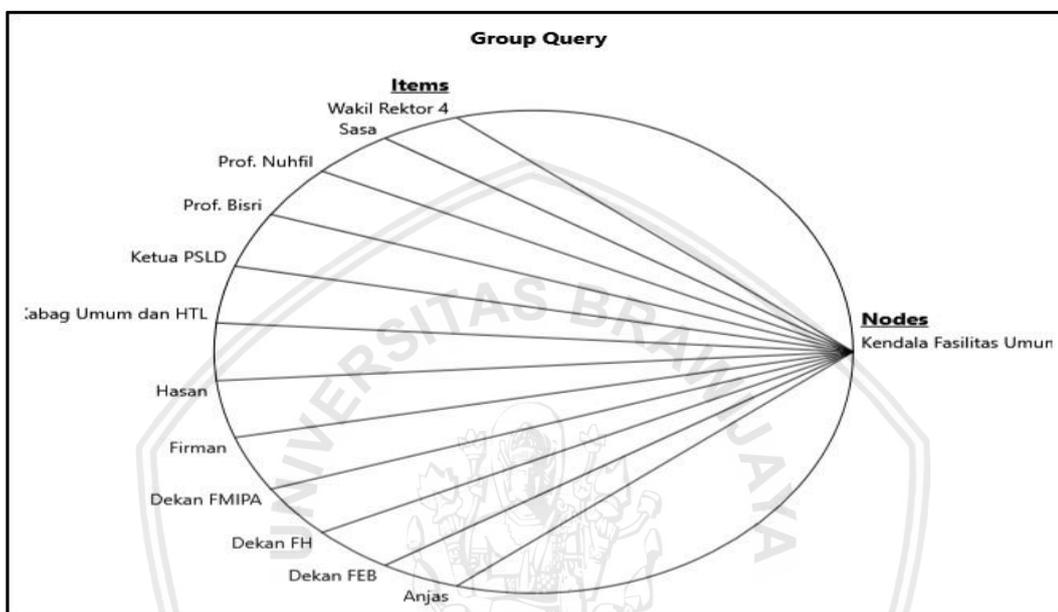
- Wakil Rektor 4

Reference 18 - 0.18% Coverage

“Semua perencanaan itu di sini (rektorat), tapi ketika dilelang, dieksekusi, itu mereka. Itu yang kesulitan kita, miss-nya di implementasinya.”

f. Infrastruktur

1) Kendala Fasilitas Umum



Gambar 24. Diagram *Group Query*, “Kendala Fasilitas Umum”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala fasilitas umum dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 24. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala fasilitas umum antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 22 references coded [4.50% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.13% Coverage

“Untuk di FILKOM seperti toilet khusus juga belum ada, yang sekarang ini saja sangat sempit untuk diakses.”

Reference 2 - 0.97% Coverage

“Guiding block itu masih belum ada untuk tuna netra, jadi mereka selalu butuh pendamping.”

- Dekan FEB
Reference 3 - 0.26% Coverage

“Ya memang kita seperti toilet khusus difabel saja masih belum ada. Saya rasa tekanan dengan adanya standar penilaian internasional akan mempercepat pembangunan UB menjadi lebih mengakomodir kebutuhan difabel”

- Dekan FH
Reference 4 - 0.33% Coverage

“Ada peraturan misalnya untuk gedung yang kurang dari 4 lantai tidak boleh ada lift, bisa saja diadakan tapi kan pertanggungjawaban anggarannya nanti yang jadi masalah. Antar peraturan saja belum sinkron, sehingga menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.”

- Dekan FMIPA
Reference 5 - 0.31% Coverage

“Kendalanya memang gedung kita itu dibangun sebelum ada peraturan-peraturan ini, jadi seperti saya dulu belum ada bayangan membangun yang dapat memberi akses (bagi difabel). Kultur kita masih gagap dengan inklusivitas kepada (kebutuhan) difabel ini.”

- Firman
Reference 6 - 0.11% Coverage

“Kalau guiding block masih sangat kurang ya, kalau ramp sudah ada tapi belum banyak.”

Reference 7 - 0.10% Coverage

“Aksesibilitas trotoarnya sangat sulit, apalagi kalau untuk menyeberang.”

- Kabag Umum dan HTL
Reference 8 - 0.19% Coverage

“Kalau di Brawijaya kan (misal) dibuat persentase difabelnya masih sedikit, tapi Alhamdulillah masih bisa terpenuhi fasilitasnya meskipun masih kurang.”

- Ketua PSLD
Reference 9 - 0.32% Coverage

“Ada beberapa gedung (fakultas) yang memang tidak menerapkan dengan alasan karena tidak menerima (peserta didik) difabel. Padahal kan ya yang normal pun bisa tiba-tiba kecelakaan (akhirnya jadi difabel). Masih ada beberapa pimpinan yang berfikir begitu.”

Reference 10 - 0.23% Coverage

“Seperti jalan saja itu kayak gini (mudah diakses hanya bagi non-difabel –red), tapi kita tidak memikirkan bahwa ada teman-teman lain yang berhak untuk mendapatkan fasilitas itu juga.”

- Prof. Bisri
Reference 11 - 0.33% Coverage

“Saya yang sampai saat ini ganjel itu yang di lift. Lift itu kalau teman-teman naik gak ada informasi sudah di lantai berapa, harusnya misalnya sudah sampai di lantai 6, di lantai 6 itu ada apa saja, lalu semisalnya difabelnya tidak mendengar (tuna rungu/tuli).”

- Prof. Nuhfil
Reference 12 - 0.35% Coverage

“Secara spesifik UB tidak ada master plan untuk mengarah ke hal tersebut, tapi kita sudah mulai perhatikan ke arah sana (inklusif) untuk toilet, lift, meskipun kendalanya ada beberapa fasilitas yang sudah kadung (belum inklusif), tetap kita akan mengarah ke sana (inklusif).”

- Hasan
Reference 13 - 0.24% Coverage

“Trotoar dan ramp masih kurang, lalu juga untuk tuli contohnya kayak petunjuk simbol (masih kurang), pernah dulu diomelin sama tukang parkir harus nunjukin STNK waktu parkir aku gak ngerti.”

Reference 14 - 0.25% Coverage

“Kalau cari toilet kadang suka susah (yang accessible), kayak di Gedung Widyaloka kurang accessible dan gak ada lift juga. Karena ada peraturan kalau gedung yang cuma 2 lantai gak boleh ada lift”

- Sasa

Reference 15 - 0.13% Coverage

“Kalau mau sholat dzuhur misalnya jadi selalu hubungi mama minta di anter ke PSLD dulu, karena jauh.”

Reference 16 - 0.15% Coverage

“Pernah dosen lupa waktu entah UTS atau UAS aku malah dapat ruangnya di lantai 2 gedung lama yang belum ada liftnya.”

Reference 17 - 0.27% Coverage

“Waktu pertama kali masuk sini tuh (FMIPA –red) gedungnya tangga semua, aku kalau kuliah di Gedung MC (MIPA Center). Karena aku mahasiswa yang pakai kursi roda setelah aku bilang ke orang-orang akhirnya dibuat ramp.”

Reference 18 - 0.11% Coverage

“Aku kalau ke lab komputer gitu di (Gedung) Graha Sainia, sulitnya ini belum ada ramp.”

Reference 19 - 0.05% Coverage

“Banyak bangunannya belum ada ramp.”

Reference 20 - 0.06% Coverage

“Toilet khusus (untuk difabel) juga gak ada.”

Reference 21 - 0.05% Coverage

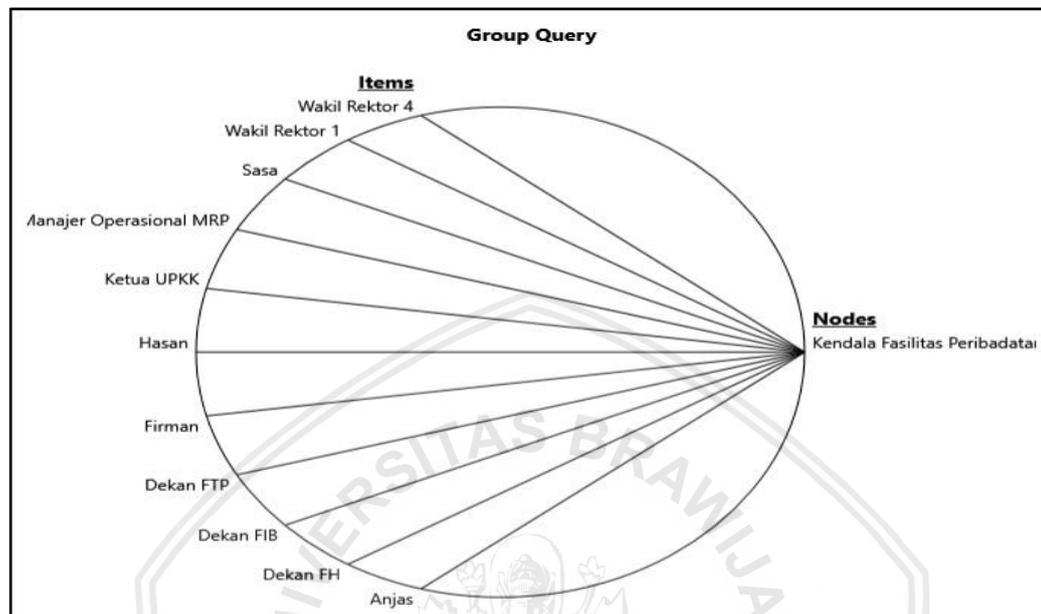
“Trotoarnya juga belum well connected.”

- Wakil Rektor 4

Reference 22 - 0.44% Coverage

“Jujur saya masih belum puas (terhadap UB), masih banyak yang harus diperbaiki. Sederhana saja semisal untuk tuna rungu, lift kita belum ada yang bunyi (pemberian informasi berupa audio, contoh: posisi sudah di lantai berapa –red), terus untuk tuna daksa jalannya belum (accessible), lalu untuk tuna netra trotoar kita belum (terdapat guiding block).”

2) Kendala Fasilitas Peribadatan



Gambar 25. Diagram *Group Query*, “Kendala Fasilitas Peribadatan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala fasilitas peribadatan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 25. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala fasilitas peribadatan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 18 references coded [3.50% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.25% Coverage

“Saya melihat di MRP saja masih belum accessible ya untuk saya sendiri. Masih terlalu banyak tangga dan untuk yang tempat wudhunya saja itu kan ada kolam ya, kolamnya tidak ramah untuk difabel lewati.”

Reference 2 - 0.19% Coverage

“Mungkin karena regulasi dipegang penuh oleh Rektorat, jadinya untuk adanya bidang miring untuk akses ke MRP belum ada karena kendala dieksekusinya.”

Reference 3 - 0.08% Coverage

“Kontur keramiknya di tempat wudhu juga masih terlalu licin ya.”

- Dekan FH

Reference 4 - 0.14% Coverage

“Saya rasa institusi pemerintah untuk perihal peribadatan belum sampai ke sana (mencoba memfasilitasi –red).”

- Dekan FIB

Reference 5 - 0.19% Coverage

“Masih relatif terbatas (fasilitas peribadatan –red), tetapi ya konsekuensi karena sudah menerima teman-teman (difabel) itu, maka harus diupayakan.”

- Dekan FTP

Reference 6 - 0.19% Coverage

“Saya kurang tahu untuk tempat wudhu, toilet, dan semacamnya apa sudah diakomodasi atau tidak. Mungkin belum kayaknya ya toilet khusus yang difabel.”

- Firman

Reference 7 - 0.11% Coverage

“Ada tempat-tempat tertentu yang masih berbahaya (kurang accessible – red) kalau di MRP.”

- Hasan

Reference 8 - 0.17% Coverage

“Aksesnya masih kurang (untuk difabel beribadah di Masjid Raden Patah) harusnya ditambahin contohnya layar (subtitle-nya) sama penerjemah.”

Reference 9 - 0.16% Coverage

“Tempat wudhunya licin, takutnya sulit untuk yang tuna daksa sama yang tuna netra. Untuk (pengguna) kursi roda juga belum akses.”

- Ketua UPKK

Reference 10 - 0.15% Coverage

“Terkait sarana prasarana (yang ramah difabel) di Masjid Raden Patah kok belum ada ya, masih banyak trap-trap saja.”

- Sasa

Reference 11 - 0.15% Coverage

“Aku aja gak pernah sholat di MIPA, pasti selalu di PSLD. Musholla di MIPA jalannya sempit banget dan ramp-nya curam.”

Reference 12 - 0.15% Coverage

“Kalau MRP (Masjid Raden Patah) pernah nanya temen kalau di sana tangga semua (aksesnya), jadi gak pernah sholat di sana.”

Reference 13 - 0.09% Coverage

“Susah (nyari) masjid yang akses (mudah dimasuki –red), tangga semua.”

- Wakil Rektor 1

Reference 14 - 0.11% Coverage

“Saya kurang tahu apakah sejauh ini sudah ada diskusi untuk penyediaan itu atau belum.”

- Wakil Rektor 4

Reference 15 - 0.08% Coverage

“MRP (Masjid Raden Patah) aja belum (ramah) untuk tuna daksa.”

- Manajer Operasional MRP

Reference 16 - 0.84% Coverage

“Inilah kelemahan kita, untuk pembangunan masjid semua diserahkan kepada bagian perencanaan di kantor pusat (rektorat –red) tapi tidak pernah kemudian mengajak diskusi (lebih lanjut dengan) pihak (Takmir)

Masjid Raden Patah. Ini yang akhirnya membuat sering terjadi miss komunikasi, yang dampaknya kepada jamaah. Sejak awal takmir selalu mengakomodir kebutuhan jamaah baik yang difabel maupun yang sudah sepuh. Kami selalu memperhatikan fasilitas wudhu, bahkan pilihan keramik yang aman kami perhatikan. Kami diskusikan kepada rektorat mereka sudah menerima, tetapi ketika praktik di lapangan sama sekali tidak berjalan bahkan melenceng jauh dari yang kita usulkan.”

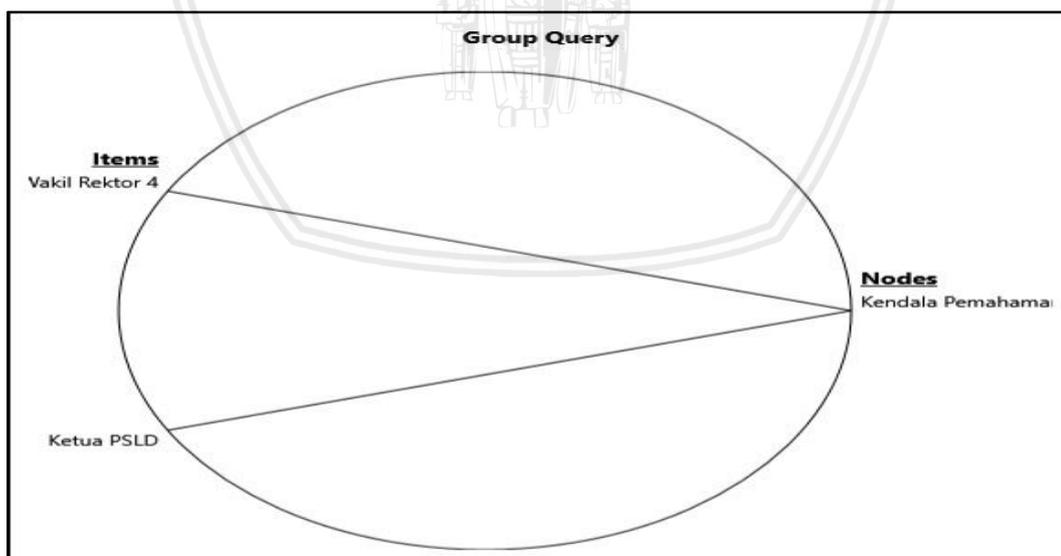
Reference 17 - 0.25% Coverage

“Inilah bedanya kita dengan Masjid Salman ITB, kalau mereka itu sudah yayasan. Jadi apa yang mereka butuhkan langsung terpenuhi sesuai usulan. Kalau kita kan tidak, semua pengadaan dari rektorat.”

Reference 18 - 0.22% Coverage

“Kami sadar toilet kami itu belum ramah difabel, jangankan difabel, untuk orang sepuh saja juga belum ramah, bahkan untuk orang normal juga belum ramah kalau menurut saya.”

3) Kendala Pemahaman



Gambar 26. Diagram *Group Query*, “Kendala Pemahaman”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kendala pemahaman dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 26. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait kendala pemahaman antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 2 references coded [0.57% Coverage]

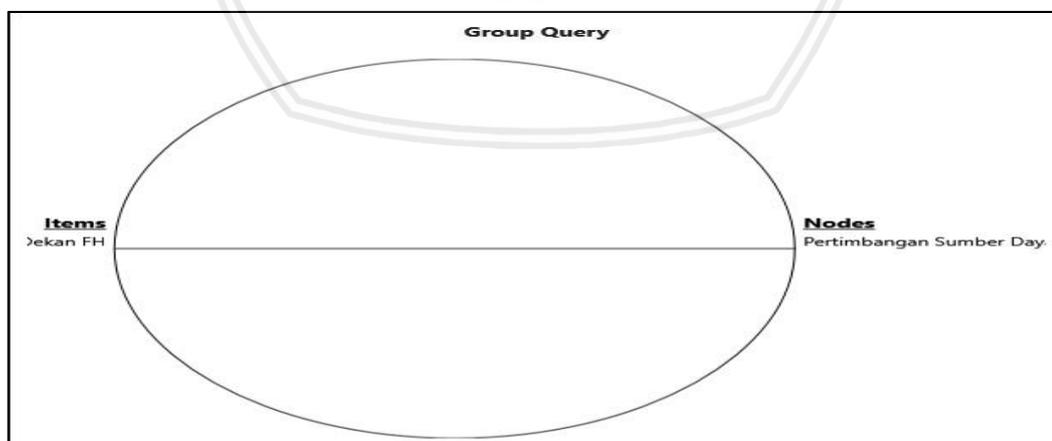
- Ketua PSLD
Reference 1 - 0.32% Coverage

“Ada beberapa gedung (fakultas) yang memang tidak menerapkan dengan alasan karena tidak menerima (peserta didik) difabel. Padahal kan ya yang normal pun bisa tiba-tiba kecelakaan (akhirnya jadi difabel). Masih ada beberapa pimpinan yang berfikir begitu.”

- Wakil Rektor 4
Reference 2 - 0.26% Coverage

“Kendala dari fakultas kurang mengikuti aturan universitas (mengenai aksesibilitas difabel –red) ya..awareness kurang. Kita mungkin masih berorientasi pada struktur, baru keindahan, yang ketiga fungsi.”

4) Pertimbangan Sumber Daya



Gambar 27. Diagram *Group Query*, “Pertimbangan Sumber Daya”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

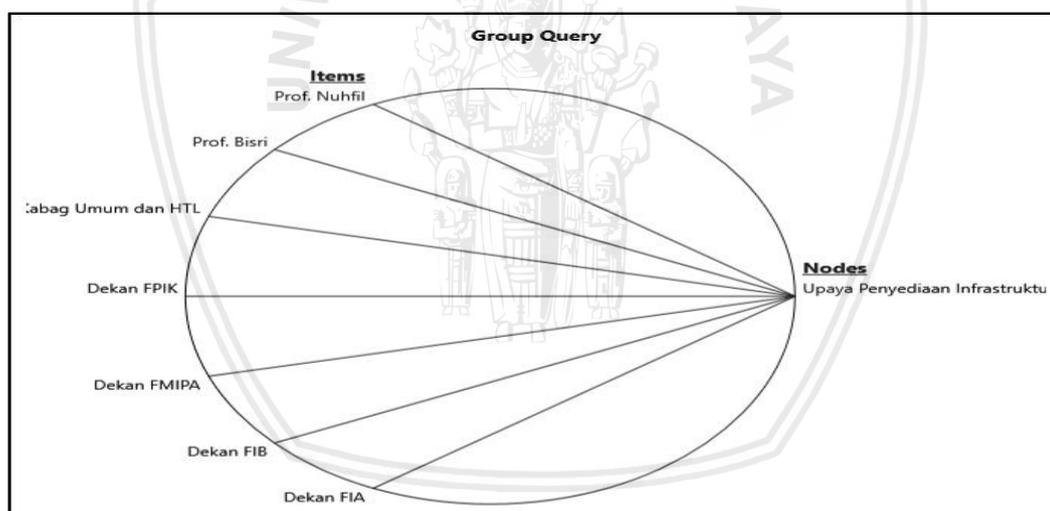
Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori pertimbangan sumber daya dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 27. Berikut ungkapan dari partisipan terkait pertimbangan sumber daya antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 1 reference coded [0.23% Coverage]

- Dekan FH
Reference 1 - 0.23% Coverage

“Kalau untuk bangunan saya rasa memang sudah harus disesuaikan dengan standar untuk memberi akses kepada difabel dan itu kan sifatnya awet, jadi sebagai resource-nya kan tidak sia-sia.”

5) Upaya Penyediaan Infrastruktur



Gambar 28. Diagram *Group Query*, “Upaya Penyediaan Infrastruktur”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori upaya penyediaan infrastruktur dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 28. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait upaya penyediaan infrastruktur antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 8 references coded [1.57%

Coverage]

- Dekan FIA

Reference 1 - 0.20% Coverage

“Prinsip saya tempat ibadah harus lebih bagus dari tempat kuliah. Ini menarik sebagai introspeksi juga untuk saya bahwa memfasilitasinya juga harus untuk difabel.”

- Dekan FIB

Reference 2 - 0.19% Coverage

“Masih relatif terbatas (fasilitas peribadatan –red), tetapi ya konsekuensi karena sudah menerima teman-teman (difabel) itu, maka harus diupayakan.”

- Prof. Bisri

Reference 3 - 0.08% Coverage

“Selama masa saya masih fokusnya pada infrastruktur masjid.”

Reference 4 - 0.30% Coverage

“Pernah ada pembahasan di rapat pimpinan tapi tidak sering. Pernah saat itu untuk menyiapkan infrastruktur, saya sampaikan di semua fakultas harus sudah mulai disiapkan ramp. Penyediaan mobil juga (untuk mobilisasi difabel di UB) sudah.”

- Dekan FMIPA

Reference 5 - 0.17% Coverage

“MIPA sudah mulai melaksanakan undang-undang itu, seperti gedung-gedung yang baru sudah mulai mengakomodasi meski gedung yang lama belum.”

- Dekan FPIK

Reference 6 - 0.21% Coverage

“Sejauh ini, Universitas Brawijaya sudah menyesuaikan kebutuhan, baik sarana maupun prasarana bagi penyandang difabel yang menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya”

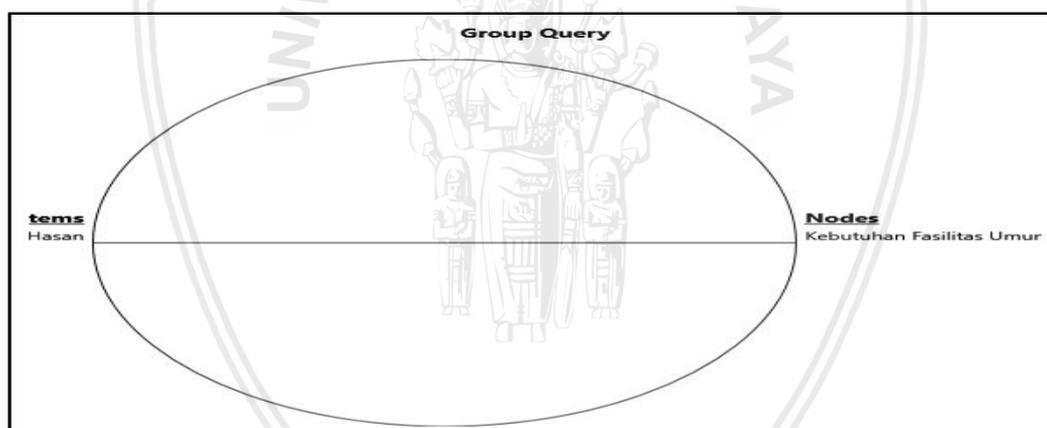
- Prof. Nuhfil
Reference 7 - 0.31% Coverage

“Pada saat Rapim (Rapat Pimpinan) tidak pernah secara spesifik membahas tentang isu difabel. Tapi saya selalu pesankan ke dekan-dekan untuk memperhatikan (difabilitas) termasuk sarana-prasarananya karena itu wajib dalam standar internasional.”

- Kabag Umum dan HTL
Reference 8 - 0.12% Coverage

“Kita untuk pembangunan sudah menggunakan zonasi yang diserahkan kepada masing-masing Dekan.”

6) Kebutuhan Fasilitas Umum



Gambar 29. Diagram *Group Query*, “Kebutuhan Fasilitas Umum”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

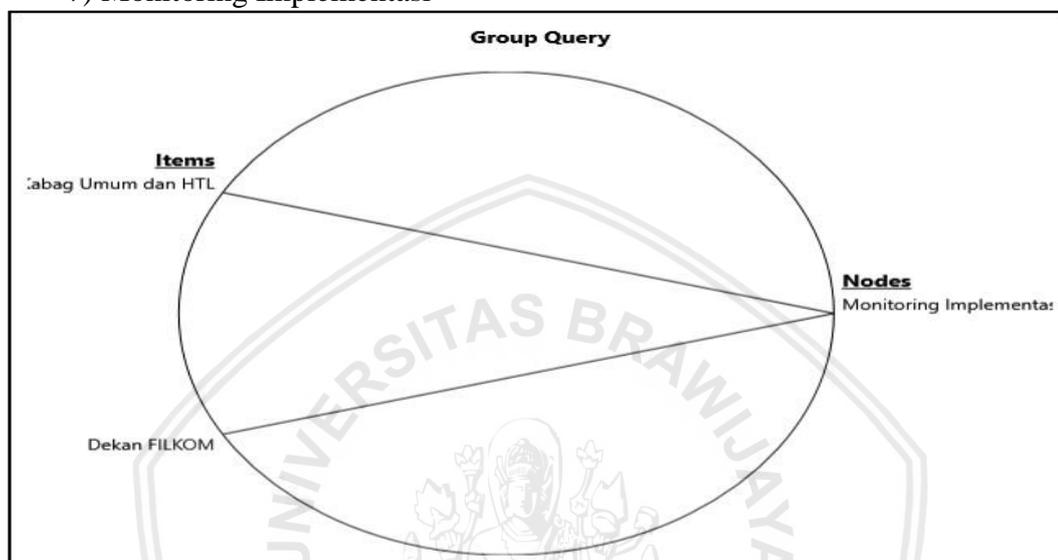
Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori kebutuhan fasilitas umum dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 29. Berikut ungkapan dari partisipan terkait kebutuhan fasilitas umum antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 1 reference coded [0.18% Coverage]

- Hasan
Reference 1 - 0.18% Coverage

“Inklusif penting banget buat akses kayak trotoar, ramp, handrail, terus kayak ada pengumuman (audio-visual), jadi penting banget untuk kehidupan.”

7) Monitoring Implementasi



Gambar 30. Diagram *Group Query*, “Monitoring Implementasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada kategori monitoring implementasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 30. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait monitoring implementasi antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 3 references coded [0.65% Coverage]

- Dekan FILKOM
Reference 1 - 0.15% Coverage

“Setiap ada pengembangan fasilitas saya meminta untuk tolong dicek standar aturan pemerintah mengenai hal tersebut.”

Reference 2 - 0.39% Coverage

“Secara implementatif saya kan gak mungkin memperhatikan satu per satu jadi saat pembangunan gedung tinggal memerintahkan ke konsultan perencana “tolong ini diperhatikan” sudah gitu aja. Nah saat rapat

penentuan baru kami tanyakan apakah sudah difasilitasi. Semua diserahkan kepada konsultan (pelaksanaannya)”

- Kabag Umum dan HTL
Reference 3 - 0.12% Coverage

“Kita kalau sampai detail ikut terlibat di pembangunan gedung yang baru misalnya, itu tidak.”

C. Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif

1. Subtema yang Ditemukan dalam Tema



Gambar 31. Skema Model Subtema pada Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif (Tema)

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

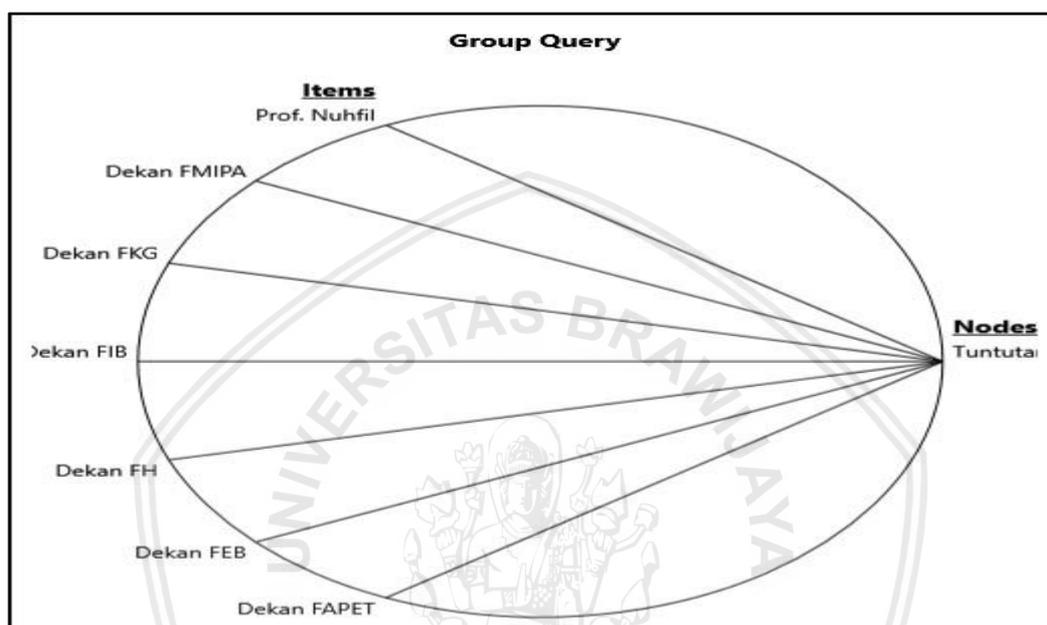
Subtema berdasarkan tema pemaknaan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif dapat dilihat pada Gambar 31, skema model subtema diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu *project map*. Subtema yang didapat sebanyak 2 yaitu 1) tuntutan dan 2) konstruksi nalar kepantasan.

2. Pemaparan Hasil Penelitian berdasarkan Subtema

Berikut ini visualisasi partisipan yang terkait dengan subtema berupa diagram, pernyataan-pernyataan partisipan, dan grafik persentase pernyataan

partisipasi yang sudah ter-*coding* terkait dengan subtema berdasarkan keseluruhan transkrip antara lain:

a. Tuntutan



Gambar 32. Diagram *Group Query*, “Tuntutan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema tuntutan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 32. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait tuntutan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 8 references coded [1.86% Coverage]

- Dekan FAPET
Reference 1 - 0.15% Coverage

“Saya sepakat dengan undang-undang tersebut sejauh itu sesuai dengan kompetensi dan area pekerjaan yang dikerjakan.”

- Dekan FEB
Reference 2 - 0.26% Coverage

“Ya memang kita seperti toilet khusus difabel saja masih belum ada. Saya rasa tekanan dengan adanya standar penilaian internasional akan mempercepat pembangunan UB menjadi lebih mengakomodir kebutuhan difabel”

- Dekan FH
Reference 3 - 0.09% Coverage

“Karena ada tuntutan saja, maka ada perubahan pada gedung-gedung itu.”

Reference 4 - 0.23% Coverage

“Penyesuaiannya (gedung ramah difabel) pun bukan karena grand design tapi karena segera untuk dibutuhkan. Akhirnya penyediaan untuk fasilitas difabel berkembang seiring waktu saja.”

- Dekan FIB
Reference 5 - 0.19% Coverage

“Sudah banyak kemajuan di UB. Terlebih semenjak kita ikut akreditasi internasional hal-hal seperti itu (infrastruktur yang ramah difabel –red) harus ada.”

- Dekan FKG
Reference 6 - 0.30% Coverage

“Masing-masing universitas dari Kemenristekdikti dituntut untuk meningkatkan peringkatnya di level dunia. Ketika UB semakin inklusif akhirnya peminat semakin banyak, orang tua yang anaknya difabel jadi mau menguliahkan anaknya di UB.”

- Dekan FMIPA
Reference 7 - 0.40% Coverage

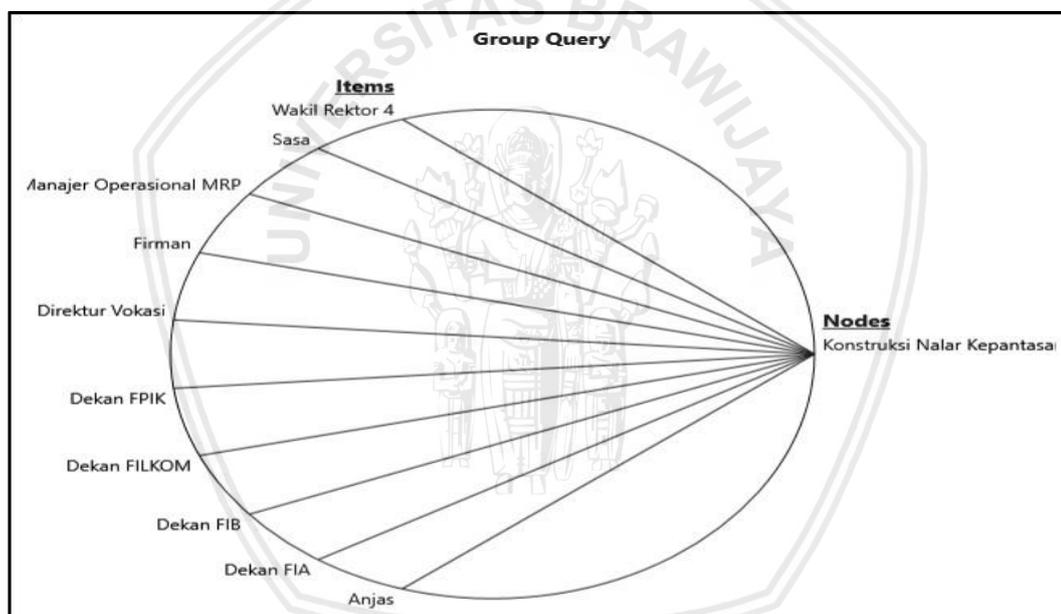
“Lambat laun kita tidak bisa lepas dari inklusivitas ini, apalagi ini sudah amanat dari peraturan atau undang-undang. Dari saya, Brawijaya juga harus siap dengan adanya ini, kita harus terus bertahap

(mengimplementasikannya). Jangan sampai nanti misal ada yang tuli terus kita kaget lagi, harus ada antisipasi dari awal.”

- Prof. Nuhfil
Reference 8 - 0.24% Coverage

“Saya waktu jadi Dekan (Fakultas Pertanian) saat ada penilaian akreditasi internasional, saya buat jalan (ramah difabel), meskipun jumlah mahasiswa difabel terbatas tetap saya buat semua itu.”

b. Konstruksi Nalar Kepantasan



Gambar 33. Diagram *Group Query*, “Konstruksi Nalar Kepantasan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema konstruksi nalar kepantasan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 33. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait konstruksi nalar kepantasan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 17 references coded [3.06%

Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.27% Coverage

“Maknanya kan sebenarnya adalah aksesibilitas atau bisa dijangkau oleh semua golongan. Nah untuk membentuk inklusivitas kan tidak hanya dari sarana, yang terpenting juga adalah edukasi awareness kepada difabilitas.”

Reference 2 - 0.09% Coverage

“Semua orang akan difabel pada waktunya, apalagi saat kita tua nantinya.”

- Dekan FIA
Reference 3 - 0.26% Coverage

“Jadi perlu ada pergeseran makna dari disability ke difability. kalau disability melihat (anak) kebutuhan khusus itu sebagai cacat, tapi kalau difability sebagai sebuah anugerah yang perlu dikembangkan.”

- Dekan FIB
Reference 4 - 0.14% Coverage

“Inklusif itu kan bagaimana kita tidak hanya berfikir tentang diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain.”

- Dekan FILKOM
Reference 5 - 0.41% Coverage

“Secara biaya (untuk melayani difabel) kan gak efisien, ngurusu satu dua orang tapi (pembiayaan) ramp-nya berapa puluh juta, toilet juga pasti akan (dibuat berbeda). Kalau hanya pertimbangan ekonomi mungkin lewat (tidak diakomodasi –red), tapi kalau saya lihat bagaimanapun kan mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.”

Reference 6 - 0.16% Coverage

“Saya lebih sepatat (penyebutannya) difabel, memang secara fisik terdapat kekurangan tapi biasanya memunculkan potensi yang lain.”

- Firman

Reference 7 - 0.20% Coverage

“Masyarakat mempersepsikan difabel masih sangat jauh dari harapan. Difabel itu membutuhkan support dan waktu untuk berkarya dan beribadah semaksimal mungkin.”

- Manajer Operasional MRP
Reference 8 - 0.20% Coverage

“Inklusivitas kita ini harus seperti mereka penyandang difabel yang rata-rata justru jauh lebih terbuka menerima perbedaan, jangan malah kita menjadi eksklusif.”

- Dekan FPIK
Reference 9 - 0.20% Coverage

“Penyandang difabel mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya, namun hanya membutuhkan bantuan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya.”

- Direktur Vokasi
Reference 10 - 0.21% Coverage

“Sejauh mana pimpinan berinteraksi dengan mereka (difabel) itu menunjukkan empati. Kalau hanya sekedar mendengarkan (kabar-kabar), saya rasa itu kurang.(mengakomodasi).”

- Sasa
Reference 11 - 0.12% Coverage

“Mungkin mereka (sivitas akademika UB –red) udah sadar kalau mereka kena (jadi difabel –red).”

Reference 12 - 0.13% Coverage

“Untuk ngebangun fasilitas gak akan ngerugiin, bukan hal yang sulit. Tolonglah memanusiakan manusia.”

Reference 13 - 0.14% Coverage

“Bukan alasan dengan jumlah difabel yang sedikit untuk gak diakomodir. Anggap kita sama, jangan dikasihaniin.”

Reference 14 - 0.10% Coverage

“Buat pimpinan UB kasih kami kesempatan untuk maju dengan diberi fasilitas.”

- Wakil Rektor 4

Reference 15 - 0.16% Coverage

“Kalau mereka hanya disekolahkan di sekolah yang eksklusif maka dia tidak bisa menjadi orang yang sehat (jiwa sosialnya –red).”

Reference 16 - 0.08% Coverage

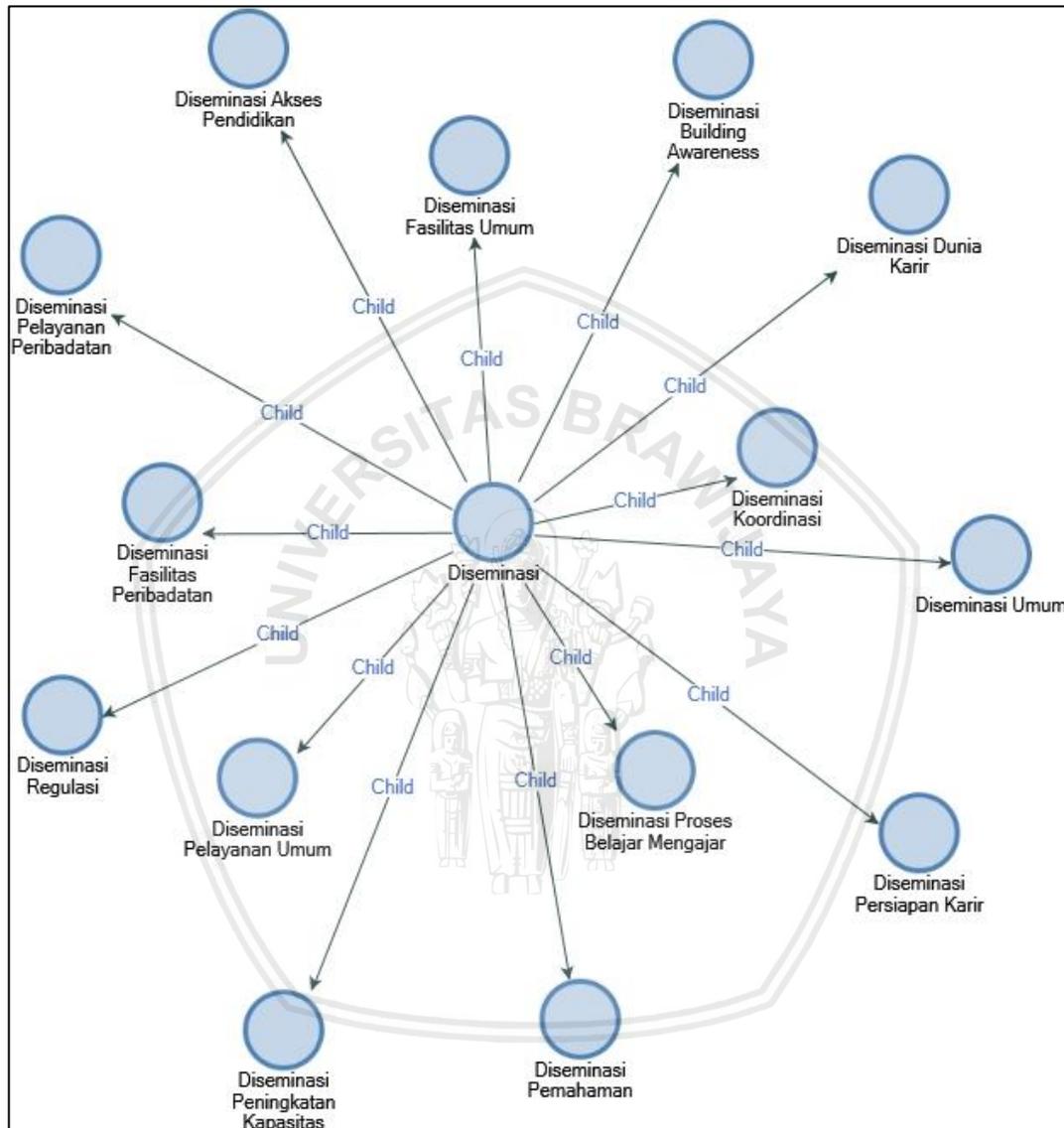
“Mereka kan tidak ingin diistimewakan, itu yang saya rasakan.”

Reference 17 - 0.20% Coverage

“Menurut saya harusnya dari perguruan tinggi-lah kita menjadi percontohan, masyarakat kita kan juga belum sadar tentang (inklusivitas terhadap difabel) itu.”

D. Diseminasi

1. Subtema yang Ditemukan dalam Tema



Gambar 34. Skema Model Subtema pada Diseminasi (Tema)

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

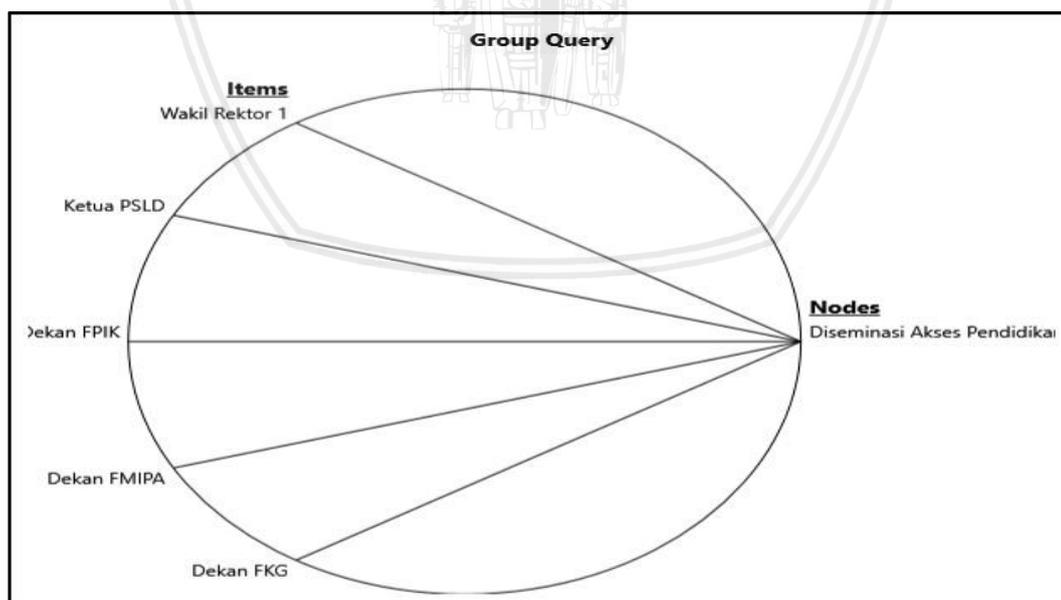
Subtema berdasarkan tema diseminasi dapat dilihat pada Gambar 34, skema model subtema diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu *project map*. Subtema yang didapat sebanyak 14 yaitu: 1) diseminasi akses pendidikan, 2)

diseminasi fasilitas umum, 3) diseminasi *building awareness*, 4) diseminasi pelayanan peribadatan, 5) diseminasi fasilitas peribadatan, 6) diseminasi koordinasi, 7) diseminasi regulasi, 8) diseminasi pelayanan umum, 9) diseminasi peningkatan kapasitas, 10) diseminasi proses belajar mengajar, 11) diseminasi pemahaman, 12) diseminasi umum, 13) diseminasi persiapan karir, dan 14) diseminasi dunia karir.

2. Pemaparan Hasil Penelitian berdasarkan Subtema

Berikut ini visualisasi partisipan yang terkait dengan subtema berupa diagram, pernyataan-pernyataan partisipan, dan grafik persentase pernyataan partisipan yang sudah ter-*coding* terkait dengan subtema berdasarkan keseluruhan transkrip antara lain:

a. Diseminasi Akses Pendidikan



Gambar 35. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Akses Pendidikan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi akses pendidikan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 35. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi akses pendidikan antara lain:

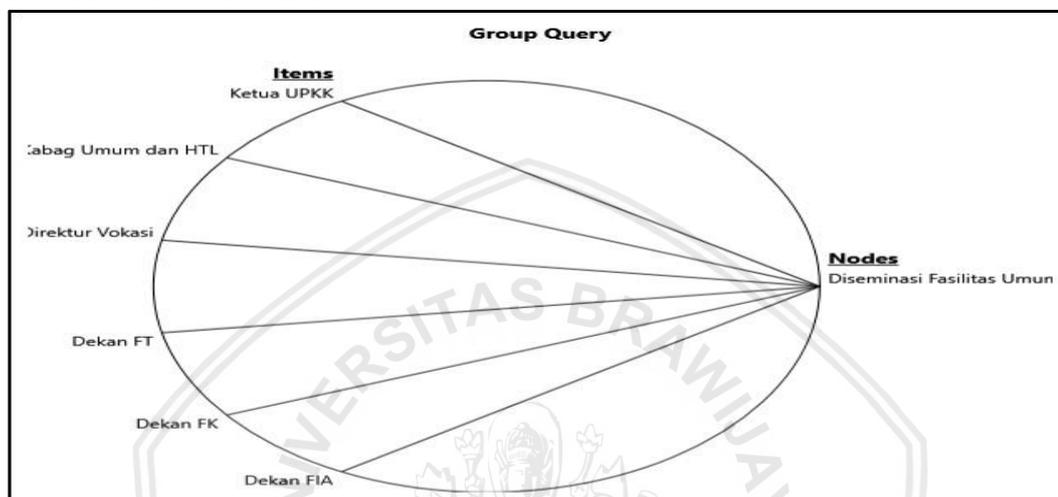
<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 5 references coded [1.48% Coverage]

- Dekan FKG
Reference 1 - 0.41% Coverage
“Kemungkinan di masa mendatang untuk dia (penyandang difabel jenis tertentu) untuk berkuliah (di FKG) ada. Yang penting prinsipnya kekurangan dia itu tidak sampai mengganggu aktifitas ketika dia belajar maupun ketika dia nanti menjadi dokter. Misalnya kakinya buntung tetapi dia menggunakan kaki tiruan, itu tidak masalah.”
- Dekan FMIPA
Reference 2 - 0.24% Coverage
“Sangat memungkinkan ada pertimbangan untuk mahasiswa yang mungkin kecelakaan untuk pindah jurusan ke yang lebih ringan (mobilitasnya), mungkin masih cukup fleksibel kalau dalam satu fakultas.”
- Dekan FPIK
Reference 3 - 0.35% Coverage
“Ketika ada mahasiswa baru penyandang difabel, Universitas Brawijaya menyampaikan kepada Fakultas tentang jenis ketidakberdayaan (difabel) dan situasi serta kondisi yang diperlukan agar ada kenyamanan untuk segala pihak dalam perkuliahan dan bidang akademik di Fakultas.”
- Ketua PSLD
Reference 4 - 0.33% Coverage
“Misalnya jurusan bahasa dia gak mau menerima tuna wicara mungkin dengan alasan komunikasi akan sulit. Di UI sudah bisa, karena mereka sudah bisa memfasilitasi sign language berarti kan tinggal tunggu waktu yang berbicara ketika sudah bisa memfasilitasi atau belum.”

- Wakil Rektor 1
Reference 5 - 0.15% Coverage

“Kalau ada kecelakaan pada mahasiswa (sehingga menjadi difabel), yang penting dia bisa menyelesaikan kompetensinya.”

b. Diseminasi Fasilitas Umum



Gambar 36. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Fasilitas Umum”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi fasilitas umum dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 36. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi fasilitas umum antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 8 references coded [1.73% Coverage]

- Dekan FT
Reference 1 - 0.25% Coverage

“Disiapkan gedung tertentu khusus untuk mereka (difabel) sehingga ini akan lebih efisien dari segi pembiayaan, beda kalau setiap gedung harus menyiapkan sarana prasarananya (yang ramah difabel).”

Reference 2 - 0.24% Coverage

“Saya pernah usulkan ke pimpinan, kenapa gak dibuat building yang memang memenuhi standar dari aspek undang-undang baik (untuk) yang berkebutuhan khusus maupun dari aspek Kementerian PUPR.”

- Dekan FIA
Reference 3 - 0.22% Coverage

“Mestinya untuk kepentingan infrastruktur juga harus ada klasifikasi karena difabel tidak tunggal, (jenisnya –red) tapi difabel juga banyak kebutuhan khususnya masing-masing.”

- Direktur Vokasi
Reference 4 - 0.27% Coverage

“Harusnya di dalam proses pelelangan pembangunan gedung, ini (syarat-syarat dalam Permen PUPR) masuk penilaian. Saya pikir itu perlu di tim perencanaan (pembangunan infrastruktur) dari difabel masuk (terlibat).”

- Dekan FK
Reference 5 - 0.13% Coverage

“Perlu lebih ditingkatkan lagi fasilitas untuk difabel baik mahasiswa, tenaga pendidik, dan lain-lain.”

- Kabag Umum dan HTL
Reference 6 - 0.10% Coverage

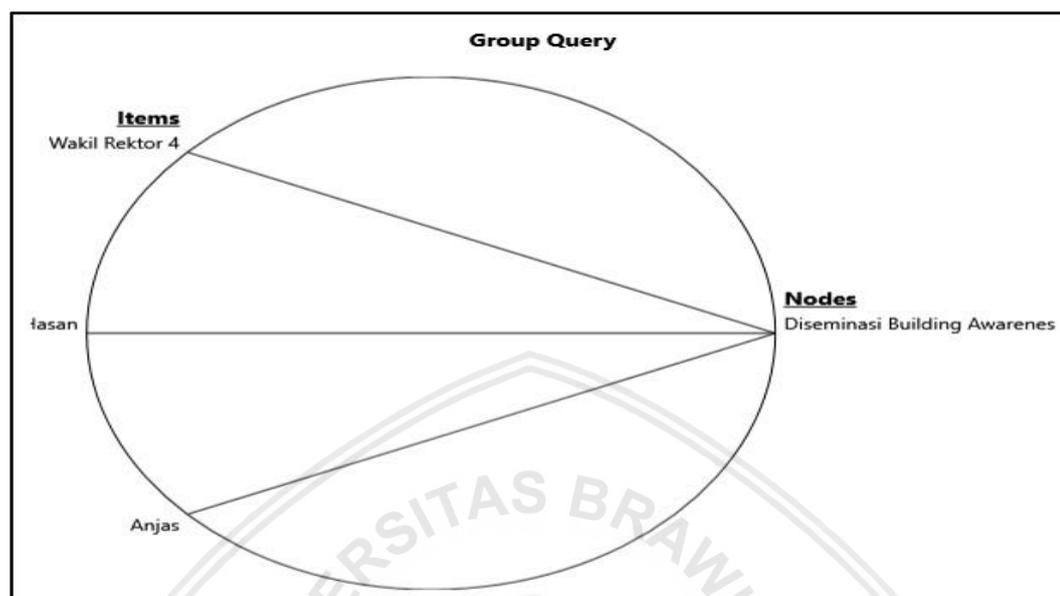
“Fasilitasnya harus ditambah untuk pemenuhan kebutuhan difabel secara khusus.”

- Ketua UPKK
Reference 7 - 0.33% Coverage

“Saya meskipun belum pernah mengajar mahasiswa difabel tapi saya pernah melihat ada mahasiswa difabel yang mengikuti proses pembelajaran. Saya rasa Brawijaya harus menyiapkan berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa difabel.”

Reference 8 - 0.20% Coverage

“Saya kira juga seperti dari klosetnya (di UB) barangkali kalau terjadi apa-apa fasilitas seperti intercom itu belum ada. Kayaknya ke depan harus dilengkapi itu.”

c. Diseminasi *Building Awareness*

Gambar 37. Diagram *Group Query*, “Diseminasi *Building Awareness*”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi *building awareness* dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 37. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi *building awareness* antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 6 references coded [1.68% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.28% Coverage

“Sampai sekarang belum ada kurikulum tentang disability awareness. Jadinya pemahaman untuk kita harus membantu teman-teman difabel ini apakah karena atas dasar kasihan atau yang lainnya, ini kan masih belum ada di Indonesia.”

- Hasan
Reference 2 - 0.39% Coverage

“Saat ujian ada pendamping difabel supaya yang lain bisa tahu kalau ada difabel, pengawas ujian juga harus mengabsen apakah ada yang difabel terus dikasih tanda nanti buat yang difabel. Jangan dipisah yang difabel dengan yang bisa dengar, jadi harus digabung gapapa supaya kalian sadar tentang difabel kayak apa.”

Reference 3 - 0.08% Coverage

“Saat ospek juga harus ada video (edukasi) tentang difabel.”

Reference 4 - 0.08% Coverage

“Ajak orang-orang organisasi pelatihan tentang inklusivitas.”

Reference 5 - 0.37% Coverage

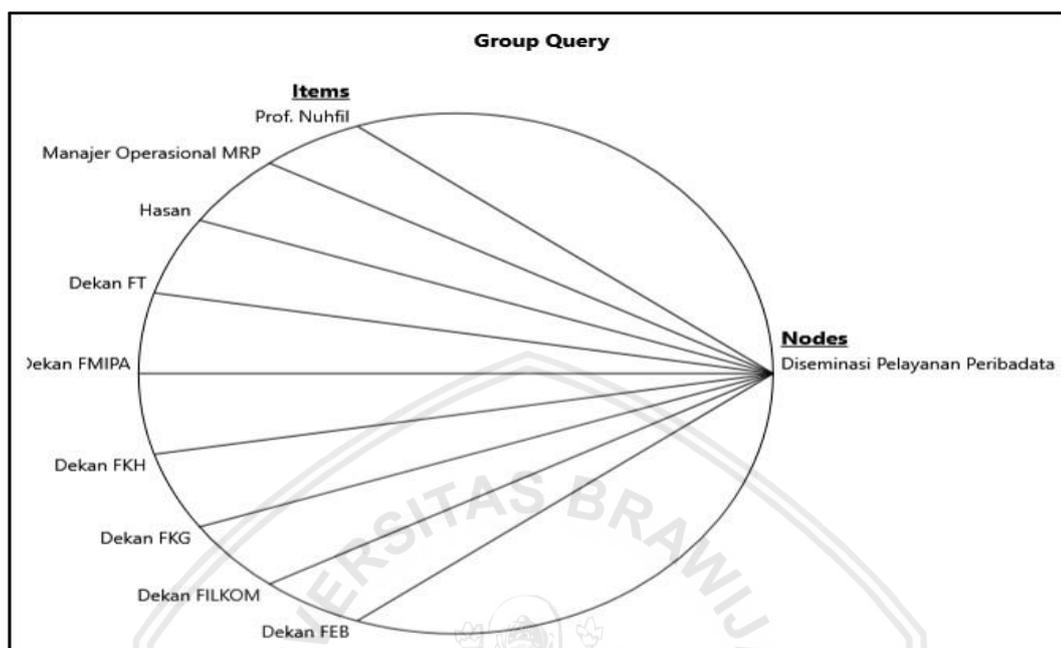
“EM (Eksekutif Mahasiswa) UB coba adain pelatihan juga untuk tahu tentang difabel, misalnya gimana sih kalau (pengguna) kursi roda, tuna rungu, dan lain-lain. Coba juga (adain edukasi) ke sekolah-sekolah, soalnya masih sedikit yang tahu tentang difabel. Supaya nanti gak ada lagi bullying.”

- Wakil Rektor 4

Reference 6 - 0.49% Coverage

“Kita harus bersama-sama mendidik, perlu adanya climate yang menghargai orang, baik yang difabel maupun bukan. Orang difabel itu ingin dihargai, bukan ditolong sebenarnya. (Mahasiswa Difabel) ingin mandiri, ingin bersosialisasi, itu saja sebetulnya yang perlu diciptakan oleh UB, sebuah budaya tentang kesadaran bahwa manusia itu punya hak yang sama dihadapan Tuhan dan juga manusia.”

d. Diseminasi Pelayanan Peribadatan



Gambar 38. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Pelayanan Peribadatan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi pelayanan peribadatan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 38. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi pelayanan peribadatan antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 12 references coded [2.47% Coverage]

- Dekan FEB
Reference 1 - 0.10% Coverage

“Untuk interpreter saya rasa kalau tidak sanggup UB maka adakan saja outsourcing.”

- Dekan FILKOM
Reference 2 - 0.14% Coverage

“Kalau saya sebagai orang (dengan keilmuan) komputer, saya berfikir teks khutbah ada (ditampilkan) di layar.”

- Dekan FKG

Reference 3 - 0.45% Coverage

“Saya kira itu ide yang bagus (adanya interpreter), contoh saja kita memiliki Masjid Raden Patah itu kayaknya hanya untuk orang-orang yang normal, tidak untuk yang difabel. Infrastrukturnya belum ramah (difabel), apalagi yang interpreter tadi itu belum ada. Jadi saya kira itu bisa diusulkan, itu ide yang bagus, di Malang belum ada masjid yang seperti itu.”

- Dekan FKH

Reference 4 - 0.23% Coverage

“Butuh banyak perbaikan ya seperti di MRP ini dari fasilitas-fasilitasnya. Saya rasa akan bagus kalau ada penerjemah bahasa isyarat di MRP untuk memudahkan teman-teman yang difabel.”

- Dekan FMIPA

Reference 5 - 0.10% Coverage

“Saya rasa MRP (Masjid Raden Patah) bisa menyediakan (interpreter), agar terpusat.”

- Dekan FT

Reference 6 - 0.12% Coverage

“Baik akademik maupun (yang) sifatnya keagamaan mesti (pihak) universitas yang ambil peran.”

Reference 7 - 0.18% Coverage

“Harus ada pilot project, program mana yang akan menjadi percontohan di kampus ini (adanya interpreter saat peribadatan) nanti kita fasilitasi.”

- Hasan

Reference 8 - 0.20% Coverage

“Harapanku keramiknya diganti biar gak licin, ada lift untuk kursi roda, layar ada subtitle-nya, ada penerjemah (interpreter), ada guiding block, terus handrail.”

Reference 9 - 0.09% Coverage

“Tempat ibadah dan Poliklinik UB harus disempurnakan lagi pelayanannya.”

- **Manajer Operasional MRP**

Reference 10 - 0.27% Coverage

“Untuk ibadah sholat Jumat sangat mudah bagi kami memfasilitasi teman-teman difabel. PSLD koordinir teman-teman difabel, lalu koordinasi ke kami nanti kami sediakan tempat khusus (untuk bisa mendengarkan ceramah).”

Reference 11 - 0.28% Coverage

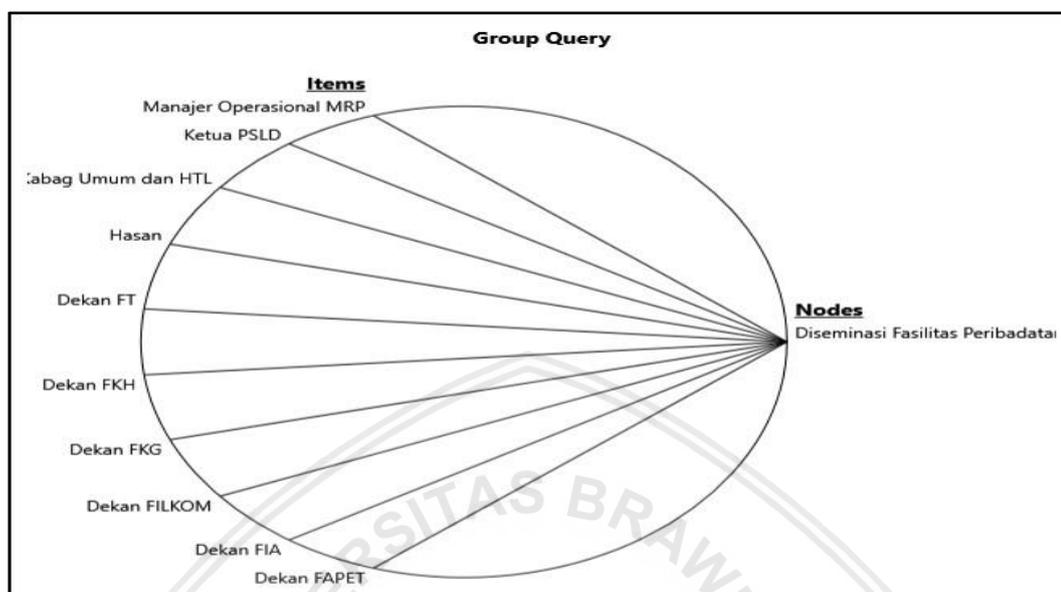
“Semua harus bisa mengakomodir jamaah Masjid Raden Patah baik itu yang normal, difabel, yang sepuh, anak kecil, ataupun yang sudah dewasa. Dalam bentuk bangunan dan fasilitas yang lain harus mengakomodir kebutuhan mereka.”

- **Prof. Nuhfil**

Reference 12 - 0.31% Coverage

“UB sejauh ini untuk interpreter bagi difabel masih seputar pendampingan saja di kelas-kelas. Saya rasa bagus Masjid Raden Patah menerapkan tersebut (adanya interpreter selama ceramah), karena UB jadi model percontohan di sana (nasional –red)”

e. Diseminasi Fasilitas Peribadatan



Gambar 39. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Fasilitas Peribadatan”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi fasilitas peribadatan dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 39. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi fasilitas peribadatan antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 11 references coded [2.10% Coverage]

- Dekan FAPET
Reference 1 - 0.18% Coverage

“Saya rasa sarana prasarana perlu dievaluasi ulang, karena beberapa hal mungkin perlu direvisi untuk dikaitkan terhadap undang-undang tersebut.”

- Dekan FIA
Reference 2 - 0.20% Coverage

“Prinsip saya tempat ibadah harus lebih bagus dari tempat kuliah. Ini menarik sebagai introspeksi juga untuk saya bahwa memfasilitasinya juga harus untuk difabel.”

- Dekan FILKOM
Reference 3 - 0.14% Coverage

“Kalau saya sebagai orang (dengan keilmuan) komputer, saya berfikir teks khutbah ada (ditampilkan) di layar.”

- Dekan FKG
Reference 4 - 0.45% Coverage

“Saya kira itu ide yang bagus (adanya interpreter), contoh saja kita memiliki Masjid Raden Patah itu kayaknya hanya untuk orang-orang yang normal, tidak untuk yang difabel. Infrastrukturnya belum ramah (difabel), apalagi yang interpreter tadi itu belum ada. Jadi saya kira itu bisa diusulkan, itu ide yang bagus, di Malang belum ada masjid yang seperti itu.”

- Dekan FKH
Reference 5 - 0.23% Coverage

“Butuh banyak perbaikan ya seperti di MRP ini dari fasilitas-fasilitasnya. Saya rasa akan bagus kalau ada penerjemah bahasa isyarat di MRP untuk memudahkan teman-teman yang difabel.”

- Dekan FT
Reference 6 - 0.12% Coverage

“Baik akademik maupun (yang) sifatnya keagamaan mesti (pihak) universitas yang ambil peran.”

- Hasan
Reference 7 - 0.08% Coverage

“Kalau tuna netra itu yang penting petunjuk braille kemana arahnya”

Reference 8 - 0.20% Coverage

“Harapanku keramiknya diganti biar gak licin, ada lift untuk kursi roda, layar ada subtitle-nya, ada penerjemah (interpreter), ada guiding block, terus handrail.”

- Ketua PSLD
Reference 9 - 0.12% Coverage

“Harapan kami mulai ada perubahan di rumah-rumah ibadah yang accessible untuk para difabel.”

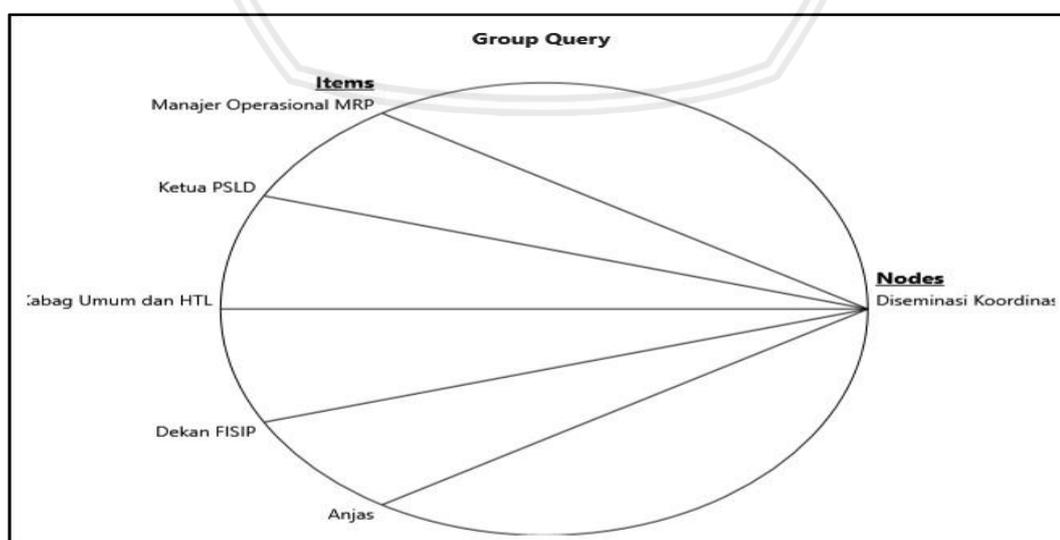
- Kabag Umum dan HTL
Reference 10 - 0.10% Coverage

“Fasilitasnya harus ditambah untuk pemenuhan kebutuhan difabel secara khusus.”

- Manajer Operasional MRP
Reference 11 - 0.28% Coverage

“Semua harus bisa mengakomodir jamaah Masjid Raden Patah baik itu yang normal, difabel, yang sepuh, anak kecil, ataupun yang sudah dewasa. Dalam bentuk bangunan dan fasilitas yang lain harus mengakomodir kebutuhan mereka.”

f. Diseminasi Koordinasi



Gambar 40. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Koordinasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi koordinasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 40. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi koordinasi antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 9 references coded [2.71% Coverage]

- **Anjas**
Reference 1 - 0.42% Coverage

“Koordinasi untuk penyediaan interpreter dengan Takmir sepertinya belum ya, harapannya dari teman-teman UAKI (Unit Aktivitas Kerohanian Islam) bisa menjembatani komunikasi itu ya. Bahkan bisa juga kita mengadakan pelatihan bahasa isyarat untuk teman-teman UAKI tentang bahasa isyarat agar nantinya bisa diterapkan di Masjid Raden Patah.”

Reference 2 - 0.13% Coverage

“Bagi saya bisa terlihat ketika UB serius mengadakan program yang melibatkan diskusi dengan difabel.”
- **Dekan FISIP**
Reference 3 - 0.20% Coverage

“Kalau harus di-cover oleh takmir (penyediaan interpreter) saat ini kami belum mampu, tapi kalau ada inisiatif dari PSLD untuk memfasilitasi ya kami senang saja”
- **Kabag Umum dan HTL**
Reference 4 - 0.24% Coverage

“Mestinya seperti (Takmir) MRP itu mengajukan kepada kami agar fasilitasnya jadi lebih ramah difabel, agar kami bisa mengusulkan kepada Rektor. Insya Allah Pak Rektor sangat antusias kok.”
- **Ketua PSLD**
Reference 5 - 0.46% Coverage

“Kalau orang sudah tidak mau membicarakan dan tidak mau memikirkan berarti kan malah gak akan ada (perubahan) apa-apa. Ini sudah ada komunikasi masukan dari mahasiswanya, dari volunteer, dari pengambil kebijakan, dan dari kita yang mengelola, itu kan akhirnya terbuka. Dengan adanya komunikasi ini langkah positif sebagai bentuk mau tau dan kemudian mau mengusahakan.”

Reference 6 - 0.43% Coverage

“Advokasi dari PSLD itu harapannya dari internal Brawijaya saja minimal ada media komunikasi sehingga nantinya bisa diidentifikasi apa masalahnya, kemudian dicarikan solusi. Misalkan assistive technology, orang tuna netra kan gak perlu braille karena sudah bisa dari text to speech. Nah dari situ mungkin dahulunya gak bisa sekarang jadi bisa.”

- **Manajer Operasional MRP**

Reference 7 - 0.15% Coverage

“Kami kesulitan mengadakan penerjemah bahasa isyarat, harapan kami dari PSLD bisa membantu (menyediakan interpreter).”

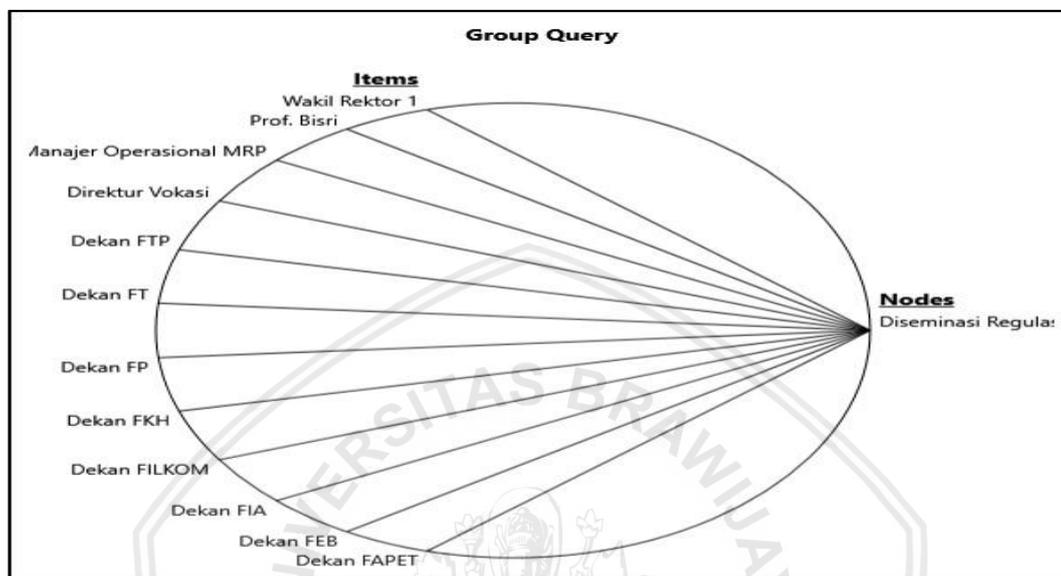
Reference 8 - 0.27% Coverage

“Untuk ibadah sholat Jumat sangat mudah bagi kami memfasilitasi teman-teman difabel. PSLD koordinir teman-teman difabel, lalu koordinasi ke kami nanti kami sediakan tempat khusus (untuk bisa mendengarkan ceramah).”

Reference 9 - 0.41% Coverage

“Menurut saya harus ada dari peraturan rektor agar semua ada payung hukumnya, sehingga ketika kami dari pihak takmir meminta (pemenuhan penunjang fasilitas) itu ada payung hukumnya. Jadi nanti antara perencanaan dengan masjid atau PSLD dengan masjid bisa seiring sejalan untuk melayani keluarga besar Universitas Brawijaya.”

g. Diseminasi Regulasi



Gambar 41. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Regulasi”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi regulasi dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 41. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi regulasi antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 20 references coded [6.05% Coverage]

- Dekan FAPET
Reference 1 - 0.22% Coverage

“Harus ada himbauan dari Rektor untuk fakultas menjalankan amanat sesuai pasal-pasal yang berlaku. Misalnya tempat ibadah harus seperti apa, laboratorium harus seperti apa.”

Reference 2 - 0.27% Coverage

“Kita mestinya meningkatkan standar minimal kita sesuai Permenristekdikti Nomor 44 (tahun 2015) tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi (SNPT) sehingga nanti kita selanjutnya mengacu ke dalam standar internasional.”

- Dekan FEB

Reference 3 - 0.14% Coverage

“Dari sekian peraturan-peraturan yang ada akan lebih memudahkan kalau ada juga peraturan setingkat universitas.”

- Dekan FIA

Reference 4 - 0.26% Coverage

“Saya (memandang) dalam undang-undang itu perlu eksplisit bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi khusus difabel, mana yang dari pemerintah pusat dan mana yang alokasi anggaran dari perguruan tinggi setempat.”

Reference 5 - 0.51% Coverage

“Untuk menerjemahkan peraturan itu dalam bentuk konkrit baik menyangkut memfasilitasi akses, lalu proses belajar mengajar tentu (butuh) ada turunan dari Pertor (Peraturan Rektor) yang lebih detail. Karena standarisasi misalnya untuk infrastruktur masing-masing fakultas juga belum ada standar yang baku, hanya masing-masing (implementasi) inklusivitas dari dekannya saja yang mempersiapkan tentang itu.”

Reference 6 - 0.22% Coverage

“Pertornya mungkin tentang difabel tidak hanya satu saja, karena ada hal-hal yang berbeda. Bisa pertor untuk infrastruktur, proses belajar mengajar, dan (kegiatan) kemahasiswaan.”

- Dekan FKH

Reference 7 - 0.61% Coverage

“Sebenarnya saya rasa ke depan kita harus menyusun Peraturan Rektor mengenai hal itu (proses belajar mengajar mahasiswa difabel di program studi tertentu –red). Semisal terjadi kecelakaan sehingga mahasiswa yang normal menjadi difabel, ini kan berarti seperti force majeure kalau dalam istilah kontrak. Kalau misalnya lumpuh di kaki tapi masih bisa beraktifitas atau jika ada yang menjadi buta lalu butuh penanganan khusus, saya rasa akan bagus dimunculkan peraturan tertentu seperti itu.”

Reference 8 - 0.28% Coverage

“Sudah mulai memperhatikan saya rasa UB ini kepada difabel, hanya saja saya rasa harus ada peraturan khusus yang menjelaskan detail rancangan bangunan UB harus seperti apa agar lebih mudah, ya perintah itu bisa dari rektorat.”

Reference 9 - 0.27% Coverage

“Harus ada peraturan rektor yang akan mempermudah kebijakan hingga lingkup fakultas untuk melaksanakan Saya rasa bisa dari PSDL yang menggodok perencanaan itu dengan mengundang fakultas-fakultas, kan jadi enak.”

- Dekan FT

Reference 10 - 0.19% Coverage

“Saya kira ketika ada undang-undang kemudian turun menjadi PP atau Permen, sekarang tinggal Pertor (Peraturan Rektor) yang harus mem-follow-up itu.”

Reference 11 - 0.16% Coverage

“Kita harus dorong peraturan itu (Pertor) untuk terbit, agar program kerja dan anggarannya ada payung hukum (pelaksanaannya).”

Reference 12 - 0.17% Coverage

“Saya kira menjadi poin penting ke depan (inklusivitas) ini ditumbuhkembangkan, ada undang-undang, permen, pertor, dan ada penilaiannya.”

Reference 13 - 0.50% Coverage

“Saya mulai dari input ya, kita mulai dari kuota tertentu yang fix, sehingga planning programnya (seperti) infrastrukturnya, pembiayaannya, ruangnya, dan apapun instrumen yang dibutuhkan jelas, karena kita akan mengalokasikan sesuai jumlah mahasiswa difabelnya. Sepanjang itu (andaikan) belum (diketahui kuota tetapnya), jadi kayak tebak-tebakan, jadi tidak jelas (untuk persiapan implementasinya).”

- Dekan FP

Reference 14 - 0.09% Coverage

“Semestinya revisi di dalam perencanaan itu ada supaya lebih accessible.”

- **Direktur Vokasi**
Reference 15 - 0.27% Coverage

“Harusnya di dalam proses pelelangan pembangunan gedung, ini (syarat-syarat dalam Permen PUPR) masuk penilaian. Saya fikir itu perlu di tim perencanaan (pembangunan infrastruktur) dari difabel masuk (terlibat).”

- **Dekan FILKOM**
Reference 16 - 0.44% Coverage

“Kebetulan juga ada dosen kami yang penelitian tentang kursi roda yang dikendalikan dengan pergerakan kepala. Nah ini kan penelitian yang khusus, suatu saat saya juga ingin ada pendanaan khusus. Jadi mungkin ada kebijakan pendanaan rektor, mungkin juga mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk penelitian dengan topik bagaimana membantu difabel.”

- **Dekan FTP**
Reference 17 - 0.36% Coverage

“Saya rasa teman-teman difabel harus diperhatikan, tidak boleh lepas dari blueprint (perencanaan –red). Seperti kalau kita buat gedung bagaimana untuk yang difabel, bicara tentang akademik bagaimana untuk yang difabel, bicara tentang sarana peribadatan juga harus memperhatikan difabel.”

- **Manajer Operasional MRP**
Reference 18 - 0.41% Coverage

“Menurut saya harus ada dari peraturan rektor agar semua ada payung hukumnya, sehingga ketika kami dari pihak takmir meminta (pemenuhan penunjang fasilitas) itu ada payung hukumnya. Jadi nanti antara perencanaan dengan masjid atau PSLD dengan masjid bisa seiring sejalan untuk melayani keluarga besar Universitas Brawijaya.”

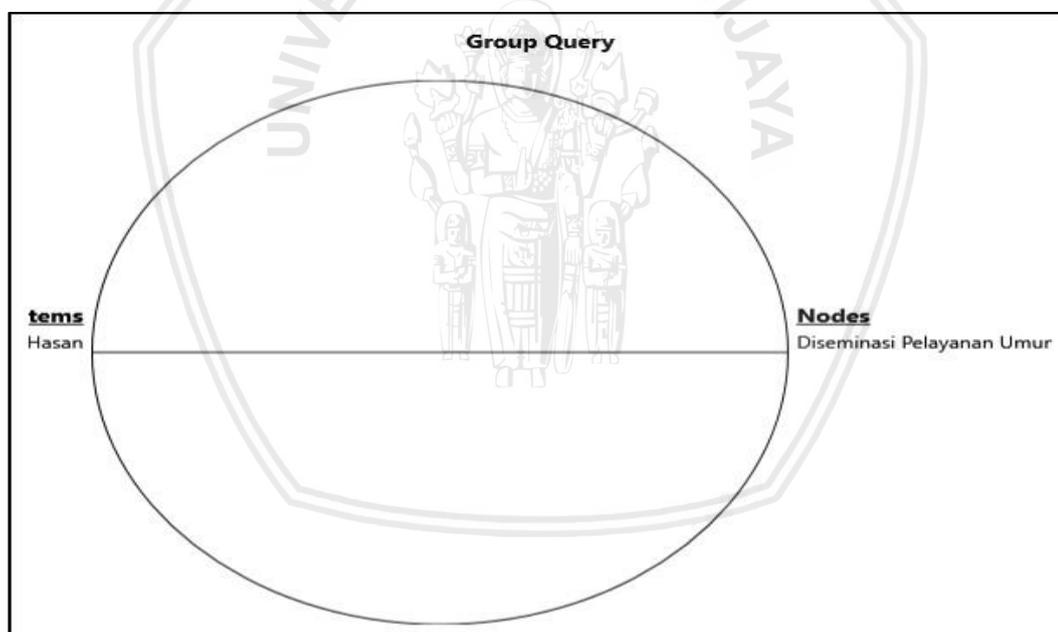
- **Prof. Bisri**
Reference 19 - 0.45% Coverage

“Kalau saran saya pimpinan di UB saat ini rapat khusus membahas disabilitas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Peraturan ini kan munculnya di akhir (masa jabatan rektor saya), ini kan sudah ada undang-undang dan peraturan berarti ini kan perintah. Ini harus khusus dirapatkan, dibahas detail (perencanaannya), dibuat kebijakan, lalu dieksekusi.”

- Wakil Rektor 1
Reference 20 - 0.22% Coverage

“Kita akan menuju lebih baik, semua akan mendapat penilaian kinerja yang jelas. Semisalnya dosen harus bisa ini (bahasa isyarat), itu akan menjadi catatan penilaian kinerja.”

h. Diseminasi Pelayanan Umum



Gambar 42. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Pelayanan Umum”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi pelayanan umum dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 42. Berikut ungkapan dari partisipan terkait diseminasi pelayanan umum antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 3 references coded [0.51% Coverage]

- Hasan
Reference 1 - 0.21% Coverage

“Udah ada PSLD untuk ngebantu rektorat tapi harus dari rektorat, dekan, dosen-dosen, dan karyawan memperbaiki layanan disabilitas, coba mereka latihan melayani difabel.”

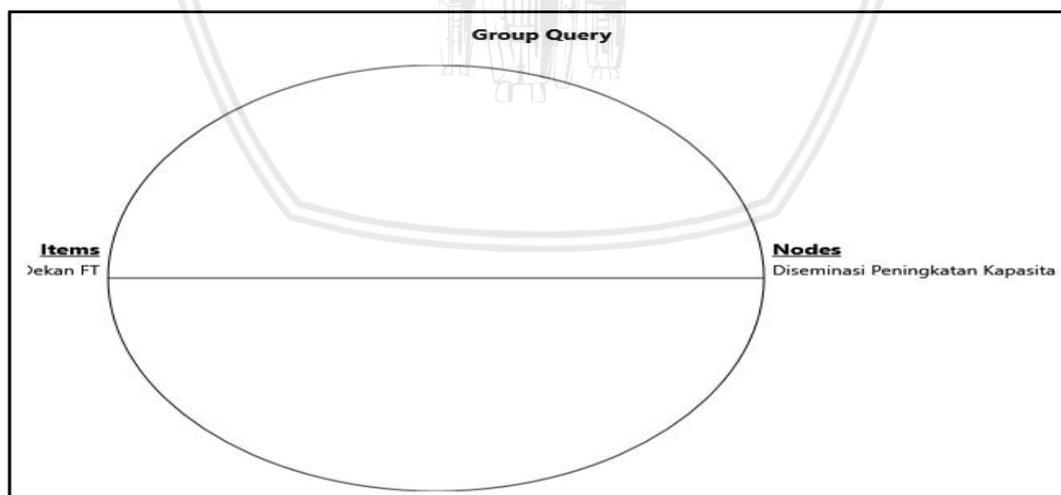
Reference 2 - 0.21% Coverage

“Pertama dosen sama karyawannya itu harus belajar bahasa isyarat biar tahu tentang difabel, terus (belajar) pelayanannya, supaya kenyamanannya didapat sama difabel.”

Reference 3 - 0.09% Coverage

“Tempat ibadah dan Poliklinik UB harus disempurnakan lagi pelayanannya.”

i. Diseminasi Peningkatan Kapasitas



Gambar 43. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Peningkatan Kapasitas”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

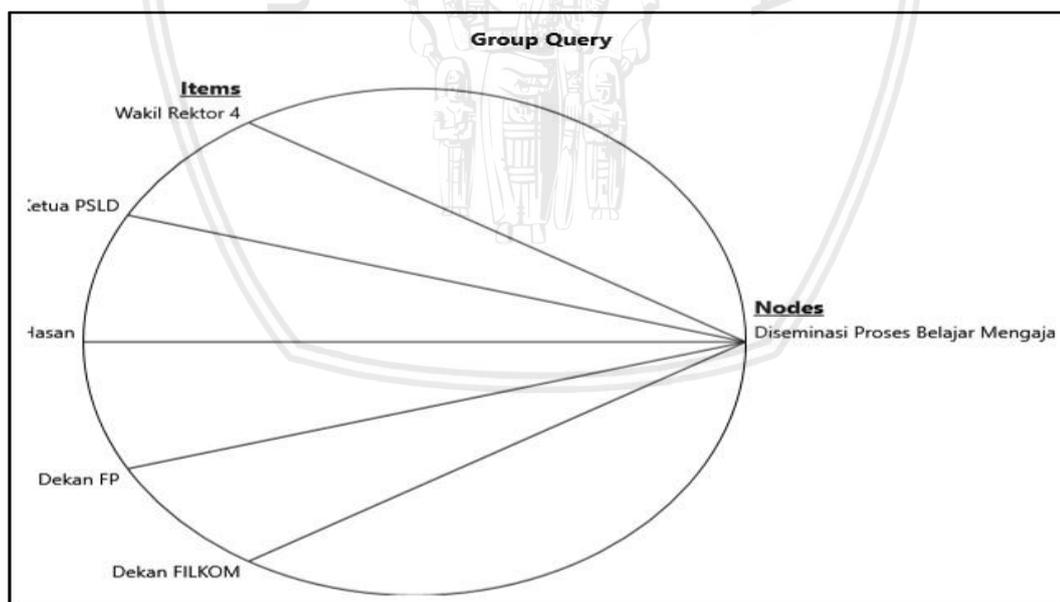
Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi peningkatan kapasitas dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 43. Berikut ungkapan dari partisipan terkait diseminasi peningkatan kapasitas antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 1 reference coded [0.30% Coverage]

- Dekan FT
Reference 1 - 0.30% Coverage

“Undang-undang yang spesifik ini dengan mahasiswa difabel yang tidak banyak tentu membutuhkan sosialisasi lebih luas, karena tidak semua fakultas pastinya men-support undang-undang ini. Maka harus ada sosialisasi untuk peningkatan pemahaman.”

j. Diseminasi Proses Belajar Mengajar



Gambar 44. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Proses Belajar Mengajar”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi proses belajar mengajar dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 44. Berikut

ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi proses belajar mengajar antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 7 references coded [2.03% Coverage]

- Dekan FILKOM

Reference 1 - 0.61% Coverage

“Ini keinginan ke depan, selama ini kan ada translater-nya (interpreter – red). Kami ingin ada penelitian jadi saat dosen itu menerangkan sesuatu ditangkap oleh speaker kemudian langsung ada machine learning-nya (jadi) tulisan langsung muncul di layar. Akhirnya kan sangat membantu pengajar di kelas, tidak hanya di ilmu komputer tapi juga di seluruh fakultas, ada product seperti itu. Kalau itu sudah ada saya ingin itu diwujudkan menjadi kewajiban seluruh fakultas untuk menggunakan.”

- Dekan FP

Reference 2 - 0.10% Coverage

“Idealnya kalau harapan saya untuk pendamping (difabel) itu yang sebidang ilmunya.”

- Hasan

Reference 3 - 0.21% Coverage

“Udah ada PSLD untuk ngebantu rektorat tapi harus dari rektorat, dekan, dosen-dosen, dan karyawan memperbaiki layanan disabilitas, coba mereka latihan melayani difabel.”

Reference 4 - 0.21% Coverage

“Pertama dosen sama karyawannya itu harus belajar bahasa isyarat biar tahu tentang difabel, terus (belajar) pelayanannya, supaya kenyamanannya didapat sama difabel.”

- Ketua PSLD

Reference 5 - 0.43% Coverage

“Advokasi dari PSLD itu harapannya dari internal Brawijaya saja minimal ada media komunikasi sehingga nantinya bisa diidentifikasi apa

masalahnya, kemudian dicarikan solusi. Misalkan assistive technology, orang tuna netra kan gak perlu braille karena sudah bisa dari text to speech. Nah dari situ mungkin dahulunya gak bisa sekarang jadi bisa.”

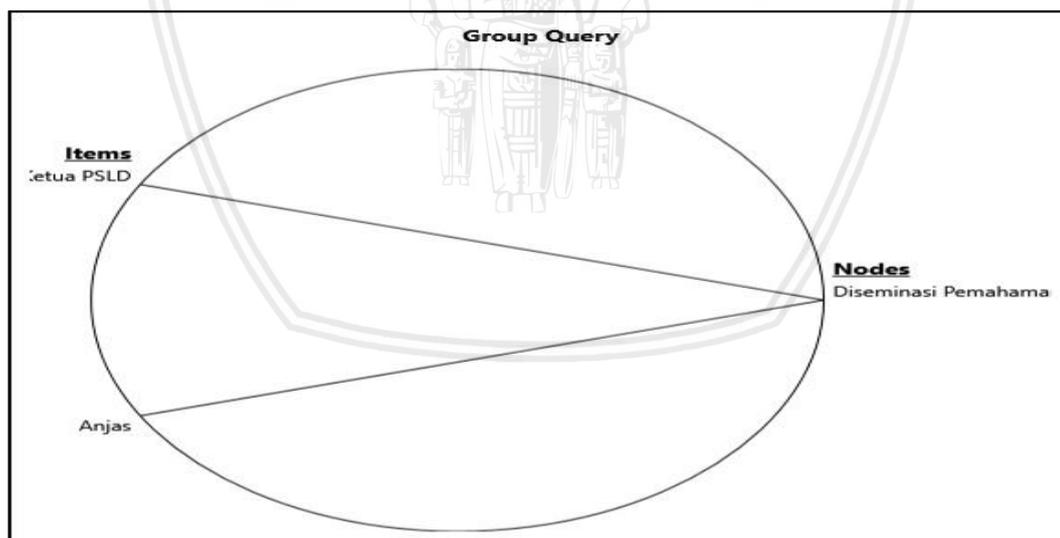
Reference 6 - 0.09% Coverage

“PSLD sendiri mencoba berusaha mengembangkan studi inovasi pembelajaran.”

- Wakil Rektor 4
Reference 7 - 0.37% Coverage

“Saya rasa harus ada kurikulum untuk membangun kesadaran (inklusivitas terhadap difabel). Harus juga ada declare mengenai bahwa kampus Brawijaya ini adalah kampus inklusif, sehingga nanti masyarakat Universitas Brawijaya sadar betul bahwa difabel juga ingin diperlakukan sama. Mereka punya hak.”

k. Diseminasi Pemahaman



Gambar 45. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Pemahaman”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi pemahaman dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 45. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi pemahaman antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 3 references coded [0.87% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.20% Coverage

“Untuk penerimaan difabel tidak boleh men-generalisir terkait potensi difabel yang kurang, seolah-olah mereka semua tidak akan sanggup mengikuti perkuliahan.”

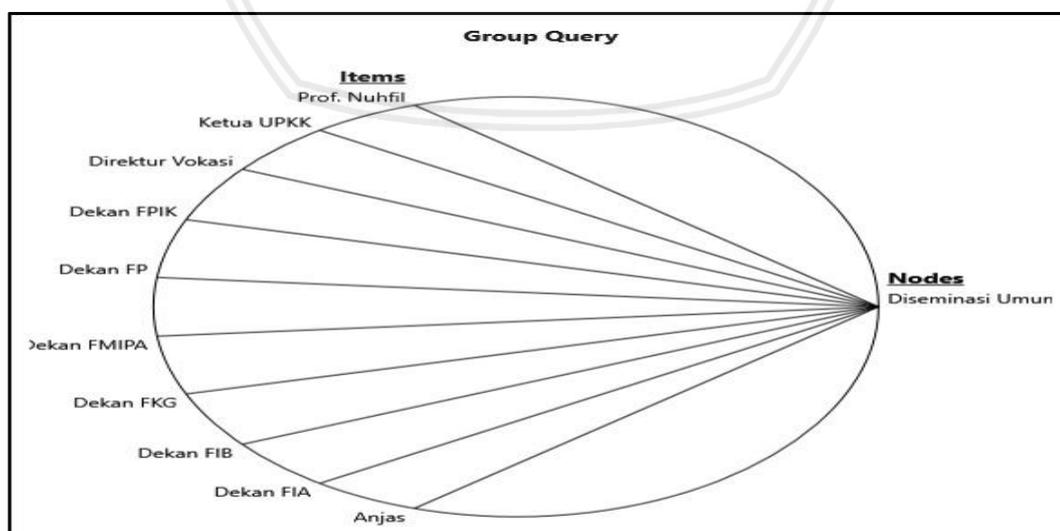
- Ketua PSLD
Reference 2 - 0.46% Coverage

“Harapan saya kalau UB memang ingin menjadi lembaga yang inklusif pastinya (harus) fasilitasnya mewadahi dengan pemikiran bahwa mewadahi untuk semua orang, saya pikir pola fikir itu harus ditanamkan. Kemudian mindset tentang orang difabel tidak bisa (sebenarnya) itu karena kita saja yang fasilitasnya tidak memfasilitasi semua, karena banyak difabel yang berprestasi.”

Reference 3 - 0.20% Coverage

“Harapan saya secara fisik dan non-fisik bahwa kultural kita harus lebih inklusif, jadi memandang teman-teman difabel itu sama untuk bisa menikmati hidup ini.”

1. Diseminasi Umum



Gambar 46. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Umum”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi umum dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 46. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi umum antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 15 references coded [4.35% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.31% Coverage

“Sebenarnya UB melalui PSLD sudah menerbitkan Fiqih Disabilitas yang bisa menjadi panduan untuk inklusivitas difabel. Ini menjadi prestasi dari Brawijaya untuk Indonesia. Harapannya juga ini bisa menjadi kurikulum di seluruh pesantren di Indonesia.”

Reference 2 - 0.35% Coverage

“Harus ada keseriusan dari UB karena sudah menetapkan dirinya sebagai kampus inklusif. Tidak hanya pelayanan yang sifatnya fisik, tapi yang non-fisik juga harus diperhatikan. Saya saja tidak bisa menjamin UB ini apakah dekan-dekannya dan rektornya bisa bahasa isyarat atau tidak.”

Reference 3 - 0.25% Coverage

“Ini semua kan kembali kepada keseriusan Rektorat UB, karena saya yakin anggaran UB ini sudah begitu banyak. Kalau nyatanya tidak ada program-program inklusivitas berarti mereka kan tidak serius.”
- Dekan FIA
Reference 4 - 0.20% Coverage

“Membangun sebuah fakultas, membangun universitas harus ada landscape-nya. Kami punya visi Alumni FIA haruslah yang religious dan berdaya saing yang kuat.”
- Dekan FIB
Reference 5 - 0.23% Coverage

“Universitas harus memberi kontribusi yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya berharap dari perguruan tinggi ini lahir orang-orang yang memikirkan orang lain.”

Reference 6 - 0.18% Coverage

“Brawijaya ini harus menjadi kampus untuk semua bukan untuk hanya orang tertentu, hanya orang kaya saja, Brawijaya harus menjadi untuk semua.”

- Dekan FKG

Reference 7 - 0.16% Coverage

“Jangan sampai kita hanya terlihat megah secara fisik, tapi juga harus disertai dengan yang non-fisik seperti SDMnya yang bagus.”

Reference 8 - 0.30% Coverage

“Masing-masing universitas dari Kemenristekdikti dituntut untuk meningkatkan peringkatnya di level dunia. Ketika UB semakin inklusif akhirnya peminat semakin banyak, orang tua yang anaknya difabel jadi mau menguliahkan anaknya di UB.”

- Dekan FMIPA

Reference 9 - 0.40% Coverage

“Lambat laun kita tidak bisa lepas dari inklusivitas ini, apalagi ini sudah amanat dari peraturan atau undang-undang. Dari saya, Brawijaya juga harus siap dengan adanya ini, kita harus terus bertahap (mengimplementasikannya). Jangan sampai nanti misal ada yang tuli terus kita kaget lagi, harus ada antisipasi dari awal.”

- Dekan FP

Reference 10 - 0.10% Coverage

“Harapan kami semua sivitas akademika mendapatkan kemudahan semudah-mudahnya.”

Reference 11 - 0.19% Coverage

“Dengan kita mengetahui kategori-kategori difabel yang disertai kebutuhannya apa, ini akan memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan pada akhirnya.”

- Dekan FPIK
Reference 12 - 0.53% Coverage

“Sebelum merencanakan implementasi inklusivitas terhadap penyandang difabel di Universitas Brawijaya, maka pihak Universitas Brawijaya juga harus berkoordinasi langsung dengan para penyandang difabel tentang kebutuhan dan keinginannya dalam mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya. Implementasi inklusivitas tidak akan berhasil sebelum Universitas Brawijaya paham, akan kebutuhan dari penyandang difabel sendiri.”

- Direktur Vokasi
Reference 13 - 0.42% Coverage

“Kita ke depan harus lebih mendengarkan mereka (mahasiswa difabel), tapi kita bangun dulu semangat mahasiswa difabel sebelumnya untuk bisa berprestasi hingga level internasional. Baru setelah itu kita tanya ingin mereka apa, kita sebagai fasilitator. Sehingga yang (pihak) UB bisa menguatkan difabel, yang difabel bisa menguatkan UB.”

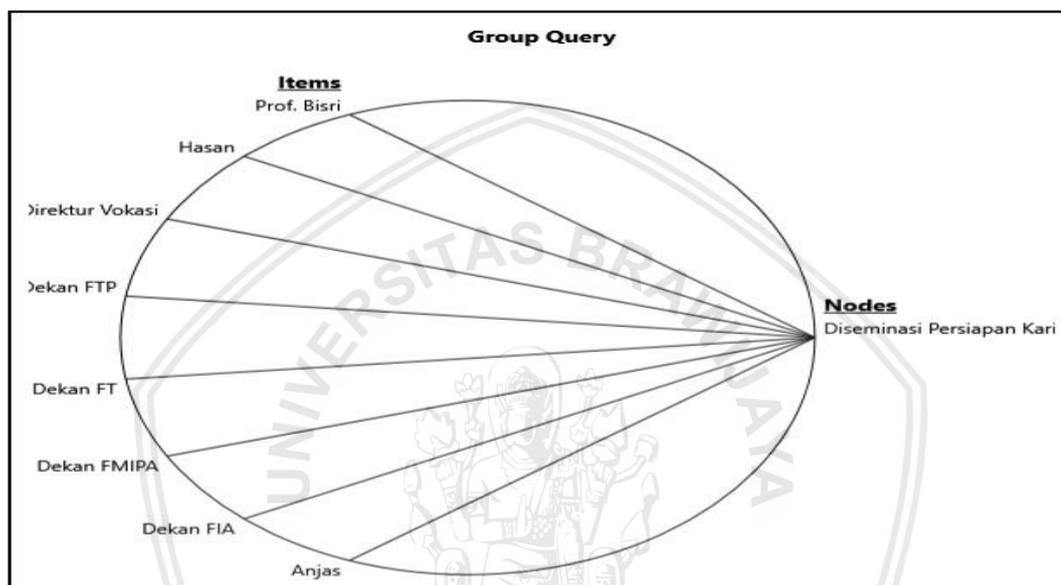
- Ketua UPKK
Reference 14 - 0.37% Coverage

“Kalau kita berbicara mengenai inklusivitas berarti kita harus bisa menerima apapun kondisinya dari difabel dan juga harus bisa memberikan pelayanan kepada difabel. Sehingga dengan begitu saya kira tidak ada lagi perbedaan antara yang non-difabel dan yang difabel karena semua difasilitasi.”

- Prof. Nuhfil
Reference 15 - 0.35% Coverage

“Kita sudah kadung terkenal di luar, pokoknya kampus yang bagus difabelnya..ya Brawijaya gitu guyonannya. Harus diikuti aturan-aturan seperti perintah dari negara termasuk standar internasionalnya harus dipenuhi semuanya, biar kita menjadi rujukan bagi perguruan tinggi yang lain.”

m. Diseminasi Persiapan Karir



Gambar 47. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Persiapan Karir”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi persiapan karir dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 47. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi persiapan karir antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 9 references coded [2.22% Coverage]

- Anjas
Reference 1 - 0.21% Coverage

“Saya rasa penting untuk ada Balai Latihan Kerja (BLK) untuk difabel, karena kalau disamakan dengan yang non-difabel ini justru akan menutup potensi keahlian mereka.”

Reference 2 - 0.44% Coverage

“Untuk pasca-kampus harus ada perencanaan koneksi UB dengan perusahaan-perusahaan untuk akses melamar pekerjaan bagi difabel sesuai dengan keahliannya ya. UPKK ini kan sejauh ini hanya menyebarkan informasi-informasi lowongan kerja saja, bahkan infonya pun tidak ada misalnya ini lho untuk yang difabel. UPKK harus mengoptimalkan diri saya rasa.”

- Dekan FIA

Reference 3 - 0.12% Coverage

“Harus ada upaya lebih dari universitas untuk menyediakan layanan persiapan karir bagi difabel.”

- Dekan FMIPA

Reference 4 - 0.21% Coverage

“Harusnya ada (pendataan) yang lulus mahasiswa difabel ini sekian, sehingga nanti JPC (Job Placement Center/UPKK) bisa memberikan gambaran (pengembangan karir) ke mereka.”

- Dekan FTP

Reference 5 - 0.32% Coverage

“Saya rasa advokasi untuk teman-teman difabel kepada perusahaan perlu terus dikomunikasikan dengan baik, jadi harus ada pendampingan atau empowering sehingga posisi yang sama bisa didapatkan teman-teman difabel, tentunya tergantung jenis pekerjaannya.”

- Dekan FT

Reference 6 - 0.21% Coverage

“... kita bangun lagi networking untuk mereka di tempat kerja, kita bikin MoU (memorandum of understanding) dengan para penerima kerja untuk mereka (mahasiswa difabel).”

- Direktur Vokasi

Reference 7 - 0.18% Coverage

“Semestinya ada pemetaan potensi pemetaan pekerjaan yang sesuai (dengan difabel). Serta pemetaan industry baik itu swasta maupun pemerintah.”

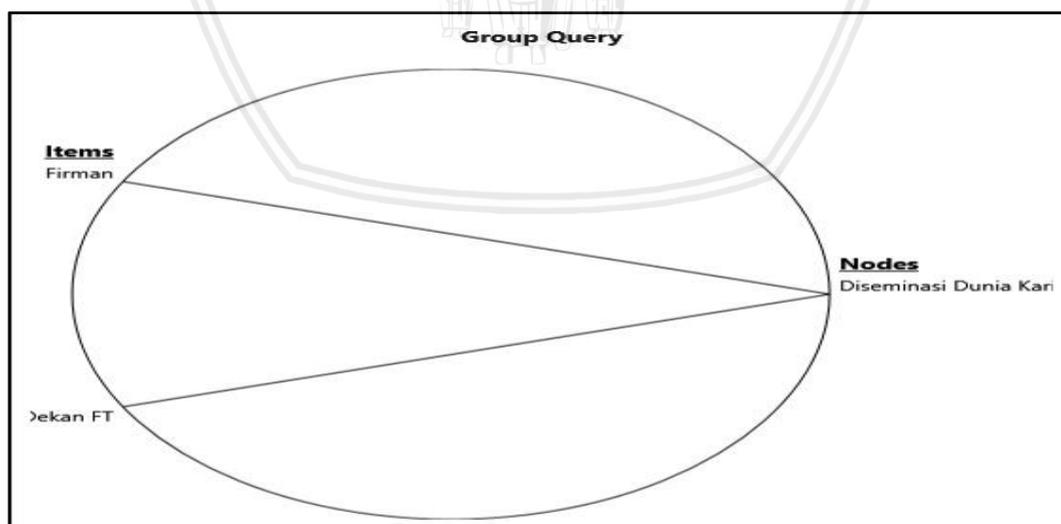
- Hasan
Reference 8 - 0.09% Coverage

“UPKK coba bikin acara pelatihan (karir dan kewirausahaan) untuk difabel.”

- Prof. Bisri
Reference 9 - 0.44% Coverage

“Harus masa rektor yang sekarang ini sudah melangkah lagi tidak hanya akomodasi infrastruktur, sudah harus melangkah memberikan peluang dia untuk bekerja melalui UPKK (Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan), karena sekarang sudah ada lulusan kita (yang difabel), kalau perlu diberikan contoh ada satu dua orang yang diterima (bekerja) di rektorat.”

n. Diseminasi Dunia Karir



Gambar 48. Diagram *Group Query*, “Diseminasi Dunia Karir”

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Keterkaitan antara kategori (*nodes*) pada subtema diseminasi dunia karir dengan partisipan (*items*) dapat dilihat pada Gambar 48. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait diseminasi dunia karir antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 2 references coded [0.32% Coverage]

- Dekan FT
Reference 1 - 0.18% Coverage

“Tupoksi kampus menyiapkan kompetensi lulusan yang sama (untuk seluruh mahasiswa), lalu untuk penerima kerja juga harus bisa mengakomodir mereka.”
- Firman
Reference 2 - 0.14% Coverage

“Semoga UB bisa memperluas jaringan dengan pihak perusahaan untuk memfasilitasi kami di dunia kerja nantinya.”

E. Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengalaman dan pemaknaan partisipan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya, lalu bagaimana diseminasi yang diharapkan untuk Universitas Brawijaya agar menjadi lebih inklusif. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengidentifikasi 3 tema, 22 subtema, dan 24 kategori. Tiga tema tersebut adalah 1) pengalaman terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif, 2) pemaknaan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif, dan 3) diseminasi. Selanjutnya peneliti akan membahas secara rinci masing-masing tema, subtema, dan kategori yang teridentifikasi.

1. Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif

Tema ini penting untuk diteliti berdasarkan pendekatan fenomenologi. Akumulasi pengalaman dari partisipan sebagai yang merasakan fenomena pendidikan tinggi inklusif memunculkan jawaban-jawaban yang beragam, ada yang menyampaikan keluhan dan ada pula yang menyampaikan pencapaian. Berikut penjabaran ulasan subtema beserta kategori:

a. Karir

1) Kendala Persiapan Karir

Kategori mengenai kendala persiapan karir banyak menyinggung mengenai peran Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) UB untuk memfasilitasi kesiapan difabel menuju dunia karir yang belum signifikan. Jawaban dari beberapa dekan menunjukkan bahwa belum ada koordinasi selama ini antara UPKK dengan fakultas untuk memfasilitasi mahasiswa difabel dalam hal tersebut. Pembahasan di jajaran pimpinan UB menurut Dekan FILKOM tidak ada membahas mengenai bagaimana upaya UB memfasilitasi mahasiswa difabel nanti dalam mencari pekerjaan setelah lulus, justru lebih banyak pembahasan mengenai penerimaan mahasiswa baru difabel saja.

Peran UPKK dalam memfasilitasi persiapan menuju dunia karir bagi mahasiswa difabel menurut pengalaman mahasiswa difabel sendiri masih kurang. Terlebih bagi Hasan yang sudah lulus merasa UPKK sejauh ini belum memfasilitasi hal tersebut. Anjas menyampaikan hal ini harus menjadi evaluasi mengingat setelah lulus nanti mahasiswa difabel menurutnya akan menjadi tenaga

profesional. Sasa turut menyampaikan bahwa sejauh ini dia belum mengetahui apa itu UPKK.

UPKK mengakui belum pernah melakukan pendataan mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya. Selain itu upaya memfasilitasi mahasiswa difabel dari UPKK belum ada dalam *roadmap* kerjanya. Prof. Bisri selaku Rektor periode 2014-2018 turut menyampaikan bahwa selama beliau menjabat, fokus untuk melayani difabel masih seputar pengadaan infrastruktur, beliau menambahkan sudah saatnya untuk memfasilitasi menuju persiapan karir mahasiswa difabel.

2) Peluang Karir

Mengenai peluang karir yang disampaikan oleh Dekan FEB, Wakil Rektor 1, serta Kabag Umum dan Hukum Tata Laksana (HTL), mereka menceritakan pengalamannya memiliki kenalan alumni UB yang difabel dan sudah memiliki pekerjaan. Manajer Operasional Masjid Raden Patah (MRP) juga menyampaikan keterbukaannya jika salah satu imam muda difabel MRP ingin menjadi pegawai di MRP, meskipun hal tersebut tentunya kembali kepada keputusan rektorat.

3) Upaya Pelatihan Karir

Upaya pelatihan karir kepada difabel pernah diadakan oleh Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) UB berdasarkan pengalaman Firman. Menurut Firman hal tersebut sangat membantu. Pelatihan-pelatihan selama ini bagi difabel masih PSLD menyelenggarakan, hal ini menjadi catatan bagi UPKK untuk turut memfasilitasi pelatihan karir bagi mahasiswa difabel.

b. Penerimaan Difabel

1) Kendala Akses Pendidikan

Perspektif beberapa dekan mengenai kendala akses memperoleh pendidikan bagi difabel diantaranya yaitu karena alasan mobilitas ketika riset di laboratorium maupun di lapangan. Fakultas-fakultas di rumpun kedokteran menolak penerimaan difabel dengan alasan regulasi dari nasional yang menyatakan bahwa mahasiswa yang diterima haruslah sehat jasmani dan rohani, ada pula karena cara pandang dalam melayani haruslah orang yang dalam kondisi fisik normal.

2) Kendala Regulasi

Kesulitan untuk menerima difabel di jurusan-jurusan kedokteran dikarenakan terdapat regulasi nasional yang sudah *rigid* untuk kriteria calon mahasiswa. Konsil Kedokteran Indonesia mengatur bahwa calon mahasiswa kedokteran haruslah sehat jasmani dan rohani. Makna “sehat jasmani” sejauh ini belum spesifik menjelaskan batasannya.

3) Upaya Penerimaan Difabel

Penerimaan khusus calon mahasiswa difabel sudah dilaksanakan sejak era Prof. Yogi, Rektor Universitas Brawijaya periode 2010-2014, jauh sebelum undang-undang tentang disabilitas diresmikan. Menurut Wakil Rektor 1 bahkan sudah ada payung hukum berupa peraturan rektor yang mengatur penerimaan mahasiswa difabel secara khusus, meskipun belum semua fakultas menerapkannya. Upaya ini yang menjadikan Universitas Brawijaya sebagai salah satu percontohan nasional perguruan tinggi yang menerima mahasiswa difabel.

Pada jajaran pimpinan memang mengenai penerimaan mahasiswa difabel merupakan bahasan bertema inklusivitas yang sering dibahas tiap tahunnya.

c. Pelayanan

1) Upaya Pelayanan

Dibentuknya PSLD sebagai unit layanan disabilitas di Universitas Brawijaya merupakan langkah positif untuk menjalankan amanat Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 10. PSLD memiliki program untuk membangun *disability awareness* kepada dosen-dosen dan tenaga kependidikan salah satunya dengan memberi pelatihan *sign language*, meskipun efektifitasnya masih terus dilakukan evaluasi. Adanya tenaga pendamping (*volunteer*) yang disediakan PSLD untuk mahasiswa difabel cukup membantu, meskipun jumlah tenaga pendampingnya masih terbatas. Menurut Wakil Rektor 4 hadirnya *volunteer* turut berkontribusi membentuk kultur inklusif di Universitas Brawijaya, senada dengan yang disampaikan Pratiwi dkk. (2018) bahwa secara tidak langsung para pendamping turut mengampanyekan hak-hak difabel khususnya dalam konteks pendidikan.

Universitas Brawijaya sejauh ini belum memiliki *interpreter* dalam kegiatan peribadatan. Beberapa dekan pun baru mengetahui adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 82 kepada pemerintah pusat dan daerah untuk

mengupayakan penyediaan *interpreter* dalam kegiatan peribadatan. Universitas Brawijaya selaku institusi pendidikan dibawah pemerintah pusat sudah seharusnya melaksanakan amanat undang-undang tersebut, terlebih untuk ketersediaan sumber daya dari PSLD seharusnya sudah disiapkan.

2) Kendala Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan untuk mampu melayani dengan lebih inklusif kepada mahasiswa difabel merupakan amanat Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 7. Universitas Brawijaya menurut pendapat Anjas masih berkuat pada pembangunan infrastruktur, namun untuk membangun sumber daya manusianya agar lebih inklusif belum maksimal. Universitas Brawijaya sudah mengadakan pelatihan bahasa isyarat, namun semangat mempelajari inklusivitas kepada difabel dari dosen dan tenaga kependidikan masih kurang.

3) Kendala Pelayanan Umum

Kendala melayani mahasiswa difabel oleh pihak universitas maupun fakultas bermula dari kurangnya inisiatif mengakomodasi kebutuhan mereka. Sasa berpendapat ketika wawancara seleksi penerimaan sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya dengan pihak program studi hanya ditanyakan sebatas kesiapan saat nanti kuliah, perihal kebutuhan khusus yang Sasa butuh diakomodasi seharusnya oleh pihak universitas maupun fakultas tidak ditanyakan. Kebutuhan khusus

difabel berdasarkan jenis-jenisnya memang berbeda dan butuh diakomodasi untuk membantu aktivitasnya, Firman misalnya, yang membutuhkan *printer braille*, *scanner*, dan pendamping khusus yang selalu ada di perpustakaan untuk mencari buku. Firman mengalami kesulitan ketika mengakses fasilitas di perpustakaan karena kebutuhan khususnya tersebut yang belum diakomodasi, selain itu Firman juga pernah mengalami kesulitan mencari ruang kelas yang dituju karena adanya perubahan nomor ruang kelas. Kesulitan serupa juga dialami Hasan, ketika mengakses pelayanan di Poliklinik Universitas Brawijaya. Tidak adanya pengumuman panggilan antrian secara visual membuat Hasan kebingungan menunggunya apakah sudah gilirannya atau belum. Menerima obat yang tidak sesuai keluhan penyakit pernah dialami Hasan karena tidak mengertinya dokter dengan bahasa isyarat, padahal Hasan sudah menirukan batuk-batuk. Ketika Hasan keluar dari parkir pun pernah mengalami penjaga parkir yang bersungut kepadanya karena Hasan tidak mengerti permintaan penjaga parkir untuk menunjukkan STNK. Tambahan menurut Hasan pelayanan di bagian akademik tidak ada prosedurnya, hal tersebut yang membuatnya kesulitan.

Kesulitan yang dialami mahasiswa-mahasiswa difabel tersebut dapat dilihat dari sudut pandang *social model*, hal yang membuat mereka berkebatasan sebenarnya karena pelayanan yang terbatas. Sensitifitas dari pemberi layanan harus diatur secara administratif kepada difabel. Dibutuhkan pemahaman akan kebutuhan khusus difabel yang berbeda-beda, sehingga dengan pemahaman tersebut akan mempermudah pelayanan yang diberikan.

Upaya dalam memberikan pelayanan kepada difabel bagi Dekan FT dan FP tidaklah mudah, karena jumlah mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya yang terbilang sedikit. Berdasarkan jumlah mahasiswa difabel yang sedikit, sementara dari segi anggaran yang dikeluarkan untuk memfasilitasi kebutuhan mereka cukup banyak bagi Dekan FT adalah letak kesulitannya, di lain sisi bagi Dekan FP kesulitan untuk memahami kebutuhan khusus mahasiswa difabel dikarenakan mahasiswa difabel yang tidak meminta bantuan. Bagi Dekan FKH pelayanan selama ini kepada mahasiswa difabel hanya bersifat kemauan dari personal pemberi layanan saja, menurut beliau harus ada peraturan yang khusus melayani difabel agar semua unit wajib melaksanakan.

4) Kendala Pelayanan Peribadatan

Pelayanan peribadatan banyak menyinggung mengenai *interpreter* bagi difabel jenis tuli yang belum tersedia di Masjid Raden Patah. Dekan FISIP yang kebetulan merupakan Ketua Takmir Masjid Raden Patah menyampaikan bahwa butuh ada bantuan dari PSLD untuk menyediakan *interpreter* saat kegiatan ceramah-ceramah. Menurut Dekan FIB penyediaan *interpreter* saat ceramah-ceramah di Masjid Raden Patah cukup menarik untuk dijadikan perhatian. Tidak hanya penyediaan *interpreter* yang harus disediakan menurut Masjid Raden Patah, tampilan ceramah di layar proyektor dengan *running text* juga dibutuhkan menurut Hasan dan penyediaan Alquran *braille* menjadi lebih banyak juga dibutuhkan oleh Firman.

Universitas Brawijaya harus mulai membangun kultur inklusif di ranah peribadatan. Penyediaan *interpreter* dan *running text* saat ceramah-ceramah peribadatan di Masjid Raden Patah berdasarkan fikih disabilitas menurut Husna dkk. (2018:97) disampaikan bahwa:

“Hukum takmir masjid menyediakan fasilitas *interpreter* atau *running text* yang berisi khotbah Jumat sehingga juga bisa dipahami oleh penyandang disabilitas rungu **diperbolehkan secara kaidah beribadah**, dengan catatan agar teknisnya tidak mengganggu jamaah lain.”

Tidak hanya penyediaan *interpreter* untuk kegiatan peribadatan Agama Islam yang ke depan harus menjadi perhatian pimpinan Universitas Brawijaya, melainkan juga untuk mahasiswa difabel yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu, selama kegiatan peribadatan keagamaan di lingkup kampus. Pemberian layanan peribadatan yang ramah difabel akan menambah sisi positif Universitas Brawijaya untuk bisa dijadikan percontohan nasional. Sebagaimana Manajer Operasional MRP menyampaikan bahwa dengan adanya *interpreter* akan membuat kebutuhan mengakses pendidikan agama bagi mahasiswa difabel dapat terpenuhi.

5) Pertimbangan Rasio Difabel

Pemberian layanan kepada mahasiswa difabel untuk tidak terlalu dibahas di ranah pimpinan karena pertimbangan rasio mahasiswa difabel yang sedikit dengan mahasiswa non-difabel pada umumnya di Universitas Brawijaya menurut Prof. Bisri. Berdasarkan rasio tersebut pertimbangan untuk dijadikan pokok bahasan

dalam perspektif pimpinan menjadi kurang terprioritaskan. Menurut Dekan FH yang akan membuat tersegerakannya pemberian fasilitas untuk difabel yaitu dengan adanya regulasi. Semakin banyak menerima mahasiswa difabel akan semakin mempermudah pemberian layanan dan *resources* yang disediakan menjadi bermanfaat bila dibandingkan jumlah mahasiswa difabel yang ada sedikit menurutnya.

Pertimbangan jumlah difabel untuk dilayani menjadi catatan dalam menggunakan analisis *Sociological Institutionalism (SI) Theory*, karena di dalam SI perilaku individu dan organisasi sama-sama bersumber pada *cognitive scripts* yang dibentuk oleh identitas kultural dan institusi yang berlaku (Putra dan Sanusi, 2019). Apa yang disampaikan oleh Dekan FH bahwa tersegerakannya pemberian fasilitas kepada difabel hanyalah dengan adanya regulasi, berarti institusionalisasi nilai inklusif dari regulasi pemerintah belum menjadi sebuah nalar kepastian yang cukup diterima di Universitas Brawijaya bagi beberapa individu.

d. Proses Belajar Mengajar

1) Pengalaman Mengajar Difabel

Beberapa dekan yang pernah memiliki pengalaman mengajar difabel selama proses belajar mengajar yaitu Dekan FH, FILKOM, FISIP, dan FP. Secara spesifik beberapa dekan menceritakan mengajar mahasiswa difabel dengan jenis tertentu, seperti Dekan FH saat itu mengajar mahasiswa difabel tuna netra; Dekan FILKOM saat itu mengajar mahasiswa difabel tuna wicara; Dekan FP saat itu mengajar mahasiswa difabel tuli. Penyesuaian dalam mengajar diberlakukan oleh

para dekan tersebut agar mempermudah mahasiswa difabel menerima pembelajarannya.

2) Kendala Proses Belajar Mengajar

Kendala proses belajar mengajar yang dialami oleh dekan dengan kapasitas dasarnya sebagai dosen dan mahasiswa difabel sebagai penerima pembelajaran adalah metode pengajaran dosen kepada difabel dan fasilitas pendukung yang kurang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa difabel. Dekan FILKOM menceritakan pengalamannya bahwa ada *volunteer* yang mengikuti kelasnya, berdasarkan pernyataan *volunteer* tersebut bahwa dia pernah dilatih oleh PSLD untuk menunjang kebutuhan proses pembelajaran mahasiswa difabel. Dekan FILKOM menambahkan bahwa dirinya dengan kapasitas sebagai dosen belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menunjang proses pengajaran yang lebih inklusif dari PSLD. Dekan FISIP pun menambahkan berdasarkan pernyataannya bahwa pembahasan di rapat pimpinan mengenai desain kurikulum atau implikasi proses pembelajaran selama 3 tahun beliau menjabat sebagai Dekan FISIP belum pernah ada.

Pengalaman akan keterbatasan buku-buku digital yang dapat diperoleh menurut Firman cukup menjadi kendala proses pembelajaran bagi dirinya. Melalui buku digital, bagi mahasiswa difabel tuna netra akan mempermudah penggunaan *assistive technology* seperti *text to speech* untuk proses pembelajarannya, hal tersebut yang diharapkan Firman untuk bisa lebih diakomodasi.

Kompetensi dosen untuk ditingkatkan menjadi lebih inklusif sangat dibutuhkan di Universitas Brawijaya. Kendala Hasan ketika meminta dosen sebagai pembimbing skripsi adalah penolakan dari dosen yang diminta dengan alasan dosen tersebut tidak bisa bahasa isyarat. Beruntung dengan upaya persuasif Hasan akhirnya dosen tersebut menerima permintaan tersebut, Hasan pun kini sudah lulus. Hasan menceritakan pula pengalamannya saat di kelas ketika namanya dipanggil oleh dosen saat pembacaan absensi, menurut dia akan lebih mudah baginya jika namanya ditulis di papan tulis. Sensitifitas dosen terhadap kebutuhan khusus mahasiswa difabel sangat butuh dibangun demi memudahkan pemberian layanan yang inklusif.

e. Interaksi

1) Upaya Koordinasi

Pembahasan mengenai isu inklusivitas terhadap difabel selama rapat pimpinan mulai dari Prof. Bisri, Prof. Nuhfil, hingga beberapa dekan-dekan menunjukkan pernyataan yang berbeda-beda. Pada intinya pembahasan mengenai inklusivitas terhadap difabel terbilang minim, hanya sebatas membahas penerimaan mahasiswa difabel. Untuk membahas mengenai memfasilitasi kebutuhan difabel, dari Prof. Nuhfil upaya koordinasi yang dilakukan kepada dekan-dekan berdasarkan pernyataannya yaitu berupa pesan-pesan untuk diperhatikan kebutuhan difabel, karena tuntutan kewajiban dari standar internasional.

Berdasarkan pernyataan Wakil Rektor 4 pembahasan terkait inklusivitas kepada difabel di rapat pimpinan terbilang sering. Beliau juga menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari universitas lain mengenai kerjasama dalam diseminasi mengelola mahasiswa difabel, upaya koordinasi tersebut menurut beliau menggambarkan bahwa Universitas Brawijaya terpancang sebagai percontohan meski beliau sendiri belum puas dengan kondisi kultur inklusif di Universitas Brawijaya sendiri.

2) Kebutuhan Komunikasi

Pengalaman Hasan bertemu difabel dengan jenis yang berbeda-beda membuatnya berusaha berlatih komunikasi. Menurutnya komunikasi menjadi sebuah kebutuhan untuk di ranah akademik dan organisasi. Kebutuhan ini juga harus diketahui oleh mereka yang non-difabel agar lebih memudahkan aktivitas mereka yang difabel.

3) Kendala Komunikasi

Pengalaman Hasan berkomunikasi pertama kali dengan sesama difabel tuli. Komunikasinya berbeda menurutnya karena budaya tulinya yang berasal dari daerah yang beragam, sehingga cara berinteraksinya pun berbeda. Menurut pengalaman Hasan sangat sulit berkomunikasi dengan difabel tuna netra, sehingga membutuhkan pendamping sebagai perantara komunikasi antara Hasan dengan difabel tuna netra tersebut.

4) Kendala Koordinasi

Koordinasi yang terkendala terjadi tidak hanya antara mahasiswa difabel dengan pimpinan Universitas Brawijaya, bahkan juga di antara level pimpinan dengan unit-unit. Anjas menyampaikan keluhannya ketika ada permasalahan penolakan mahasiswa difabel di berbagai fakultas, belum ada audiensi dengan mahasiswa difabel untuk mengklarifikasi alasan penolakan tersebut. Dekan FKH menyampaikan tidak pernah ada koordinasi dari UPKK sedari beliau menjabat sebagai Dekan FTP hingga kini untuk membahas perihal persiapan karir mahasiswa difabel. Beliau juga menambahkan tidak tahu mengenai apakah ada rancangan kerja yang sudah disusun oleh PSLD terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 perihal hak difabel untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. PSLD sendiri pernah mengadakan pelatihan karir untuk difabel namun sayangnya tidak diikutsertakan UPKK untuk terlibat di dalamnya, karena menurut Ketua PSLD belum ada mekanisme formal yang mengatur koordinasi tersebut. Pengalaman Ketua UPKK sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan inklusivitas terhadap difabel, di lain sisi teruntuk membahas anggaran dan OTK terbilang sering. Selanjutnya dalam perencanaan penyediaan fasilitas di Masjid Raden Patah masih terdapat kendala pula dalam hal koordinasi. Manajer Operasional MRP menyampaikan bahwa pihak Takmir MRP sudah merencanakan sebaik mungkin untuk melayani jamaah MRP tidak hanya untuk difabel namun juga untuk jamaah yang sudah sepuh, tetapi implementasinya yang disediakan oleh pihak rektorat bagian umum tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pihak Takmir MRP. Penyediaan infrastruktur juga terjadi *miss* koordinasi antara pihak rektorat dengan fakultas.

Wakil Rektor 4 menyampaikan bahwa semua perencanaan pembangunan gedung bermula dari rektorat, namun ketika sudah pada tahap lelang dan eksekusi itu adalah fakultas yang memonitoring dan hal tersebut yang menyebabkan terkadang pembangunan gedung tidak sesuai dengan yang direncanakan.

f. Infrastruktur

1) Kendala Fasilitas Umum

Universitas Brawijaya masih memiliki catatan evaluasi yang cukup banyak mengenai infrastrukturnya yang belum ramah difabel. Beberapa infrastruktur tersebut yang belum ramah difabel contohnya trotoar yang belum *well-connected* karena belum banyaknya *ramp*, *guiding block* dengan warna kuning, akses untuk menyeberang jalan dan memasuki bangunan; lift yang belum terdapat *handrail*, tombol *braille*, informasi berupa audio untuk menjelaskan posisi lantai saat pemberhentian, dan luas lift yang cukup untuk difabel *wheelchair user*; toilet khusus; dan tempat wudhu di musholla fakultas maupun Masjid Raden Patah. Penjelasan spesifik mengenai bangunan gedung dengan prinsip desain universal ramah difabel sudah terdapat di Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 PRT/M/Tahun 2017. Dengan adanya regulasi tersebut seharusnya memudahkan Universitas Brawijaya membangun kultur inklusif secara fisik.

2) Kendala Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan seperti Masjid Raden Patah masih belum aksesibel bagi difabel. Menurut Anjas akses untuk menuju tempat wudhu saja belum ramah untuk dirinya karena terdapat kolam yang justru menyulitkan dirinya untuk

melewati, selain itu kontur keramik yang licin juga menjadi catatan evaluasi. Hal serupa juga disampaikan Hasan bahwa Masjid Raden Patah belum aksesibel bagi pengguna kursi roda. Sasa sebagai pengguna kursi roda mengalami sendiri kesulitan tersebut sehingga akhirnya Sasa tidak pernah beribadah di Masjid Raden Patah. Kesulitan-kesulitan ini disadari oleh Wakil Rektor 4 dan Masjid Raden Patah. Revitalisasi Masjid Raden Patah sudah seharusnya dilakukan oleh Universitas Brawijaya agar lebih aksesibel untuk difabel mengingat amanat dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 PRT/M/ Tahun 2017 untuk bangunan gedung dengan prinsip desain universal.

3) Kendala Pemahaman

Berdasarkan pernyataan dari Ketua PSLD ada beberapa gedung yang tidak menerapkan prinsip desain universal dengan alasan tidak menerima mahasiswa difabel. Beberapa pimpinan fakultas masih ada yang berfikir seperti itu menurutnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengalaman Wakil Rektor 4 bahwa fakultas kurang mengikuti aturan dari universitas, beliau merasa karena *disability awareness*-nya masih kurang. Tambahan pula menurut beliau mungkin pihak fakultas masih berorientasi pertama pada struktur, lalu keindahan, terakhir pada fungsi.

4) Pertimbangan Sumber Daya

Pembangunan infrastruktur menurut Dekan FH sudah harus disesuaikan dengan standar untuk memberi akses kepada difabel. Alasan tersebut karena dalam menyediakan infrastruktur yang ramah difabel bersifat tahan lama,

sehingga tidak akan sia-sia. Pertimbangan penyediaan infrastruktur tersebut memiliki kecenderungan pada pertimbangan untung rugi.

5) Upaya Penyediaan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berdasarkan yang disampaikan oleh Kabag Umum dan HTL telah dibuat zonasi yang diserahkan kepada dekan masing-masing. Beberapa dekan-dekan juga sudah menyadari konsekuensi amanat regulasi dari pemerintah sehingga mulai mengupayakan bangunan gedung yang tersedia agar lebih aksesibel bagi difabel. Prof. Nuhfil juga memberikan pesan kepada dekan-dekan untuk memperhatikan sarana prasarana yang ramah difabel karena terdapat tuntutan kewajiban dari standar internasional.

6) Kebutuhan Fasilitas Umum

Kebutuhan fasilitas umum yang ramah bagi difabel menurut Hasan sangat dibutuhkan. Seperti adanya akses trotoar, *ramp*, *handrail*, dan pengumuman audio-visual sangat dibutuhkan. Menurutnya inklusivitas dalam wujud fisik sangat penting untuk kehidupan difabel.

7) Monitoring Implementasi

Upaya monitoring implementasi pembangunan infrastruktur belum banyak menjadi perhatian bagi pimpinan Universitas Brawijaya. Menurut Dekan FILKOM pelimpahan monitoring tersebut diserahkan kepada konsultan perencana. Selain itu Kabag Umum dan HTL juga menyampaikan bahwa tidak ada keterlibatan monitoring dari rektorat di dalam pembangunan gedung baru.

2. Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif

Tema ini penting untuk diteliti berdasarkan pendekatan fenomenologi. Akumulasi pengalaman dari partisipan sebagai yang merasakan fenomena pendidikan tinggi inklusif membuat partisipan memaknai fenomena tersebut. Berikut pemaknaan dari partisipan yang menjadi subtema-subtema:

a. Tuntutan

Institusionalisasi nilai inklusif untuk bisa diterapkan di Universitas Brawijaya berdasarkan pernyataan beberapa pimpinan karena adanya tuntutan dari regulasi pemerintah dan standar penilaian internasional. Menurut Dekan FH perubahan untuk Universitas Brawijaya hanya berkembang seiring waktu saja berdasarkan hal apa yang segera dibutuhkan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Dekan FMIPA bahwa lambat laun nilai inklusivitas kehadirannya tidak bisa dibantahkan. Terlebih karena sudah ada amanat dari undang-undang.

b. Konstruksi Nalar Kepantasan

Proses konstruksi nilai inklusif sehingga menjadi sebuah nalar kepantasan (*the logic of appropriateness*) di Universitas Brawijaya dan bahkan di masyarakat umum berdasarkan pernyataan pimpinan dan mahasiswa difabel yaitu berasal dari kesadaran (*awareness*), cara pandang, dan kewajiban pelayanan (*service obligation*). Menurut Anjas membentuk inklusivitas tidak hanya melalui membangun secara fisik, namun juga edukasi *disability awareness*. Anjas juga menambahkan harusnya ada kesadaran bahwa semua orang akan difabel pada waktunya, terlebih saat menginjak usia tua menurutnya. Berdasarkan opini Sasa

bahwa sivitas akademika Universitas Brawijaya bisa saja baru menyadari dibutuhkannya inklusivitas ketika seseorang merasakan menjadi difabel. Inklusivitas terhadap difabel menurut Wakil Rektor 4 harusnya dicontohkan oleh perguruan tinggi agar masyarakat dapat teredukasi mengenai *difability awareness*.

Melihat difabel dengan pemaknaan istilah dan sensitivitas oleh beberapa pimpinan dan mahasiswa difabel menjadi cara pandang mereka. Menurut Dekan FIA perlu ada pergeseran makna dari *disability* menjadi *difability*. Selanjutnya menurut Dekan FILKOM, beliau lebih sepekat penyebutannya adalah difabel dibanding disabilitas ataupun penyandang cacat, karena menurutnya memang secara fisik terdapat kekurangan namun biasanya memunculkan potensi lain. Mengenai sensitivitas, Manajer Operasional Masjid Raden Patah menyampaikan bahwa harus adanya sikap tidak eksklusif sebagaimana difabel yang inklusif. Wakil Rektor 4 juga menyampaikan bahwa difabel tidak ingin diistimewakan, beliau menambahkan jika difabel disekolahkan di sekolah yang eksklusif hal itu akan membentuk difabel menjadi tidak sehat jiwa sosialnya. Pendapat Wakil Rektor 4 tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Oliver (1996) terhadap sistem pendidikan khusus yang justru membuat penyandang difabel terkecualikan, berikut kutipannya: *“I argue that the special education system has functioned to exclude persons with disabilities are not only from the education process but also from mainstream social life”*.

Kewajiban pelayanan untuk difabel bagaimanapun harus menjadi upaya konstruksi nalar kepastian di Universitas Brawijaya bagi beberapa pimpinan dan mahasiswa. Menurut Dekan FILKOM secara biaya memang tidak efisien untuk

melayani difabel dengan jumlah difabel yang sedikit, namun bagaimanapun difabel menurutnya memiliki kesempatan hak yang sama untuk dilayani. Menurut Direktur Vokasi perihal sejauh mana pimpinan berinteraksi dengan difabel baginya hal itu menunjukkan empati, kalau hanya sekedar mendengarkan kabar-kabar saja beliau merasa hal tersebut tidak kurang akomodatif. Perihal akomodatif sebagaimana Firman sampaikan bahwa difabel membutuhkan dukungan, waktu untuk berkarya, dan beribadah semaksimal mungkin. Sasa juga menyatakan hal serupa bahwa dia berpendapat untuk membangun fasilitas tidak akan merugikan karena hal tersebut tidaklah sulit dan cukup manusiawi. Selain itu Sasa menyatakan bahwa bukan alasan dengan jumlah difabel yang sedikit untuk tidak diakomodasi, harus adanya perlakuan yang adil antara difabel dengan non-difabel dan jangan beri rasa kasihan. Sebagai tambahan dia juga menyampaikan secara eksplisit untuk pimpinan Universitas Brawijaya agar memberi kesempatan kepada difabel untuk maju dengan diberi fasilitas.

3. Diseminasi

Diseminasi-diseminasi yang disampaikan oleh partisipan dapat dijadikan upaya institusionalisasi nilai inklusivitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya. Partisipan sebagai yang mengalami fenomena pendidikan tinggi inklusif akan mempermudah penerimaan diseminasi-diseminasi yang disampaikan sebagai standar baru berupa kebijakan di Universitas Brawijaya. Berikut interpretasi dari masing-masing diseminasi:

a. Diseminasi Akses Pendidikan

Akses memperoleh pendidikan dapat sewaktu-waktu terhambat apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti kecelakaan yang terjadi pada mahasiswa. Menurut Dekan FKG di masa mendatang akan ada kemungkinan untuk difabel berkuliah di FKG, karena jika terdapat kejadian tidak terduga seperti kecelakaan pada mahasiswa yang menyebabkannya menjadi difabel dan selama mahasiswa tersebut masih bisa melaksanakan aktivitas kuliahnya maka tidak menjadi masalah, misalnya tuna daksa kaki yang memiliki kaki tiruan. Dapat dikatakan berarti keadaan fisik seseorang saat seleksi penerimaan mahasiswa maupun saat sudah menjadi mahasiswa bukanlah alasan diterima, ditolak, atau diberhentikan di fakultas tertentu, selama keadaan fisik tersebut masih sangat memungkinkan untuk ditunjang dengan alat bantu. Dekan FMIPA juga menambahkan hal serupa menurutnya masih ada kemungkinan mahasiswa yang kecelakaan untuk dipindah ke jurusan yang jauh lebih ringan mobilitasnya. Wakil Rektor 1 juga menyampaikan bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada mahasiswa hingga menyebabkannya menjadi difabel yang terpenting adalah mahasiswa tersebut tetap bisa menyelesaikan kompetensinya.

Menerima difabel bagi beberapa fakultas masih cukup sulit karena kekhawatiran dalam proses perkuliahan nanti yang akan menghambat aktivitas difabel. Ketua PSLD mencontohkan jurusan bahasa di Universitas Indonesia (UI) sudah menerima tuna wicara karena UI sudah bisa memfasilitasi *sign language*. Menurutnya hanya tinggal menunggu waktu untuk semua kebutuhan fasilitas pendidikan mahasiswa difabel dapat terpenuhi.

b. Diseminasi Fasilitas Umum

Kebutuhan akan fasilitas umum yang aksesibel sangat dibutuhkan bagi difabel. Fasilitas umum yang aksesibel juga harus diperhatikan kekhususan fungsinya kepada difabel. Menurut Dekan FIA harus ada klasifikasi di dalam membangun infrastruktur sesuai kebutuhan khusus difabel sesuai jenis difabelnya masing-masing. Menurut Direktur Vokasi di dalam proses pelelangan pembangunan gedung harusnya syarat-syarat di dalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 masuk dalam indikator penilaian gedung. Beliau juga menambahkan untuk dari pihak difabel yang memahami kebutuhan fasilitas yang inklusif bisa terlibat di dalam tim perencanaan pembangunan gedung. Menarik apa yang disampaikan oleh Dekan FT untuk sebaiknya menyediakan gedung khusus untuk difabel yang sudah memenuhi aspek regulasi pemerintah agar lebih efisien dalam pembiayaan. Pendapat tersebut justru menimbulkan difabel secara sosial menjadi tereksklusikan.

c. Diseminasi *Building Awareness*

Membangun *difability awareness* sangat dibutuhkan untuk membentuk kultur yang inklusif. Anjas menyampaikan belum ada kurikulum tentang *difability awareness* di pendidikan Indonesia, akhirnya menurutnya masih terdapat kebingungan dalam membantu difabel apakah harus karena atas dasar kasihan atau yang lain. *Difability awareness* juga bisa dibangun dengan memberikan ruang bersama kepada difabel dengan non-difabel. Menurut Hasan jangan ada pemisahan antara yang difabel dengan yang non-difabel, hal ini agar mereka yang non-difabel menjadi sadar tentang difabel sebagai perbedaan identitas seperti apa. Hasan juga menambahkan harus ada saat ospek berupa video edukasi tentang

difability awareness, lalu pelatihan tentang inklusivitas untuk mahasiswa yang mengikuti organisasi, serta edukasi ke sekolah-sekolah tentang inklusivitas kepada difabel agar ke depan tidak ada lagi *bullying* yang dirasakan oleh difabel dalam bersosialisasi. Selanjutnya menurut Wakil Rektor 4 yang perlu diciptakan oleh Universitas Brawijaya yaitu sebuah kesadaran bahwa manusia punya hak yang sama dihadapan Tuhan dan manusia.

d. Diseminasi Pelayanan Peribadatan

Pelayanan peribadatan yang diharapkan oleh partisipan secara umum adalah adanya penyedia bahasa isyarat (*interpreter*) dan ceramah yang terdapat *running text* pada layar proyektor. Penyediaan hal tersebut di Universitas Brawijaya akan menjadi percontohan yang baik bagi masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan spiritual merupakan hak dasar manusia, pemberian pelayanan peribadatan harus berorientasi untuk memudahkan difabel memperoleh hak tersebut.

e. Diseminasi Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang menjadi harapan partisipan adalah fasilitas peribadatan dengan kemudahan yang dapat diakses oleh difabel. Harapan Hasan seperti Masjid Raden Patah untuk mengganti lantai keramikya karena mudah licin, menyediakan lift untuk kursi roda, *guiding block*, petunjuk *braille*, dan *handrail*. Ketua PSLD juga memberikan harapannya agar mulai ada perubahan di rumah ibadah menjadi lebih aksesibel untuk difabel. Manajer Operasional Masjid Raden Patah juga menambahkan bahwa Masjid Raden Patah dalam bentuk

bangunan dan fasilitas harus bisa mengakomodasi seluruh jamaah baik yang non-difabel, difabel, sepuh, anak kecil, dan orang dewasa.

f. Diseminasi Koordinasi

Koordinasi untuk menciptakan kultur inklusif sangat dibutuhkan. PSLD cukup sering disebut sebagai pihak yang dibutuhkan untuk diajak berkoordinasi. Takmir Masjid Raden Patah dalam menyediakan *interpreter* sangat membutuhkan bantuan dari PSLD. Menurut Ketua PSLD sendiri koordinasi memang sangat dibutuhkan seperti adanya media komunikasi di internal Universitas Brawijaya untuk mengidentifikasi permasalahan hingga dapat dicari solusi. Beliau juga menambahkan dengan adanya komunikasi berupa masukan dari mahasiswa, pendamping difabel (*volunteer*), pengambil kebijakan, dan dari PSLD yang mengelola, akhirnya menjadi langkah positif sebagai bentuk ingin tahu dan lalu ingin mengusahakan. Pernyataan Anjas turut memperjelas hal tersebut, baginya Universitas Brawijaya dapat terlihat serius terhadap pendidikan inklusif ketika mengadakan program diskusi yang melibatkan difabel.

g. Diseminasi Regulasi

Institusionalisasi nilai inklusif dapat masuk salah satunya melalui adanya regulasi yang mengatur inklusivitas tersebut. Beberapa pimpinan menyampaikan butuh adanya regulasi di tingkat universitas seperti peraturan rektor untuk menjadi panduan dalam mengimplementasikan inklusivitas terhadap difabel baik di lingkup universitas maupun fakultas. Peraturan rektor yang ada nantinya menurut Dekan FIA harus dibuat satu per satu dalam mengatur hal tertentu seperti adanya

peraturan rektor khusus infrastruktur, proses belajar mengajar, serta kegiatan kemahasiswaan. Dekan FAPET juga menyampaikan bahwa Universitas Brawijaya harus meningkatkan standar minimalnya sesuai Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sehingga selanjutnya dapat menyesuaikan ke dalam standar internasional.

h. Diseminasi Pelayanan Umum

Pelayanan harus memberikan kemudahan bagi difabel untuk mendapatkannya. Menurut Hasan baik rektorat, dekan, dosen-dosen, dan karyawan harus mengikuti pelatihan melayani difabel. Kenyamanan bagi difabel Hasan harapkan melalui pelayanan yang memahami difabel. Tempat ibadah dan Poliklinik Universitas Brawijaya juga menurutnya harus menyempurnakan kembali pelayanannya.

i. Diseminasi Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas pihak rektorat hingga fakultas untuk dapat memberikan pendidikan yang bermutu dan akomodasi yang layak butuh adanya tahap *learning*. Menurut Dekan FT harus ada sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut di pihak rektorat dan fakultas. Sosialisasi yang lebih luas dibutuhkan menurut beliau karena jumlah mahasiswa difabel yang sedikit.

j. Diseminasi Proses Belajar Mengajar

Inovasi metode di dalam proses belajar mengajar dibutuhkan untuk semakin menyesuaikan kebutuhan mahasiswa difabel dan tentunya untuk menciptakan kultur inklusif. Menurut Hasan dosen haruslah belajar bahasa isyarat. Menurut Ketua PSLD beliau menginginkan adanya *assistive technology* yang dapat menyesuaikan kebutuhan belajar sesuai jenis difabelnya. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Dekan FILKOM yang menginginkan adanya *machine learning* yang dapat menangkap penyampaian audio dosen saat pembelajaran lalu ditampilkan ke layar proyektor, hal tersebut menurutnya akan memudahkan dosen dalam mengajar di kelas. Beliau menginginkan apabila sudah ada *product* tersebut, maka dapat dijadikan kewajiban bagi seluruh fakultas untuk menggunakannya. Selanjutnya mengenai *difability awareness*, Wakil Rektor 4 menyampaikan harus ada kurikulum yang membahas hal tersebut.

k. Diseminasi Pemahaman

Pemahaman terhadap inklusivitas difabel dibutuhkan untuk menunjang nalar kepantasan yang kokoh di sivitas akademika Universitas Brawijaya. Anjas menyampaikan seperti untuk penerimaan difabel tidak boleh menyamaratakan terkait potensi difabel yang seolah mereka tidak sanggup untuk mengikuti perkuliahan. Ketua PSLD juga menyampaikan harapan untuk Universitas Brawijaya jika ingin menjadi institusi yang inklusif pastinya harus segala fasilitasnya disediakan dengan pemikiran untuk mewadahi semua orang. Selain itu menurut beliau cara berfikir mengenai difabel adalah orang yang tidak mampu beraktualisasi sebenarnya karena dari yang berpendapat demikian yang tidak

memfasilitasi difabel, padahal mereka juga banyak yang berprestasi. Beliau juga menambahkan harapannya secara fisik dan non-fisik bahwa kultur Universitas Brawijaya harus lebih inklusif, sehingga dalam memandang difabel yang terbentuk adalah difabel merupakan identitas yang sama-sama ingin menikmati hidup ini.

l. Diseminasi Umum

Universitas Brawijaya harus meningkatkan standar inklusivitasnya agar dapat diterima dengan baik oleh difabel dan menjadi percontohan nasional. Menurut Anjas harus ada program-program mengenai inklusivitas dari rektorat untuk menunjukkan keseriusannya sebagai perguruan tinggi inklusif. Menurut Dekan FKG ketika Universitas Brawijaya semakin inklusif akhirnya peminat semakin banyak, orangtua yang anaknya difabel jadi mau menguliahkan anaknya di Universitas Brawijaya. Prof. Nuhfil mempertegas secara umum Universitas Brawijaya harus mengikuti aturan-aturan nasional dan standar internasional agar Universitas Brawijaya dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lainnya.

m. Diseminasi Persiapan Karir

Persiapan karir bagi difabel sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan dunia karirnya. Peran UPKK cukup penting dalam hal ini, menurut Anjas UPKK harus mengoptimalkan pelayanan kepada mahasiswa difabel. Beberapa pimpinan menyampaikan harus ada pendataan mahasiswa difabel di fakultas mana saja beserta potensinya oleh UPKK untuk selanjutnya diberikan pelatihan persiapan karir. Berdasarkan pernyataan Dekan FT, UPKK juga harus terus berupaya

membangun jaringan dengan pihak penerima kerja disertai dengan membuat MoU untuk memudahkan mahasiswa difabel.

n. Diseminasi Dunia Karir

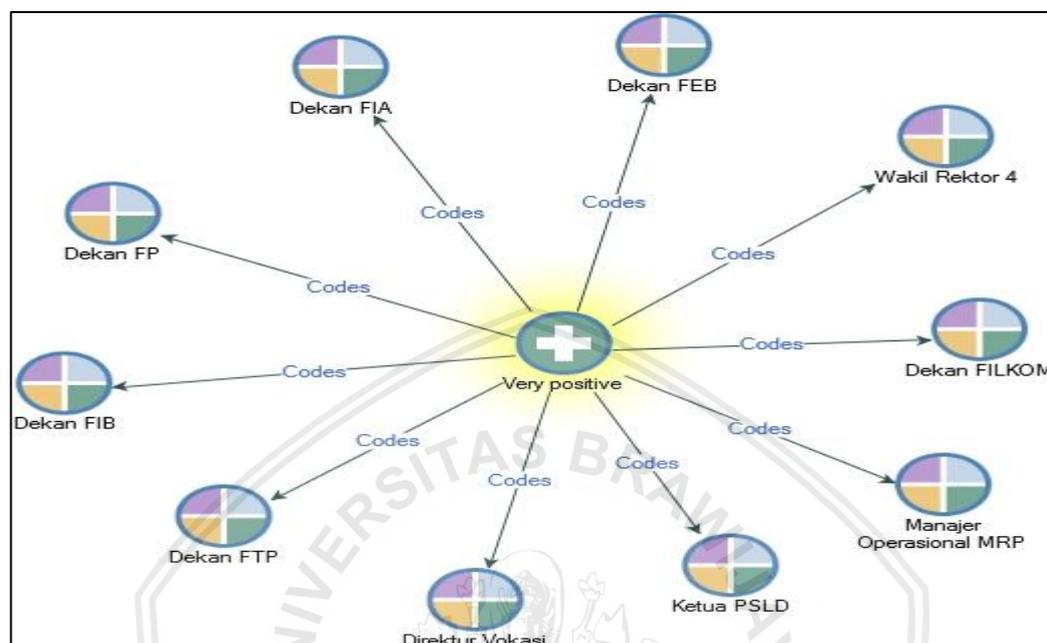
Universitas Brawijaya ketika telah siap menerima mahasiswa difabel maka harus pula siap mengakomodasi pasca kampus mahasiswa difabel di dunia karir. Universitas Brawijaya harapan dari Firman semoga bisa memperluas jaringan dengan pihak penerima kerja untuk memfasilitas difabel. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antara Universitas Brawijaya dengan pihak penerima kerja, hal tersebut dapat diatur dengan adanya kesepakatan berupa MoU.

4. Klasifikasi *Sentiments* pada Rektorat, Dekan, dan Direktur Vokasi

Peneliti menjadikan nilai inklusif berdasarkan *Sociological Institutionalism Theory* sebagai muatan nilai yang sudah seharusnya secara kolektif terkonstruksi dan terinstitusionalisasi di Universitas Brawijaya karena “kampus inklusif” telah menjadi identitas Universitas Brawijaya. Identitas tersebut berdasarkan pada penghargaan *Inclusive Education Award* yang diterima Universitas Brawijaya pada tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan temuan yang didapat oleh peneliti, terdapat aktor-aktor (dekan, direktur vokasi, dan rektorat) yang sudah terinstitusi nilai inklusif dan ada pula yang sebaliknya. Peneliti membuat tingkatan asumsi *sentiments* disertai visualisasi dengan menempatkan institusi nilai inklusif dalam perspektif *Sociological Institutionalism (SI)* pada masing-masing tingkatan *sentiments* yang disampaikan oleh aktor. Ketika aktor memberikan pernyataan yang menunjukkan

kepatuhan terhadap nilai inklusif disertai rasa kesadaran (*awareness*), maka peneliti menempatkan aktor tersebut pada *very positive sentiments*. Selanjutnya apabila pernyataan aktor menunjukkan adanya upaya menjalankan nilai inklusif karena pertimbangan historis, maka peneliti menempatkan aktor tersebut pada *moderately positive sentiments*. Apabila pernyataan aktor menunjukkan adanya diupayakan atau tidaknya dalam menjalankan nilai inklusif harus mempertimbangkan rasionalitas keuntungan maupun kerugian yang didapat, maka peneliti menempatkan aktor tersebut pada *moderately negative sentiments*. Terakhir apabila pernyataan aktor menunjukkan adanya bentuk keterpaksaan atau bahkan penolakan terhadap entitas nilai inklusif, maka peneliti menempatkan aktor tersebut pada *very negative*.



a. Asumsi *Very Positive*

Gambar 49. Skema Model Partisipan dalam Asumsi *Very Positive*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Skema model partisipan dalam asumsi *very positive* dapat dilihat pada Gambar 49, skema model tersebut diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu *explore diagram*. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait asumsi *very positive* antara lain:

<Files\\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 34 references coded [10.70% Coverage]

- Dekan FEB
Reference 1 - 0.16% Coverage

*“Difabel harus **diberi kesempatan yang sama pada hak dan akses**. Semua tinggal bagaimana kita merespon difabel ingin seperti apa.”*

Reference 2 - 0.26% Coverage

*“Ya memang kita seperti toilet khusus difabel saja masih belum ada. Saya rasa tekanan dengan adanya **standar penilaian internasional akan mempercepat pembangunan UB menjadi lebih mengakomodir kebutuhan difabel.**”*

- Dekan FIA
Reference 3 - 0.43% Coverage

*“Di SD Muhammad Hatta merupakan salah satu sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus, tentu tingkat fasilitasnya lebih tinggi dibanding mahasiswa. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan khusus tidak hanya bisa dirancang di pendidikan tinggi tetapi harus mulai dari pendidikan dasar, sehingga saya **berpengalaman dari tingkat pendidikan dasar.**”*

Reference 4 - 0.51% Coverage

*“Untuk menerjemahkan peraturan itu dalam bentuk konkrit baik menyangkut memfasilitasi akses, lalu proses belajar mengajar tentu (butuh) ada turunan dari Pertor (Peraturan Rektor) yang lebih detil. Karena standarisasi misalnya untuk infrastruktur masing-masing fakultas juga belum ada standar yang baku, **hanya masing-masing (implementasi) inklusivitas dari dekannya saja yang mempersiapkan tentang itu.**”*

- Dekan FIB
Reference 5 - 0.28% Coverage

*“Sepertinya di Masjid Raden Patah itu (interpreter) tidak ada ya, apalagi di mushola-mushola, saya kira ini menarik ya. **Insyallah saya akan sampaikan ke teman-teman (Takmir) Masjid Raden Patah untuk menjadi perhatian.**”*

Reference 6 - 0.38% Coverage

*“Secara spesifik kalau di FIB kami selalu diskusikan (membahas inklusivitas difabel), dosen-dosen sering mengeluh juga karena ingin membantu tetapi mereka tidak punya kemampuan (untuk melayani difabel). **Selalu kami upayakan untuk menghubungkan dosen, mahasiswa difabel, dan interpreter di FIB ini.**”*

Reference 7 - 0.18% Coverage

*“Brawijaya ini harus menjadi kampus untuk semua **bukan untuk hanya orang tertentu, hanya orang kaya saja, Brawijaya harus menjadi untuk semua.**”*

- Dekan FILKOM
Reference 8 - 0.31% Coverage

“Saya kuliah S3 di Adelaide, hampir semua fasilitas itu memfasilitasi difabel, contoh toilet untuk difabel, lift pasti ada pegangan (handrail – red), trotoarnya pasti ramah difabel bahkan yang terbilang seperti gang itu ramah difabel trotoarnya.”

Reference 9 - 0.12% Coverage

“Saya juga kalau ke luar negeri selalu yang saya perhatikan fasilitas kampusnya seperti apa saja.”

Reference 10 - 0.41% Coverage

“Secara biaya (untuk melayani difabel) kan gak efisien, ngurusi satu dua orang tapi (pembayaan) ramp-nya berapa puluh juta, toilet juga pasti akan (dibuat berbeda). Kalau hanya pertimbangan ekonomi mungkin lewat (tidak diakomodasi –red), tapi kalau saya lihat bagaimanapun kan mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.”

Reference 11 - 0.61% Coverage

“Ini keinginan ke depan, selama ini kan ada translater-nya (interpreter – red). Kami ingin ada penelitian jadi saat dosen itu menerangkan sesuatu ditangkap oleh speaker kemudian langsung ada machine learning-nya (jadi) tulisan langsung muncul di layar. Akhirnya kan sangat membantu pengajar di kelas, tidak hanya di ilmu komputer tapi juga di seluruh fakultas, ada product seperti itu. Kalau itu sudah ada saya ingin itu diwujudkan menjadi kewajiban seluruh fakultas untuk menggunakan.”

- Dekan FP
Reference 12 - 0.22% Coverage

“Saya berfikir begini, karena populasi mereka (mahasiswa difabel –red) tidak banyak, kalau selama mereka tidak mengakses meminta bantuan kita juga sulit untuk memahami itu.”

Reference 13 - 0.12% Coverage

“Kita coba memfasilitasi mereka step by step sesuai dengan jenis difabelnya terlebih dahulu.”

Reference 14 - 0.10% Coverage

“Kebutuhan-kebutuhan muncul dari mereka (difabel), agar kita bisa memfasilitasi.”

Reference 15 - 0.19% Coverage

“Dengan kita mengetahui kategori-kategori difabel yang disertai kebutuhannya apa, ini akan memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan pada akhirnya.”

- Dekan FTP

Reference 16 - 0.47% Coverage

“Setiap orang dengan keterbatasannya juga punya hak yang sama untuk berkembang lebih baik. Sepanjang fakultas dan universitas mampu menyediakan fasilitas yang mampu mereka (difabel) ikuti saya rasa sangat penting menyediakan hal itu. Meskipun kita memang juga tidak bisa memberikan full kesempatan yang sama karena beberapa keterbatasan yang tidak memungkinkan dia ikuti.”

Reference 17 - 0.28% Coverage

“Kita sudah merumuskan, tadi (komunikasi) di WA (Whatsapp) WD (Wakil Dekan) 1, Kajur (Kepala Jurusan), dan dekan bahwa kita tetap menghargai mereka sehingga pada level mana yang masih bisa toleransi itu pasti kita fasilitasi.”

- Direktur Vokasi

Reference 18 - 0.17% Coverage

“Saya juga sering berinteraksi dengan mahasiswa difabel (vokasi) ketika ada pameran seni, karya mereka seperti fotografi bagus-bagus.”

Reference 19 - 0.21% Coverage

“Sejauh mana pimpinan berinteraksi dengan mereka (difabel) itu menunjukkan empati. Kalau hanya sekedar mendengarkan (kabar-kabar), saya rasa itu kurang (mengakomodasi).”

Reference 20 - 0.27% Coverage

“Harusnya di dalam proses pelelangan pembangunan gedung, ini (syarat-syarat dalam Permen PUPR) masuk penilaian. Saya pikir itu perlu di tim perencanaan (pembangunan infrastruktur) dari **difabel masuk (terlibat)**.”

Reference 21 - 0.42% Coverage

“Kita ke depan harus lebih mendengarkan mereka (mahasiswa difabel), tapi **kita bangun dulu semangat mahasiswa difabel sebelumnya untuk bisa berprestasi hingga level internasional**. Baru setelah itu kita tanya ingin mereka apa, kita sebagai fasilitator. Sehingga yang (pihak) UB bisa menguatkan difabel, yang difabel bisa menguatkan UB.”

Reference 22 - 0.29% Coverage

“Pembahasan di rapat pimpinan ada tapi tidak sering. Menurut saya **begini, tidak mesti ketika ada masalah baru dibahas. Ya..kita jemput bola sajalah**, kita support apa-apa saja kegiatan difabel. Tidak mesti bottom-up ya juga top-down.”

- Ketua PSLD

Reference 23 - 0.46% Coverage

“Kalau orang sudah tidak mau membicarakan dan tidak mau memikirkan berarti kan malah gak akan ada (perubahan) apa-apa. Ini sudah ada komunikasi masukan dari mahasiswanya, dari volunteer, dari pengambil kebijakan, dan dari kita yang mengelola, itu kan akhirnya terbuka. Dengan adanya komunikasi ini langkah positif sebagai bentuk **mau tau dan kemudian mau mengusahakan**.”

Reference 24 - 0.43% Coverage

“Advokasi dari PSLD itu harapannya dari internal Brawijaya saja minimal ada media komunikasi sehingga nantinya bisa **diidentifikasi apa masalahnya, kemudian dicarikan solusi**. Misalkan assistive technology, orang tuna netra kan gak perlu braille karena sudah bisa dari text to speech. Nah dari situ mungkin dahulunya gak bisa sekarang jadi bisa.”

Reference 25 - 0.09% Coverage

“PSLD sendiri mencoba **berusaha mengembangkan studi inovasi pembelajaran**.”

Reference 26 - 0.46% Coverage

*“Harapan saya kalau UB memang ingin menjadi lembaga yang inklusif pastinya **(harus) fasilitasnya mewadahi dengan pemikiran bahwa mewadahi untuk semua orang**, saya fikir pola fikir itu harus ditanamkan. Kemudian mindset tentang orang difabel tidak bisa (sebenarnya) itu karena kita saja yang fasilitasnya tidak memfasilitasi semua, karena banyak difabel yang berprestasi.”*

- Manajer Operasional MRP
Reference 27 - 0.23% Coverage

*“Kebetulan salah satu imam muda kami itu adalah difabel tuna netra, namanya mas Wahyu. Itulah bukti kami bahwa Masjid Raden Patah itu **tidak membedakan yang difabel dengan yang tidak.**”*

Reference 28 - 0.32% Coverage

*“Kadang mereka tidak ada yang mendampingi (ketika di Masjid Raden Patah), padahal **mereka juga memiliki hak yang sama** (untuk) mengikuti kajian-kajian di Masjid Raden Patah ini, yang mungkin itu **merupakan bagian dari pendidikan agama** juga menurut saya.”*

Reference 29 - 0.41% Coverage

*“Menurut saya harus ada dari peraturan rektor agar semua ada payung hukumnya, sehingga ketika kami dari pihak takmir meminta (pemuahan penunjang fasilitas) itu ada payung hukumnya. Jadi nanti **antara perencanaan dengan masjid atau PSLD dengan masjid bisa seiring sejalan untuk melayani keluarga besar Universitas Brawijaya.**”*

- Wakil Rektor 4
Reference 30 - 0.16% Coverage

*“Kalau mereka hanya disekolahkan di sekolah yang eksklusif maka dia **tidak bisa menjadi orang yang sehat (jiwa sosialnya –red).**”*

Reference 31 - 0.44% Coverage

*“**Jujur saya masih belum puas (terhadap UB)**, masih banyak yang harus diperbaiki. Sederhana saja semisal untuk tuna rungu, lift kita belum ada yang bunyi (pemberian informasi berupa audio, contoh: posisi sudah di lantai berapa –red), terus untuk tuna daksa jalannya belum (accessible), lalu untuk tuna netra trotoar kita belum (terdapat guiding block).”*

Reference 32 - 0.57% Coverage

“Menurut saya harusnya dari perguruan tinggi-lah kita menjadi percontohan, masyarakat kita kan juga belum sadar tentang (inklusivitas terhadap difabel) itu.”

“Saya rasa harus ada kurikulum untuk membangun kesadaran (inklusivitas terhadap difabel). Harus juga ada declare mengenai bahwa kampus Brawijaya ini adalah kampus inklusif, sehingga nanti masyarakat Universitas Brawijaya sadar betul bahwa difabel juga ingin diperlakukan sama. Mereka punya hak.”

Reference 33 - 0.46% Coverage

“Sering ada pembahasan di rapat pimpinan terkait inklusivitas. Saya saat jadi WR (Wakil Rektor) yang (periode) pertama itu, kebetulan beberapa perguruan tinggi mengajak kerjasama untuk mengelola (mahasiswa) difabel. Jadi kita dipandang oleh universitas lain lebih baik dari mereka, tetapi saya sendiri terus terang saja belum puas dengan kondisi (inklusivitas) kita.”

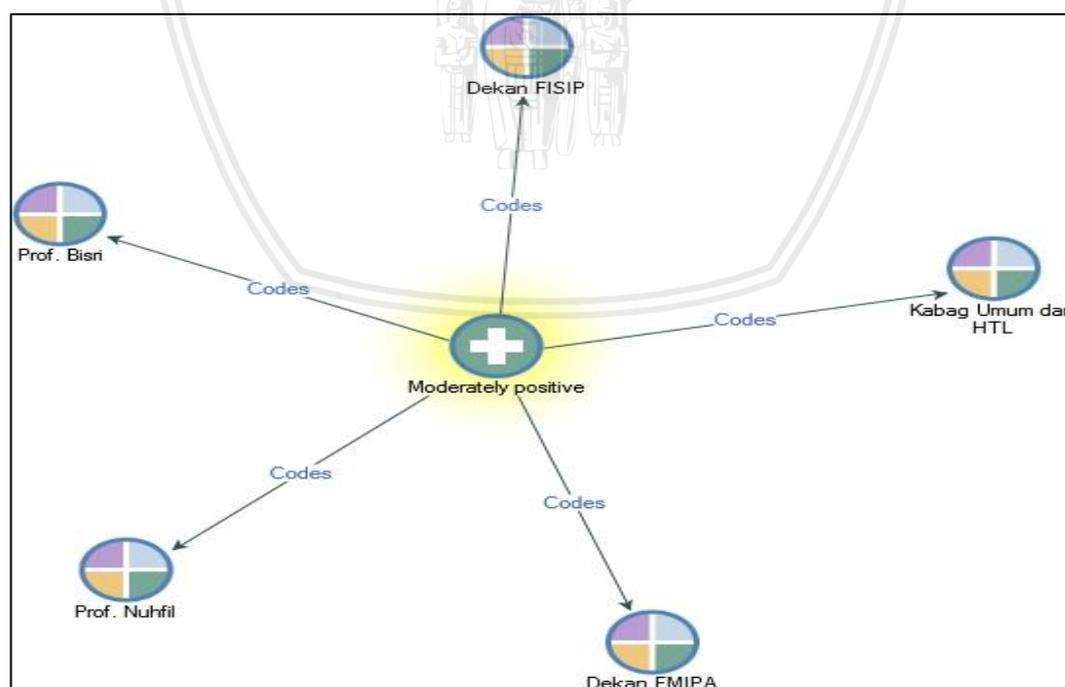
Reference 34 - 0.29% Coverage

*“Saya sebagai perencana (pembangunan), semua (mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur ramah difabel) ada. Jadi konsep perencanaan kita itu smart building, terus **difable access**, macam-macam itu termasuk konsep green campus.”*

Pernyataan-pernyataan dari beberapa aktor tersebut mengimplikasikan adanya nilai inklusif yang sesuai dengan institusi SI pada aktor. Selain itu pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan cara pandang *social model* dan *right-based model* kepada difabel dari beberapa aktor. Cara pandang *social model* dapat diamati berdasarkan pernyataan partisipan seperti difabel memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, pemberian akses pendidikan, inovasi metode pembelajaran dan *building awareness*. Sedangkan cara pandang

right-based model dapat diamati berdasarkan pernyataan partisipan seperti pemberian kesempatan untuk difabel menyampaikan masukannya, upaya pemenuhan hak di atas pertimbangan *cost efficiency*, dan kesadaran bahwa difabel memiliki hak. Hadirnya SI pada aktor-aktor tersebut melalui proses konstruksi sosial dan insitucionalisasi nilai. Pada proses konstruksi sosial, nilai inklusif hadir karena adanya kesadaran norma yang terbangun berdasarkan pengalaman aktor. Mengenai insitucionalisasi nilai, nilai inklusif hadir karena institusi berupa regulasi memiliki efek “mengarahkan” (*constitutive effects*) serta dipenuhi kadar kerelaan yang tinggi. Pernyataan-pernyataan tersebut memperkuat adanya implikasi SI pada aktor.

b. Asumsi *Moderately Positive*



Gambar 50. Skema Model Partisipan dalam Asumsi *Moderately Positive*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Skema model partisipan dalam asumsi *moderately positive* dapat dilihat pada Gambar 50, skema model tersebut diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu *explore diagram*. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait asumsi *moderately positive* antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 19 references coded [6.23% Coverage]

- Dekan FISIP

Reference 1 - 0.10% Coverage

“Saya memiliki kelas yang terdapat penyandang difabel baik di FEB maupun di FISIP.”

Reference 2 - 0.40% Coverage

“Bagi yang secara fisik berbeda saya pikir itu bukan sesuatu yang harus kita tolak, justru sesuatu yang harus kita carikan solusinya agar kekurangan yang ada pada saudara kita (penyandang difabel) bisa teratasi dengan pemakluman kita terhadap keadaannya, sehingga mereka menjadi lebih merasa berdaya dan seterusnya.”

Reference 3 - 0.50% Coverage

“UB termasuk perguruan tinggi di Indonesia yang pertama kali peduli pada difabel, hal itu patut kita syukuri. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika masih Fakultas Ekonomi (sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis), pernah memiliki dekan yang penyandang difabel yaitu Prof. Harry Susanto (Dekan FE UB periode 2001-2005), beliau mengalami kelumpuhan sejak kecil sehingga beliau harus memakai kursi roda.”

Reference 4 - 0.34% Coverage

“Jauh sebelum peraturan-peraturan ini (terkait difabilitas) muncul, UB sudah bergerak lebih dulu. Kesadaran atas kebutuhan fasilitas untuk saudara kita yang difabel sudah diperhatikan, bahwa belum sempurna (implementasinya) itu pasti iya dan itu pasti butuh proses.”

- Dekan FMIPA
Reference 5 - 0.41% Coverage

“Kita belum punya pengalaman (membantu alumni mahasiswa difabel MIPA), tetapi seandainya ada saya kira itu akan kita ikut perjuangkan kalau memiliki kapasitas. Seperti (mahasiswa difabel) statistika (kita bantu) di BPS (Badan Pusat Statistik), itu kan gak begitu membutuhkan praktik di lapangan karena cukup mengolah data.”

Reference 6 - 0.37% Coverage

“Beberapa difabel akan sulit memang untuk masuk jurusan yang berhubungan dengan (pembelajaran di) laboratorium dan lapangan. Mungkin seperti (jurusan) kimia, geofisika, fisika, biologi gak bisa, mungkin yang bisa adalah di statistika dan matematika yang memang tidak membutuhkan mobilitas tinggi.”

Reference 7 - 0.16% Coverage

“Titik beratnya itu selama ini adalah accessible (infrastruktur) terhadap difabel yang coba diupayakan di gedung-gedung baru.”

Reference 8 - 0.31% Coverage

“Kendalanya memang gedung kita itu dibangun sebelum ada peraturan-peraturan ini, jadi seperti saya dulu belum ada bayangan membangun yang dapat memberi akses (bagi difabel). Kultur kita masih gagap dengan inklusivitas kepada (kebutuhan) difabel ini.”

Reference 9 - 0.40% Coverage

“Lambat laun kita tidak bisa lepas dari inklusivitas ini, apalagi ini sudah amanat dari peraturan atau undang-undang. Dari saya, Brawijaya juga harus siap dengan adanya ini, kita harus terus bertahap (mengimplementasikannya). Jangan sampai nanti misal ada yang tuli terus kita kaget lagi, harus ada antisipasi dari awal.”

- Kabag Umum dan HTL
Reference 10 - 0.30% Coverage

“Semenjak era Prof. Yogi (Rektor UB 2010-2014) itu sudah menerima difabel lalu dilanjut hingga sekarang. Kami memberi fasilitas ada tempat khusus seperti PSD, kemudian kami memberikan fasilitas seperti jalan yang sudah bisa untuk kursi roda.”

Reference 11 - 0.10% Coverage

“Fasilitasnya harus ditambah untuk pemenuhan kebutuhan difabel secara khusus.”

- Prof. Bisri

Reference 12 - 0.32% Coverage

“Tidak begitu intensif pengalaman saya, sekedar kenal teman yang berkebutuhan khusus. Nah saya baru merasa agak intensif ketika menjadi rektor di Brawijaya, karena saya tahu betapa mereka mengalami kesulitan di segala bidang, terutama di bidang pendidikan.”

Reference 13 - 0.50% Coverage

“UB sebelum undang-undang ini keluar sudah menjalankan, saat itu dimulai dari eranya Prof. Yogi (Rektor UB dua periode 2006-2014), terus saya lanjutkan lebih intensif karena saya melihat selain ada undang-undang itu wajib kita laksanakan, tetapi ada juga sisi kemanusiaan. Saat itu saya lebih banyak melaksanakan (dengan) sisi kemanusiaannya dibanding melaksanakan undang-undang walaupun itu wajib.”

Reference 14 - 0.45% Coverage

“Kalau saran saya pimpinan di UB saat ini rapat khusus membahas disabilitas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Peraturan ini kan munculnya di akhir (masa jabatan rektor saya), ini kan sudah ada undang-undang dan peraturan berarti ini kan perintah. Ini harus khusus dirapatkan, dibahas detail (perencanaannya), dibuat kebijakan, lalu dieksekusi.”

- Prof. Nuhfil

Reference 15 - 0.31% Coverage

*“UB sejauh ini untuk interpreter bagi difabel masih seputar pendampingan saja di kelas-kelas. Saya rasa bagus Masjid Raden Patah menerapkan tersebut (adanya interpreter selama ceramah), **karena UB jadi model percontohan di sana (nasional -red)**”*

Reference 16 - 0.31% Coverage

*“Pada saat Rapim (Rapat Pimpinan) tidak pernah secara spesifik membahas tentang isu difabel. Tapi saya selalu pesankan ke dekan-dekan untuk memperhatikan (difabilitas) termasuk sarana-prasarananya karena itu **wajib dalam standar internasional.**”*

Reference 17 - 0.24% Coverage

“Saya waktu jadi Dekan (Fakultas Pertanian) saat ada penilaian akreditasi internasional, saya buat jalan (ramah difabel), meskipun jumlah mahasiswa difabel terbatas tetap saya buat semua itu.”

Reference 18 - 0.35% Coverage

*“Secara spesifik **UB tidak ada master plan untuk mengarah ke hal tersebut**, tapi kita sudah mulai perhatikan ke arah sana (inklusif) untuk toilet, lift, meskipun kendalanya ada beberapa fasilitas yang sudah kadung (belum inklusif), **tetap kita akan mengarah ke sana (inklusif -red).**”*

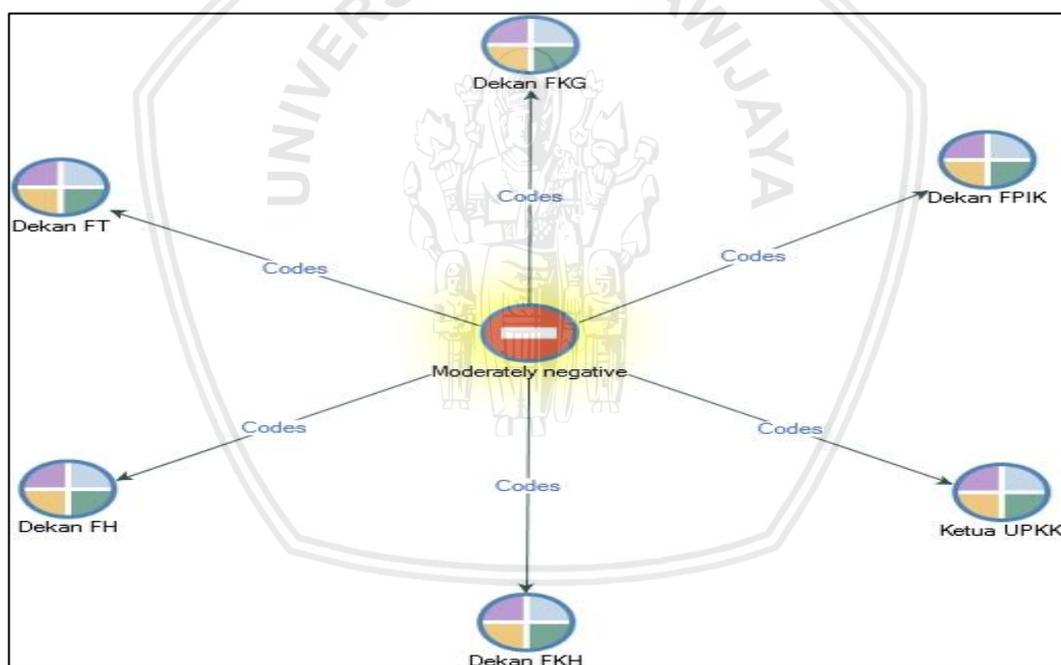
Reference 19 - 0.35% Coverage

“Kita sudah kadung terkenal di luar, pokoknya kampus yang bagus difabelnya..ya Brawijaya gitu guyonannya. Harus diikuti aturan-aturan seperti perintah dari negara termasuk standar internasionalnya harus dipenuhi semuanya, biar kita menjadi rujukan bagi perguruan tinggi yang lain.”

Pernyataan-pernyataan dari beberapa aktor tersebut mengimplikasikan adanya pertimbangan historis pada aktor. Aktor melihat secara dominan fenomena pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya sebagai diskursus yang telah hadir sedari dulu. Perilaku aktor yang terbentuk karena pertimbangan historis

dalam fenomena tersebut yaitu dengan terus melakukan inovasi implementasi kebijakan dari yang sebelumnya. Pernyataan seperti Universitas Brawijaya sudah terlanjur terkenal akan inklusivitasnya, adanya dekan yang difabel di masa lalu, pengalaman yang minim terhadap pendidikan tinggi inklusif, dan sebagainya adalah pernyataan yang memperkuat hadirnya implikasi pertimbangan historis pada aktor. Setidaknya pertimbangan historis tersebut yang perlahan membentuk institusionalisasi kesadaran nilai inklusif pada aktor.

c. Asumsi *Moderately Negative*



Gambar 51. Skema Model Partisipan dalam Asumsi *Moderately Negative*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Skema model partisipan dalam asumsi *moderately negative* dapat dilihat pada Gambar 51, skema model tersebut diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu

explore diagram. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan terkait asumsi *moderately negative* antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 18 references coded [5.05% Coverage]

- Dekan FH

Reference 1 - 0.13% Coverage

“Belum pernah ada bahasan mengenai hal tersebut, karena kalau di FH sendiri **jumlahnya yang masih sedikit.**”

Reference 2 - 0.09% Coverage

“**Karena ada tuntutan saja, maka ada perubahan pada gedung-gedung itu.**”

Reference 3 - 0.45% Coverage

“Ingin kami memfasilitasi seluruh difabel, tapi karena selama ini jumlahnya kan belum banyak itu akan menjadi **tidak efektif kalau diselenggarakan masing-masing fakultas.** Resource yang kita sediakan jadi tidak bermanfaat, misalnya diwajibkan dosen untuk mengikuti pelatihan bahasa isyarat namun ternyata tidak ada mahasiswa tuna rungu di fakultas tersebut.”

- Dekan FKG

Reference 4 - 0.30% Coverage

“Sayangnya beberapa fakultas tidak bisa diperuntukkan kepada difabel, seperti misalnya FKG. Karena kita melayani masyarakat, memberikan pengobatan kepada masyarakat, dan **aktivitas yang dilakukan itu memerlukan orang-orang yang normal.**”

Reference 5 - 0.30% Coverage

“Masing-masing universitas dari Kemenristekdikti dituntut untuk meningkatkan peringkatnya di level dunia. Ketika UB semakin inklusif akhirnya **peminat semakin banyak,** orang tua yang anaknya difabel jadi mau menguliahkan anaknya di UB.”

- Dekan FKH

Reference 6 - 0.31% Coverage

*“Memang kalau saya rasa kan untuk yang **kesiapan di dunia kerja itu sudah di luar kampus ya**, kalau di kita kan ranahnya bagaimana kita menyiapkan semua mahasiswa termasuk yang difabel itu untuk bisa bersaing di luarnya nanti (di dunia kerja –red).”*

Reference 7 - 0.13% Coverage

*“Meskipun undang-undang mengatakan begitu tapi kan **tidak bisa semua program studi menerima (difabel).**”*

- Dekan FPIK

Reference 8 - 0.22% Coverage

*“Menurut kami, Universitas Brawijaya juga memberikan kebebasan bagi penyandang difabel untuk memperoleh pekerjaan, namun **juga harus diperhitungkan, kemampuan yang bersangkutan.**”*

Reference 9 - 0.38% Coverage

*“Sejauh ini, Universitas Brawijaya sudah menyesuaikan kebutuhan, baik sarana maupun prasarana bagi penyandang difabel yang menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya namun **yang bersangkutan juga harus mempunyai kemampuan yang cukup/sesuai dengan program studi yang mereka pilih untuk kuliah.**”*

- Dekan FT

Reference 10 - 0.27% Coverage

*“Saya pernah datang ke beberapa kampus di luar negeri sebetulnya tidak semua mesti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, tapi **disiapkan building tertentu sehingga mereka terpusat.**”*

Reference 11 - 0.25% Coverage

*“Terkadang kendala yang didapat untuk mewadahi mereka ini dari **segi anggaran.** Karena jumlah mereka yang tidak banyak, kemudian (di lain sisi) membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang mereka.”*

Reference 12 - 0.30% Coverage

*“Undang-undang yang spesifik ini dengan mahasiswa difabel yang tidak banyak tentu membutuhkan sosialisasi lebih luas, **karena tidak semua***

fakultas pastinya men-support undang-undang ini. Maka harus ada sosialisasi untuk peningkatan pemahaman.”

Reference 13 - 0.16% Coverage

“Kita harus dorong peraturan itu (Pertor) untuk terbit, agar program kerja dan anggarannya ada payung hukum (pelaksanaannya).”

Reference 14 - 0.22% Coverage

“Saya jujur saja tidak banyak ruang untuk membahas ini (inklusivitas terhadap difabel) di level pimpinan. Ini dibahas ketika syarat masuk (penerimaan mahasiswa difabel) saja.”

- Ketua UPKK

Reference 15 - 0.60% Coverage

“Kami melaksanakan kegiatan rekrutmen yang pertama untuk (perusahaan) swasta kemudian yang kedua untuk BUMN. Kita tahu yang swasta itu orientasinya adalah profit oriented sehingga kualifikasi yang diminta itu sudah tertentu, kemudian BUMN juga punya merekrut sumber daya dengan kualifikasi tertentu. Sehingga kami tidak pernah membicarakan dan tidak pernah dilibatkan dalam membicarakan berapa persen dari tenaga kerja yang direkrut itu nanti terdiri dari alumni UB yang difabel.”

Reference 16 - 0.46% Coverage

“Kita belum pernah melakukan kerjasama (dengan perusahaan) kecuali kita melakukan penajakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam penempatan tenaga kerja, itu kita lakukan, baik itu yang di Jawa maupun di luar Jawa. Tetapi akhir-akhir ini kita melakukan kerjasama itu dengan yang di luar Pulau Jawa dan itu untuk mereka yang normal bukan untuk yang difabel.”

Reference 17 - 0.11% Coverage

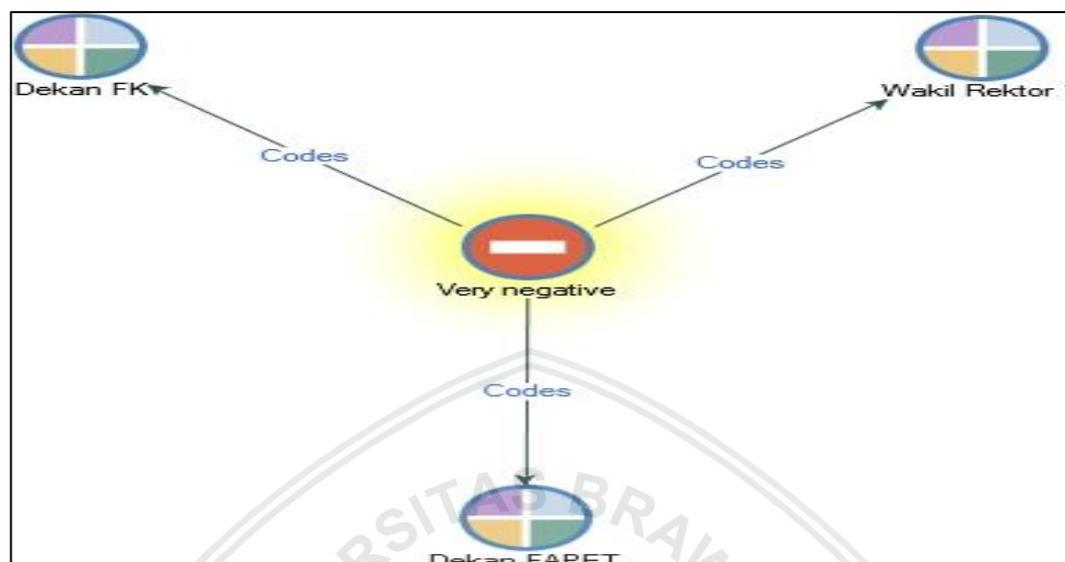
“(Dari UPKK) belum ada roadmap (pengembangan karir) sama sekali untuk yang difabel.”

Reference 18 - 0.39% Coverage

“Tidak setiap rapat pimpinan UPKK dilibatkan, tidak selalu, kecuali memang itu bersentuhan dengan tupoksi dari UPKK. Sejauh ini kami tidak pernah dilibatkan untuk membahas difabilitas itu, tetapi untuk

rapim-rapim yang membahas anggaran lalu barangkali (membahas) OTK (Organisasi dan Tata Kerja) sudah sering.”

Pernyataan-pernyataan beberapa aktor tersebut menunjukkan antitesis dari SI. Disinilah menariknya hasil riset yang peneliti dapatkan, bahwa terdapat sebuah pemikiran yang bertolak belakang dengan SI yang peneliti asumsikan negatif pada partisipan yang kebetulan merupakan pimpinan Universitas Brawijaya. Dalam melayani difabel menurut beberapa pimpinan harus melihat jumlah difabel yang ada agar pelayanannya tidak sia-sia, dibangun gedung terpusat hanya untuk difabel agar efisien, adanya penjalinan kerjasama dengan pihak penerima kerja hanya untuk non-difabel, dan sebagainya merupakan pernyataan yang mempertimbangkan rasionalitas keuntungan, kerugian, dan resiko. Cara tersebut menjadi sebuah langkah tidak antisipatif karena mahasiswa difabel dapat sewaktu-waktu bertambah, sementara untuk memberikan pelayanan yang inklusif dibutuhkan pelatihan yang tidak sebentar. Sementara terdapat juga pernyataan yang mempertimbangkan dari segi *cost efficiency* untuk memberikan fasilitas bagi difabel. Pernyataan mengenai lebih baik memusatkan mahasiswa difabel pada satu gedung justru akan membuat mereka menjadi tereksklusikan. Dengan ini nilai inklusif akan menjadi terhambat untuk dijadikan nalar-kepentasan di Universitas Brawijaya. Aktor sebagai bagian dari pemegang dan yang menjalankan kebijakan masih mempertimbangkan rasionalitas keuntungan dan kerugian, padahal mahasiswa difabel sudah menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas Brawijaya yang harus dilayani.

d. Asumsi *Very Negative*

Gambar 52. Skema Model Partisipan dalam Asumsi *Very Negative*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

Skema model partisipan dalam asumsi *very negative* dapat dilihat pada Gambar 52, skema model tersebut diperoleh melalui hasil uji Nvivo 12 Plus yaitu *explore diagram*. Berikut ungkapan dari masing-masing partisipan asumsi *very negative* antara lain:

<Files\Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif> - § 8 references coded [1.69% Coverage]

- Dekan FAPET
Reference 1 - 0.15% Coverage

“Saya sepakat dengan undang-undang tersebut sejauh itu sesuai dengan kompetensi dan area pekerjaan yang dikerjakan.”

Reference 2 - 0.35% Coverage

“Ada beberapa fakultas yang bisa diikuti, tetapi ada juga fakultas yang tidak bisa diikuti (oleh difabel). Mengapa begitu? Karena lulusan S1 akan memiliki sesuatu peran tertentu, sehingga kompetensi tertentu harus dimiliki selama perkuliahan untuk (nantinya) melayani sesuatu.”

- Dekan FK
Reference 3 - 0.34% Coverage

“Mereka (difabel) punya hak yang sama termasuk di dalam pendidikan, hanya saja ada beberapa prodi seperti di FK ini yang tidak menerima difabel, karena ini terkait dengan profesi yang nantinya akan terkait dengan keselamatan untuk yang menjalankan profesi dan pasien.”

Reference 4 - 0.09% Coverage

“Tidak mungkin dokter difabel, dia harus melakukan tindakan emergency.”

Reference 5 - 0.16% Coverage

“Sulit menerima difabel di kedokteran karena sudah diatur di dalam Konsil Kedokteran Indonesia harus sehat jasmani dan rohani.”

- Wakil Rektor 1
Reference 6 - 0.20% Coverage

“Baru semenjak saya di sini (WR 1) saya jadi tahu tentang ini (difabel). Karena ketika saya dulu di Fakultas Kedokteran Hewan tidak mungkin ada mahasiswa difabel.”

Reference 7 - 0.29% Coverage

“Harus adanya kesadaran dari difabel dan orangtuanya untuk meyakini (menerima –red) bahwa anaknya memang difabel. Karena kadang ketika difabel kesulitan untuk mengakses sesuatu itu karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya difabel.”

Reference 8 - 0.11% Coverage

“Kalau kita lihat di peraturan rektor itu ada khusus penerimaan bagi mahasiswa difabel.”

Pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh beberapa aktor menunjukkan adanya pemikiran yang terpaksa atau bahkan menolak hadirnya nilai inklusif

sebagai institusi. Terdapat standar yang berlawanan dengan nilai (inklusivitas) pada pernyataan-pernyataan aktor tersebut mengenai kepatuhan terhadap regulasi. Jelas bahwa pernyataan tersebut merupakan metode diskursif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci mengenai tindakan hegemoni. Dalam proses hegemoni, kerelaan aktor dalam menerima nilai sangat tipis dan keterpaksaan mereka lebih dominan (Putra dan Sanusi, 2019). Selanjutnya pernyataan bahwa difabel tidak bisa diterima dengan alasan persyaratan sehat jasmani dan rohani merupakan cara pandang *medical model*. Persyaratan mengenai sehat jasmani dan rohani tidak spesifik dalam menjelaskan maksudnya dan terkesan aksiomatis. Interpretasi terhadap regulasi bahwa difabel tidak bisa beraktivitas melayani dalam bidang kedokteran dengan alasan fisik harus dikaji kembali. Butuh adanya wadah berkomunikasi seluruh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya untuk membangun *disability awareness* disertai pemecahan solusi atas keterpaksaan dan penolakan dalam menerima nilai inklusif.

BAB V

PENUTUP

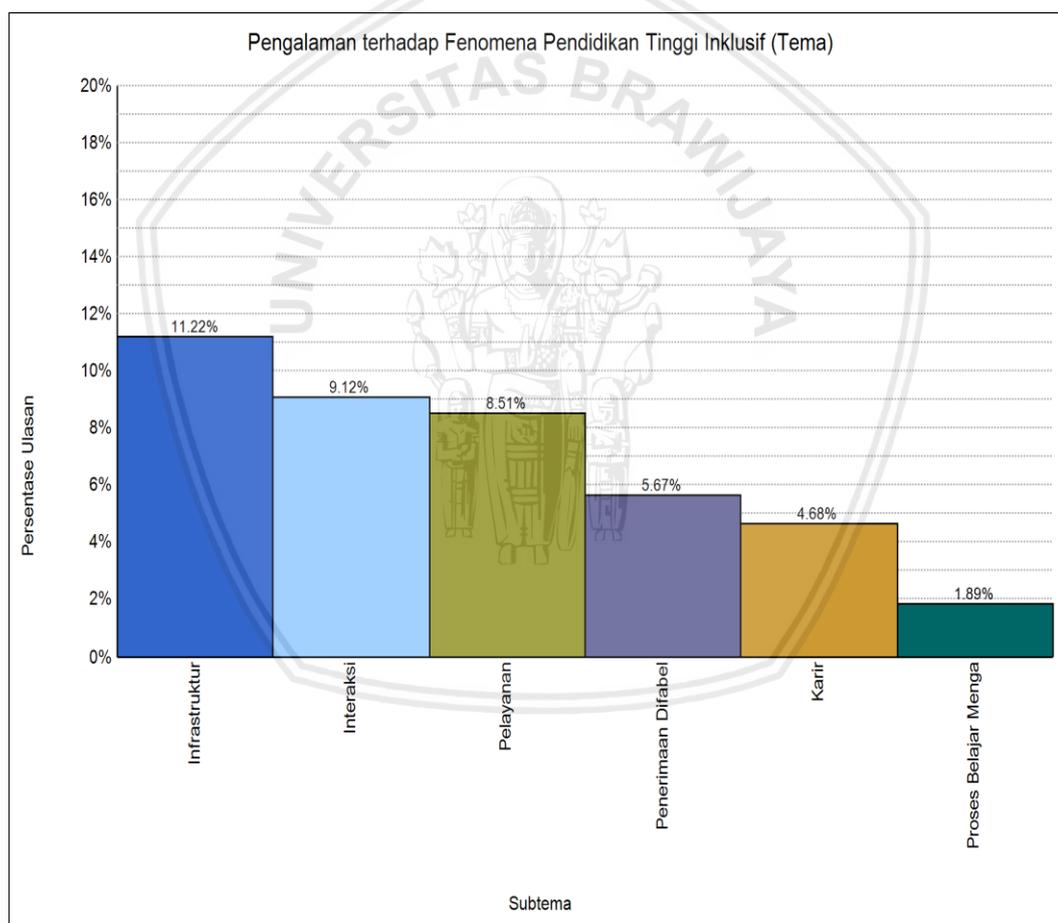
A. Kesimpulan

Fenomena pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya telah peneliti identifikasi sehingga ditemukan 3 tema, 22 subtema, dan 24 kategori. 3 tema yang dimunculkan yaitu berdasarkan perpaduan pendekatan **fenomenologi** yang meneliti pengalaman beserta pemaknaan partisipan terhadap fenomena dan *Sociological Institutionalism Theory* sebagai pisau analisis fenomena pendidikan tinggi inklusif terhadap difabel di Universitas Brawijaya. 22 subtema dan 24 kategori yang muncul melalui proses identifikasi peneliti berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh untuk disesuaikan nantinya dengan tema.

Interpretasi yang dimunculkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian tidak lepas dari asumsi **aksiologis**. *Sociological Institutionalism Theory* memperkuat asumsi peneliti bahwa setiap hasil penelitian ketika dianalisis apakah mengandung muatan nilai inklusif yang sudah terkonstruksi dan terinstitusionalisasi atau tidak. Tentunya pernyataan dari partisipan cukup beragam sebagai individu yang mengalami fenomena pendidikan tinggi inklusif.

Pandangan-pandangan partisipan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya mencerminkan adanya perbedaan institusi yang melekat pada partisipan, khususnya pimpinan Universitas Brawijaya sebagai aktor

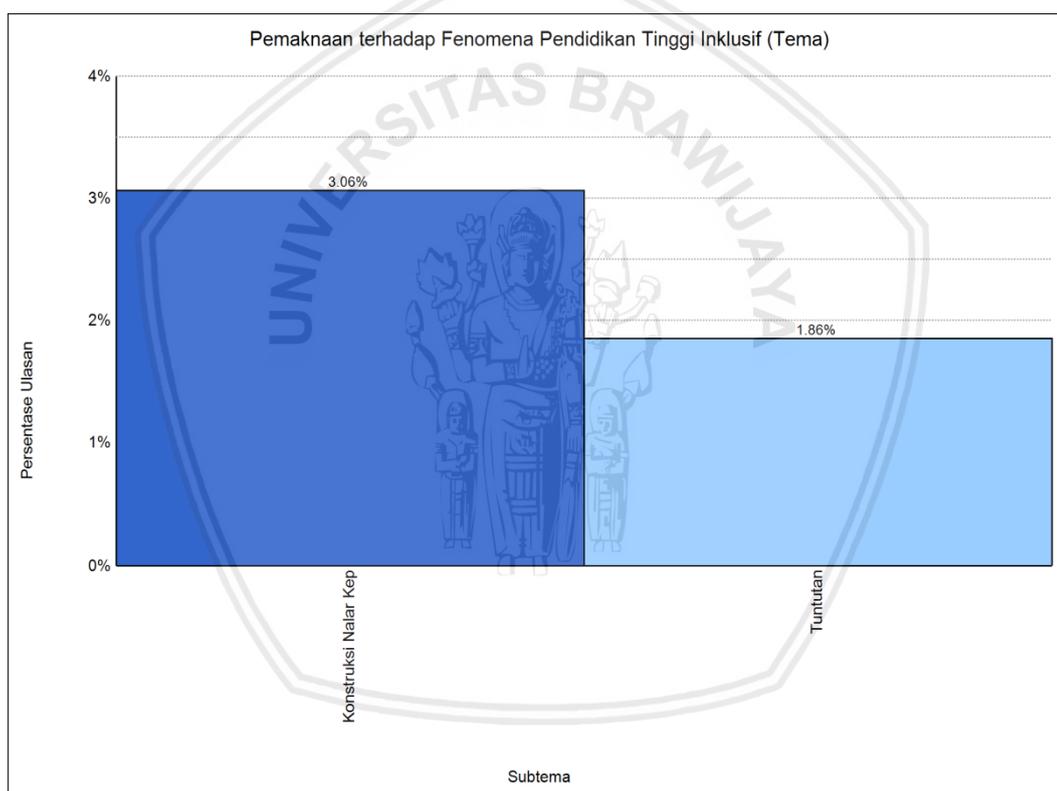
pemegang kebijakan. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa **Universitas Brawijaya belum sepenuhnya inklusif** karena kesadaran (*awareness*) untuk menjalankan nilai inklusif pada beberapa aktor belum sesuai berdasarkan **analisis *Sociological Institutionalism Theory***. Berikut peneliti tampilkan visualisasi beserta interpretasi dari pembahasan fenomena pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya:



Gambar 53. Grafik Persentase Subtema pada Tema Pengalaman terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif.

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Berdasarkan pada Gambar 53 tema pengalaman terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif ditemukan bahwa subtema infrastruktur berada di posisi teratas yang sering dibahas dengan jumlah persentase 11,22%; diikuti setelahnya subtema interaksi sejumlah 9,12%; subtema pelayanan 8,51%; subtema penerimaan difabel 5,67%; subtema karir 4,68%; dan subtema proses belajar mengajar 1,89%.

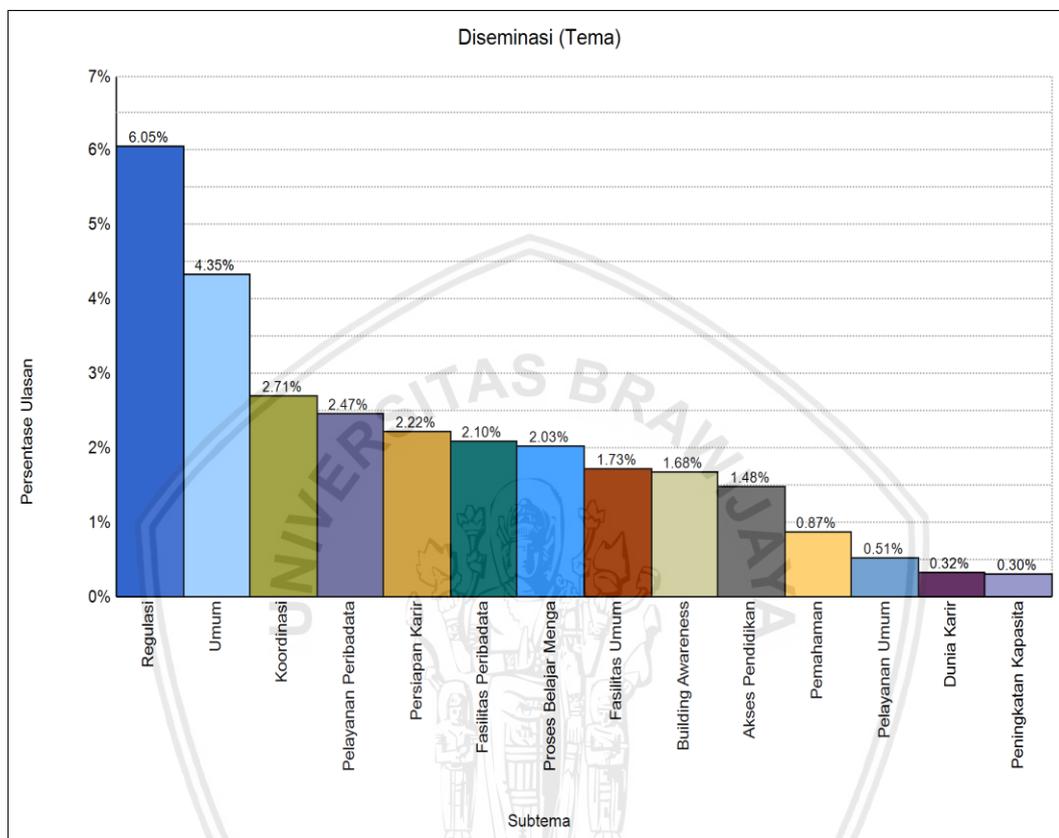


Gambar 54. Grafik Persentase Subtema pada Tema Pemaknaan terhadap Fenomena Pendidikan Tinggi Inklusif.

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Berdasarkan pada Gambar 54 tema pemaknaan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif ditemukan bahwa subtema konstruksi nalar-kepentasan

berada di posisi teratas yang sering dibahas dengan jumlah persentase 3,06% dan diikuti setelahnya subtema tuntutan sejumlah 1,86%.

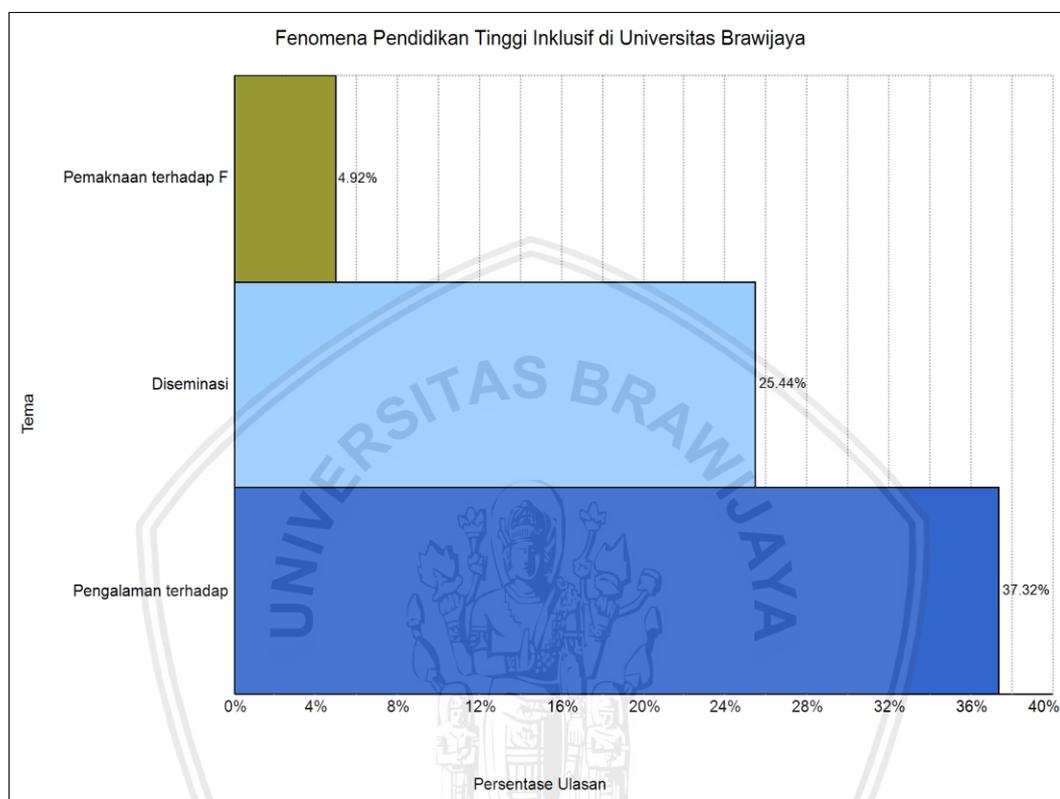


Gambar 55. Grafik Persentase Subtema pada Tema Diseminasi

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Berdasarkan pada Gambar 55 tema diseminasi ditemukan bahwa subtema regulasi berada di posisi teratas yang sering dibahas dengan jumlah persentase 6,05%; diikuti setelahnya subtema umum sejumlah 4,35%; subtema koordinasi 2,71%; subtema pelayanan peribadatan 2,47%; subtema persiapan karir 2,22%; subtema fasilitas peribadatan 2,10%; subtema proses belajar mengajar 2,03%; subtema fasilitas umum 1,73%; subtema *building awareness* 1,68%; subtema

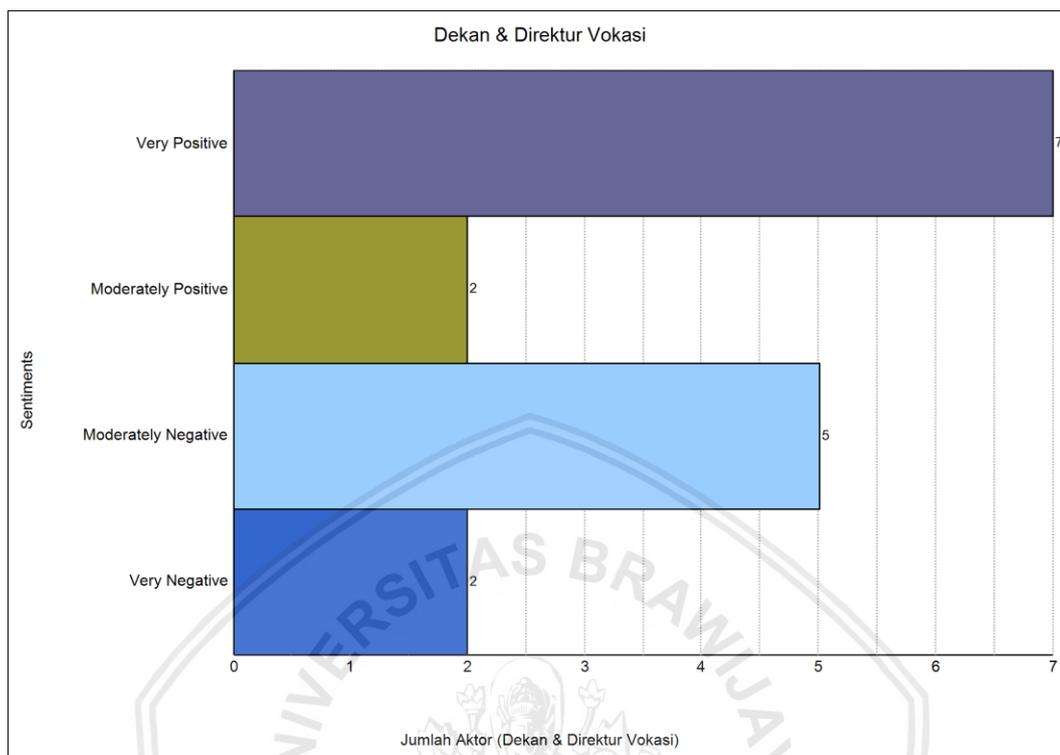
akses pendidikan 1,48%; subtema pemahaman 0,87%; subtema pelayanan umum 0,51%; subtema dunia karir 0,32 %; dan subtema peningkatan kapasitas 0,30%.



Gambar 56. Grafik Persentase Ulasan Keseluruhan Tema

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Grafik persentase ulasan keseluruhan tema dapat dilihat pada Gambar 56 dengan tema pengalaman terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif menempati persentase terbanyak dengan jumlah persentase 37,32%; selanjutnya diikuti oleh tema diseminasi sejumlah 25,44%; dan tema pemaknaan terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif sejumlah 4,92%. Selanjutnya dari ulasan-ulasan tersebut ditemukan jenis-jenis institusi yang terimplikasi pada masing-masing aktor.

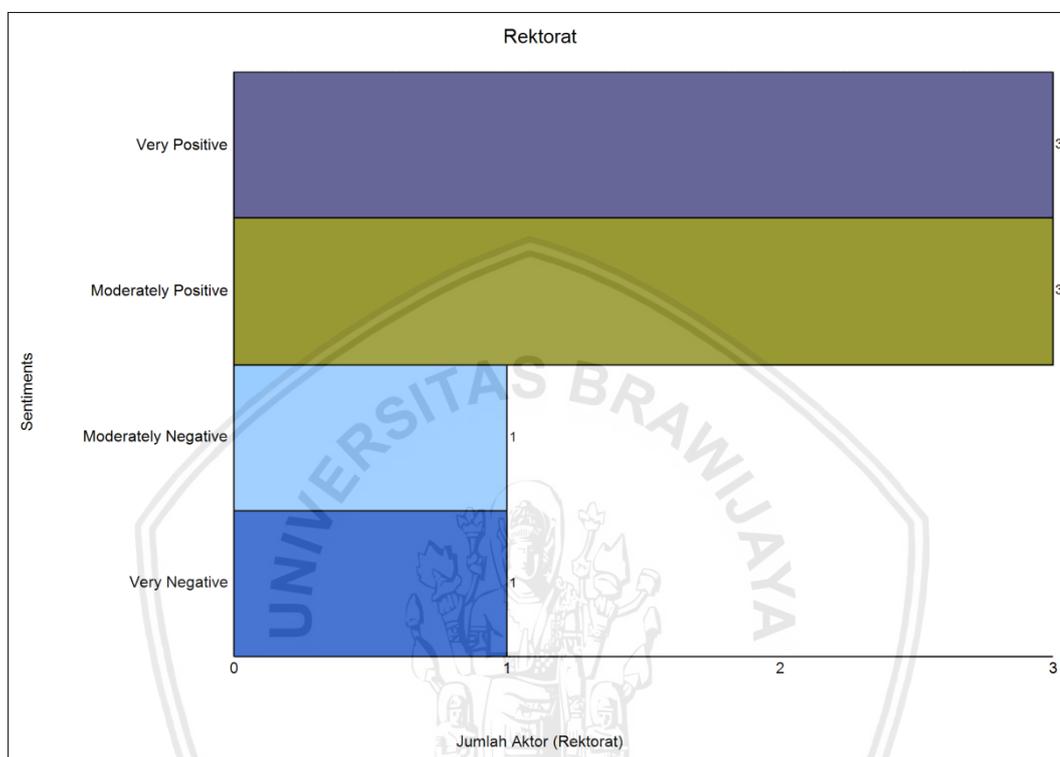


Gambar 57. Grafik Jumlah Aktor (Dekan & Direktur Vokasi) dengan *Sentiments*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Berdasarkan pada Gambar 57 jumlah aktor dengan *very positive sentiments* menempati urutan terbanyak dengan jumlah 7; selanjutnya diikuti oleh *moderately positive sentiments* sejumlah 2; *moderately negative sentiments* sejumlah 5; dan *very negative sentiments* sejumlah 2. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai inklusif belum menjadi kesatuan institusi pemikiran bagi aktor. Jika diakumulasi jumlah aktor pada *very positive* dan *moderately positive sentiments* yang tergabung dalam *positive sentiments*, maka akan didapat jumlah aktor pada *positive sentiments* sejumlah 9. Sedangkan akumulasi jumlah aktor

pada *very negative* dan *moderately negative sentiments* yang tergabung dalam *negative sentiments* didapatkan angka sejumlah 7.

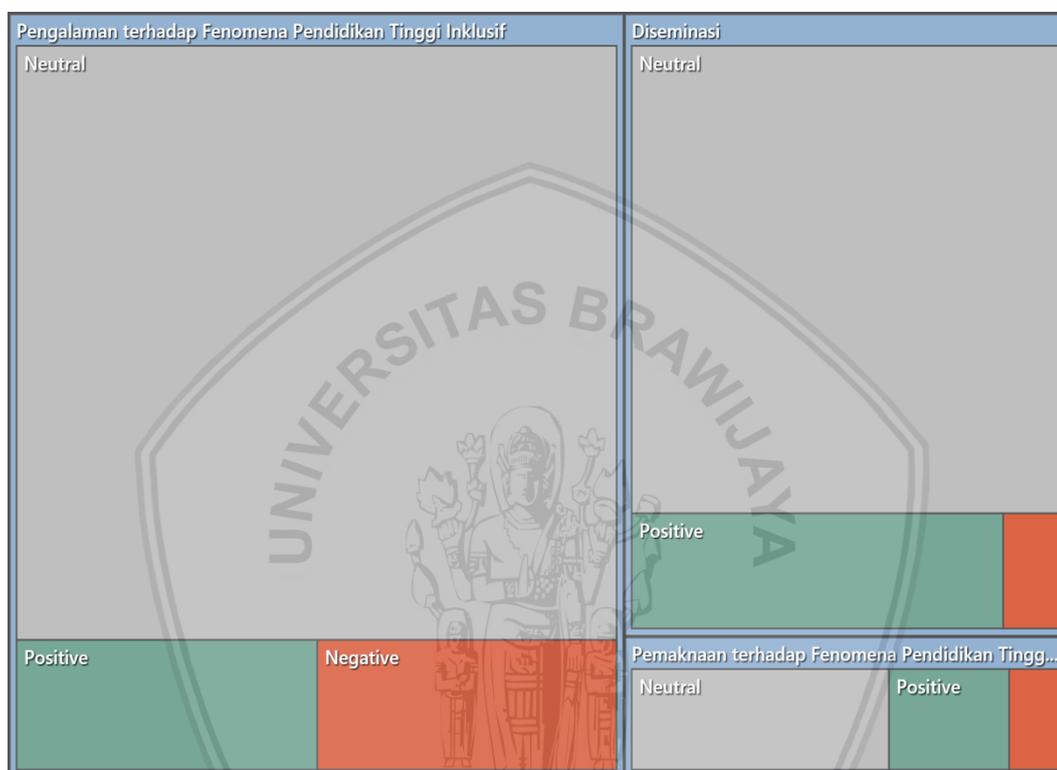


Gambar 58. Grafik Jumlah Aktor (Rektorat) dengan *Sentiments*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Berdasarkan pada Gambar 58 jumlah aktor dengan *very positive sentiments* menempati urutan terbanyak dengan jumlah 3; selanjutnya diikuti oleh *moderately positive sentiments* sejumlah 3; *moderately negative sentiments* sejumlah 1; dan *very negative sentiments* sejumlah 1. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai inklusif belum menjadi kesatuan institusi pemikiran bagi aktor. Jika diakumulasi jumlah aktor pada *very positive* dan *moderately positive sentiments* yang tergabung dalam *positive sentiments*, maka akan didapat jumlah

aktor pada *positive sentiments* sejumlah 6. Sedangkan akumulasi jumlah aktor pada *very negative* dan *moderately negative sentiments* yang tergabung dalam *negative sentiments* didapatkan angka sejumlah 2.



Gambar 59. Bagan Hirarkis (*Hierarchy Chart*) Tema dengan Klasifikasi *Sentiments*

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12

Berdasarkan pada Gambar 59 dapat dilihat bagan yang menampilkan keseluruhan transkrip pernyataan yang ter-*coding* terhadap tema, serta diikuti *sentiments* yang terdapat di dalam tema. Pernyataan-pernyataan *neutral sentiments* di masing-masing tema dapat diasumsikan sangat dominan. Sedangkan untuk *positive sentiments* dan *negative sentiments* menunjukkan dominasi yang berbeda di masing-masing tema.

Tema pengalaman terhadap pendidikan tinggi inklusif ter-coding sejumlah 189 pernyataan dari transkrip. Pada *neutral sentiments* ter-coding sejumlah 154 pernyataan dari tema. Selanjutnya *positive sentiment* dan *negative sentiment* pada tema pemaknaan terhadap pendidikan tinggi inklusif ter-coding untuk *positive sentiments* sejumlah 18 pernyataan, sedangkan *negative sentiments* sejumlah 17 pernyataan. Dengan demikian implikasi jenis institusi pada tema pengalaman terhadap pendidikan tinggi inklusif dapat disimpulkan ***positive sentiments unggul*** bila dibandingkan dengan *negative sentiments*.

Tema pemaknaan terhadap pendidikan tinggi inklusif ter-coding sejumlah 25 pernyataan dari transkrip. Pada *neutral sentiments* ter-coding sejumlah 15 pernyataan dari tema. Selanjutnya *positive sentiment* dengan *negative sentiment* pada tema pemaknaan terhadap pendidikan tinggi inklusif ter-coding dengan jumlah untuk *positive sentiments* sejumlah 7 pernyataan, sedangkan *negative sentiments* sejumlah 3 pernyataan. Dengan demikian implikasi jenis institusi pada tema pengalaman terhadap pendidikan tinggi inklusif dapat disimpulkan ***positive sentiments unggul*** bila dibandingkan dengan *negative sentiments*.

Tema diseminasi ter-coding sejumlah 111 pernyataan dari transkrip. Pada *neutral sentiments* ter-coding sejumlah 87 pernyataan dari tema. Selanjutnya *positive sentiment* dan *negative sentiment* pada tema pemaknaan terhadap pendidikan tinggi inklusif ter-coding untuk *positive sentiments* sejumlah 21 pernyataan, sedangkan *negative sentiments* sejumlah 3 pernyataan. Dengan demikian implikasi jenis institusi pada tema pengalaman terhadap pendidikan

tinggi inklusif dapat disimpulkan *positive sentiments unggul* bila dibandingkan dengan *negative sentiments*.

B. Saran

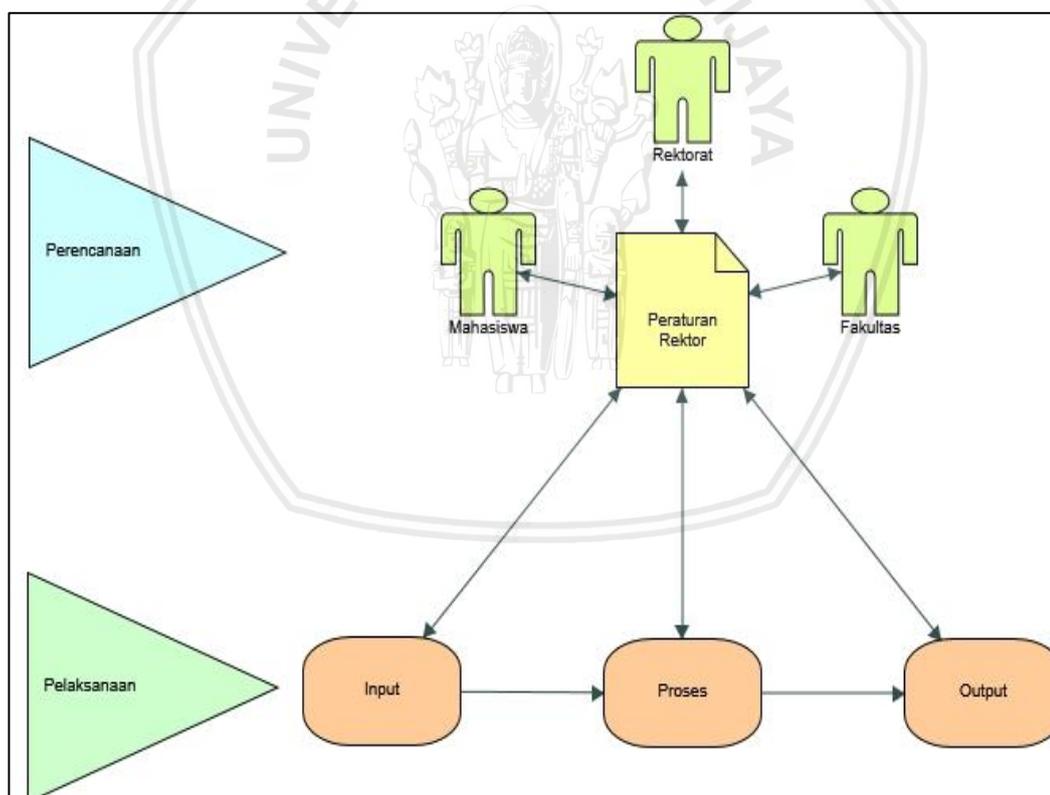
Saran-saran yang diberikan berdasarkan diseminasi dari peneliti dan para partisipan. Universitas Brawijaya harus memiliki peraturan universitas yang menjadi dasar kebijakan untuk dilaksanakannya pendidikan tinggi inklusif di segala aspek oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam merencanakannya. Hadirnya peraturan rektor akan mempermudah untuk **nilai inklusif menjadi institusi yang terformalkan (terinstitusionalisasi)**. Selain itu dengan adanya peraturan rektor akan membentuk nalar-kepentingan dan *cognitive scripts* pada sivitas akademika yang lebih terarahkan pada nilai inklusif. Dengan demikian hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Putra dan Sanusi (2019) bahwa institusi memiliki efek “mengarahkan” (*constitutive effects*) tidak hanya pada preferensi dari para aktor, melainkan juga pada identitas mereka.

Universitas Brawijaya dalam waktu dekat akan mengesahkan statuta terbaru. Pada rancangan statuta tersebut disampaikan pada bab 8 pembahasan mengenai perencanaan. Pada pasal 66 disampaikan di ayat 1) bahwa sistem perencanaan Universitas Brawijaya merupakan satu kesatuan cara perencana pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.; ayat 2) sistem perencanaan Universitas Brawijaya menjadi dasar bagi setiap organ Universitas Brawijaya dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program.; ayat 3) jangka waktu perencanaan terdiri atas: a. 20 tahun untuk jangka panjang,

b. 5 tahun untuk jangka menengah, dan c. 1 tahun untuk jangka pendek.; ayat 4) sistem perencanaan Universitas Brawijaya dituangkan dalam dokumen perencanaan Universitas Brawijaya.; ayat 5) dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mencakup: a. rencana induk pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang, b. rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dan c. rencana kerja dan anggaran yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek; ayat 6) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk **menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya**. Sivitas Akademika Universitas Brawijaya harus memasukan inklusivitas terhadap difabel sebagai program yang masuk dalam perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Sebagaimana amanat dari Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 7 disampaikan bahwa pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi terbentuknya kultur inklusif, dengan dimasukkannya program inklusivitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya akan memudahkan untuk menilai capaian kinerja Rektor, terkhusus untuk membentuk kultur inklusif. Dengan dimasukkannya program inklusivitas terhadap difabel dalam perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek akan mempermudah pula terinstitusionalisasi nilai inklusif menjadi sebuah kebijakan yang akan membentuk nalar-kepantasan dan *cognitive scripts* yang lebih kokoh dalam menjalankan pendidikan tinggi inklusif. Untuk mewadahi hal tersebut dalam sebuah kebijakan dapat dilakukan dengan membuat **Peraturan Rektor**. Saran tambahan dari peneliti, Universitas Brawijaya dapat membuat model

penilaian indikator inklusivitas pendidikan tinggi yang menilai beberapa aspek dengan model bernama *Brawijaya Inclusive Matrix*.

Peneliti menyoroti 3 aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek input, proses, dan keluaran (*output*). Selanjutnya pihak-pihak yang memberikan masukan-masukan untuk terciptanya peraturan rektor adalah rektorat, fakultas, dan mahasiswa. Peraturan rektor harus dibuat masing-masing secara khusus dalam mengatur per aspek yang disampaikan sebelumnya. Berikut akan dijabarkan saran untuk masing-masing aspek:



Gambar 60. Skema Model Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif di Universitas Brawijaya

Sumber: Data Primer Hasil Olah Nvivo 12 Plus

a. Input

Universitas Brawijaya patut diapresiasi karena telah membuka seleksi penerimaan mahasiswa difabel melalui jalur mandiri, karena belum banyak perguruan tinggi yang secara khusus membuka jalur masuk untuk difabel. Hanya saja masih ada beberapa fakultas yang menolak difabel dengan alasan mobilitas saat perkuliahan yang sulit dijalankan oleh difabel nantinya dan regulasi keprofesian yang khusus mengatur bahwa calon mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani, seperti FK, FKG, dan FKH. Harus adanya ketetapan yang jelas di peraturan yang menyampaikan bahwa tidak boleh ada penyamarataan difabel untuk ditolak, karena ada jenis difabel yang masih memungkinkan mengikuti perkuliahan secara normal. Kriteria sehat jasmani dan rohani tidak boleh secara rigid diberlakukan dengan penyamarataan.

Universitas Brawijaya juga harus memiliki antisipasi jika terjadi *force majeure* ketika mahasiswanya mengalami kecelakaan sehingga menjadi difabel. Disediakkannya opsi perpindahan jurusan yang masih memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa yang menjadi difabel misalnya. Antisipasi-antisipasi terbaik harus dipersiapkan sebelum menerima mahasiswa jika terjadi keadaan *force majeure* dan hal tersebut juga harus dikomunikasikan dengan mahasiswanya.

Perencanaan pada sisi input bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi difabel untuk berkuliah di Universitas Brawijaya. Seluruh fakultas harus mengupayakan akses tersebut bagi difabel disertai solusi terbaik selama proses berjalannya perkuliahan. Dengan ini diharapkan nilai inklusif dapat mendorong

proses konstruksi sosial dan institusionalisasi nilai di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya karena diberikannya ruang aktualisasi bagi difabel untuk mengembangkan potensinya.

b. Proses

Universitas Brawijaya harus terus menyempurnakan pelayanan dan fasilitas yang dimilikinya agar lebih aksesibel untuk difabel. Proses belajar mengajar harus terus diperkuat inovasi metodenya agar menjadi lebih inklusif dengan diadakannya pelatihan yang wajib diikuti oleh dosen-dosen seluruh fakultas. Penyediaan *assistive technology* yang disesuaikan dengan kebutuhan difabel berdasarkan jenisnya masing-masing di proses belajar mengajar akan memudahkan baik bagi dosen maupun mahasiswa.

Pelayanan peribadatan bagi difabel jenis tuli harus difasilitasi dengan disediakannya *interpreter* dan/atau *running text subtitle*. Penyediaan pelayanan tersebut diperuntukan bagi mahasiswa difabel tuli dari agama manapun selama kegiatan peribadatannya. Upaya penyediaan tersebut untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 82.

Pelayanan seperti di Poliklinik Universitas Brawijaya, perpustakaan, birokrasi rektorat maupun fakultas, dan sebagainya juga harus disempurnakan untuk lebih inklusif. Disediakannya pelayanan dalam bentuk visual, audio, dan *braille* di ruang terselenggaranya pelayanan akan memudahkan difabel. Harus adanya inovasi pelayanan yang diberlakukan, merekayasa model pelayanan untuk

uji coba dengan menjadikan difabel sebagai *user experience* akan memudahkan membuat model pelayanan.

Fasilitas umum dan peribadatan sudah harus disesuaikan sebagaimana amanat Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017. Bangunan gedung sudah harus lebih aksesibel bagi difabel. Revitalisasi trotoar agar lebih aksesibel bagi difabel dan *well connected* ke seluruh tempat-tempat di Universitas Brawijaya. Masjid dan musholla juga harus diperbaiki fasilitasnya agar lebih aksesibel bagi difabel.

Program-program mengenai *difability awareness* harus terus diperluas cakupan pesertanya di Universitas Brawijaya. Rektorat, dekanat, dosen-dosen, karyawan, hingga mahasiswa baik yang aktif di organisasi maupun yang tidak harus diberikan pemahaman *difability awareness* dengan cara disesuaikan konsep programnya dengan pesertanya. Organisasi kemahasiswaan harus mulai menetapkan afirmasi berupa kuota persentase penerimaan mahasiswa difabel sebagai pengurus di dalam sebuah organisasi. Kebutuhan pengembangan *soft skills* juga dibutuhkan oleh mahasiswa difabel.

Perencanaan pada sisi proses bertujuan untuk menciptakan pelayanan dan penyediaan akomodasi fasilitas yang inklusif bagi mahasiswa difabel. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya harus secara bertahap menerapkan tujuan tersebut. Dengan ini diharapkan wujud pelayanan dan penyediaan akomodasi fasilitas yang inklusif bagi mahasiswa difabel dapat menjadi sebuah **simbol yang memengaruhi proses konstruksi sosial dan**

institusionalisasi nilai di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya.

c. Output

Universitas Brawijaya ketika telah siap menerima mahasiswa difabel maka harus pula siap memberi fasilitas persiapan karir untuk mahasiswa difabel. Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) harus mengoptimalkan perannya dalam memfasilitasi mahasiswa difabel. Pendataan mahasiswa difabel berdasarkan program studi yang diikuti hingga potensi yang dimilikinya harus menjadi program kerja dari UPKK. Mengadakan kerjasama dengan pihak penerima kerja untuk kemudahan difabel memperoleh pekerjaan setelah lulus juga harus menjadi prioritas UPKK. Dikarenakan indikator penilaian performa perguruan tinggi pada tahun 2019 dari Kemenristekdikti menitikberatkan pada *output-outcome base*, yaitu dengan **Kinerja Luaran** dengan bobot 60% yang meliputi kinerja **Output** (25%) dan **Outcome** (35%), dapat dilihat pada Gambar 61.

NO	KRITERIA	INDIKATOR
A	INPUT 15%	1 Dosen berpendidikan S3
		2 Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
		3 Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen
		4 Jumlah mahasiswa asing
		5 Jumlah dosen asing
B	PROSES 25%	1 Akreditasi institusi BAN-PT
		2 Akreditasi program studi BAN-PT
		3 Pembelajaran Daring
		4 Kerjasama Perguruan Tinggi
		5 Kelengkapan Laporan PDDIKTI
		6 Laporan Keuangan
C	OUTPUT 25%	1 Jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen
		2 Kinerja penelitian
		3 Kinerja kemahasiswaan
		4 Jumlah program studi terakreditasi internasional
D	OUTCOME 35%	1 Kinerja inovasi
		2 Lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 (enam) bulan
		3 Jumlah sitasi per dosen
		4 jumlah paten per dosen
		5 Kinerja pengabdian kepada masyarakat

Gambar 61. Indikator Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia

Sumber: Kementerian Ristekdikti (Instagram)

Perencanaan pada sisi keluaran (*output*) bertujuan untuk menunjukkan hasil (*outcome*) kebijakan Universitas Brawijaya mengenai pendidikan tinggi inklusif kepada publik. Publik harus mengetahui bahwa Universitas Brawijaya benar-benar bertanggungjawab terhadap identitasnya sebagai perguruan tinggi inklusif berdasarkan *Inclusive Education Award* yang diterimanya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Dengan ini diharapkan **identitas** tersebut dapat mempengaruhi proses konstruksi sosial dan institusionalisasi

nilai di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya dan menjadi percontohan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsono, Agung. 2012. *Penggunaan Teori Institusional dalam Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia* Makalah disajikan dalam *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*. Yogyakarta, 15-16 Juni 2012.
- Firdaus, Endis. 2010. *Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia*. Makalah disajikan dalam *Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)*. Purwokerto, 24 Januari 2010.
- Hendrastomo, Grendi. 2012. Homogenisasi Pendidikan: Potret Eksklusifitas Pendidikan Modern. Makalah disajikan dalam sesi panel *Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta, 7-8 Mei 2012.
- Kruse, Kevin M. 2019, 14 Agustus. What does a traffic jam in Atlanta have to do with segregation? Quite a lot. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/traffic-atlanta-segregation.html> . Diakses pada 16 Agustus 2019.
- Mujimin, W.M. 2007. *Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Difabel*. *Dinamika Pendidikan*, 1(XIV) (*Jurnal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta*).
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nursyamsi, Fajri. dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Oliver, Michael. 1990. *The Politics of Disablement*. New York: Palgrave Macmillan.
- Oliver, Michael. 1996. *Understanding Disability: From Theory to Practice*. New York: St. Martin Press.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Pratiwi, Lintang Sari, Rizky, Rahajeng. 2018. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press.
- Putra, Aris Try Andreas. 2015. *Pemikiran Filosofis Pendidikan Ibnu Sina dan Implikasinya pada Pendidikan Islam Kontemporer*. Literasi, VI(2): 194-195.
- Putra, Fadillah. dan Sanusi, Anwar. 2018. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Rahardja, Djaja. 2010. *Pendidikan Luar Biasa dalam Perspektif Dewasa Ini*. Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus (JASSI), 1(9).
- Rizky, Ulfah Fatmala. 2015. *Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)*. Indonesian Journal of Disability Studies, 1(II).
- Roman, Stephan., Bartels-Ellis, Fiona., dan Upton, Peter. 2014. *Moving from The Margins Mainstreaming Persons with Disabilities in Pakistan*. The Economist Intelligence Unit.
- Scott, W. Richard. 2004. *Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program*. Oxford: Oxford University Press.
- Setiawan, Rahmat. 2018. *Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak*. Poetika: Jurnal Ilmu Sastra, 1(VI): 13-14.
- Shakespeare, Tom. 2015. *Disability Research Today International Perspectives*. Oxon & New York: Routledge.
- Stubbs, Sue. 2008. *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. Schweigaards: The Atlas Alliance.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

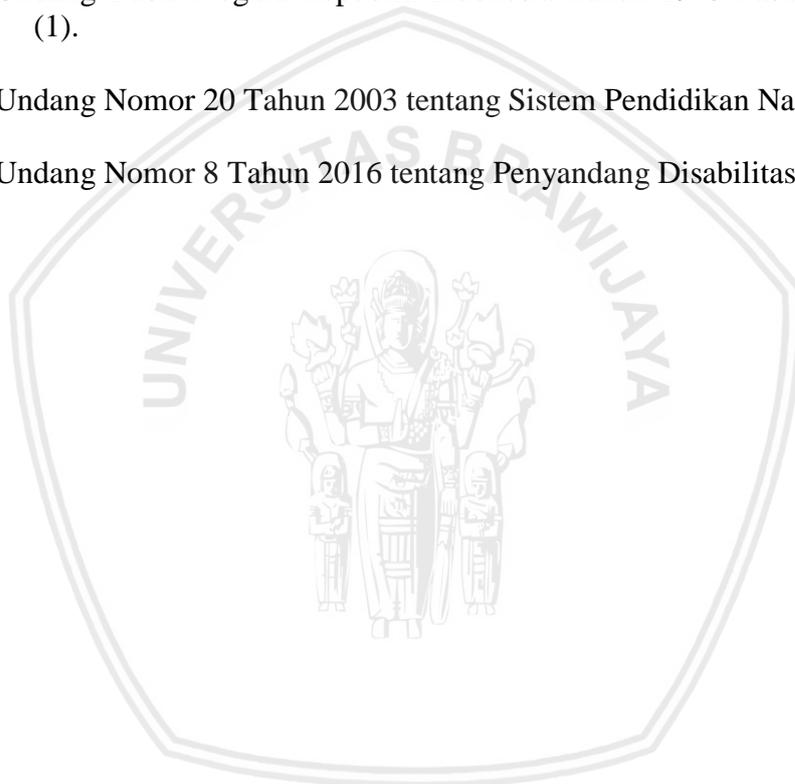
Syafitri, Fadli, Hadiyantina. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)*. Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.

Tarsidi, Didi dan Somad, Permanarian. 2009. *Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik untuk Menggantikan Istilah Penyandang Cacat*. JASSI ANAKKU, 2(VIII): 128

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



LAMPIRAN

1. Foto Kegiatan



Manajer Operasional Masjid Raden Patah



Ketua Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan



Dekan FILKOM



Dekan FTP



Dekan FH



Dekan FP



Dekan FKH



Direktur Vokasi



Dekan FIB



Dekan FKG



Dekan FAPET



Dekan FIA



Anjas



Firman



Dekan FT



Hasan



Wakil Rektor 1



Rektor Prof. Nuhfil



Rektor Prof. Bisri



Dekan FISIP



Wakil Rektor 4



Ketua PSLD UB



Dekan FMIPA



Sasa



Dekan FEB



Dekan FK

2. Surat Permohonan Wawancara



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Rektor Universitas Brawijaya
 Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, M.S.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Difabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2019


 Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik
Dr. Andy Fefta Wijaya, M.D.A., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Rektor UB Periode 2018-2022




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Rektor Universitas Brawijaya Periode 2014-2018
 Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, M.S.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Difabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2019



Rektor Universitas Brawijaya
 Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Dis. Andri Fefta Wijaya, M.DA., Ph.D
 NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Rektor UB Periode 2014-2018




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

 Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : 062-341-553737, 568914, 558226 Fax : 062-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Wakil Rektor I, Universitas Brawijaya
 Prof. Dr. Gih. A. Jaz'anu, DES

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhamad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru,
 Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih,

Malang, 26 Juni 2019



Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Prof. Anis Fetta Wijaya, M.D.A., Ph.D
 NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Wakil Rektor UB Periode 2019-2022




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryoto 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya
 Prof. Dr. Ir. Much. Saemtu Djai, M.S.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kemis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kc. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru,
 Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Difabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2019



Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Dr. Andy Fefta Wijaya, M.DA., Ph.D
 NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Wakil Rektor IV UB Periode 2019-2022




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fa.ub.ac.id E-mail: fa@ub.ac.id

Nomor : 6971/AUN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Manajer Operasional Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya
 Nur Eldi, s.s.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jafimulyo, Kec. Lowokwaru,
 Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2019



Prof. Dekan
 Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Dr. Andri Fefit Wijaya, M.D.A., Ph.D
 NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Manajer Operasional Masjid Raden Patah
 UB




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Ketua UPKK-JPC Universitas Brawijaya
 Dr. Dts. Edy Yulianto, M.P.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Difabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih,

Malang, 26 Juni 2019



Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Prof. Anni Felita Wijaya, M.DA., Ph.D
 NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Ketua UPKK-JPC UB




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Dekan, Program Vokasi Universitas Brawijaya
D. Ir. Jaranawan, Dekan Sulung, M. Si.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang
NIM : 145030100111103
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Difabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2019



Dita Andri Fefita Wijaya, M.D.A., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Direktur Program Vokasi UB




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-552737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fu.ub.ac.id E-mail: fu@ub.ac.id

Nomor : 6991/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset Wawancara

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Brawijaya
 Prof. Dr. So. Ago. H. Suyadi, M.S.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset wawancara bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
 Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
 NIM : 145030100111105
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Publik
 Tema : Pendidikan Tinggi Inklusif terhadap Mahasiswa Penyandang Difabilitas

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2019

Dr. Andy Fefta Wijaya, M.D.A., Ph.D
 NIP. 196702171991031010

Surat Permohonan Wawancara Dekan Fapet UB



3. Surat Persetujuan Kelayakan Riset Pertanyaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)
Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia
Telp : +62-341-551611
E-mail : psldbrawijaya@ub.ac.id ; psld.brawijaya@gmail.com
[http : www.psls.d.ub.ac.id](http://www.psls.d.ub.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN
KELAYAKAN RISET PERTANYAAN**
Nomor : 094/UN10.C20.11/PN/2019

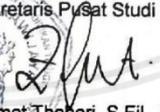
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Slamet Thohari, S.Fil., MA
NIK : 2013048111191001
Jabatan : Sekretaris Pusat Studi Layanan Disabilitas
Universitas Brawijaya

menyatakan bahwa penelitian :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
Alamat : Jl. Bunga Kumis Kucing No. 5 RT/RW 05/02 Kel. Jatimulyo,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 145030100111105
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : *Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis Sociological Institutionalism Theory dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusifitas di Universitas Brawijaya)*

telah disetujui untuk riset pertanyaan kepada partisipan demi kebutuhan kegiatan wawancara dalam penelitian skripsi saudara yang bersangkutan.

17 JUN 2019
Sekretaris Pusat Studi Layanan Disabilitas

Slamet Thohari, S.Fil., MA
NIK. 2013048111191001

Surat Persetujuan Kelayakan Riset Pertanyaan

4. Tanda Tangan Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

(Informed Consent)

Judul Penelitian

Pemodelan Pendidikan Tinggi Inklusif (Analisis *Sociological Institutionalism Theory* dalam Regulasi dan Diseminasi Nilai Inklusivitas di Universitas Brawijaya)

Peneliti:

Muhammad Nur Fauzan

Sebelum menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, penting bagi Anda untuk membaca penjelasan berikut. Lembar persetujuan ini menjelaskan tujuan, prosedur, dan manfaat dari penelitian.

Tujuan Penelitian:

4. Untuk mengetahui, menganalisa, dan mengidentifikasi peran regulasi dalam membentuk pengalaman dan pemaknaan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya terhadap fenomena pendidikan tinggi inklusif berdasarkan perspektif *Sociological Institutionalism Theory*
5. Untuk mengetahui, menganalisa, dan mengidentifikasi diseminasi standar baru bagi pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Prosedur Penelitian:

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada partisipan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 jam. Wawancara akan direkam menggunakan *voice recorder* dan selanjutnya akan ditranskrip untuk keperluan analisis data. Setelah transkrip selesai disusun, peneliti akan melakukan *member check* menandakan penelitian telah selesai.

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Peternakan

 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS
 Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS.
 NIP. 19620403198701100

Surat Persetujuan Dekan Fapet

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS
 EKONOMI DAN BISNIS
 Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)..Ak., PhD
 NIP. 196607061991031001

Surat Persetujuan Dekan FEB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, 16 Juni 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muchamad AU Safa'at, SH., MH

NIP. 197608151999031003

Surat Persetujuan Dekan FH

Manfaat:

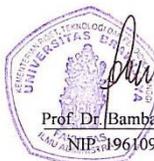
3. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
4. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

NIP. 196109051986011002

Surat Persetujuan Dekan FIA

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Ilmu Budaya



Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA

NIP. 196006151987011001

Surat Persetujuan Dekan FIB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Yusuf Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D

NIP. 197209191997021001

Surat Persetujuan Dekan FILKOM

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Surat Persetujuan Dekan FISIP

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Kedokteran



Surat Persetujuan Dekan FK

Manfaat:

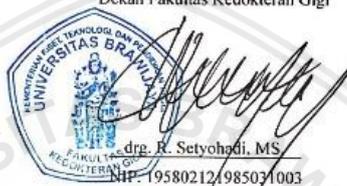
1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusiitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi



Surat Persetujuan Dekan FKG

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusiitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan



Surat Persetujuan Dekan FKH

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Dr. Adi Susilo, M.si., Ph.D

NIP. 196312271991031002

Surat Persetujuan Dekan FMIPA

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Pertanian



D. Damanhuri, MS.

NIP. 196211231987031002

Surat Persetujuan Dekan FP

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan



Dr. Ir. Happy Nursyam, MS.

NIP. 196003221986011001

Surat Persetujuan Dekan FPIK

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Teknik



Dr. Pito Tri Juwono, MT

19700212000121001

Surat Persetujuan Dekan FT

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian



Dr. Irfan Santoso, MP.
NIP.196810051995121001

Surat Persetujuan Dekan FTP

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Direktur Program Pendidikan Vokasi



Dr. Darmawan Oekto Sutjipto, M.Si
NIP. 196010281986031005

Surat Persetujuan Direktur Program Pendidikan Vokasi

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Ketua Bagian Umum, Hukum, dan Tata Laksana



Dra. Rosadah Agustin Syarif, M.A.B
NIP.196108031986032001

Surat Persetujuan Ketua Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, 5 Juli 2019

Ketua Pusat Studi Layanan Disabilitas
Universitas Brawijaya



Zubaidah Ningsih AS., Ph.D
NIP.197905242003122002

Surat Persetujuan Ketua PSLD UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

**Surat Persetujuan Ketua UPKK-JPC****Manfaat:**

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, 30 Juni 2019

Mahasiswa FIA UB

Muhammad Hasanuddin
NIM. 155030819111001

Surat Persetujuan Mahasiswa FIA UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, 6 Agustus 2019

Mahasiswa FIB UB


Mochamad Firmansyah Zefanya

NIM. 155110719111001

Surat Persetujuan Mahasiswa FIB UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, 5 Agustus 2019

Mahasiswa FILKOM UB



Anjas Pramono Sukamto

NIM. 165150219111001

Surat Persetujuan Mahasiswa FILKOM UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juli 2019

Mahasiswa FMIPA UB


 Saphira Kusbandiyah
 NIM. 185090519111001

Surat Persetujuan Mahasiswa FMIPA UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

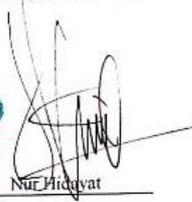
Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juli 2019

Manajer Operasional MRP UB




 Nur Hidayat

MASJID RADEN PAKSA
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Surat Persetujuan Manajer Operasional MRP UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Rektor UB Periode 2014-2018



Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS
NIP. 195811261986091001

Surat Persetujuan Rektor UB Periode 2014-2018

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Rektor Universitas Brawijaya



Dr. Ir. Mahfil Hanani, MS.
NIP. 195811281983031005

Surat Persetujuan Rektor UB Periode 2019-2022

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Wakil Rektor I Universitas Brawijaya



Prof. Dr. drh. Aulanni'am, DES.

NIP. 196009031988022001

Surat Persetujuan Wakil Rektor I UB

Manfaat:

1. Manfaat keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan gagasan terkait dengan inklusifitas terhadap difabel di Universitas Brawijaya
2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan pendidikan tinggi inklusif di Universitas Brawijaya

Persetujuan:

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, Anda menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Malang, Juni 2019

Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya



Prof. Moch. Sasmito Djati, M.S.

NIP. 196107041994031001

Surat Persetujuan Wakil Rektor IV UB